



2021

LAPORAN KEUANGAN SETELAH AUDIT BPK RI





WALI KOTA CIMAHI

Cimahi, Mei 2022

Nomor	:	Kepada :
Sifat	:	Yth. Kepala BPK-RI Perwakilan Jawa Barat
Lampiran	:	Jl. Muhamad Toha No.164
Hal	:	Bandung
	:	Surat Representasi
	:	Manajemen

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 31 Desember 2021, Neraca per 31 Desember 2021, Laporan Operasional per 31 Desember 2021, Laporan Arus Kas 31 Desember 2021, Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan :

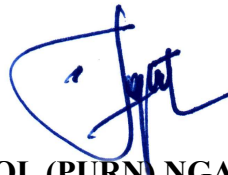
1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK-RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.

4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Daerah Kota Cimahi memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2020 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkaskan secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.

15. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan.

Plt. WALI KOTA CIMAHI,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Purno Ngatiyana', written over a circular stamp or seal.

LETKOL (PURN) NGATIYANA



WALI KOTA CIMAHI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun, berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, posisi kas, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Cimahi, Mei 2022

Plt. WALI KOTA CIMAHI,

LETKOL (PURN) NGATIYANA

**LAPORAN REALISASI
ANGGARAN
(LRA)**



WALI KOTA CIMAHI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	152.786.878.291,00	179.891.802.692,00	117,74	158.937.237.899,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	11.404.826.000,00	11.548.482.640,00	101,26	15.243.650.522,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.956.960.000,00	9.956.960.000,00	100,00	9.778.080.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	172.473.478.843,00	203.707.746.221,11	118,11	191.728.274.257,91
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	346.622.143.134,00	405.104.991.553,11	116,87	375.687.242.678,91
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	60.721.010.363,00	61.309.116.578,00	100,97	50.460.873.698,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	31.578.902.903,00	47.781.705.502,00	151,31	38.645.976.130,00
	Dana Alokasi Umum	530.425.978.000,00	530.425.978.000,00	100,00	539.717.972.000,00
	Dana Alokasi Khusus	143.744.872.000,00	131.759.768.941,00	91,66	160.457.085.903,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	766.470.763.266,00	771.276.569.021,00	100,63	789.281.907.731,00
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah	52.247.274.000,00	52.247.274.000,00	100,00	97.730.028.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	52.247.274.000,00	52.247.274.000,00	100,00	97.730.028.000,00
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	128.032.319.484,00	123.865.281.737,00	96,75	118.963.390.897,00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi	236.810.517.464,00	105.707.342.961,00	44,64	23.922.151.027,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	364.842.836.948,00	229.572.624.698,00	62,92	142.885.541.924,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.183.560.874.214,00	1.053.096.467.719,00	88,98	1.029.897.477.655,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	6.700.327.000,00	-	140.839.566,00
	Dana Darurat				
	Dana BOS	57.652.719.654,00	55.161.824.000,00	95,68	52.270.900.000,00
	Pendapatan Lainnya		71.950.231,00		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	57.652.719.654,00	61.934.101.231,00	107,43	52.411.739.566,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.587.835.737.002,00	1.520.135.560.503,11	95,74	1.457.996.459.899,91
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	723.673.114.458,00	643.977.236.028,00	88,99	636.883.229.738,00
	Belanja Barang	657.581.777.697,00	555.391.457.278,00	84,46	456.337.905.380,02
	Belanja Bunga	600.000.000,00	308.874.114,00	51,48	781.441.813,09
	Belanja Subsidi	507.144.000,00	410.574.000,00	80,96	-
	Belanja Hibah	20.953.726.450,00	18.999.042.200,00	90,67	13.856.011.450,00
	Belanja Bantuan Sosial	3.630.024.338,00	2.571.530.000,00	70,84	2.864.475.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	1.406.945.786.943,00	1.221.658.713.620,00	86,83	1.110.723.063.381,11
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	8.724.964.740,00	1.924.413.918,00	22,06	24.237.283.327,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	52.272.761.644,00	40.367.666.054,00	77,23	36.574.433.534,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	228.846.712.178,00	92.323.402.639,00	40,34	19.768.621.392,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	132.999.455.842,00	109.597.606.795,00	82,40	13.598.490.000,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.908.382.106,00	2.847.475.380,00	97,91	3.065.785.548,00
	Jumlah Belanja Modal	425.752.276.510,00	247.060.564.786,00	58,03	97.244.613.801,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	23.880.085.890,00	12.793.426.443,00	53,57	74.352.158.320,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga	23.880.085.890,00	12.793.426.443,00	53,57	74.352.158.320,00
	JUMLAH BELANJA	1.856.578.149.343,00	1.481.512.704.849,00	79,80	1.282.319.835.502,11

(Dalam Rupiah)

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.856.578.149.343,00	1.481.512.704.849,00	79,80	1.282.319.835.502,11
	SURPLUS / DEFISIT	(268.742.412.341,00)	38.622.855.654,11		175.676.624.397,80
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	271.172.220.678,00	270.898.017.186,53	99,90	121.693.751.477,73
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	8.548.192.400,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	271.172.220.678,00	270.898.017.186,53	99,90	130.241.943.877,73
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	2.429.808.337,00	855.508.220,00	35,21	34.746.347.598,00
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	2.429.808.337,00	855.508.220,00	35,21	34.746.347.598,00
	PEMBIAYAAN NETO	268.742.412.341,00	270.042.508.966,53	100,48	95.495.596.279,73
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	308.665.364.620,64		271.172.220.677,53

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Plt. WALI KOTA CIMAHI,

LETKOL (PURN) NGATIYANA

**LAPORAN PERUBAHAN
SALDO ANGGARAN
LEBIH (LPSAL)**



WALI KOTA CIMAHI
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	271.172.220.677,53	121.693.751.477,73
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	270.898.017.186,53	121.693.751.477,73
3	Subtotal (1-2)	274.203.491,00	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLpa/SiKPA)	308.665.364.620,64	271.172.220.677,53
5	Subtotal (3+4)	308.939.568.111,64	271.172.220.677,53
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahunan Sebelumnya	(274.203.491,00)	
7	Lain-lain		
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	308.665.364.620,64	271.172.220.677,53

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Plt. WALI KOTA CIMAHI,

LETKOL (PURN) NGATIYANA

NERACA



WALI KOTA CIMAHI

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

NERACA

PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	261.726.825.185,51	252.983.054.384,92
	Kas di RSUD	40.989.619.473,61	12.624.391.630,61
	Kas di Bendahara Pengeluaran	148.923.030,52	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	659.044,00	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	861.472.095,00	195.990.640,00
	Kas Di Kas BLUD Puskesmas	3.174.447.354,00	2.573.771.153,00
	Kas Dana Bos	1.763.418.438,00	2.490.895.654,00
	Kas Lainnya	590.793.711,00	560.144.677,00
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	128.892.710.993,00	198.458.610.887,00
	Penyisihan Piutang Pajak	(46.745.285.110,18)	(135.641.054.045,82)
	Piutang Pajak Netto	82.147.425.882,83	62.817.556.841,19
	Piutang Retribusi	2.271.651.667,00	3.264.415.784,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.510.951.900,38)	(1.691.808.387,35)
	Piutang Retribusi Netto	760.699.766,62	1.572.607.396,66
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	27.370.729.034,00
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	9.794.305.571,00	6.877.800.265,00
	Belanja Dibayar Dimuka	4.576.692.589,29	10.378.639.377,91
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	217.551.668,00	217.551.668,00
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(217.551.668,00)	(217.551.668,00)
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	-	-
	Piutang Lainnya	9.567.340.661,47	5.426.999.986,32
	Penyisihan Piutang Lainnya	(2.298.845.270,88)	(942.440.653,32)
	Piutang Lainnya Netto	7.268.495.390,59	4.484.559.333,00
	Persediaan	32.019.657.874,93	38.927.924.338,32
	Jumlah Aset Lancar	445.823.435.406,89	423.858.064.725,60
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	50.591.536,00	48.909.062,00
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	50.591.536,00	48.909.062,00
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	68.493.992.363,50	68.660.344.186,50
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	68.493.992.363,50	68.660.344.186,50
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	68.544.583.899,50	68.709.253.248,50
3	ASET TETAP		
	Tanah	1.056.705.806.799,00	1.054.785.789.081,00
	Peralatan dan Mesin	694.191.726.346,98	653.697.490.905,54
	Gedung dan Bangunan	772.624.864.228,52	745.821.693.568,20
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	826.964.855.561,52	788.273.686.779,63
	Aset Tetap Lainnya	70.405.620.977,47	67.891.291.041,47
	Konstruksi dalam Pengerjaan	211.996.377.038,36	51.926.798.918,36
	Akumulasi Penyusutan	(1.231.876.277.638,95)	(1.119.661.893.807,38)
	Jumlah Aset Tetap	2.401.012.973.312,90	2.242.734.856.486,82

No.	Uraian	2021	2020
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.348.345.000,00	3.348.345.000,00
	Aset Tak Berwujud	9.932.562.034,90	8.733.693.634,90
	Akumulasi Amortisasi	(8.229.263.872,40)	(6.900.246.239,16)
	Aset Tak Berwujud Netto	1.703.298.162,51	1.833.447.395,75
	Aset Lain-Lain	16.955.466.977,42	19.709.611.280,92
	Jumlah Aset Lainnya	22.007.110.139,93	24.891.403.676,67
	JUMLAH ASET	2.937.388.102.759,22	2.760.193.578.137,59
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	48.276.595,00	40.349.191,00
	Utang Bunga	129.039.156,47	161.298.946,00
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	855.508.220,00	855.508.220,00
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	4.141.620.812,00	19.004.747.924,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	13.622.915.723,00	25.180.855.366,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	18.797.360.506,47	45.242.759.647,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	2.566.524.658,70	3.422.032.878,70
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	2.566.524.658,70	3.422.032.878,70
	JUMLAH KEWAJIBAN	21.363.885.165,17	48.664.792.525,70
III	EKUITAS		
	EKUITAS	2.916.024.217.594,05	2.711.528.785.611,89
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.937.388.102.759,22	2.760.193.578.137,59

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Plt. WALI KOTA CIMAHI

LETKOL (PURN) NGATIYANA

LAPORAN OPERASIONAL (LO)



WALI KOTA CIMAHI

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp 203.700.704.578,00	Rp 179.325.342.134,00	Rp 24.375.362.444,00	13,59
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 12.171.916.379,00	Rp 17.838.995.698,00	Rp (5.667.079.319,00)	-31,77
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 9.956.960.000,00	Rp 9.778.080.000,00	Rp 178.880.000,00	1,83
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 207.335.232.391,49	Rp 161.672.800.908,91	Rp 45.662.431.482,58	28,24
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 433.164.813.348,49	Rp 368.615.218.740,91	Rp 64.549.594.607,58	17,51
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp 51.986.941.479,00	Rp 48.571.558.676,00	Rp 3.415.382.803,00	7,03
	Dana Bagi Hasil Sumbang Daya Alam	Rp 29.733.151.567,00	Rp 39.583.428.911,00	Rp (9.850.277.344,00)	-24,88
	Dana Alokasi Umum	Rp 530.425.978.000,00	Rp 539.717.972.000,00	Rp (9.291.994.000,00)	-1,72
	Dana Alokasi Khusus	Rp 131.759.768.941,00	Rp 160.457.085.903,00	Rp (28.697.316.962,00)	-17,88
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp 743.905.839.987,00	Rp 788.330.045.490,00	Rp (44.424.205.503,00)	-5,64
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	DID	Rp 52.247.274.000,00	Rp 97.730.028.000,00	Rp (45.482.754.000,00)	-46,54
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp 52.247.274.000,00	Rp 97.730.028.000,00	Rp (45.482.754.000,00)	-46,54
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp 126.781.787.043,00	Rp 119.792.475.687,00	Rp 6.989.311.356,00	5,83
	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 105.707.342.961,00	Rp -	Rp 105.707.342.961,00	
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp 232.489.130.004,00	Rp 119.792.475.687,00	Rp 112.696.654.317,00	94,08
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp 1.028.642.243.991,00	Rp 1.005.852.549.177,00	Rp 22.789.694.814,00	2,27
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp 83.494.375.949,80	Rp 59.439.221.689,98	Rp 24.055.154.259,82	40,47
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp 71.950.231,00	Rp 23.922.151.027,00	Rp (23.850.200.796,00)	-99,70
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 83.566.326.180,80	Rp 83.361.372.716,98	Rp 204.953.463,82	0,25
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.545.373.383.520,29	Rp 1.457.829.140.634,89	Rp 87.544.242.885,40	6,01
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 626.341.641.494,00	Rp 654.522.752.844,00	Rp (28.181.111.350,00)	-4,31
	Beban Persediaan	Rp 147.997.945.138,29	Rp 174.752.300.288,94	Rp (26.754.355.150,65)	-15,31
	Beban Jasa	Rp 336.911.501.029,62	Rp 263.219.286.073,75	Rp 73.692.214.955,87	28,00
	Beban Pemeliharaan	Rp 46.128.442.345,00	Rp 14.290.438.232,00	Rp 31.838.004.113,00	222,79
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 25.225.731.969,00	Rp 36.159.340.024,00	Rp (10.933.608.055,00)	-30,24
	Beban Bunga	Rp 276.614.324,47	Rp 458.243.473,20	Rp (181.629.148,73)	-39,64
	Beban Subsidi	Rp 410.574.000,00	Rp -	Rp 410.574.000,00	
	Beban Hibah	Rp 18.250.155.200,00	Rp 13.856.011.450,00	Rp 4.394.143.750,00	31,71
	Beban Bantuan Sosial	Rp 2.571.530.000,00	Rp 2.864.475.000,00	Rp (292.945.000,00)	-10,23
	Beban Penyusutan	Rp 122.398.887.198,70	Rp 182.254.741.087,95	Rp (59.855.853.889,25)	-32,84
	Beban Amortisasi	Rp 1.329.017.633,25	Rp 1.498.437.358,25	Rp (169.419.725,00)	-11,31
	Beban Penyisihan Piutang	Rp 2.666.559.266,06	Rp 12.404.995.594,40	Rp (9.738.436.328,33)	-78,50
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp 334.507.323,99	Rp 728.625.259,50	Rp (394.117.935,51)	-54,09
	JUMLAH BEBAN	Rp 1.330.843.106.922,38	Rp 1.357.009.646.685,98	Rp (26.166.539.763,61)	-1,93
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp 214.530.276.597,91	Rp 100.819.493.948,91		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-Rp 5.130.797.753,00	-Rp 11.341.280.894,45	Rp 6.210.483.141,45	-54,76
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-Rp 5.130.797.753,00	-Rp 11.341.280.894,45	Rp 6.210.483.141,45	-54,76
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp 209.399.478.844,91	Rp 89.478.213.054,46	Rp 119.921.265.790,45	134,02
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Luar Biasa	Rp 9.736.649.668,00	Rp 10.612.007.886,38	Rp (875.358.218,38)	-8,25
	POS LUAR BIASA	-Rp 9.736.649.668,00	-Rp 10.612.007.886,38	Rp 875.358.218,38	-8,25
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp 199.662.829.176,91	Rp 78.866.205.168,08	Rp 120.796.624.008,83	153,17

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Pt. WALI KOTA CIMAHI

LETKOL (PURN) NGATIYANA

LAPORAN ARUS KAS

(LAK)



WALI KOTA CIMAHI
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	179.891.802.692,00	158.937.237.899,00
4	Penerimaan Retribusi daerah	11.548.482.640,00	15.243.650.522,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.956.960.000,00	9.778.080.000,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	202.654.762.893,11	190.008.897.075,91
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	61.309.116.578,00	50.460.873.698,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	47.781.705.502,00	38.645.976.130,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	530.425.978.000,00	539.717.972.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	131.759.768.941,00	160.457.085.903,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	52.247.274.000,00	97.730.028.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	123.865.281.737,00	118.963.390.897,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	-	-
15	Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat	105.707.342.961,00	23.922.151.027,00
16	Penerimaan Hibah	6.700.327.000,00	140.839.566,00
17	Penerimaan Dana Darurat	-	-
18	Dana BOS	55.161.824.000,00	52.270.900.000,00
19	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	71.950.231,00	-
20	Jumlah Arus Masuk Kas	1.519.082.577.175,11	1.456.277.082.717,91
21	Arus Keluar Kas		
22	Pembayaran Pegawai	643.977.236.028,00	636.883.229.738,00
23	Pembayaran Barang	555.391.457.278,00	456.337.905.380,02
24	Pembayaran Bunga	308.874.114,00	781.441.813,09
25	Pembayaran Subsidi	410.574.000,00	-
26	Pembayaran Hibah	18.999.042.200,00	13.856.011.450,00
27	Pembayaran Bantuan Sosial	2.571.530.000,00	2.864.475.000,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan	-	-
29	Pembayaran Tak Terduga	12.793.426.443,00	74.352.158.320,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	-	-
31	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	-	-
32	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
33	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
34	Jumlah Arus Keluar Kas	1.234.452.140.063,00	1.185.075.221.701,11
35	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	284.630.437.112,11	271.201.861.016,80
36	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
37	Arus Masuk Kas		
38	Pencairan Dana Cadangan	-	-
39	Penjualan atas Tanah	-	-
40	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	1.662.403.182,00
41	Penjualan atas Gedung dan bangunan	10.511.600,00	56.974.000,00
42	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
43	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	1.042.471.728,00	-
44	Penjualan atas Aset Lainnya	-	-
45	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
46	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
47	Jumlah Arus Masuk Kas	1.052.983.328,00	1.719.377.182,00
48	Arus Keluar Kas		
49	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
50	Perolehan Tanah	1.924.413.918,00	24.237.283.327,00
51	Perolehan Peralatan dan Mesin	40.367.666.054,00	36.574.433.534,00
52	Perolehan Gedung dan bangunan	92.323.402.639,00	19.768.621.392,00
53	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	109.597.606.795,00	13.598.490.000,00
54	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.847.475.380,00	3.065.785.548,00
55	Perolehan Aset Lainnya	-	-

No.	Uraian	2021	2020
56	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-
57	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-
58	Jumlah Arus Keluar Kas	247.060.564.786,00	97.244.613.801,00
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(246.007.581.458,00)	(95.525.236.619,00)
60	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
61	Arus Masuk Kas		
62	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		-
63	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		-
64	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		8.548.192.400,00
65	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		-
66	Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		-
67	Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		-
68	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-
69	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-
70	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya		-
71	Penarikan Kembali Investasi Daerah - Dana Bergulir		-
72	Jumlah Arus Masuk Kas	-	8.548.192.400,00
73	Arus Keluar Kas		
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	855.508.220,00	855.508.220,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		-
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		33.705.190.978,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		-
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		-
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		185.648.400,00
80	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-
81	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-
82	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya		-
83	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-
84	Jumlah Arus Keluar Kas	855.508.220,00	34.746.347.598,00
85	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(855.508.220,00)	(26.198.155.198,00)
86	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
87	Arus Masuk Kas		
88	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	94.401.906.222,00	85.776.323.087,00
89	Jumlah Arus Masuk Kas	94.401.906.222,00	85.776.323.087,00
90	Arus Keluar kas		
91	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	94.364.065.094,00	86.040.091.111,00
92	Jumlah Arus Keluar Kas	94.364.065.094,00	86.040.091.111,00
93	Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris	37.841.128,00	(263.768.024,00)
94	Kenaikan/Penurunan Kas	37.805.188.562,11	149.214.701.175,80
95	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	270.908.452.653,53	121.693.751.477,73
96	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	308.713.641.215,64	270.908.452.653,53
97	Saldo Akhir Kas	308.713.641.215,64	270.908.452.653,53

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Plt. WALI KOTA CIMAHI,

LETKOL (PURN) NGATIYANA

**LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS
(LPE)**



WALI KOTA CIMAHI

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	2.711.528.785.611,89	2.633.055.798.669,41
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	199.662.829.176,91	78.866.205.168,08
3	RK PPKD	-	(0,00)
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	(0,52)	0,91
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	(4.175.918.915,75)	(8.328.101.111,35)
6	KOREKSI NILAI UTANG	(21.905.000,00)	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	(4.683.461,90)	(27.912.082,00)
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(1.265.202.393,86)	(2.300.574.403,87)
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	7.147.191.431,60
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	- Penyisihan Piutang	84.553.855,62	725.109.015,27
	- Akumulasi Penyusutan	10.184.503.367,13	2.315.992.928,42
	- Akumulasi Amortisasi	0,01	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	29.572.880,52	74.039.638,42
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	1.682.474,00	1.036.357,00
14	EKUITAS AKHIR	2.916.024.217.594,05	2.711.528.785.611,89

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Plt. WALI KOTA CIMAHI

LETKOL (PURN) INGATIYANA

**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN
(CALK)**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi selama 1 (satu) periode pelaporan dan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan. Menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik itu keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas.

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Basis Akrual dengan terlebih dahulu melakukan konversi laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Konversi dilakukan dengan mengacu kepada Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Konversi mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan struktur APBD. Klasifikasi anggaran, aset, kewajiban, ekuitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Secara lengkap penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cimahi
 - 2.1. Visi dan Misi Pemerintah Daerah
 - 2.2. Tujuan dan Sasaran Kota Cimahi
 - 2.3. Refocusing Dan Realokasi APBD Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid 19 Di Kota Cimahi
- Bab III Kebijakan Akuntansi
 - 3.1. Kebijakan Akuntansi
- Bab IV Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - 4.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 4.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
 - 4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
 - 4.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
 - 4.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab V Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan
 - 5.1 Profile Entitas
 - 5.2 Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - 5.3 Hubungan dengan DPRD, BPK, dan Forkopimda
 - 5.4 Pengaruh Stakeholder : DPRD
 - 5.5 Dampak dari Lingkungan Entitas Terhadap Resiko Bidang Kerja dan Laporan Keuangan
 - 5.6 Alamat Kantor
- Bab VI Penutup

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

2.1 VISI DAN MISI KOTA CIMAHI.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Terutama klausul yang berkenaan dengan RPJPD dan RPJMD, semua Provinsi serta Kabupaten/Kota wajib menyusun RPJPD untuk periode waktu 2005 - 2025. RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya, RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJPD dan RPJMD harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengacu pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 - 2025. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi adalah :

“MEWUJUDKAN CIMAHI BARU MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA”

Dalam Visi Kota Cimahi tahun 2017-2022 tersebut, ada 3 (tiga) kata kunci, yakni : Maju, Agamis dan Berbudaya, yang diuraikan sebagai berikut :

Pertama, Maju. Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. Terdepan dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Kota Cimahi harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, bukan obyek pembangunan. Dalam konteks ini, terdepan dijabarkan pada tingkatan nasional atau regional dengan bisnis inti di bidang jasa dan perdagangan. Semua sektor pembangunan daerah Kota Cimahi, seperti pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja diarahkan untuk menunjang bisnis inti tersebut. Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan yang dimiliki oleh Kota Cimahi. Masyarakat Cimahi harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Kota Cimahi sebagai karakteristik yang khas dalam kearifan lokal.

Kedua, Agamis. Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal itu merupakan substansi makna inti dari religius, karena dalam religius memiliki muatan amanah dalam pemerintahan, dimana para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan

yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah dengan memenuhi dan menepati berbagai janji dan harapan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat pada saat kampanye Pilkada karena hal ini sebagai kontrak politik. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka masyarakat boleh menyuarakan aspirasinya kepada DPRD.

Ketiga, Berbudaya. Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan. Kata kunci kemampuan sumber daya lokal menyangkut pengaturan daerah yang menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Membangun dengan pondasi kepribadian dalam berkebudayaan, memerlukan dialog antara pelaku-pelaku penting di daerah, agar semua pihak mampu berperan aktif dalam membangun integritas masyarakat Kota Cimahi.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi 2017-2022 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi sebagai berikut : **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.**

Misi pertama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kota Cimahi yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia dan mampu menjadi pelopor proses pembangunan daerah dalam segala bidang melalui kecerdasan yang kreatif dan inovatif yang berakar budaya lokal serta diarahkan untuk meningkatkan daya saing, mengembangkan potensi-potensi ekonomi kerakyatan dan keunggulan teknologi yang mendukung percepatan pembangunan Kota Cimahi dalam segala bidang.

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.

Misi kedua ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam dimensi pertama, dimensi struktural yang meliputi tata hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, struktur hubungan antara eksekutif dengan legislatif ataupun struktur hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat. Kedua, dimensi fungsional yang menyangkut perubahan fungsi yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan; Ketiga, perubahan kultural menyangkut perubahan pada tata nilai dan budaya yang melandasi hubungan kerja intra organisasi, antar organisasi maupun ekstra organisasi, untuk mengendalikan perubahan kultural diperlukan kepemimpinan yang kuat, amanah dan memiliki visi. Inti misi ini adalah mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*clean goverment*), anti korupsi dan bebas KKN, menjunjung tinggi prinsip partisipasi, *rule of law*, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi strategis yang ditujukan untuk masyarakat Kota Cimahi.

2. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Misi ketiga ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Cimahi yang mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lokal dengan segala potensinya. Kota Cimahi memiliki keterbatasan dalam sumber daya alam, oleh karena itu, pembangunan Kota Cimahi harus menekankan pada kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengembangkan sektor jasa yang berbasis teknologi informasi dengan meningkatkan upaya yang kreatif dalam segala bidang yang dilakukan melalui pengembangan potensi sosial dan budaya dan pengembangan ekonomi lokal yang memberikan peluang kepada meningkatnya Usaha kecil menengah.

3. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.

Maksud misi keempat ini dimaksudkan untuk mengarahkan kepada pemahaman paradigma pembangunan secara berkelanjutan (*sustainable development*) yang secara global sudah disepakati dalam SDGs, yang memberikan guidelines kepada pemerintah bersama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan percepatan pembangunan saat ini tidak merusak dan menurunkan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menjaga keseimbangan lingkungan secara bijak dalam memanfaatkan sumber daya melalui penjagaan keseimbangan alami yang ada didalamnya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekarang dan masyarakat di kurun waktu masa depan.

4. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Misi kelima ini secara khusus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam menjawab dinamika perubahan pemerintahan dalam pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Diperlukan peningkatan kapasitas (*capacity building*) aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan, kompetensi dan tingkat kesejahteraan yang baik yang outputnya adalah kinerja pemerintahan yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN KOTA CIMAHI

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional. untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan Sasaran Kota Cimahi Periode 2017-2022 adalah :

MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul

Tujuan dari Misi kesatu adalah:

- 1) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan;
- 2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- 3) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Sasaran dari Misi kesatu adalah:

- 1) Meningkatnya aksesibilitas pendidikan;
- 2) Meningkatnya kualitas pendidikan;
- 3) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- 4) Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang;

MISI 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik

Tujuan dari Misi kedua adalah:

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah;

Sasaran dari Misi kedua adalah:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
- 2) Meningkatnya Pengelolaan Pemerintahan Daerah;
- 3) Meningkatnya Efisiensi dan Transparansi Pemerintah Daerah;
- 4) Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah;
- 5) Meningkatnya profesionalitas aparatur;
- 6) Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik;
- 7) Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- 8) Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah;
- 9) Meningkatnya kinerja pelayanan tugas dan fungsi DPRD.

MISI 3 : Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan

Tujuan dari Misi Ketiga adalah:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- 2) Meningkatkan pemerataan pendapatan;
- 3) Mengentaskan kemiskinan.

Sasaran dari Misi Ketiga adalah:

- 1) Meningkatnya Pertumbuhan Investasi;
- 2) Meningkatnya Daya saing industri;
- 3) Meningkatnya Daya saing Perdagangan;
- 4) Meningkatnya Ekspor;
- 5) Meningkatnya Daya Beli dan Kesejahteraan Masyarakat Berpendapatan rendah;
- 6) Meningkatnya Kapabilitas sektor pertanian;
- 7) Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi;
- 8) Berkurangnya Ketimpangan antar wilayah;
- 9) Menurunnya angka pengangguran;
- 10) Meningkatnya kualitas konsumsi pangan penduduk;
- 11) Meningkatnya kualitas penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

MISI 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan

Tujuan dari Misi Keempat adalah:

- 1) Meningkatkan tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi;
- 2) Meningkatkan kualitas permukiman;
- 3) Meningkatkan ketahanan bencana;
- 4) Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan;

Sasaran dari Misi Keempat adalah:

- 1) Meningkatkan kelancaran pengguna jalan;
- 2) Meningkatkan kenyamanan pengguna jalan;
- 3) Meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan;
- 4) Meningkatkan pelayanan air limbah domestik;
- 5) Meningkatkan pelayanan drainase permukiman;
- 6) Meningkatkan pelayanan air bersih;
- 7) Mengurangi luas kawasan kumuh;
- 8) Meningkatkan Kesiapsiagaan tanggap bencana;
- 9) Mengurangi resiko banjir;
- 10) Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara;
- 11) Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air;
- 12) Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas ruang terbuka hijau;
- 13) Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

MISI 5 : Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan

Tujuan dari Misi Kelima adalah:

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- 2) Meningkatkan pengarusutamaan gender.

Sasaran dari Misi Kelima adalah:

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat;
- 2) Meningkatkan pelestarian warisan budaya;
- 3) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan;
- 4) Optimalnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

2.3 REFOCUSING DAN REALOKASI APBD TAHUN ANGGARAN 2020 DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID 19 DI KOTA CIMAHI

Pada tahun 2020, dunia mengalami bencana pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia. Mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Direktur WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bahwa dalam kondisi saat ini pandemi Covid-19 membuat kita harus melakukan upaya proteksi atau melindungi diri sebagai tindakan pencegahan dari penularan Covid-19. Lebih lengkapnya beliau menyatakan: *“We must do all we can to protect health workers, and the best way to do that is for all of us to take every precaution we can to reduce the risk of transmission,*

for ourselves and others. No one wants more so-called lockdowns. But if we want to avoid them, we all have to play our part.” Berdasarkan pernyataan tersebut memberikan pemahaman bahwa terhadap upaya penanggulangan pandemic Covid-19 sampai saat masih diperlukan beberapa tindakan khusus dalam menghadapinya.

Menurut Juan Pablo Bohoslavsky, ahli PBB dalam urusan hutang dan hak asasi manusia (*United Nations Independent Expert on Debt and Human Rights*), menyatakan krisis kesehatan akibat Covid-19 membawa dunia ke dalam resesi ekonomi. Kondisi tersebut sejatinya akan menyebabkan ekonomi dunia menanggung beban dalam bentuk perlambatan ekonomi sebagai dampak Covid19.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun dari 3% (tiga persen) menjadi hanya 1,5% (satu koma lima persen) atau bahkan lebih rendah dari itu. Perkembangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai 4% (empat persen) atau lebih rendah, tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, baik sisi Pendapatan Negara, sisi Belanja Negara, maupun sisi Pembiayaan. Potensi perubahan APBN Tahun Anggaran 2020 berasal dari terganggunya aktivitas ekonomi ataupun sebaliknya. Gangguan aktivitas ekonomi akan banyak berpotensi mengganggu APBN Tahun Anggaran 2020 dari sisi Pendapatan Negara. Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan menjaga aktivitas usaha. Tekanan pada sektor keuangan akan mempengaruhi APBN Tahun Anggaran 2020, terutama sisi Pembiayaan.

Kota Cimahi merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang juga sangat terdampak oleh pandemi COVID-19, sepanjang Tahun 2020 sebanyak 2636 Warga Cimahi Positif COVID-19 dengan rincian Konfirmasi Aktif 446 Sembuh 2126 dan meninggal 64. Selain itu menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi akibat pandemi COVID-19 tercatat ada 488 orang dari 12 perusahaan yang terkena PHK hingga menjadi pengangguran baru. Lalu ada 4.083 orang yang dirumahkan dari 17 perusahaan. Sehingga secara persentase pengangguran di Kota Cimahi naik 12 %. Untuk menanggulangi kondisi tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi perlu melakukan tindakan yang cepat dan tepat untuk penyelamatan kesehatan, perekonomian kota, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak , namun diperlukan dana yang cukup besar untuk membiayai hal tersebut, sedangkan APBD Kota Cimahi Tahun 2020 sudah ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2019 sehingga perlu dilakukan kebijakan *Refocusing* dan Realokasi APBD Kota Cimahi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perlu di pahami bahwa penanganan pandemi (Covid-19) sebagai keadaan darurat

sejatinya dapat didasarkan kepada 3 (tiga) pendekatan yaitu:

1. pelayanan kesehatan (*health services*),
2. pemenuhan kebutuhan fiskal (*fulfillment of fiscal needs*), dan
3. percepatan penanganan dalam kegiatan sosial (*acceleration of handling in social activities*).

Ketiga pendekatan tersebut sejatinya tercermin dalam beberapa produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19. Seperti kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kemudian dalam bidang ekonomi Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Kedua peraturan tersebut memang dapat ditujukan dalam menjalankan proses penanganan bencana kedaruratan seperti saat Covid-19 ini. Dan Indonesia sendiri menggunakan model yang kedua yaitu menggunakan undang - undang yang ada dengan memperhatikan kesehatan masyarakat (model legislatif). Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang kehadiran undang –undang tersebut dibentuk dalam menghadapi kondisi kedarurat akibat Covid-19 yang dialami oleh Indonesia.

Untuk tingkat Kota Cimahi Wali Kota Cimahi menetapkan Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 443/Kep.884-BPBD/2020 tentang Status Keadaan Darurat tertentu *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) di Kota Cimahi. Dalam Peraturan Wali Kota tersebut ditetapkan :

1. Menetapkan Status Keadaan Darurat Tertentu *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) di Kota Cimahi.
2. Melakukan upaya penanggulangan Keadaan Darurat yang ditujukan untuk mencegah, mendeteksi, merespons serta menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID19).
3. Pembiayaan Keadaan Darurat Tertentu bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.
4. Jangka waktu penanggulangan Status Keadaan darurat tertentu *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) di Kota Cimahi diberlakukan sampai dengan Wali Kota Cimahi mencabut penetapan Status Keadaan Darurat.

Dalam melakukan perubahan struktur anggaran APBD dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan kemudian mempertimbangkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa perubahan terhadap struktur anggaran dalam APBD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan alasan-alasan, yaitu sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.

Dasar untuk melakukan perubahan struktur anggaran APBD ini pada dasarnya hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun, namun dikecualikan dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan perubahan lebih dari 1 (satu) kali dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 316 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Syarat tersebut menghendaki bahwa harus adanya estimasi penerimaan atau pengeluaran dalam APBD yang mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 50% (lima puluh) persen. Di samping itu, perubahan tersebut juga dilakukan secara teknis dengan wewenang yang dimiliki oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan demikian, Gubernur, Bupati/Wali Kota memiliki

tanggung jawab serta otoritas dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah terhadap perubahan anggaran APBD.

Untuk Tahun 2021 Pemerintah Kota Cimahi bersama DPRD Kota Cimahi telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 kemudian memberikan ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu untuk selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, mengingat dampak dari adanya pandemi Covid-19 ini dapat dinilai sebagai keadaan darurat dan luar biasa, sehingga memerlukan penanganan yang cepat.

Sejatinya proses pencegahan dan pengendalian Covid-19 harus ditempatkan pada prioritas yang paling utama dalam segala kebijakan pemerintahan. Kehadiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan pemerintah daerah dan keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan RI Nomor 119/2814/SJ Nomor 177/KMK/07/2020 memberikan beberapa ketentuan penting terhadap upaya melakukan percepatan penanganan Covid-19 yang berkaitan dengan penggunaan APBD, antara lain sebagai berikut:

1. Mewajibkan kepada kepala daerah untuk melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD melalui 2 (dua) cara, yaitu: *Pertama*, penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). *Kedua*, penyesuaian pendapatan asli daerah.
2. Kepala daerah harus melakukan penyesuaian belanja daerah dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 terdiri dari 3 (tiga) cara, yaitu: (1) Belanja bidang kesehatan seperti pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis serta penyediaan sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat dan penanganan pasien. (2) Penyediaan jaringan pengamanan sosial (*social safety net*) seperti pemberian bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu. (3) Penanganan dampak ekonomi.
3. Kepala daerah harus melakukan pengutamaan penggunaan anggaran dan metode pelaksanaan kegiatan dan anggaran melalui realokasi penggunaan anggaran honorarium, bantuan sosial dan hibah untuk kemudian dialihkan menjadi anggaran bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang mengalami penurunan daya beli akibat pandemi Covid-19.

Sehingga dengan berpedoman pada peraturan-peraturan tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi beberapa kali melakukan perubahan APBD. Adapun rincian beberapa kali perubahan tersebut adalah :

Tabel 1
Rincian Perubahan Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Refocusing dan Realokasi APBD Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19

NO	URAIAN	PERDA/ PERWAL	TANGGAL	Keterangan
1	Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang APBD TA 2021	9 Tahun 2020	30 Desember 2021	
2	Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran APBD TA 2021	66 Tahun 2020	30 Desember 2021	

NO	URAIAN	PERDA/ PERWAL	TANGGAL	Keterangan
3	Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA 2021	31 Tahun 2021	22 Februari 2021	Penyesuaian alokasi penerimaan dan belanja DBH Pajak Daerah dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp15.950.838.895,00 dan penerimaan Bantuan Keuangan sebesar Rp411.210.331.864,00 berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 71/KU.01.06.08/BPKAD Tgl. 7 Januari 2020 Hal Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Kabupaten/Kota pada APBD Tahun Anggaran 2021
				Realokasi belanja yang bersumber dari DBH CHT sebesar Rp4.750.226.000,00.
				Penyesuaian/penambahan alokasi penerimaan Dana Transfer Tenaga Kesehatan sebesar Rp.7.200.000.167,00.
4	Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA 2021	47 Tahun 2021		Tindaklanjut surat Dirjen Bina Keuda Kemendagri No. 906/1351/KEUDA Tgl. 16 Februari 2021 terkait penyesuaian kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan, Sanitasi dan Lingkungan Hidup dan DAK Non Fisik Jenis Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
				Melaksanakan amanat PMK No. 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan TA. 2021.
				Tindaklanjut surat Dirjen Bina Keuda Kemendagri No. 440/2757/Keuda Tgl. 19 April 2021 Hal Hasil Pemetaan (<i>Mapping</i>) dan Pemutakhiran terkait Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4241/2021.

NO	URAIAN	PERDA/ PERWAL	TANGGAL	Keterangan
				Tindaklanjut surat Dirjen Bina Keuda Kemendagri No. 906/2805/Keuda Tgl. 20 April 2021 terkait penyesuaian kegiatan DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata TA 2021.
				Melaksanakan amanat Permendikbud No. 9 Tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan.
				Koreksi alokasi anggaran pada DPA-SKPD
5	Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Perubahan APBD TA 2021	13 Tahun 2021	28 Oktober 2021	
6	Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2021	52 Tahun 2021	28 Oktober 2021	

Tabel 2
Rincian Perubahan Jenis Mata Anggaran pada Perda/Perwal Kota Cimahi terkait Refocusing dan Realokasi APBD
Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19

KODE	URAIAN	APBD	Perwal 31 Tahun 2021	Perwal 47 Tahun 2021	PERUBAHAN APBD
4	PENDAPATAN DAERAH	1.293.373.842.498	1.702.944.891.257	1.702.944.891.257	1.587.835.737.002
4.1	Pendapatan Asli Daerah	344.133.306.653	344.133.306.653	344.133.306.653	346.622.143.134
4.1.01	Pajak daerah	145.285.001.230	145.285.001.230	145.285.001.230	152.786.878.291
4.1.02	Retribusi daerah	13.441.644.012	13.441.644.012	13.441.644.012	11.404.826.000
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.391.200.000	9.391.200.000	9.391.200.000	9.956.960.000
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	176.015.461.411	176.015.461.411	176.015.461.411	172.473.478.843
4.2	Pendapatan Transfer	949.240.535.845	1.358.811.584.604	1.358.811.584.604	1.183.560.874.214
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	820.769.545.501	803.179.423.501	803.179.423.501	818.718.037.266
4.2.02	Transfer Antar Daerah	128.470.990.344	555.632.161.103	555.632.161.103	364.842.836.948
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	-	-	-	57.652.719.654
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				57.652.719.654
	Bantuan Provinsi				
	Jumlah Pendapatan	1.293.373.842.498	1.702.944.891.257	1.702.944.891.257	1.587.835.737.002
5	BELANJA	1.524.593.549.263	1.944.351.613.857	1.944.351.613.857	1.856.578.149.343
5.1	Belanja operasi	1.326.436.826.675	1.345.011.268.405	1.345.903.098.805	1.406.966.779.143
5.1.01	Belanja pegawai	774.916.162.307	743.862.499.922	738.266.108.122	723.583.114.458
5.1.02	Belanja barang dan jasa	524.921.603.780	574.549.707.895	581.539.430.095	657.692.769.897
5.1.03	Belanja bunga	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	600.000.000
5.1.04	Belanja subsidi				507.144.000
5.1.05	Belanja hibah	11.116.326.450	11.116.326.450	20.198.726.450	20.953.726.450
5.1.06	Belanja bantuan sosial	14.482.734.138	14.482.734.138	4.898.834.138	3.630.024.338
5.2	BELANJA MODAL	174.276.636.698	575.460.259.562	574.568.429.162	425.731.284.310
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.307.976.980	5.307.976.980	5.307.976.980	8.724.964.740
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.698.584.491	125.894.743.673	125.963.913.273	52.251.769.444
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.986.316.922	312.957.879.816	312.957.879.816	228.846.712.178
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	20.193.373.105	131.181.986.105	130.220.986.105	132.999.455.842
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	90.385.200	117.672.988	117.672.988	2.908.382.106
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	23.880.085.890	23.880.085.890	23.880.085.890	23.880.085.890
5.3.1	Belanja tidak terduga	23.880.085.890	23.880.085.890	23.880.085.890	23.880.085.890
	Jumlah Belanja	1.524.593.549.263	1.944.351.613.857	1.944.351.613.857	1.856.578.149.343
	Total Surplus (Defisit)	(231.219.706.765)	(241.406.722.600)	(241.406.722.600)	(268.742.412.341)
6	PEMBIAYAAN	231.219.706.765	241.406.722.600	241.406.722.600	268.742.412.341
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	233.649.515.102	243.836.530.937	243.836.530.937	271.172.220.678
6.1.01	SILPA	233.649.515.102	243.836.530.937	243.836.530.937	271.172.220.678
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.429.808.337	2.429.808.337	2.429.808.337	2.429.808.337
6.2.01	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	2.429.808.337	2.429.808.337	2.429.808.337	2.429.808.337
	SURPLUS/ DEFISIT	-	-	-	-

2.3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

2.3.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Reformasi perpajakan (*tax reform*) yang mulai digulirkan pemerintah sejak tahun 1983 lalu merupakan satu tonggak sejarah monumental perpajakan guna menciptakan sistem yang lebih efektif dari sistem perpajakan sebelumnya. Sistem *self assessment*, sebagai sistem yang dianut dalam undang-undang perpajakan saat ini didesain berlandaskan pada kepercayaan dan kesadaran setiap Wajib Pajak (WP) untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Sistem yang sudah berjalan lebih dari dua dasawarsa ini selalu menarik untuk terus dikaji demi suksesnya pelaksanaan sistem perpajakan dalam mengamankan penerimaan daerah pada kususnya dari sektor pajak. Penerimaan pajak pada masa kini merupakan pilar utama pembiayaan pemerintahan dan pembangunan bangsa serta negara sebagaimana telah disepakati bersama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tidak dapat didipungkiri bahwa persoalan perpajakan selalu menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia. Dari sisi psikologis, misalnya diketahui bahwa pada umumnya tidak mudah mendapatkan seseorang yang dengan sukarela membayar pajak. Hal ini dapat dimengerti karena pajak akan mengurangi jumlah penghasilan yang dapat dibelanjakannya. Namun demikian, harus disadari pula bahwa untuk keberlangsungan pembangunan daerah, pajak rela tidak rela harus dibayar oleh mereka yang sudah mempunyai penghasilan melampaui batasan tertentu yang ditetapkan undang-undang. Semua itu dimaksudkan agar pundi-pundi APBD tetap terisi untuk kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan demi kepentingan bersama. Di negara kita ini kegiatan pembangunan akan berjalan lancar apabila pemerintah dapat mendukung tujuan tersebut.

2.3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.587.835.737.002,00 dengan realisasi sebesar Rp1.520.135.560.503,11 atau 95,74% dari target, sebagai berikut:

No	Dinas/Instansi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	677.903.245.268,00	603.120.255.312,11	88,97
2	Dinas Kesehatan	17.738.905.080,00	18.034.132.900,00	101,66
3	Rsu Daerah Cibabat	145.000.000.000,00	165.608.981.259,00	114,21
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	7.754.071.000,00	7.686.799.080,00	99,13
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	64.575.500,00	104.907.500,00	162,46
6	Dinas Tenaga Kerja	750.000.000,00	583.770.000,00	77,84
7	Dinas Pangan Dan Pertanian	240.800.000,00	263.827.000,00	109,56
8	Dinas Lingkungan Hidup	1.900.000.000,00	2.154.402.900,00	113,39

No	Dinas/Instansi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
9	Dinas Perhubungan	1.288.475.000,00	1.529.391.040,00	118,70
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan	400.000.000,00	431.612.791,00	107,90
11	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian	1.572.095.500,00	1.717.326.502,00	109,24
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.400.000.000,00	1.552.574.234,00	110,90
13	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	731.823.569.654,00	717.347.579.985,00	98,02
	JUMLAH	1.587.835.737.002,00	1.520.135.560.503,11	95,74

Secara khusus realisasi pendapatan dari masing-masing dinas/instansi penghasil sebagai berikut :

1. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah yang dikelola Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar Rp677.903.245.268,00 dengan realisasi sebesar Rp603.120.255.312,11 atau 88,97% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2021 berada di bawah *cash budget* sebesar 11,03%.

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	677.903.245.268,00	603.120.255.312,11	88,97
Pendapatan Asli Daerah	168.513.221.054,00	205.437.257.303,11	121,91
Hasil Pajak Daerah	152.786.878.291,00	179.891.802.692,00	117,74
Pajak Hotel	149.382.500,00	179.180.631,00	119,95
Pajak Hotel	149.382.500,00	175.215.317,00	117,29
Pajak Gubuk Pariwisata	-	3.965.314,00	-
Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	70.321.000,00	104.237.335,00	148,23
Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	70.321.000,00	104.237.335,00	148,23
Pajak Restoran	14.278.402.073,00	17.018.807.906,00	119,19
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	14.253.402.073,00	17.018.807.906,00	119,40
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	25.000.000,00	-	-
Pajak Hiburan	88.096.000,00	123.330.330,00	140,00
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	2.864.520,00	-	-

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	85.231.480,00	123.330.330,00	144,70
Pajak Reklame	1.748.195.268,00	2.326.007.100,00	133,05
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	942.290.918,00	1.302.620.500,00	138,24
Reklame Kain	161.900.100,00	204.129.100,00	126,08
Reklame Melekat/Stiker	587.748.000,00	775.085.700,00	131,87
Reklame Berjalan	56.256.250,00	44.171.800,00	78,52
Pajak Penerangan Jalan	34.709.763.147,00	37.701.852.705,00	108,62
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	34.705.220.910,00	37.688.296.591,00	108,60
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	4.542.237,00	13.556.114,00	298,45
Pajak Parkir	620.000.000,00	937.097.932,00	151,14
Pajak Parkir	620.000.000,00	937.097.932,00	151,14
Pajak Air tanah	6.360.000.000,00	8.237.134.116,00	129,51
Pajak Air tanah	6.360.000.000,00	8.237.134.116,00	129,51
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	52.500.391.242,00	57.303.314.555,00	109,15
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	52.500.391.242,00	57.303.314.555,00	109,15
BPHTB-Pemindahan Hak	42.262.327.061,00	55.960.840.082,00	132,41
BPHTB-Pemindahan Hak	42.262.327.061,00	55.960.840.082,00	132,41
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.956.960.000,00	9.956.960.000,00	100,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	9.956.960.000,00	9.956.960.000,00	100,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.769.382.763,00	15.588.494.611,11	270,20
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	70.000.000,00	1.052.983.328,00	1.504,26
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	-	-
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.511.600,00	105,12

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Penjualan Aset Lainnya	30.000.000,00	1.042.471.728,00	3.474,91
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	353.243.450,00	337.911.429,00	95,66
Hasil Sewa BMD	-	28.750.000,00	-
Hasil Kerja sama Pemanfaatan BMD	353.243.450,00	309.161.429,00	87,52
Penerimaan Jasa Giro	5.000.000.000,00	9.376.691.914,10	187,54
Jasa Giro Kas Daerah	5.000.000.000,00	8.940.488.321,10	178,82
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	304.410.155,00	-
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	-	131.793.438,00	-
Pendapatan Bunga	-	307.719.834,01	-
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	-	307.719.834,01	-
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	110.459.167,00	2.507.325.531,00	2.269,91
Kerugian Terhadap Bendahara	110.459.167,00	-	-
Kerugian Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	-	2.507.325.531,00	-
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	561.000,00	-
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	561.000,00	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00	184.126.021,00	92,06
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00	184.126.021,00	92,06
Pendapatan Denda Pajak Daerah	21.159.546,00	1.426.540.148,00	6.741,83
Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	1.852.586,00	-
Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	27.083.744,00	-
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	3.272.650,00	-
Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	25.875.282,00	-
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	-	10.628,00	-

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	6.815.882,00	-
Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	-	7.769.388,00	-
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	21.159.546,00	1.332.289.704,00	6.296,40
Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	21.570.284,00	-
Pendapatan Denda atas penandatanganan Akta sebelum melihat Bukti Pembayaran Pajak BPHTB			-
Pendapatan Denda Retribusi	14.520.600,00	-	-
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	500.000,00	-	-
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	14.020.600,00	-	-
Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	-	49.593.947,00	-
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	-	49.593.947,00	-
Pendapatan dari Pengembalian	-	315.613.979,00	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	308.733.979,00	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja	-	1.687.500,00	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Jaminan Kematian	-	5.062.500,00	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	-	130.000,00	-
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	-	1.177.480,00	-
Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	-	1.177.480,00	-
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	28.250.000,00	-

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	28.250.000,00	-
PENDAPATAN TRANSFER	509.390.024.214,00	390.910.720.778,00	76,74
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	144.547.187.266,00	161.338.096.080,00	
Dana Perimbangan	92.299.913.266,00	109.090.822.080,00	
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	92.299.913.266,00	109.090.822.080,00	118,19
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	6.171.640.448,00	7.497.770.028,00	121,49
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	49.292.878.142,00	48.386.046.177,00	98,16
Dana Alokasi Cukai	5.256.491.773,00	5.425.300.373,00	103,21
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	3.358.469.000,00	3.490.313.900,00	103,93
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	179.344.000,00	192.486.100,00	107,33
Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	801.488.018,00	801.488.018,00	100,00
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	103.708.525,00	151.713.993,00	146,29
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.287.505.980,00	1.674.500.150,00	130,06
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	25.848.387.380,00	41.471.203.341,00	160,44
Dana Insentif Daerah (DID)	52.247.274.000,00	52.247.274.000,00	100,00
DID	52.247.274.000,00	52.247.274.000,00	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	364.842.836.948,00	229.572.624.698,00	62,92
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	128.032.319.484,00	123.865.281.737,00	96,75
Bantuan Keuangan	236.810.517.464,00	105.707.342.961,00	44,64
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	6.772.277.231,00	-
Pendapatan Hibah	-	6.772.277.231,00	-
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	-	6.700.327.000,00	-
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		6.700.327.000,00	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan	-	71.950.231,00	-

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
Lain-lain Pendapatan		71.950.231,00	-

2. Dinas Kesehatan

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Kesehatan sebesar Rp17.738.905.080,00 dengan realisasi sebesar Rp18.034.132.900,00 atau 101,66% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir Tahun 2021 berada di atas *cash budget* sebesar 1,66%.

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<u>Pendapatan</u>	17.738.905.080,00	18.034.132.900,00	101,66
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.738.905.080,00	18.034.132.900,00	101,66
Pendapatan BLUD	17.738.905.080,00	18.034.132.900,00	101,66

3. RSUD Cibabat

Target pendapatan daerah dari Badan Layanan Umum Daerah (RSUD Cibabat) sebesar Rp145.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp165.608.981.259,00 atau 114,21% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir Tahun 2021 berada di atas *cash budget* sebesar 14,21 %.

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<u>Pendapatan</u>	145.000.000.000,00	165.608.981.259,00	114.21
Pendapatan Asli Daerah	145.000.000.000,00	165.608.981.259,00	114.21
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	145.000.000.000,00	165.608.981.259,00	114.21
Pendapatan Dari BLUD	145.000.000.000,00	165.608.981.259,00	114.21
Pendapatan dari BLUD	145.000.000.000,00	165.608.981.259,00	114.21

4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp7.754.071.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.686.799.080,00 atau 99,13% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2021 berada di bawah *cash budget* sebesar 0,87 %.

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	7.754.071.000,00	7.686.799.080,00	99,13

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	7.754.071.000,00	7.686.799.080,00	99,13
Retribusi Daerah	3.788.880.000,00	3.217.805.900,00	84,93
Retribusi Jasa Umum	210.600.000,00	378.211.000,00	179,59
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	115.500.000,00	181.345.000,00	157,01
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	53.000.000,00	157.970.000,00	298,06
Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	42.100.000,00	38.896.000,00	92,39
Retribusi Jasa Usaha	3.578.280.000,00	2.839.594.900,00	79,36
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.578.280.000,00	2.839.594.900,00	79,36
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.965.191.000,00	4.468.993.180,00	112,71
Pendapatan Denda Retribusi.	-	16.335.580,00	-
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	16.335.580,00	-
Pendapatan Dari BLUD	3.965.191.000,00	4.452.657.600,00	112,29
Pendapatan dari BLUD	3.965.191.000,00	4.452.657.600,00	112,29

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Target pendapatan daerah yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp64.575.500,00 dengan realisasi sebesar Rp104.907.500,00 atau 162,46% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2021 berada di atas *cash budget* sebesar 62,46%

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	64.575.500,00	104.907.500,00	162,46
Pendapatan Asli Daerah	64.575.500,00	104.907.500,00	162,46
Retribusi Daerah	64.575.500,00	104.907.500,00	162,46
Retribusi Jasa Umum	64.575.500,00	104.907.500,00	162,46
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	64.575.500,00	104.907.500,00	162,46

6. Dinas Tenaga Kerja

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp750.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp583.770.000,00 atau 77,84% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2021 berada di bawah *cash budget* sebesar 22,16%

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	750.000.000,00	583.770.000,00	77,84
Pendapatan Asli Daerah	750.000.000,00	583.770.000,00	77,84
Retribusi Daerah	750.000.000,00	583.770.000,00	77,84
Retribusi Perizinan Tertentu	750.000.000,00	583.770.000,00	77,84
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	750.000.000,00	583.770.000,00	77,84

7. Dinas Pangan dan Pertanian

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Pangan dan Pertanian sebesar Rp240.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp263.827.000,00 atau 109,56% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2021 berada di atas *cash budget* sebesar 9,56%

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	240.800.000,00	263.827.000,00	109,56
Pendapatan Asli Daerah	240.800.000,00	263.827.000,00	109,56
Retribusi Daerah	240.800.000,00	263.827.000,00	109,56
Retribusi Jasa Usaha	240.800.000,00	263.827.000,00	109,56
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	208.800.000,00	233.635.000,00	111,89
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	32.000.000,00	30.192.000,00	94,35

8. Dinas Lingkungan Hidup

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.900.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.154.402.900,00 atau 113,39% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2021 berada di atas *cash budget* sebesar 13,39%

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	1.900.000.000,00	2.154.402.900,00	113,39
Pendapatan Asli Daerah	1.900.000.000,00	2.154.402.900,00	113,39
Retribusi Daerah	1.900.000.000,00	2.154.402.900,00	113,39
Retribusi Jasa Umum	1.500.000.000,00	1.562.133.900,00	104,14
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.500.000.000,00	1.562.133.900,00	104,14

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Retribusi Jasa Usaha	400.000.000,00	592.269.000,00	148,07
Pendapatan	1.900.000.000,00	2.154.402.900,00	113,39

9. Dinas Perhubungan

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Perhubungan sebesar Rp1.288.475.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.529.391.040,00 atau 118,70% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2021 di atas *cash budget* sebesar 18,70%.

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	1.288.475.000,00	1.529.391.040,00	118,70
Pendapatan Asli Daerah	1.288.475.000,00	1.529.391.040,00	118,70
Retribusi Daerah	1.288.475.000,00	1.529.391.040,00	118,70
Retribusi Jasa Umum	1.070.000.000,00	1.271.953.040,00	118,87
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	550.000.000,00	683.644.000,00	124,30
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	520.000.000,00	588.309.040,00	113,14
Retribusi Jasa Usaha	216.975.000,00	253.838.000,00	116,99
Retribusi Terminal	216.975.000,00	253.838.000,00	116,99
Retribusi Perizinan Tertentu	1.500.000,00	3.600.000,00	240,00
Retribusi Izin Trayek / Izin Usaha Angkutan Umum	1.500.000,00	3.600.000,00	240,00

10. Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp431.612.791,00. atau 107,90% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2021 di atas *cash budget* sebesar 7,90%.

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	400.000.000,00	431.612.791,00	107,90
Pendapatan Asli Daerah	400.000.000,00	431.612.791,00	107,90
Retribusi Daerah	400.000.000,00	431.612.791,00	107,90

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Retribusi Jasa Umum	400.000.000,00	431.612.791,00	107,90
Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi	400.000.000,00	431.612.791,00	107,90

11. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian.

Target pendapatan daerah yang dikelola Dinas Koperasi UKM Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian sebesar Rp1.572.095.500,00 dengan realisasi sebesar Rp1.717.326.502,00 atau 109,24% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir tahun 2020 berada di atas *cash budget* sebesar 9,24%.

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	1.572.095.500,00	1.717.326.502,00	109,24
Pendapatan Asli Daerah	1.572.095.500,00	1.717.326.502,00	109,24
Retribusi Daerah	1.572.095.500,00	1.710.256.225,00	108,79
Retribusi Jasa Umum	125.000.000,00	1.068.244.000,00	854,60
Retribusi Pelayanan Pasar	-	895.585.000,00	-
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	125.000.000,00	172.659.000,00	138,13
Retribusi Jasa Usaha	1.447.095.500,00	642.012.225,00	44,37
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	560.000.000,00	642.012.225,00	114,65
Retribusi Pasar Grosir dan pertokoan	887.095.500,00	-	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	7.070.277,00	-
Pendapatan Denda Retribusi.	-	7.070.277,00	-
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	7.070.277,00	-

12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Target pendapatan daerah yang dikelola Kantor Pelayanan Perizinan Tertentu sebesar Rp1.400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.552.574.234,00 atau 110,90% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir Tahun 2021 berada di atas *cash budget* sebesar 10,90%.

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	1.400.000.000,00	1.552.574.234,00	110,90
Pendapatan Asli Daerah	1.400.000.000,00	1.552.574.234,00	110,90
Retribusi Daerah	1.400.000.000,00	1.552.574.234,00	110,90

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Retribusi Perizinan Tertentu	1.400.000.000,00	1.552.574.234,00	110,90
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.400.000.000,00	1.552.574.234,00	110,90

13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Target pendapatan daerah yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp731.823.569.654,00 dengan realisasi sebesar Rp717.347.579.985,00 atau 98,02% dari target. Apabila dibandingkan dengan *cash budget*, sampai dengan akhir Tahun 2021 berada di bawah *cash budget* sebesar 1,98%

Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	731.823.569.654,00	717.347.579.985,00	98,02
Pendapatan Asli Daerah	-	9.044,00	-
Jasa Giro pd Rekening Dana BOS	-	9.044,00	-
Dana Perimbangan	674.170.850.000,00	662.185.746.941,00	98,22
Dana Alokasi Umum	530.425.978.000,00	530.425.978.000,00	100,00
Dana Alokasi Umum.	530.425.978.000,00	530.425.978.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	143.744.872.000,00	131.759.768.941,00	91,66
Dana Alokasi Khusus	143.744.872.000,00	131.759.768.941,00	91,66
Dana Alokasi Khusus Fisik	37.033.421.000,00	31.966.257.254,00	86,32
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	106.711.451.000,00	99.793.511.687,00	93,52
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	57.652.719.654,00	55.161.824.000,00	95,68
Pendapatan Hibah	57.652.719.654,00	55.161.824.000,00	95,68
Pendapatan Hibah Dana BOS	57.652.719.654,00	55.161.824.000,00	95,68
Dana BOS	57.652.719.654,00	55.161.824.000,00	95,68

Mekanisme Pendapatan Dana BOS dilakukan dengan cara pemindah bukuan (transfer) dari Rekening Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke Rekening Bendahara BOS di sekolah sehingga tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah Kota Cimahi. Pengakuan Pendapatan Dana BOS dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 adalah berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

2.3.2 Pengelolaan Belanja Daerah

2.3.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 Nomor 273), sedangkan perubahannya dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 286).

2.3.2.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah

Dalam Tahun Anggaran 2021 belanja daerah dianggarkan sebesar Rp1.856.578.149.343,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.481.512.704.849,00 atau 79,80%. Belanja daerah dimaksud dipergunakan untuk:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1.406.945.786.943,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 1.221.658.713.620,00 atau 86,83% terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp723.673.114.458,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp643.977.236.028,00 atau 88,99%;

b. Belanja Barang

Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp657.581.777.697,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp555.391.457.278,00 atau 84,46%;

c. Belanja Bunga

Belanja Bunga dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp308.874.114,00 atau 51,48%;

d. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi dianggarkan sebesar Rp507.144.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp410.574.000,00 atau 80,96%

e. Belanja Hibah

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp20.953.726.450,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp18.999.042.200,00 atau 90,67%

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp3.630.024.338,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.571.530.000,00 atau 70,84%;

2. Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp425.752.276.510,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp247.060.564.786,00 atau 58,03%;

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp23.880.085.890,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp12.793.426.443,00 atau 53,57%.

2.3.3 Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih besar dari pada anggaran belanja, sedangkan defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih kecil dari pada anggaran belanja.

Apabila terjadi surplus anggaran dapat dimanfaatkan melalui pengeluaran anggaran pembiayaan untuk transfer ke dana cadangan, pembayaran cicilan utang, penyertaan modal (investasi) dan/atau menjadi sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan. Sedangkan apabila terjadi defisit anggaran ditutup/dibiayai dari sisa lebih anggaran tahun lalu. Pinjaman daerah dan/atau transfer/penarikan dana cadangan daerah yang dianggarkan pada penerimaan anggaran pembiayaan.

Dalam Tahun Anggaran 2021 pembiayaan dianggarkan sebesar Rp268.742.412.341,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp270.042.508.966,53 terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp271.172.220.678,00 dan telah direalisasikan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya sebesar Rp270.898.017.186,53 atau 99,90%;

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp2.429.808.337,00 dan telah direalisasikan untuk Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp855.508.220,00 atau 35,21%.

2.3.4 Analisis Efisiensi

Dalam melaksanakan kinerja kegiatan suatu organisasi perlu diukur dalam suatu ukuran analisis antara pendapatan dan belanja anggaran. Pencapaian realisasi pendapatan dan belanja Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Uraian	Target/Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1)	Pendapatan	1.587.835.737.002,00	1.520.135.560.503,11	95,74
1	Pendapatan Asli Daerah	346.622.143.134,00	405.104.991.553,11	116,87
2	Pendapatan Transfer	1.183.560.874.214,00	1.053.096.467.719,00	88,98
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	57.652.719.654,00	61.934.101.231,00	107,43
	Jumlah	1.587.835.737.002,00	1.520.135.560.503,11	95,74
2)	Belanja	1.856.578.149.343,00	1.481.512.704.849,00	79,80
1	Belanja Operasi	1.406.945.786.943,00	1.221.658.713.620,00	86,83
2	Belanja Modal	425.752.276.510,00	247.060.564.786,00	58,03
3	Belanja Tak Terduga	23.880.085.890,00	12.793.426.443,00	53,57
	Jumlah	1.856.578.149.343,00	1.481.512.704.849,00	79,80
	Surplus/defisit	- (268.742.412.341,00)	38.622.855.654,11	- (14,37)

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan beberapa informasi penting yang perlu disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut :

Basis akuntansi yang digunakan dalam Pelaporan Keuangan Kota Cimahi adalah Basis Akrual untuk Neraca. Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Arus Kas dan Laporan Saldo Anggaran Lebih sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Cimahi, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1. Pendapatan - LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
3. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas pelaporan yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus tahun anggaran.
5. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Berlebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca

Neraca SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah. serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Laporan Operasional

1. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu pelaporan.
2. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, Transfer dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :
3. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
4. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
5. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
6. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.

2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menindaklanjuti Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah beberapa kali menetapkan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Kebijakan Akuntansi terakhir dengan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang ruang lingkupnya meliputi terdiri dari :

1. Kerangka Konseptual;

Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi adalah sebagai acuan bagi :

- a. penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
- b. pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
- c. para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

2. Penyajian Laporan Keuangan;

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual.
- b. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.
- c. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

3. Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas;

- 1) Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
- 2) Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan dengan anggarannya.
- 3) Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 4) Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a) Pendapatan-LRA;
 - b) Belanja;
 - c) Transfer;
 - d) Surplus atau defisit-LRA;
 - e) Penerimaan pembiayaan;

- f) Pengeluaran pembiayaan;
- g) Pembiayaan neto; dan
- h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

4. Neraca;

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. kas dan setara kas;
- b. investasi jangka pendek;
- c. piutang pajak dan bukan pajak;
- d. persediaan;
- e. Biaya dibayar di muka;
- f. investasi jangka panjang;
- g. aset tetap;
- h. Aset lainnya;
- i. kewajiban jangka pendek;
- j. kewajiban jangka panjang;
- k. ekuitas.

Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca jika Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mensyaratkan atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- a) Sifat, likuiditas dan materialitas aset;
- b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- c) Jumlah, sifat dan jangka waktu kewajiban.

Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasi.

5. Laporan Arus Kas;

- a. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.
- b. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.
- c. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

6. Laporan Operasional;

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit entitas pemerintah dan seluruh entitas akuntansi.

Laporan Operasional menyediakan informasi :

- a. Besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah untuk menjalankan pelayanan;
- b. Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi, efektivitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- d. Penurunan ekuitas (bila defisit operasional). dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan operasional disusun untuk *melengkapi* pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan;

- a. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman. Laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
- b. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah daerah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.

8. Akuntansi Pendapatan Perpajakan;

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pemerintah daerah dalam hal ini otoritas perpajakan di daerah dalam menjaga terlaksananya pemungutan pajak daerah secara tertib administrasi berhak juga mengenakan sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan/atau kenaikan.
3. Pada pemerintah daerah sanksi perpajakan merupakan Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah.
4. Pendapatan Pajak Daerah-LRA, diakui pada saat:
 - a. Pendapatan kas telah diterima pada RKUD.
 - b. Pendapatan kas diterima oleh bendahara penerimaan.
 - c. Pendapatan kas diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD.
5. Pendapatan Pajak Daerah-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
6. Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
7. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan self assessment system diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Daerah tanpa terlebih dahulu pemerintah daerah menerbitkan ketetapan.
8. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan self assessment system antara lain bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Bendahara Penerimaan atau ke Kas Daerah.
9. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan official assessment system diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan pajak. Timbulnya hak menagih tersebut adalah pada saat diterbitkan ketetapan.
10. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan official assessment system antara lain ketetapan yang diterbitkan oleh otoritas pajak daerah.
11. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
12. Pengembalian Pendapatan Perpajakan-LRA diukur sebesar nominal uang yang keluar dari kas daerah.
13. Pendapatan Perpajakan-LO diukur sebesar nilai nominal yaitu:
 - a. Nilai aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah untuk self assessment.

- b. Nilai aliran masuk yang akan diterima pemerintah untuk official assessment.
- 14. Akuntansi pendapatan Pendapatan Pajak Daerah-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 15. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan Pajak Daerah-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

9. Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan;

- 1. Pendapatan nonperpajakan dapat diartikan sebagai pendapatan daerah yang tidak berasal dari pendapatan perpajakan.
- 2. Pendapatan Non Perpajakan -LRA, diakui pada saat:
 - a. Pendapatan kas telah diterima pada RKUD.
 - b. Pendapatan kas diterima oleh bendahara penerimaan.
 - c. Pendapatan kas diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD.

Pendapatan perizinan;

- 3. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
- 4. Atas izin yang diberikan pemerintah yang melebihi satu periode akuntansi, pengakuan pendapatannya dilakukan hanya satu kali pada saat izin tersebut dan tidak perlu dibagi secara proporsional sesuai dengan waktu berlakunya izin yang bersangkutan.
- 5. Pengakuan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa layanan pemberian izin merupakan layanan yang berkelanjutan serta tidak terdapat sumber daya ekonomi yang dikeluarkan pemerintah selama periode berlakunya izin.

Pendapatan Pemberian Layanan

- 6. Pengakuan pendapatan pemberian layanan pada prinsipnya yaitu Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
- 7. Mengacu pada *best practices*, apabila hasil dari suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan operasional sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca.
- 8. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi secara andal apabila seluruh kondisi di bawah ini dapat dipenuhi:
 - a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal; yang terkait akan diperoleh entitas;
 - b. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
 - c. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Pendapatan Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)

9. Pendapatan nonperpajakan-LO diakui pada saat bagian dari hak pemerintah daerah atas pemanfaatan/pengambilan SDA dimaksud ditetapkan.
10. Tata cara penetapan bagi hasil ini pada umumnya berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga/kontraktor serta sesuai dengan peraturan perundangan.

Pendapatan Investasi

11. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividen) diakui pada saat diperoleh.
12. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan dividen dalam bentuk saham diakui sebagai penambah nilai investasi pemerintah.
13. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

Pendapatan Pemanfaatan Aset Non-Keluangan/Pemanfaatan Aset Tetap

14. Pendapatan nonperpajakan yang berasal dari pemanfaatan aset nonkeuangan diakui sesuai dengan hak yang dapat diakui oleh entitas sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dibuat oleh entitas pemerintah dengan pihak ketiga yang melakukan kerja sama tersebut atau pada saat diterima oleh entitas.
15. Pengakuan pendapatan dari kerja sama pemanfaatan dilakukan pada saat entitas memiliki hak atas pendapatan tersebut sesuai dengan perjanjian antara entitas dengan pihak ketiga. Apabila pendapatan dari kerja sama pemanfaatan tersebut diterima untuk masa yang lebih dari satu periode akuntansi, maka dilakukan penyesuaian pendapatan secara proporsional (secara bulanan atau semesteran) tergantung dengan sistem yang dibuat oleh pemerintah daerah.
16. Bentuk pemanfaatan aset sesuai dengan Peraturan Pemerintah saat ini terdiri dari sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna serta kerja sama penyediaan infrastruktur.
17. Pengakuan pendapatan sewa dilakukan pada saat entitas memiliki hak atas pendapatan tersebut sesuai dengan perjanjian. Apabila perjanjian sewa melewati jangka waktu satu tahun, maka dilakukan penyesuaian pengakuan pendapatan sebesar yang telah menjadi hak entitas yang bersangkutan secara proporsional (secara bulanan atau semesteran) sesuai dengan sistem yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Non-Perpajakan Lainnya

18. Pendapatan nonperpajakan lainnya antara lain dapat berasal dari keuntungan penjualan, denda akibat perjanjian/peraturan, bunga/jasa perbankan, penerimaan kembali belanja tahun sebelumnya, putusan pengadilan/pelanggaran hukum dan penghapusan utang.

19. Pendapatan yang berasal dari keuntungan penjualan aset diakui pada saat kas diterima oleh entitas, pendapatan yang berasal dari denda akibat perjanjian atau peraturan diakui pada saat menjadi hak entitas, pendapatan yang berasal dari bunga/jasa perbankan diakui pada saat kas diterima oleh entitas, pendapatan yang berasal dari pengembalian kembali belanja tahun sebelumnya diakui pada saat kas diterima oleh entitas.
20. Untuk pendapatan yang berasal dari penghapusan utang diakui pada saat telah ada penetapan dari pemberi pinjaman bahwa utang entitas telah dihapuskan oleh pemberi pinjaman.

Pendapatan perizinan;

21. Pendapatan yang berasal dari perizinan disajikan sebesar tarif yang dipungut oleh pemerintah atas izin yang diberikannya.
22. Pemerintah selaku pemberi izin dapat memberikan batas waktu kepada penerima izin maupun tidak memberikan batas waktu.

Pendapatan Pemberian Layanan

23. Jumlah pendapatan operasional yang berasal dari pemberian layanan yang dilakukan oleh pemerintah diukur sebesar nilai yang dibebankan atau ditagihkan kepada pengguna.

Pendapatan Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)

24. Terhadap pendapatan operasional yang berasal dari pemanfaatan/pengambilan SDA berdasar unitnya, jumlah pendapatannya dinilai sebesar jumlah SDA yang diambil/dimanfaatkan dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan.
25. Dalam hal tarif dan penetapan dengan mata uang asing, jumlah pendapatan dicatat dengan mengkonversi menjadi rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal penetapan.
26. Dalam hal penyeteroran baru dilakukan kemudian masih dalam batas waktu yang diperkenankan dan terdapat perubahan kurs, jumlah pendapatan operasional adalah sebesar jumlah setoran sekaligus untuk koreksi atas pencatatan sebelumnya.

Pendapatan Investasi

27. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek bunga deposito dinilai sebesar bunga deposito yang diterima oleh entitas. Untuk hasil investasi dari bunga obligasi dinilai sebesar bunga obligasi yang menjadi hak entitas berdasarkan sertifikat obligasi yang dimiliki oleh entitas.
28. Hasil investasi jangka pendek yang berasal dari penyertaan jangka pendek berupa dividen tunai (cash dividend) dinilai sebesar jumlah yang akan diterima oleh pemerintah yang diumumkan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
29. Pendapatan dari investasi jangka panjang penyertaan modal pemerintah, apabila menggunakan metode biaya, dinilai sebesar bagian tunai yang akan diterima oleh entitas pada saat diumumkan dalam RUPS. Sementara itu apabila menggunakan metode ekuitas disamping dinilai sebesar bagian tunai yang akan diterima oleh entitas pada saat diumumkan dalam RUPS, pendapatan tersebut juga akan mengurangi ekuitas entitas pada penyertaan tersebut.

Pendapatan Pemanfaatan Aset Non-Kuangan/Pemanfaatan Aset Tetap

30. Pendapatan operasional yang berasal dari pendapatan sewa dinilai sebesar yang menjadi hak entitas pada tahun berjalan. Penghitungan proporsi nilai pendapatan dapat menggunakan bulanan maupun tahunan, tergantung sistem yang dibangun oleh pemerintah daerah.
31. Pendapatan operasional yang berasal dari kerja sama pemanfaatan, dinilai sebesar jumlah yang menjadi hak entitas pemerintah daerah yang bersangkutan pada tahun berjalan. Penghitungan proporsi nilai pendapatan dapat menggunakan bulanan maupun tahunan, tergantung sistem yang dibangun oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Non-Perpajakan Lainnya

32. Pendapatan operasional yang berasal dari keuntungan penjualan atau pertukaran aset diukur sebesar selisih positif antara kas dan/atau nilai aset yang diterima dikurangi dengan nilai buku aset yang dijual atau diserahkan.
33. Pendapatan yang berasal dari denda akibat perjanjian atau peraturan pemerintah dinilai sebesar nilai penetapan.
34. Untuk pendapatan bunga/jasa perbankan dan pendapatan dari pengembalian belanja tahun sebelumnya diakui sebesar yang telah diterima oleh entitas.
35. Pendapatan yang berasal dari putusan pengadilan/pelanggaran hukum dinilai sebesar penetapan putusan.
36. Pendapatan yang berasal dari penghapusan utang, dinilai sebesar nilai utang yang dihapuskan oleh pemberi pinjaman. Bisa terjadi penghapusan utang dapat berasal dari usaha yang melebihi satu periode, namun mengingat prinsip keandalan, pendapatan dari penghapusan utang ini diakui sebesar nilai penghapusan pada tahun berkenaan.

10. Akuntansi Pendapatan Operasional Transfer;

1. Pendapatan operasional transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Pendapatan operasional transfer LRA diakui pada saat :
 - a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
 - b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - c. Pendapatan kas yang diterima Perangkat Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
 - d. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUN/BUD, dan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

3. Pendapatan Operasional Transfer - LO diakui, yaitu pada saat kas diterima dan pada saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang melakukan transfer kepada entitas penerima.
4. Alokasi pendapatan transfer merupakan pagu hak bagi daerah dalam satu tahun anggaran untuk menerima penyaluran secara periodik berdasar persyaratan-persyaratan tertentu. Dapat terjadi nilai yang dialokasikan tidak disalurkan seluruhnya karena terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi. Selain itu, pengakuan pendapatan transfer LO berdasar kas yang diterima juga mencerminkan kinerja pendapatan dalam suatu periode dalam satu tahun anggaran bagi entitas penyalur. Artinya, jumlah transfer yang dilakukan oleh entitas penyalur disesuaikan dengan kinerja pendapatan pada periode yang sama.
5. Ada kalanya informasi mengenai kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur sebelum entitas penerima menerbitkan laporan keuangan. Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan.
6. Apabila informasi mengenai kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur setelah entitas penerima menerbitkan laporan keuangan, maka entitas penerima dapat mengakui informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi tersebut.
7. Ada jenis transfer yang karena kebijakan Pemerintah Pusat, entitas penerima mempunyai kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari entitas penerima sesuai ketentuan. Contohnya dana BOS dan dana desa.
8. Penerimaan Dana BOS oleh unit sekolah yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Cimahi diakui sebagai pendapatan. Sedangkan untuk Dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta tidak diakui karena bukan merupakan bagian dari entitas pemerintah Kota Cimahi.
9. Pendapatan Transfer LRA diukur sebesar kas yang diterima atau yang seharusnya diterima di RKUD.
10. Kas yang diterima di RKUD bisa kurang dari yang seharusnya diterima. Dalam hal terdapat lebih salur pada TA sebelumnya, penyaluran akan dipotong oleh pihak yang menyalurkan. Hal ini lazim terjadi pada penyaluran DBH. Dalam hal terjadi demikian, pendapatan dicatat sebesar nilai brutonya dan nilai yang dipotong dicatat sebagai pengurang SiLPA.
11. Pendapatan Transfer LO diakui dan dicatat sebesar kas yang diterima oleh entitas dan/atau sebesar pengakuan kurang salur oleh entitas penyalur.
12. Nilai penerimaan kas didasarkan pada penyaluran transfer yang diterima di rekening entitas pada bank atau RKUD. Selain itu Pendapatan Transfer LO atas kurang salur dicatat sebesar nilai yang akan diterima yang ditetapkan dalam peraturan mengenai kurang salur dimaksud.
13. Untuk kurang bayar/salur diakui sebesar ketetapan dari entitas penyalur yang dapat berupa laporan keuangan entitas penyalur yang telah diaudit, pemberitahuan, atau dalam bentuk produk hukum peraturan/keputusan.
14. Berbeda dengan jenis piutang lainnya yang menyajikan penyisihan piutang, pada piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang.
15. Tidak adanya perlakuan penyisihan piutang ini dengan pertimbangan (1) timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah

melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan (2) dalam hal piutang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur sangat besar.

11. Akuntansi Hibah;

1. Pendapatan Hibah adalah penerimaan daerah dalam rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali.
2. Kriteria Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:
 - a. Berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, dan pemerintah lain atau berasal dari badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan;
 - b. Tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah;
 - c. Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung dari penerima hibah kepada pemberi hibah;
 - d. Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah.
3. Pendapatan hibah - LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
4. Selanjutnya dalam persepsi yang lebih luas Pengakuan Pendapatan yang diterima pada RKUD, yaitu:
 - a. Pendapatan hibah diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
 - b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - c. Pendapatan kas yang diterima Perangkat Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan daerah.
 - d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan daerah.
 - e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, entitas lain tersebut dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
5. Pendapatan hibah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
6. Pengakuan pendapatan hibah – LO terjadi pada saat hak pemerintah timbul yang akan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan serta tidak perlu dibayar kembali.
7. Pendapatan hibah – LO disajikan di Laporan Operasional.
8. Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat:
 - a. Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;
 - b. Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih; dan

- c. Jumlahnya dapat diestimasi secara andal.
9. Untuk pendapatan hibah langsung yang diterima Perangkat Daerah dan telah memenuhi kriteria pengakuan Pendapatan Hibah-LO, maka pendapatan hibah-LO diakui pada saat diterima oleh Perangkat Daerah penerima.
10. Belanja hibah – LRA diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
11. Belanja hibah – LRA disajikan di Laporan Realisasi Anggaran.
12. Pengakuan beban pada akuntansi berbasis akrual terjadi pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
13. Beban hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut antara lain:
14. Dana hibah akan dikeluarkan jika penerima hibah sudah kegiatan atau persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
15. Dana hibah dikeluarkan tanpa persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut.
16. Beban hibah juga disajikan pada Laporan Operasional pada Pos Operasional.
14. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.
15. Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
16. Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
17. Belanja hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.
18. Realisasi belanja dan beban hibah disajikan dalam mata uang rupiah.
19. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja hibah menurut jenis belanja, organisasi dan. menurut fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja.
- 12. Akuntansi Bantuan Sosial;**
 1. Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Transfer uang/barang/jasa tersebut memiliki ketentuan berikut ini :
 - a. Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah.

- b. Belanja bantuan sosial dapat bersifat sementara atau berkelanjutan.
 - c. Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan bencana.
 - d. Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.
 - e. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan.
2. Beban Bantuan Sosial adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban pemerintah sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
 3. Belanja bantuan sosial diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
 4. Pengakuan belanja bantuan sosial dikaitkan dengan pengeluaran kas, sehingga belanja bantuan sosial hanya diakui untuk belanja yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam tahun anggaran tersebut atau dalam bentuk barang/jasa yang dianggarkan dan dibeli pada tahun anggaran bersangkutan.
 5. Jika pengeluarannya berbentuk barang yang telah ada (dianggarkan pada tahun anggaran sebelumnya), maka tidak diklasifikasikan sebagai belanja bansos. Sebaliknya jika terjadi pengeluaran bansos dalam bentuk barang, maka belanja bansos akan diakui pada saat kas untuk pembelian barang tersebut dikeluarkan, walaupun barang tersebut belum diserahkan sebagian atau seluruhnya.
 6. Beban diakui pada saat:
 - a. timbulnya kewajiban;
 - b. terjadinya konsumsi aset;
 - c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 7. Beban Bantuan Sosial diakui pada saat terjadi konsumsi aset dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Hal ini dapat berupa pengeluaran sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Untuk itu, Beban Bansos dapat diakui pada saat bansos diserahkan kepada pihak yang berhak menerima bansos.
 8. Belanja bantuan sosial diukur sebesar nilai belanja bantuan sosial yang direalisasikan. Realisasi belanja bantuan sosial diukur sebesar jumlah pengeluaran untuk pembayaran belanja bansos.
 9. Beban bansos diukur sebesar nilai bantuan sosial berupa uang/barang/jasa yang telah diserahkan kepada masyarakat penerima bansos.
 10. Apabila Bantuan Sosial disalurkan melalui lembaga penyalur kepada masyarakat, untuk mengukur nilai Beban Bantuan Sosial, maka Entitas harus mendapatkan informasi mengenai nilai yang telah disalurkan oleh Lembaga Penyalur kepada masyarakat.

11. Nilai Beban Bantuan Sosial tersebut diukur hanya sebesar yang telah disalurkan oleh lembaga penyalur.
12. Untuk Bantuan Sosial berupa uang yang belum disalurkan tersebut jika Entitas Pemerintah masih menguasai uang yang masih berada di lembaga penyalur, maka entitas juga harus melaporkan kas tersebut dalam Neraca.
13. Untuk Bansos dalam bentuk barang yang telah dikeluarkan namun belum diserahkan ke masyarakat akan diakui sebagai persediaan.
14. Persediaan yang berasal dari belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dinilai sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Persediaan, disajikan sebesar:
 - a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. biaya standar apabila diproduksi sendiri;
 - c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.
15. Penyaluran Bantuan Sosial dapat menimbulkan kewajiban apabila entitas pemerintah belum menyalurkan bantuan sosial yang sudah menjadi hak penerima bantuan sosial, dan penerima masih memiliki hak untuk memperoleh bantuan sosial tersebut pada periode berikutnya masa mendatang.

13. Akuntansi Piutang;

- 1) Untuk piutang yang berasal dari pungutan pendapatan daerah diakui pada saat:
 - a) Telah diterbitkan surat ketetapan ; dan/atau
 - b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- 2) Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem self assessment, setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh Wajib Pajak ke instansi terkait. Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya piutang pajak ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
- 3) Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan penghitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.
- 4) Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. Apabila sampai dengan tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Retribusi Daerah (STRD).

- 5) STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 6) Piutang yang berdasarkan perikatan harus memenuhi kriteria untuk diakui sebagai piutang :
 - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. Jumlah piutang dapat diukur;
 - c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
 - d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- 7) Piutang yang berasal dari peristiwa pemberian pinjaman dapat diberikan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu kepada pemerintah daerah, perorangan, BUMD, perusahaan swasta atau organisasi lainnya.
- 8) Ketentuan dan persyaratan timbulnya piutang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman antara pihak-pihak terkait dan pengakuan timbulnya piutang dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Piutang tersebut berkurang apabila terjadi penerimaan angsuran pokok pinjaman di Rekening Kas Umum daerah. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai denda, bunga, biaya komitmen, maka setiap akhir tahun harus diakui adanya piutang atas bunga, denda dan biaya komitmen yang harus dikenakan untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- 9) Piutang yang timbul dari penjualan pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah. Pemindahtanganan barang milik daerah dapat dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau diserahkan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah. Timbulnya piutang atau hak untuk menagih pada akhir periode pelaporan harus didukung dengan bukti yang sah mengenai pemindahtanganan barang milik daerah.
- 10) Penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran misalnya penjualan kendaraan dinas. Pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi. Timbulnya tagihan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti pelelangan atau bukti lain yang sah yang menyatakan bahwa barang milik daerah tersebut dipindahtangankan secara cicilan/angsuran.
- 11) Piutang atas dasar kemitraan timbul apabila terdapat hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang sampai dengan berakhirnya periode pelaporan belum dilunasi oleh mitra kerjasamanya.
- 12) Pemberian fasilitas/jasa yang dilakukan oleh satuan kerja pengguna barang atau pengelola barang pada umumnya untuk memanfaatkan barang milik daerah dengan cara mengenakan sewa, misalnya penyewaan tanah dan alat-alat milik pemerintah daerah. Persyaratan sewa menyewa tersebut harus dituangkan dalam naskah perjanjian sewa menyewa dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas selama masa manfaat. Berdasarkan naskah perjanjian sewa menyewa, apabila ada hak tagih atas suatu pemberian fasilitas/jasa pada setiap akhir periode akuntansi maka hak tersebut dicatat sebagai piutang di neraca.
- 13) Pengakuan piutang yang berasal dari transfer antar pemerintahan adalah sebagai berikut :

a) Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat;

Piutang Dana bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan tahun anggaran maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang Dana Bagi Hasil oleh pemerintah daerah.

b) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU);

Piutang DAU diakui apabila pada saat akhir tahun anggaran masih ada jumlah DAU yang belum ditransfer ke daerah, yaitu sebesar jumlah perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh pemerintah daerah apabila Pemerintah Pusat mengakuinya dan menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

c) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK);

Transfer DAK dilaksanakan dengan menggunakan pola bertahap sesuai dengan tingkat pelaksanaan belanja kegiatan. Apabila pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka pada saat itu dapat diakui telah timbulnya hak untuk menagih (piutang) kepada Pemerintah Pusat. Jumlah piutang yang diakui oleh pemerintah daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

d) Piutang Transfer Lainnya;

Selain Dana Bagi Hasil, DAU dan DAK, pemerintah Pusat dapat mengeluarkan kebijakan transfer lain, misalnya Dana Penyesuaian. Terdapat dua kemungkinan cara penyaluran untuk transfer lainnya, yaitu pertama, pencairannya bertahap dalam periode/bulan tertentu tanpa persyaratan dan kedua, pencairannya bertahap dengan persyaratan tertentu. Apabila penyaluran tidak memerlukan persyaratan dan sampai dengan akhir tahun anggaran. Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi piutang bagi pemerintah daerah. Apabila dalam pencairan dana diperlukan persyaratan, maka timbulnya piutang pada saat persyaratan sudah dipenuhi tetapi pembayarannya belum dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

e) Piutang Bagi Hasil dari Provinsi.

Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Jumlah nilai definitif yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah

yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai piutang bagi pemerintah daerah.

- 14) Pengakuan untuk piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP) tergantung dari penyelesaian kasusnya, yaitu sebagai berikut :
 - a) Apabila penyelesaian TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan, maka piutang diakui pada saat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) sudah diterbitkan.
 - b) Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat keputusan yang diterbitkan oleh pengadilan.

14. Akuntansi Persediaan;

Persediaan diakui :

- 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan disajikan sebesar :

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Pencatatan Persediaan menggunakan metode FIFO (First In First Out) Perpetual. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

15. Akuntansi Investasi;

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah

dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas pelaporan perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas pelaporan akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Kriteria pengakuan investasi berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan maka pengakuan menggunakan nilai estimasi yang layak.

16. Akuntansi Aset Tetap;

Aset diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset tetap akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

17. Akuntansi Kerugian Daerah;

- 1) Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 2) Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dapat terdiri dari:
 - a. Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara. Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di

- neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
- b. Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan
Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.
 - c. Pengakuan Beban Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara, maka akan diakui sebagai beban non operasional.
- 3) Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawai tersebut dalam melakukan kewajibannya.
 - 4) Kerugian daerah pegawai negeri bukan bendahara antara lain dapat terjadi karena kehilangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas di bawah penguasaan dan/atau tanggung jawab pegawai bukan bendahara.
 - 5) Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh pegawai bukan Bendahara dapat mengakibatkan beberapa pengakuan akuntansi yaitu:
 - a. Pengakuan atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas
Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
 - b. Pengakuan atas Piutang TGR
Diakui di neraca pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan pejabat berwenang.
 - c. Pengakuan Beban
Apabila kehilangan kendaraan tersebut terbukti bukan kesalahan pegawai bukan Bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional.
 - 6) Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah berdasarkan putusan pengadilan dapat menimbulkan beberapa pengakuan akuntansi di entitas terkait, yaitu:
 - a. Entitas yang mengalami kerugian daerah.
 - 1) Pengakuan Beban Non Operasional
Beban Non Operasional diakui pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.
 - 2) Pengakuan atas kekurangan aset
Diakui dengan mengeluarkan atau mengurangi dari neraca pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.
 - b. Entitas Yang Berhak Menerima
 - 1) Pengakuan atas Piutang Ganti kerugian daerah
Piutang Ganti Kerugian diakui di neraca pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.
 - 2) Pengakuan Pendapatan LRA
Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian Negara/daerah diakui pada saat diterima di Kas Negara/daerah.
 - 3) Pengakuan Pendapatan LO
Pendapatan LO diakui pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.

- 7) Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena adalah bendahara:
- Uang tunai kerugian daerah diukur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara penanggung jawab uang tunai tersebut.
 - kerugian daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di tangan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara sebagai kustodian surat berharga.
 - kerugian daerah berbentuk barang milik daerah diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah fisik barang milik daerah di bawah pengawasan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara.
- 8) Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena pegawai bukan bendahara sebagai berikut :
- Kerugian daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di bawah kekuasaan Pegawai Bukan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab surat berharga.
 - Kerugian daerah berbentuk barang seperti persediaan dan aset tetap diukur dengan nilai buku atau nilai yang ditetapkan oleh Tim yang dibentuk untuk menangani kerugian daerah atas barang di bawah pengawasan pegawai bukan bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab barang milik daerah tersebut.
- 9) Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian karena putusan pengadilan sebagai berikut:
- Beban kerugian daerah dan kekurangan aset diukur berdasarkan nilai yang dihitung oleh Ahli.
 - Piutang Ganti kerugian daerah dan Pendapatan LO diukur berdasarkan nilai putusan hakim.
 - Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian daerah diukur sebesar jumlah yang diterima di Kas daerah.

18. Akuntansi Aset Tidak Berwujud

- Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Definisi aset tak berwujud mensyaratkan bahwa aset tak berwujud harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.
 - Dapat Diidentifikasi**
Kriteria pertama untuk ATB adalah dapat diidentifikasi. Yang dimaksud

dengan kriteria ini adalah:

- 1) Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas.
- 2) Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

b. Pengendalian

Pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset satu entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut.

c. Manfaat Ekonomi Masa Depan

Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential services) di masa depan.

Aset tak berwujud diakui pada saat:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Pengeluaran Setelah Perolehan

3. Pada kebanyakan kasus, sifat alamiah aset tak berwujud adalah tidak adanya penambahan nilai aset tak berwujud dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian aset tak berwujud dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan aset tak berwujud mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam aset tak berwujud dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset tak berwujud. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu aset tak berwujud tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas.
4. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap aset tak berwujud tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai aset tak berwujud dimaksud.
5. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:
 - a. Meningkatkan fungsi *software*;
 - b. Meningkatkan efisiensi *software*.

6. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan (Intangible Asset-Work In Progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.
7. Aset tak berwujud disajikan sebesar:
 - a. Harga beli, termasuk biaya import, pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat serta setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan untuk aset tak berwujud yang diperoleh dengan pembelian, kerjasama atau pengembangan internal;
 - b. Nilai wajar, apabila diperoleh dari pertukaran atau donasi/hibah.
 - c. ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat. Metode amortisasi yang digunakan oleh pemerintah kota Cimahi adalah metode garis lurus, dilakukan setiap akhir periode dan masa manfaat sebagai berikut :

No	Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
1	Lisensi, franchise, Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya	Sesuai masa berlaku/ perjanjian yang ditetapkan pemberi hak seperti Ditjen HAKI dll.
2	Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang	5 (lima) Tahun
3	Software Komputer	4 (empat) Tahun

8. Perhitungan amortisasi aset tak berwujud dilakukan mulai tahun berikutnya setelah tahun perolehannya. Rumus amortisasi adalah sebagai berikut:

$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasi}}{\text{Masa manfaat}}$
--

- a. Amortisasi per periode merupakan nilai amortisasi untuk aset tidak berwujud suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;
- b. Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tidak Berwujud yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

9. Aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti goodwill) tidak boleh diamortisasi. Nilai aset tak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah aset tak berwujud tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka aset tak berwujud tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai aset tak berwujud harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TAK BERWUJUD

10. Aset tak berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu aset tidak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tidak berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat aset tidak berwujud sehingga perlu diganti dengan yang baru.
11. Penghapusan Aset tak berwujud harus diungkapkan dalam CaLK.

19. Akuntansi Kewajiban;

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat laporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan/atau pada saat kewajiban timbul.

20. Koreksi Kesalahan. Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa;

- 1) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- 2) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- 3) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - (a) kesalahan yang tidak berulang;
 - (b) kesalahan yang berulang dan sistemik.
- 4) Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
 - (a) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

- (b) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- 5) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Restitusi pendapatan akan diatur dalam peraturan tersendiri.
 - 6) Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
 - 7) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
 - 8) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.
 - 9) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan kembali penerimaan belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset dan akun ekuitas dana.
 - 10) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.
 - 11) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana.
 - 12) Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

21. Laporan Keuangan Konsolidasian.

- 1) Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- 3) Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD Pemerintah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 Nomor 273), sedangkan perubahannya dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 273);

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan dan dicatat berdasarkan azas bruto. Kode Rekening dalam Catatan Atas Laporan Keuangan ini sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

1. Pendapatan

Pendapatan adalah peningkatan aset dan/atau penurunan utang yang berasal dari berbagai kegiatan dalam satu tahun anggaran. Pendapatan dicatat berdasarkan penerimaan bruto (azas bruto) sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran dan diakui dalam tahun anggaran berjalan dan pada akhir tahun anggaran.

Pendapatan dalam tahun anggaran berjalan dicatat berdasarkan jumlah kas yang diterima dan diakui pada saat diterima Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir tahun anggaran, pendapatan pada LRA diakui berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. Pendapatan Transfer yaitu Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan. Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi;
- c. Lain-lain Pendapatanyang Sah terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya.

Realisasi pendapatan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.520.135.560.503,11 atau mencapai 95,74% dari target anggaran yang telah ditetapkan tahun 2021 sebesar Rp1.587.835.737.002,00. Pencapaian target tercermin dari terlampauinya realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibandingkan anggarannya. Walaupun realisasi Pendapatan Transfer lebih kecil dibandingkan anggarannya.

2. Belanja

Belanja adalah penurunan aset dan/atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam satu tahun anggaran. Belanja adalah semua pengeluaran kas yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui dalam Tahun Anggaran berjalan dan pada akhir Tahun Anggaran.

Pengeluaran belanja daerah terdiri dari:

- a. Belanja Operasi yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan keuangan dan belanja bantuan sosial;
- b. Belanja Modal yaitu belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya;
- c. Belanja Tak Terduga.

Realisasi belanja periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.481.512.704.849,00 atau mencapai 79,80% dari anggaran belanja tahun 2021 sebesar Rp1.856.578.149.343,00.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan pengembalian belanja) yang terjadi dalam Tahun Anggaran berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada Tahun Anggaran berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dicatat dalam Lain-lain Pendapatan yang Sah.

3. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali,

yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan Surplus Anggaran.

Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan yaitu semua penerimaan kas yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu;
- b. Pengeluaran pembiayaan yaitu semua pengeluaran kas yaitu Pembayaran Pokok Utang. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan.;
- c. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode Tahun Anggaran tertentu.;

Realisasi Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp270.042.508.966,53 atau 100,48% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp268.742.412.341,00. Penerimaan pembiayaan Rp270.898.017.186,53 atau 99,90% dari anggaran yang ditetapkan Rp271.172.220.678,00 terdiri dari dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp270.898.017.186,53. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp855.508.220,00 atau 35,21% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.429.808.337,00 terdiri dari pembayaran pokok pinjaman ke Bank Dunia sebesar Rp855.508.220,00.

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp405.104.991.553,11 atau mencapai 116,87% dari target anggaran sebesar Rp346.622.143.134,00.

4.1.1.1. Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp179.891.802.692,00 atau mencapai 117,74% dari target anggaran sebesar Rp152.786.878.291,00 terdiri dari:

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pajak Hotel	219.703.500,00	283.417.966,00	129,00	422.665.698,00
Pajak Restoran	14.278.402.073,00	17.018.807.906,00	119,19	13.838.928.732,00
Pajak Hiburan	88.096.000,00	123.330.330,00	140,00	220.047.083,00
Pajak Reklame	1.748.195.268,00	2.326.007.100,00	133,05	2.502.161.350,00
Pajak Penerangan Jalan	34.709.763.147,00	37.701.852.705,00	108,62	37.334.153.409,00
Pajak Parkir.	620.000.000,00	937.097.932,00	151,14	645.221.004,00
Pajak Air tanah	6.360.000.000,00	8.237.134.116,00	129,51	8.620.538.880,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	52.500.391.242,00	57.303.314.555,00	109,15	53.858.343.870,00
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan	42.262.327.061,00	55.960.840.082,00	132,41	41.495.177.873,00
Jumlah	152.786.878.291,00	179.891.802.692,00	117,74	158.937.237.899,00

4.1.1.2. Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.548.482.640,00 atau mencapai 101,26% dari target anggaran sebesar Rp11.404.826.000,00 terdiri dari:

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	3.370.175.500,00	4.817.062.231,00	142,93	5.453.450.995,00
Retribusi Jasa Usaha	5.883.150.500,00	4.591.476.175,00	78,04	5.570.310.836,00
Retribusi Perijinan Tertentu	2.151.500.000,00	2.139.944.234,00	99,46	4.219.888.691,00
Jumlah	11.404.826.000,00	11.548.482.640,00	101,26	15.243.650.522,00

Dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Retribusi Daerah	11.404.826.000,00	11.548.482.640,00	101,26	15.243.650.522,00
Retribusi Jasa Umum	3.370.175.500,00	4.817.062.231,00	142,93	5.453.450.995,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-	-	1.793.473.500,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.500.000.000,00	1.562.133.900,00	104,14	1.309.268.700,00
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	115.500.000,00	181.345.000,00	157,01	119.085.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	550.000.000,00	683.644.000,00	124,30	444.189.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	-	895.585.000,00	-	879.072.450,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	520.000.000,00	588.309.040,00	113,14	543.932.260,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	64.575.500,00	104.907.500,00	162,46	74.546.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	53.000.000,00	157.970.000,00	298,06	97.035.000,00
Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	42.100.000,00	38.896.000,00	92,39	30.180.000,00
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	125.000.000,00	172.659.000,00	138,13	134.160.600,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	400.000.000,00	431.612.791,00	107,90	28.568.485,00
Retribusi Jasa Usaha	5.883.150.500,00	4.591.476.175,00	78,04	5.570.310.836,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.747.080.000,00	4.307.446.175,00	90,74	2.999.163.536,00
Retribusi Pasar Grosir	887.095.500,00	-	-	-
Retribusi Terminal	216.975.000,00	253.838.000,00	116,99	86.928.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	32.000.000,00	30.192.000,00	94,35	2.484.219.300,00
Retribusi Perizinan Tertentu	2.151.500.000,00	2.139.944.234,00	99,46	4.219.888.691,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.400.000.000,00	1.552.574.234,00	110,90	3.183.687.691,00
Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum	1.500.000,00	3.600.000,00	240,00	4.200.000,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	750.000.000,00	583.770.000,00	77,84	1.032.001.000,00

4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.956.960.000,00 atau mencapai 100% dari target anggaran sebesar Rp9.956.960.000,00 terdiri dari :

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	9.956.960.000,00	9.956.960.000,00	100,00	9.778.080.000,00
Jumlah	9.956.960.000,00	9.956.960.000,00	100,00	9.778.080.000,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp9.956.960.000 tersebut merupakan bagian dividen atas laba tahun 2021 Pemerintah Kota Cimahi atas kepemilikan 104.000.000 lembar saham pada PT Bank BJB.

4.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp203.707.746.221,11 atau mencapai 118,11% dari target anggaran sebesar Rp172.473.478.843,00 terdiri dari:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	70.000.000,00	1.052.983.328,00	1.504,26	1.719.377.182,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	353.243.450,00	337.911.429,00	95,66	-
Jasa Giro	5.000.000.000,00	9.376.700.958,10	187,54	6.061.508.451,14
Pendapatan Bunga	-	307.719.834,01	-	287.203.040,32
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	110.459.167,00	2.507.325.531,00	2.269,91	23.181.000,00
Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk lain	-	561.000,00	-	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00	184.126.021,00	92,06	144.273.512,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	21.159.546,00	1.426.540.148,00	6.741,83	2.093.540.349,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	14.520.600,00	23.470.807,00	161,64	43.239.321,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	49.593.947,00	-	-
Pendapatan dari Pengembalian	-	315.613.979,00	-	1.941.191.919,00
Pendapatan Dari BLUD	166.704.096.080,00	188.095.771.759,00	112,83	163.071.117.561,45
Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-	86.156.937,00
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-	-	16.041.653.850,00
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	-	1.177.480,00	-	-
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	28.250.000,00	-	-
Pendapatan Denda Lain-lain	-	-	-	13.750.000,00
Dana Non Kapitasi	-	-	-	202.081.135,00
Jumlah	172.473.478.843,00	203.707.746.221,11	118,11	191.728.274.257,91

4.1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer berupa Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dan Transfer dari Pemerintah Provinsi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.053.096.467.719,00 atau 88,98% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp1.183.560.874.214,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	766.470.763.266,00	771.276.569.021,00	100,63	789.281.907.731,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	52.247.274.000,00	52.247.274.000,00	100,00	97.730.028.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	364.842.836.948,00	229.572.624.698,00	62,92	142.885.541.924,00
Jumlah	1.183.560.874.214,00	1.053.096.467.719,00	88,98	1.029.897.477.655,00

4.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp771.276.569.021,00 atau 100,63% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp766.470.763.266,00.

4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp61.309.116.578,00 atau 100,97% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp60.721.010.363,00 terdiri dari:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.171.640.448,00	7.497.770.028,00	121,49	3.633.582.139,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	6.039.776.294,00	6.039.776.294,00	100,00	42.517.164.195,00
DBH PPh Pasal 21	43.253.101.848,00	42.346.269.883,00	97,90	
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	5.256.491.773,00	5.425.300.373,00	103,21	4.310.127.364,00
Jumlah	60.721.010.363,00	61.309.116.578,00	100,97	50.460.873.698,00

4.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp47.781.705.502,00 atau 151,31% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp31.578.902.903,00 terdiri dari:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	3.358.469.000,00	3.490.313.900,00	103,93	5.198.363.984,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	179.344.000,00	192.486.100,00	107,33	4.779.508.956,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	801.488.018,00	801.488.018,00	100,00	600.301.979,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	103.708.525,00	151.713.993,00	146,29	62.729.843,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.287.505.980,00	1.674.500.150,00	130,06	788.276.289,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi	25.848.387.380,00	41.471.203.341,00	160,44	27.216.795.079,00
Jumlah	31.578.902.903,00	47.781.705.502,00	151,31	38.645.976.130,00

4.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana Alokasi Umum periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp530.425.978.000,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp530.425.978.000,00 terdiri dari:

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	530.425.978.000,00	530.425.978.000,00	100,00	539.717.972.000,00

4.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp131.759.768.941,00 atau 91,66% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp143.744.872.000,00 terdiri dari:

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Dana Alokasi Khusus Fisik	37.033.421.000,00	31.966.257.254,00	86,32	45.170.237.820,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	106.711.451.000,00	99.793.511.687,00	93,52	115.286.848.083,00
Jumlah	143.744.872.000,00	131.759.768.941,00	91,66	160.457.085.903,00

4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

4.1.2.2.1. Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah

Realisasi Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp52.247.274.000,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp52.47.274.000,00 terdiri dari:

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Dana Insentif daerah (DID)	52.247.274.000,00	52.247.274.000,00	100,00	97.730.028.000,00
Jumlah	52.247.274.000,00	52.247.274.000,00	100,00	97.730.028.000,00

4.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp229.572.624.698,00 atau 62,92% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp364.842.836.948,00 terdiri dari:

4.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp123.865.281.737,00 atau 96,75% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp128.032.319.484,00 terdiri dari:

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	48.482.420.940,00	47.304.226.200,00	97,57	45.562.232.850,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30.564.409.050,00	22.198.195.050,00	72,63	18.951.688.350,00
Bagi Hasil dr Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	22.455.483.720,00	29.470.331.948,00	131,24	28.250.472.845,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	376.953.500,00	215.330.600,00	57,12	131.610.400,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	26.153.052.274,00	24.677.197.939,00	94,36	26.067.386.452,00
Jumlah	128.032.319.484,00	123.865.281.737,00	96,75	118.963.390.897,00

4.1.2.3.2. Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp105.707.342.961,00 atau 44,64% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp236.810.517.464,00 terdiri dari:

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	-	9.676.657.020,00	-	-
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	236.810.517.464,00	96.030.685.941,00	40,55	-
Bantuan Dari Provinsi Jawa Barat	-	-	-	23.922.151.027,00
Jumlah	236.810.517.464,00	105.707.342.961,00	44,64	23.922.151.027,00

4.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp61.934.101.231,00 atau tercapai 107,43% dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp57.652.719.654,00 terdiri dari:

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat :		6.700.327.000,00		140.839.566,00
<i>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat</i>		6.700.327.000,00		-
<i>Pendapatan Bunga Dana BOS</i>		-		140.839.566,00

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan Hibah Dana BOS	57.652.719.654,00	55.161.824.000,00	95,68	52.270.900.000,00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah		71.950.231,00	-	-
Jumlah	57.652.719.654,00	61.934.101.231,00	107,43	52.411.739.566,00

4.1.4. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Realisasi Belanja Operasi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.221.658.713.620,00 atau mencapai 86,83% dari anggarannya sebesar Rp1.406.945.786.943,00 terdiri dari:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Pegawai	723.673.114.458,00	643.977.236.028,00	88,99	636.883.229.738,00
Belanja Barang	657.581.777.697,00	555.391.457.278,00	84,46	456.337.905.380,02
Belanja Bunga	600.000.000,00	308.874.114,00	51,48	781.441.813,09
Belanja Subsidi	507.144.000,00	410.574.000,00	80,96	-
Belanja Hibah	20.953.726.450,00	18.999.042.200,00	90,67	13.856.011.450,00
Belanja Bantuan Sosial	3.630.024.338,00	2.571.530.000,00	70,84	2.864.475.000,00
Jumlah	1.406.945.786.943,00	1.221.658.713.620,00	86,83	1.110.723.063.381,11

4.1.4.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran untuk membayar gaji, tunjangan dan honorarium pegawai Pemerintah Kota Cimahi selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Belanja Pegawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp643.977.236.028,00 atau mencapai 88,99% dari anggarannya sebesar Rp723.673.114.458,00 dan proporsi terhadap total Belanja Operasi sebesar 52,71% terdiri dari:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	321.601.606.396,00	287.338.317.514,00	89,35	389.095.253.926,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	195.515.418.721,00	174.975.041.742,00	89,49	137.970.734.500,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	115.281.747.638,00	98.614.718.280,00	85,54	-
Biaya Insentif Pemungutan Pajak	-	-	-	829.207.008,00
Tunjangan Transportasi ASN	-	-	-	8.794.000.000,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Jasa Pelayanan	-	-	-	23.414.788.318,00
Honorarium PNS	-	-	-	57.458.000,00
Jasa Medis	-	-	-	119.054.090,00
Gaji dan Tunjangan DPRD	37.380.962.123,00	33.629.360.044,00	89,96	9.812.600.000,00
Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.054.245.918,00	536.897.640,00	50,93	
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	605.520.000,00	60,97	
Honorarium Non PNS	-	-	-	2.845.950.000,00
Uang lembur	-	-	-	2.222.107.700,00
Belanja Pegawai BLUD	51.846.013.662,00	48.277.380.808,00	93,12	61.156.411.196,00
Belanja Pegawai BOS	-	-	-	565.665.000,00
JUMLAH	723.673.114.458,00	643.977.236.028,00	88,99	636.883.229.738,00

4.1.4.2. Belanja Barang

Belanja Barang merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi untuk membeli barang dan jasa serta untuk membayar biaya pemeliharaan aset-aset Pemerintah Kota Cimahi selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Belanja Barang adalah untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Realisasi Belanja Barang periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp555.391.457.278,00 atau 84,46% dari anggarannya sebesar Rp657.581.777.697,00 dan proporsi terhadap total Belanja Operasi sebesar 45,46%, terdiri dari:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Bahan Pakai Habis	121.507.353.554,00	101.499.483.027,00	83,53	39.673.852.254,00
Belanja Bahan/Material				9.076.289.994,00
Belanja Cetak dan Penggandaan				7.257.472.876,00
Belanja Makanan dan Minuman				13.035.270.030,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				527.160.000,00
Belanja Pakaian Kerja				467.775.350,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu				500.096.000,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Peralatan/Perlengkapan untuk Kantor/Rumah Tangga/Lapangan				1.405.783.356,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	47.160.000,00	47.160.000,00	100,00	-
Belanja Jasa				
Belanja Jasa Kantor	200.913.196.435,00	171.986.735.688,00	85,60	18.256.493.415,00
Belanja Penyedia Jasa/Barang				14.245.136.790,00
Belanja Penyedia Kesehatan				27.552.000,00
Belanja Bantuan Sosial				2.838.585.496,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Penceramah				8.447.458.524,00
Belanja Jasa Tenaga Pendukung				71.466.004.895,00
Belanja Jasa Peserta Kegiatan				16.163.037.300,00
Belanja Premi Asuransi	41.669.911.224,00	30.507.042.985,00	73,21	30.859.569.714,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				4.789.631.628,00
Belanja Sewa Tanah	1.682.721.038,00	1.289.551.963,00	76,63	-
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.551.051.200,00	2.209.706.263,00	62,23	-
Belanja Sewa Sarana Mobilitas				175.843.000,00
Belanja Sewa Alat Berat				99.396.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				1.715.912.847,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.214.754.000,00	4.314.242.000,00	82,73	3.379.130.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	141.920.600,00	33.950.000,00	23,92	-
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	22.643.459.904,00	17.552.242.206,00	77,52	3.622.107.640,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.414.307.300,00	4.320.851.128,00	79,80	
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	60.000.000,00	57.000.000,00	95,00	128.250.000,00
Belanja Kursus. Pelatihan. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.168.152.000,00	1.854.950.764,00	85,55	1.546.130.000,00

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Pemeliharaan	39.986.870.874,00	36.408.345.721,00	91,05	6.675.850.679,00
Belanja Perjalanan Dinas				
Belanja Perjalanan Dinas	30.248.007.000,00	21.680.937.291,00	71,68	33.524.690.986,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak				
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	9.299.212.243,00	8.019.579.973,00	86,24	6.845.950.000
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga				6.439.664.750,00
Belanja Aset Tetap untuk Diserahkan				21.974.218.610,00
Belanja Barang dan Jasa BOS				
Belanja Barang Dana BOS	49.375.209.843,00	47.607.938.129,00	96,42	44.363.875.087,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD				
Belanja Barang dan Jasa BLUD	123.658.490.482,00	106.001.740.140,00	85,72	86.809.716.159,02
Jumlah	657.581.777.697,00	555.391.457.278,00	84,46	456.337.905.380,02

4.1.4.3. Belanja Bunga

Belanja Bunga adalah pembayaran bunga atas kewajiban penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Realisasi Belanja Bunga periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp308.874.114,00 atau 51,48% dari anggarannya sebesar Rp600.000.000,00 dan proporsi terhadap total Belanja Operasi sebesar 0,03% terdiri dari:

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	600.000.000	308.874.114,00	51,48	781.441.813,09
- JT s.d maret		161.298.946,00	-	217.334.735,00
- JT s.d September		147.575.168,00	-	201.412.775,00
- RSUD		-	-	362.694.303,09
Bunga Utang Pinjaman	600.000.000,00	308.874.114,00	51,48	781.441.813,09

Belanja Bunga adalah pembayaran bunga atas Pembayaran bunga atas pinjaman ke Pemerintah Pusat sebesar Rp308.874.114,00 terdiri dari jatuh tempo bulan Maret 2021

Pinjaman Daerah No. SLA-1208/DP3/2007 sebesar Rp161.298.946,00, jatuh tempo bulan September 2021 Pinjaman Daerah No. SLA-1208/DP3/2007 sebesar Rp147.575.168,00.

4.1.4.4. Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi pada periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Subsidi	507.144.000,00	410.574.000,00	80,96	-
Jumlah	507.144.000,00	410.574.000,00	80,96	-

4.1.4.5. Belanja Hibah

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada badan/lembaga/organisasi, dan kepada kelompok/anggota masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Belanja Hibah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.999.042.200,00 atau 90,67% dari anggarannya sebesar Rp20.953.726.450,00 dan proporsi terhadap total Belanja Operasi sebesar 1,56% terdiri dari:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	1.005.000.000,00	998.887.000,00	99,39	-
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	18.402.400.000,00	16.453.828.750,00	89,41	13.856.011.450,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.546.326.450,00	1.546.326.450,00	100	-
Jumlah	20.953.726.450,00	18.999.042.200,00	90,67	13.856.011.450,00

Rincian Penerima Hibah dapat dilihat di **lampiran 1**.

4.1.4.6. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.571.530.000,00 atau 70,84% dari anggarannya sebesar Rp3.630.024.338,00 dan proporsi terhadap total Belanja Operasi sebesar 0.21% terdiri dari:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.378.320.000,00	1.369.990.000,00	57,60	2.864.475.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.251.704.338,00	1.201.540.000,00	95,99	
Jumlah	3.630.024.338,00	2.571.530.000,00	70,84	2.864.475.000,00

Rincian Penerima Bantuan Sosial dapat dilihat di **lampiran 1**.

4.1.5. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan Aset Tetap Berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Realisasi Belanja Modal periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp247.060.564.786,00 atau mencapai 58,03% dari anggaran belanja tahun 2021 sebesar Rp425.752.276.510,00 terdiri dari:

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Tanah	8.724.964.740,00	1.924.413.918,00	22,06	24.237.283.327,00
Belanja Peralatan dan Mesin	52.272.761.644,00	40.367.666.054,00	77,23	36.574.433.534,00
Belanja Gedung dan Bangunan	228.846.712.178,00	92.323.402.639,00	40,34	19.768.621.392,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	132.999.455.842,00	109.597.606.795,00	82,40	13.598.490.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.908.382.106,00	2.847.475.380,00	97,91	3.065.785.548,00
Jumlah	425.752.276.510,00	247.060.564.786,00	58,03	97.244.613.801,00

4.1.6. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Realisasi Belanja Tidak Terduga pada tahun 2021 sebesar Rp12.793.426.443,00 atau mencapai 53,57% dari anggaran belanja tahun 2021 sebesar Rp23.880.085.890,00.

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Tak Terduga	23.880.085.890,00	12.793.426.443,00	53,57	74.352.158.320,00
Jumlah	23.880.085.890,00	12.793.426.443,00	53,57	74.352.158.320,00

Belanja tidak terduga sebesar Rp12.793.426.443,00 merupakan Belanja yang digunakan untuk percepatan penanganan Covid 19 sebesar Rp12.793.426.443,00 yang terdiri dari Penanganan Kesehatan sebesar Rp4.414.316.671,00 dan Belanja Bantuan dan Distribusinya Rp8.379.109.772,00. Rincian Penggunaan BTT untuk adalah sebagai berikut:

No	SKPD	Kesehatan (Rp)	Bantuan & Distribusi (Rp)	Total (Rp)
1	Dinas Kesehatan	342.970.546,00		342.970.546,00
2	RSU Daerah Cibabat	4.071.346.125,00		4.071.346.125,00
3	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman		125.522.000,00	125.522.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran		959.013.032,00	959.013.032,00

No	SKPD	Kesehatan (Rp)	Bantuan & Distribusi (Rp)	Total (Rp)
5	Dinas Sosial P2KBP3A		5.481.792.000,00	5.481.792.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		589.412.440,00	589.412.440,00
7	Dinas Perhubungan		365.031.000,00	365.031.000,00
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan Dan Perpustakaan		118.079.500,00	118.079.500,00
9	Kecamatan Cimahi Utara		206.322.800,00	206.322.800,00
10	Kecamatan Cimahi Tengah		286.796.700,00	286.796.700,00
11	Kecamatan Cimahi Selatan		247.140.300,00	247.140.300,00
	Total	4.414.316.671,00	8.379.109.772,00	12.793.426.443,00

4.1.7. Surplus/(Defisit)

Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran. Pada tahun 2021, dianggarkan terjadi defisit sebesar Rp268.742.412.341,00 sedangkan realisasinya mengalami Surplus sebesar Rp38.622.855.654,11.

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Surplus/(Defisit)	(268.742.412.341,00)	38.622.855.654,11	14,37	175.676.624.397,80

4.1.8. Pembiayaan

4.1.8.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp270.898.017.186,53 yang bersumber dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun lalu Rp270.898.017.186,53 atau 99,90% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp271.172.220.677,53. Di dalam penerimaan pembiayaan sebesar Rp270.898.017.186,53 terdapat koreksi penggunaan SiLPA Tahun-Tahun sebelumnya sebesar Rp274.203.491,00.

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Penggunaan SiLPA	271.172.220.677,53	270.898.017.186,53	99,90	121.693.751.477,73
Penerimaan Dana Talangan RSUD dari Bank Mandiri	-	-	-	8.548.192.400,00
Jumlah	271.172.220.677,53	270.898.017.186,53	99,90	130.241.943.877,73

4.1.8.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp855.508.220,00 atau 35,21% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.429.808.337,00.

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
Penyertaan Modal Pemda		-	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman	2.429.808.337,00	855.508.220,00	35,21	34.746.347.598,00
Jumlah	2.429.808.337,00	855.508.220,00	35,21	34.746.347.598,00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp855.508.220,00 yaitu dari pembayaran tagihan pokok atas pinjaman daerah sebesar Rp855.508.220,00.

4.1.9. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan, belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja (surplus/defisit) dengan penerimaan/pengeluaran pembiayaan (pembiayaan netto) selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA TA 2021 yaitu sebesar Rp308.665.364.620,64 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020(Rp)
Realisasi Pendapatan		
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	405.104.991.553,11	375.687.242.678,91
Pendapatan Transfer	1.053.096.467.719,00	1.029.897.477.655,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	61.934.101.231,00	52.411.739.566,00
Jumlah Pendapatan (a)	1.520.135.560.503,11	1.457.996.459.899,91
Realisasi Belanja		
Belanja Operasi	1.221.658.713.620,00	1.110.723.063.381,11
Belanja Modal	247.060.564.786,00	97.244.613.801,00
Belanja Tak Terduga	12.793.426.443,00	74.352.158.320,00
Jumlah Belanja (b)	1.481.512.704.849,00	1.282.319.835.502,11
Surplus / (Defisit) (I)	38.622.855.654,11	175.676.624.397,80
Realisasi Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan	270.898.017.186,53	130.241.943.877,73
Pengeluaran Pembiayaan	855.508.220,00	34.746.347.598,00
Pembiayaan Netto (II)	270.042.508.966,53	95.495.596.279,73
SiLPA Tahun 2021 (I) + (II)	308.665.364.620,64	271.172.220.677,53

Didalam Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp270,898,017,186,53 terdapat koreksi Penggunaan SiLPA Tahun-Tahun sebelumnya sebesar Rp274.203.491,00 yang terdiri dari lebih bayar PFK BPKAD Rp6.812.150,52 lebih bayar PFK Sekretariat Daerah Rp26.204.303,00 lebih bayar PFK Kelurahan Cibabat Cimahi Utara Rp98.606,00 dan lebih bayar PFK Dinas Pendidikan Rp6.050,00.

4.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2021 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020.

Ringkasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

	Tahun Anggaran 2021	Tahun Anggaran 2020
Saldo Anggaran Lebih Awal	271.172.220.677,53	121.693.751.477,73
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	270.898.017.186,53	121.693.751.477,73
Subtotal	274.203.491,00	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	308.665.364.620,64	271.172.220.677,53
Subtotal	308.939.558.111,64	271.172.220.677,53
Koreksi kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(274.203.491,00)	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	308.665.364.620,64	271.172.220.677,53

4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

4.3.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah saldo uang tunai dan simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD). Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kota Cimahi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Kas di Kas Daerah	261.726.825.185,51	252.983.054.384,92

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 tersebut terdiri dari:

No	No. Rek.	Bank	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	0230270000025	BJB	240.615.550.149,00	232.747.645.321,52
2	00091.01.30.000230.1	BTN	13.194.835.071,97	12.612.394.605,64
3	7233333551	BSM	7.303.169.762,23	6.995.449.928,22
4	7233333446	BSM	613.270.202,31	594.434.012,94
5	1300088005007	MANDIRI	-	33.130.516,60
Jumlah			261.726.825.185,51	252.983.054.384,92

Dari Kas di Kas Daerah tersebut dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- Kas di Kas Daerah pada Bank BJB merupakan rekening yang dikelola oleh BUD yang digunakan untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Saldo Kas Daerah pada Bank BJB adalah sebesar Rp240.615.550.149,00 . Di dalam Kas di Kas daerah tersebut terdapat koreksi sebesar 0,14 karena pembulatan Transaksi di Bank Jabar Banten;
- Kas di Kas Daerah pada Bank BTN sebesar Rp13.194.835,017,97 adalah rekening Giro Nomor : 0009101300002301 digunakan sebagai rekening penerimaan pajak;
- Kas di Kas Daerah pada Bank Syariah Mandiri sebesar Rp7.303.169.762,23 adalah saldo rekening Tabungan Mudharabah Nomor : 7233333551. Kas tersebut tidak

digunakan untuk operasional namun sebagai rekening penerimaan bunga dan pencairan deposito bulanan Pemerintah Kota Cimahi;

- d. Kas di Kas Daerah pada Bank Syariah Mandiri sebesar Rp613.270.202,31 adalah saldo rekening Giro Wadiah Nomor : 7233333446. Kas tersebut digunakan sebagai rekening penerimaan pajak;
- e. Pemerintah Kota Cimahi tidak mengeluarkan bilyet giro untuk memindahbukukan uang dari rekening Kas Daerah kepada rekening pihak yang menerima, tetapi menggunakan SP2D sebagai alat pembayaran;
- f. Di dalam Kas di Kas Daerah pada Bank BJB terdapat juga sisa Dana Transfer (Earmark) Per 31 Desember 2021 sebesar Rp28.007.688.436,00 yang terdiri dari :

1.	BOP PAUD	1.418.718.470
2.	BOP Kesetaraan	359.259.756
3	Tunjangan Profesi Guru	5.597.346.180
4	Tambahan Penghasilan Guru	966.200.000
5	BO Kesehatan Reguler	6.217.827.117
6	BO Kesehatan Tambahan	971.978.164
7	BOKB	986.920.000
8	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM	126.075.500
9	Administrasi Kependudukan	148.698.800
10	Dana Pelayanan Kepariwisata	13.710.200
11	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	94.130.500
11	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.800.000
12	DID	8.953.277.528
13	DAK Fisik Bidang Pendidikan	31.417.355
14	DAK Fisik Bidang Kesehatan	1.988.133.275
15	DAK Fisik Bidang Jalan	14.818.591
16	DAK Fisik Bidang Sanitasi	65.110.000
17	DAK Fisik Bidang Irigasi	42.267.000

4.3.2. Kas di RSUD Cibabat

Kas di RSUD Cibabat merupakan saldo kas di rekening RSUD Cibabat yang merupakan hasil dari kegiatan operasional RSUD dan dapat langsung dipergunakan untuk keperluan operasional RSUD Cibabat, dan Saldo Giro Rupiah IDR-Gov. Saldo Kas di RSUD Cibabat per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Kas di RSUD Cibabat	40.989.619.473,61	12.624.391.630,61

Saldo Kas di RSUD Cibabat yang berada pada rekening nomor 00230030000609 a.n. RSUD Cibabat pada Bank Jabar Banten berasal dari pendapatan operasional rumah sakit sebesar Rp40.989.619.473,61 dengan rincian sebagai berikut:

Penerimaan :

Pendapatan Operasional TA 2021	165.608.981.259,00
--------------------------------	--------------------

Jumlah (a)	165.608.981.259,00
-------------------	--------------------

Belanja :

TA 2021	137.243.753.416,00
---------	--------------------

Ambang Batas TA 2021	-
----------------------	---

Jumlah (b)	137.243.753.416,00
-------------------	--------------------

Sisa Kas (c=a-b)	28.365.227.843,00
-------------------------	--------------------------

Pembiayaan	-
-------------------	---

Saldo Tahun Lalu (d)	12.624.391.630,61
----------------------	-------------------

Total Kas di RSUD Cibabat TA 2021 (e=c+d)	40.989.619.473,61
--	--------------------------

4.3.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo seluruh kas tunai yang berada di bawah tanggungjawab bendahara pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Dinas Pendidikan	6.050,00	-
Dinas Komunikasi, Informasi, Kearsipan dan Perpustakaan	140.400,00	-
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	115.661.521,00	-
Sekretariat Daerah	26.204.303,00	-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.812.150,52	-
Kecamatan Cimahi Utara	98.606,00	-
Jumlah	148.923.030,52	-

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga sebesar Rp115.661.521,00 merupakan pengembalian dana hibah KONI yang dikembalikan di Tahun 2022. Sedangkan Dinas Komunikasi, Informasi, Kearsipan dan Perpustakaan terdapat saldo sebesar 140.400,00 yang merupakan pengembalian Tahun 2021 yang dikembalikan Tahun 2022. Selain itu, juga terdapat saldo atas lebih bayar PFK yang belum dikembalikan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp6.050,00, Sekretariat Daerah sebesar Rp26.204.303,00, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp6.812.150,52 dan Kecamatan Cimahi Utara sebesar Rp98.606,00.

4.3.4. Kas di Bendaharan Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo seluruh kas tunai yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan dan belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.044,00	-
Dinas Lingkungan Hidup	650.000,00	-
Jumlah	659.044,00	-

Saldo Kas Rp9.044,00 merupakan saldo bunga giro rekening dana bos yang tidak terauto debet oleh Bank BJB.

4.3.5. Kas di BLUD Air Minum

Kas di BLUD Air Minum merupakan saldo kas di rekening BLUD Air Minum yang merupakan hasil dari kegiatan operasional BLUD Air Minum dan dapat langsung dipergunakan untuk keperluan operasional BLUD Air Minum. Saldo Kas di BLUD Air Minum per 31 Desember 2021 adalah sebesar:

Penerimaan :

Pendapatan Operasional TA 2021	4.452.657.600,00
--------------------------------	------------------

Jumlah (a)	4.452.657.600,00
-------------------	-------------------------

Belanja :

TA 2021	3.787.176.145,00
---------	------------------

Jumlah (b)	3.787.176.145,00
-------------------	-------------------------

Sisa Kas (c=a-b)	665.481.455,00
-------------------------	-----------------------

Saldo Tahun Lalu (d)	195.990.640,00
----------------------	----------------

Total Kas di BLUD Air Minum TA 2021 (e=c+d)	861.472.095,00
--	-----------------------

4.3.6. Kas di Bendahara BLUD Puskesmas

Kas di Bendahara BLUD Puskesmas merupakan saldo kas di rekening FKTP (Puskesmas) Kota Cimahi pada Bank bjb yang berasal dari Badan Penyelenggara Jasa Kesehatan (BPJS) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Saldo kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Kas di Bendahara BLUD Puskesmas	3.174.447.354,00	2.573.771.153,00

No.	Nomor Rekening	BLUD Puskesmas	2021	2020
1	0059469843001	Bend Dana Kapitasi Cibeureum	328.239.378,00	258.468.761,00
2	0059470388001	Bend Dana Kapitasi Leuwigajah	92.173.325,00	142.618.793,00
3	0059474278001	Bend Dana Kapitasi Cigugur	256.566.295,00	283.181.378,00
4	0059475851001	Bend Dana Kapitasi Pasirkaliki	83.242.045,00	83.135.701,00
5	0059478494001	Bend Dana Kapitasi Cipageran	439.412.244,00	281.093.148,00

No.	Nomor Rekening	BLUD Puskesmas	2021	2020
6	0059478117001	Bend Dana Kapitasi Cimahi Tengah	359.767.797,00	196.875.180,00
7	0059478249001	Bend Dana Kapitasi Padasuka	422.289.259,00	216.368.098,00
8	0059479938001	Bend Dana Kapitasi Cimahi Utara	389.933.703,00	582.414.981,00
9	0059490974001	Bend Dana Kapitasi Cibeber	237.303.220,00	147.571.267,00
10	0059535862001	Bend Dana Kapitasi Melong Tengah	101.143.217,00	34.345.487,00
11	0059547607001	Bend Dana Kapitasi Citeureup	99.553.496,00	76.458.909,00
12	0059547879001	Bend Dana Kapitasi Cimahi Selatan	177.893.032,00	134.831.986,00
13	0059574868001	Bend Dana Kapitasi Melong Asih	186.930.343,00	136.407.464,00
Jumlah			3.174.447.354,00	2.573.771.153,00

4.3.7. Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan Sisa dari Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari APBN yang belum digunakan sampai dengan 31 Desember 2021.

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Kas Dana BOS	1.763.418.438,00	2.490.895.654,00
Rincian sebagai berikut :		
Pendapatan (a)		
Penerimaan Dana Bos TA 2021	55.161.824.000,00	52.270.900.000,00
Belanja (b)		
Pengeluaran Dana Bos TA 2021	55.889.301.216,00	51.021.575.394,00
Pengembalian Dana BOS		
Sisa Kas (c=a-b)	(727.477.216,00)	1.249.324.606,00
Pajak Yang belum Di setor (d)		
Pajak Yang Sudah Di setor (e)		
Saldo Tahun Lalu(f)	2.490.895.654,00	1.241.571.048,00
Total Kas Dana BOS TA 2021 (g=d+e+f)	1.763.418.438,00	2.490.895.654,00

4.3.8. Kas Lainnya

Kas Lainnya terdiri dari kas pada Rekening UPTD Rusunawa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kas pada Rekening UPTD Rusunawa penerimaannya berasal dari jaminan dan/atau bunga uang keluar atas pencairan penghuni yang telah keluar. Selain Kas pada Rekening UPTD Rusunawa, juga terdapat keterlambatan pembayaran pajak (PFK) Dana BOS Tahun 2021 dari 8 Sekolah Dasar Negeri.

No.	SOPD	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	542.857.960,00	519.795.486,00
2	Setoran PFK - Dana Bos	47.935.751,00	40.349.191,00
Jumlah		590.793.711,00	560.144.677,00

4.3.9. Piutang Pajak

Pajak merupakan hak Pemerintah Kota Cimahi yang diakui atas pajak daerah yang dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah diterbitkan dalam tahun berjalan tetapi belum dilunasi oleh Wajib Pajak (WP). Saldo piutang pajak per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Piutang Pajak	128.892.710.993,00	198.458.610.887,00

Piutang pajak daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp128.892.710.993,00 tersebut dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) yang telah dikeluarkan dalam tahun berjalan akan tetapi belum dilunasi oleh Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember 2021, terdiri dari:

No.	Jenis Pajak	2021	2020
1	Pajak Hotel	19.580.880,00	1.150.000,00
2	Pajak Restoran	40.929.897,00	11.260.236,00
3	Pajak Reklame	916.986.235,00	700.293.335,00
4	Pajak Hiburan dan Tontonan	-	90.000,00
2	Pajak Penerangan Jalan PLN	-	3.066.502.695,00
3	Pajak Parkir	433.000,00	856.200,00
3	Pajak Air Tanah	886.660.956,00	650.988.401,00,00
4	Pajak Bumi dan Bangunan	127.028.120.025,00	194.027.470.020,00
	Jumlah	128.892.710.993,00	198.458.610.887,00

Saldo piutang pajak sebesar Rp128.892.710.993,00 tersebut berasal dari mutasi piutang pajak selama tahun 2020 yang meliputi:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Piutang per 31 Desember 2021	198.458.610.887,00
2	Koreksi Penghapusan Piutang PBB sesuai SK Wali Kota 973/Kep.456-BAPPENDA/2021 tanggal 12 Maret 2021	(91.036.314.611,00)
3	Ketetapan dan Catatan Tunggal atas Pembayaran Piutang PBB yang dihapuskan atas Piutang sebelum Tahun 2021	865.007.026,00
4	Penambahan:	
3	Penetapan SKPD tahun 2021	200.497.210.383,00
5	Jumlah Penambahan	<u>200.497.210.383,00</u>
6	Pengurangan:	
7	Pembayaran tahun 2021	179.891.802.692,00
8	Jumlah Pengurangan (6 + 7)	<u>179.891.802.692,00</u>
9	Saldo Piutang per 31 Desember 2020 (9 = 1 + 4 – 8)	128.892.710.993,00

Rincian mutasi dapat dilihat pada **lampiran 2**.

Saldo piutang pajak tersebut belum termasuk potensi denda pajak yang belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), yaitu sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut :

Piutang	Potensi Denda Pajak per 31 Desember 2021 (Rp)
Pajak Reklame	251.490.093,00
Pajak Air Tanah	236.106.755,00
Pajak Bumi dan Bangunan	44.367.096.483,00
Jumlah	44.854.693.331,00

4.3.10. Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak merupakan taksiran nilai piutang pajak yang kemungkinan tidak dapat tertagih dalam periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2021 adalah:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak	46.745.285.110,18	135.641.054.045,82

Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak dilakukan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cimahi. Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2021 besar (Rp46.745.285.110,18) dengan rincian:

Piutang	Penyisihan Piutang Pajak 31 Desember 2021 (Rp)	Penyisihan Piutang Pajak 31 Desember 2020 (Rp)
Pajak Hotel	97.904,40	5.750,00
Pajak Restoran	204.649,49	56.301,18
Pajak Reklame	157.981.948,00	155.123.000,00
Pajak Hiburan dan Tontonan	-	450,00
Pajak Penerangan Jalan	-	15.332.513,48
Pajak Parkir	18.866,00	4.281,00
Pajak Air Tanah	206.535.379,83	194.201.253,22
Pajak Bumi dan Bangunan	46.380.446.362,47	135.276.330.496,95
Jumlah	46.745.285.110,18	135.641.054.045,82

Rincian mutasi dapat dilihat pada **lampiran 3**.

4.3.11. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan hak Pemerintah Kota Cimahi yang diakui atas retribusi daerah yang dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan dalam tahun berjalan tetapi belum dilunasi oleh Wajib Retribusi (WR). Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Piutang Retribusi	2.271.651.667,00	3.264.415.784,00

Piutang retribusi tersebut terdiri dari:

No.	Jenis Piutang	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang retribusi Ijin Gangguan/Keramaian (HO)	51.898.211,00	51.898.211,00
2	Piutang retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	105.001.074,00	593.626.830,00

No.	Jenis Piutang	2021 (Rp)	2020 (Rp)
3	Piutang retribusi Ijin Trayek	2.900.000,00	3.200.000,00
4	Piutang retribusi Kartu Pengawasan	1.140.000,00	1.140.000,00
5	Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (BITC)	86.411.700,00	36.199.500,00
6	Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)	1.992.752.682,00	1.247.172.932,00
7	Piutang Retribusi Air Minum	-	1.125.080.600,00
8	Piutang Retribusi UPTD Laboratorium Lingkungan	31.548.000,00	33.889.500,00
9	Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	-	172.208.211,00
Jumlah		2.271.651.667,00	Rp3.264.415.784,00

Rincian dapat dilihat pada **lampiran 4**.

Saldo piutang retribusi sebesar Rp2.271.651.667,00 tersebut berasal dari mutasi piutang retribusi selama tahun 2021 yang meliputi:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Piutang per 31 Desember 2020	3.264.415.784,00
2	Koreksi : Pemindahan Piutang Retribusi Air Minum menjadi Piutang Lainnya	(1.125.080.600,00)
3	Penambahan:	
4	Penetapan SKRD tahun 2021	5.934.100.109,00
5	Koreksi	-
6	Jumlah Penambahan	5.934.100.109,00
7	Pengurangan:	
8	Pembayaran tahun 2021	5.801.783.626,00
9	Penghapusan (Koreksi)	
10	Jumlah Pengurangan (7 + 8)	5.801.783.626,00
11	Saldo Piutang per 31 Desember 2021 (10 = 1 + 5 – 9)	2.271.651.667,00

Rincian mutasi sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi	Saldo Awal Per 31 Desember 2020	Koreksi Perpindahan Piutang air Minum	Penambahan Piutang Tahun 2021	Pengurangan Piutang Tahun 2021	Saldo Akhir Per 31 Desember 2021
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	593.626.830,00		1.063.948.484,00	1.552.574.240,00	105.001.074,00
2	Izin Gangguan Keramaian (HO/IG)	51.898.211,00		-	-	51.898.211,00
3	Izin Trayek (IT)	3.200.000,00		3.300.000,00	3.600.000,00	2.900.000,00
4	Izin Kartu Pengawasan	1.140.000,00		-	-	1.140.000,00
5	Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (BITC)	36.199.500,00		691.814.425,00	641.602.225,00	86.411.700,00
6	Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)	1.247.172.932,00		3.585.109.700,00	2.839.529.950,00	1.992.752.682,00
7	Piutang Retribusi Air Minum	1.125.080.600,00	(1.125.080.600,00)	-	-	-

No	Jenis Retribusi	Saldo Awal Per 31 Desember 2020	Koreksi Perpindahan Piutang air Minum	Penambahan Piutang Tahun 2021	Pengurangan Piutang Tahun 2021	Saldo Akhir Per 31 Desember 2021
8	Laboratorium Lingkungan	33.889.500,00		589.927.500,00	592.269.000,00	31.548.000,00
9	Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	172.208.211,00		-	172.208.211,00	-
	Jumlah	3.264.415.784,00	(1.125.080.600,00)	5.934.100.109,00	5.801.783.626,00	2.271.651.667,00

Pada Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah, terdapat potensi denda atas keterlambatan pembayaran sewa Rusunawa sebesar Rp. 19.803.725,00

4.3.12. Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi merupakan taksiran nilai Piutang Retribusi yang diperkirakan tidak dapat tertagih dalam periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi dilakukan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cimahi. Penyisihan Piutang Retribusi Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.510.951.900,38 dengan rincian:

Piutang	Penyisihan Piutang Retribusi 31 Desember 2021 (Rp)	Penyisihan Piutang Retribusi 31 Desember 2020 (Rp)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	102.404.149,00	140.680.640,05
Retribusi Izin Gangguan /Keramaian (IG)	51.898.211,00	51.898.211,00
Retribusi Izin Trayek(IT)	2.900.000,00	2.975.750,00
Kartu Pengawasan	1.140.000,00	1.140.000,00
Pemakaian Kekayaan Daerah (BITC)	35.289.205,88	4.667.580,00
Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)	1.303.245.519,50	889.689.164,20
Retribusi Air Minum	-	576.492.253,50
Laboratorium Lingkungan	14.074.815,00	7.043.967,50
Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	-	17.220.821,10
Jumlah	1.510.951.900,38	1.691.808.387,35

Rincian dapat dilihat pada **lampiran 4**.

4.3.13. Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat

Berdasarkan Saldo Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Piutang Bagi Hasil	-	27.370.729.034,00

4.3.14. Piutang Bagi Hasil Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Bagi Hasil Pemerintah Daerah Lainnya merupakan hak Pemerintah Kota Cimahi yang diakui atas bagi hasil daerah yang dicatat berdasarkan jumlah nilai definitif yang menjadi bagian Kota Cimahi dan telah ditetapkan dengan peraturan atau surat keputusan tetapi masih ada hak yang masih harus diterima sampai dengan akhir tahun anggaran. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/Kep.115-Bapenda/2022 atas kurang/Lebih Salur Bagi hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Per 31 Desember 2021 Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Saldo Piutang Bagi Hasil per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Piutang Bagi Hasil	9.794.305.571,00	6.877.800.265,00

No.	Jenis Bagi Hasil Pajak	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2.624.406.060,00	2.034.635.940,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.467.319.800,00	875.641.020,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.696.305.912,00	2.430.275.470,00
4	Pajak Air Permukaan	24.964.600,00	61.393.500,00
5	Pajak Rokok	2.981.309.199,00	1.475.854.335,00
Jumlah		9.794.305.571,00	6.877.800.265,00

4.3.15. Belanja Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka timbul karena pembayaran atas sewa/asuransi yang dilakukan pada tahun 2021 tetapi terdapat sisa periode/manfaat pada tahun 2020. Saldo biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Belanja Dibayar di Muka	4.576.692.589,29	10.378.639.377,91

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.576.692.589,29 tersebut merupakan biaya dibayar di muka atas sewa penyimpanan barang, sewa gedung/kantor/tempat, sewa rumah jabatan/rumah dinas, sewa lahan, asuransi gedung, asuransi kerugian, asuransi kendaraan bermotor, dan belanja pemeliharaan server komputer. Rincian Biaya Dibayar di Muka dapat dilihat pada **lampiran 5**.

4.3.16. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan saldo Tuntutan Ganti Rugi atas kasus kerugian keuangan daerah karena kelalaian pegawai dan kehilangan aset yang telah jatuh tempo sampai dengan tahun 2021. Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	217.551.668,00	217.551.668,00

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp217.551.668,00 tersebut berasal dari mutasi selama tahun 2021 yang meliputi:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Kerugian keuangan daerah	159.884.500,00	409.477.500,00
Kerugian kehilangan aset daerah	57.667.168,00	311.461.500,00
Kerugian -Kelebihan Pembayaran Ke Pihak Ketiga	-	1.421.357.111,35
Jumlah	217.551.668,00	2.142.296.111,35
Penerimaan pembayaran	-	1.737.463.456,00
Koreksi	-	187.280.987,35
Saldo Tuntutan Ganti Rugi	217.551.668,00	217.551.668,00
Saldo Tuntutan Ganti Rugi terdiri dari :		
Bagian lancar	217.551.668,00	217.551.668,00
Bagian jangka panjang		
Jumlah	217.551.668,00	217.551.668,00

Koreksi atas Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan penyesuaian saldo atas kesalahan pencatatan tahun 2018 dan telah disesuaikan dengan surat keterangan tanggung jawab mutlak.

Jangka waktu Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi yang telah terlewati sehingga nilai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Disisihkan yaitu sebesar Rp217.551.668,00

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	217.551.668,00	217.551.668,00

Rincian kasus tuntutan Ganti Rugi dapat dilihat pada **lampiran 6**.

4.3.17. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan saldo piutang atas hak Pemerintah Kota Cimahi yang bukan berasal dari pemungutan pajak daerah. Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Piutang Lainnya	9.567.340.661,47	5.426.999.986,32

Saldo piutang lainnya tersebut terdiri dari:

No	Jenis Piutang	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang Pelayanan Kesehatan RSU Cibabat	6.662.518.251,00	4.111.485.995,00
2	Piutang Ganti Rugi Pihak Ketiga RSU Cibabat	197.129.997,09	325.629.997,09
3	Piutang atas Pengelolaan Pasar Antri Baru	224.137.525,00	224.137.525,00
4	Piutang Atas Kontribusi Cimahi Mall	391.208.333,20	282.020.374,00
5	Piutang Atas Ganti Rugi Pihak Ketiga PUPR	396.455.379,55	483.726.095,23
6	Piutang Atas Ganti Rugi Pihak Ketiga Disdik	89.463.875,63	-
7	Piutang BLUD Air Minum	1.582.507.300,00	-

No	Jenis Piutang	2021 (Rp)	2020 (Rp)
8	Piutang BLUD Puskesmas	23.920.000,00	
	Jumlah	9.567.340.661,47	5.426.999.986,32

Dari rincian Piutang Lainnya tersebut dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- Piutang Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.662.518.251,00 merupakan hak penerimaan pembayaran dari perusahaan-perusahaan swasta dan lembaga-lembaga pemerintah seperti BPJS yang telah melakukan kerjasama dengan RSUD Cibabat terkait dengan penyediaan jasa kesehatan atas pelayanan kesehatan dari RSUD Cibabat (rincian dapat dilihat pada **lampiran 7a**).
- Piutang Ganti Rugi Pihak Ketiga RSUD Cibabat sebesar Rp197.129.997,09 merupakan ganti rugi pihak ketiga atas temuan tahun 2020 pada RSUD Cibabat yang harus dibayarkan ke kas daerah.
- Piutang atas Pengelolaan Pasar Antri Baru per 31 Desember 2021 sebesar Rp224.137.525,00 merupakan kekurangan setor atas kontribusi pengelolaan Pasar Antri Baru yang didasarkan atas perjanjian pengelolaan Pasar Antri Baru beserta fasilitas penunjangnya antara Pemerintah Kota Cimahi dengan PT Bumi Kencana Indah Nomor 180/09 Perj-/2004 dan telah mengalami perubahan melalui addendum pertama Nomor 180/18b-perj/2007 antara Pemerintah Kota Cimahi dengan PT Cimahi Persada terdiri atas :

Jenis Piutang	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Piutang pajak parkir	26.480.000,00	26.480.000,00
Piutang retribusi pelayanan parkir	183.509.525,00	183.509.525,00
Piutang retribusi sub terminal	14.148.000,00	14.148.000,00
Jumlah	224.137.525,00	224.137.525,00

- Piutang atas Kontribusi Cimahi Mall, merupakan kontribusi dari Cimahi Mall selama Januari – Desember 2021 sebesar Rp391.208.333,20 yang terdiri dari Piutang Pokok Rp302.552.832,00 dan Piutang denda Rp88.655.501,20.
- Piutang Ganti Rugi Pihak Ketiga DPUPR sebesar Rp396.455.379,55 merupakan ganti rugi pihak ketiga atas temuan tahun 2021 pada DPUPR yang harus dibayarkan ke kas daerah.
- Piutang Ganti Rugi Pihak Ketiga DISDIK sebesar Rp89.463.875,63 merupakan ganti rugi pihak ketiga atas temuan tahun 2021 pada DISDIK yang harus dibayarkan ke kas daerah.
- Piutang BLUD Air Minum sebesar Rp1.582.507.300,00 merupakan Piutang Dari BLUD Air Minum yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (rincian dapat dilihat pada **lampiran 7b**).
- Piutang BLUD Puskesmas sebesar Rp23.920.000,00 merupakan Piutang atas Pendapatan Non Kapitasi pada Puskesmas Cimahi Selatan Rp5.325.000,00 dan Puskesmas Melong Tengah Rp18.595.000,00.

4.3.18. Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya merupakan taksiran saldo piutang atas hak Pemerintah Kota Cimahi yang bukan berasal dari pemungutan pajak daerah yang diperkirakan tidak dapat tertagih. Saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Piutang Lainnya	Penyisihan Piutang Lainnya 31 Desember 2021 (Rp)	Penyisihan Piutang Lainnya 31 Desember 2020 (Rp)
Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat	671.030.309,52	131.783.689,75
Piutang Ganti Rugi Pihak Ketiga RSUD Cibabat	197.129.997,09	325.629.997,09
Piutang atas pengelolaan Pasar Antri Baru	224.137.525,00	224.137.525,00
Piutang Atas Kontribusi Cimahi Mall	302.552.832,00	258.470.811,00
Piutang Atas Ganti Rugi Pihak Ketiga DPUPR	1.982.276,89	2.418.630,48
Piutang Atas Ganti Rugi Pihak Ketiga DISDIK	447.319,38	
Piutang BLUD Air Minum	901.445.411,00	
Piutang BLUD Puskesmas	119.600,00	
Jumlah	2.298.845.270,88	942.440.653,32

Peraturan Walikota Cimahi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kota Cimahi mengatur bahwa penyisihan Piutang Lainnya dihitung berdasarkan progress dari keluarnya surat tagihan.

4.3.19. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Cimahi dan barang-barang, termasuk hewan ternak dan tanaman yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020(Rp)
Persediaan	32.019.657.874,93	38.927.924.338,32

Persediaan yang tercatat per 31 Desember 2021 sebesar Rp32.019.657.874,93 tersebut terdiri dari persediaan alat tulis kantor, barang cetakan, alat kebersihan, alat listrik, bahan makanan, obat-obatan, bahan laboratorium, bahan radiologi, bahan baku bangunan, alat KB, suku cadang dan bahan material. Saldo persediaan tersebut diakui sebesar biaya perolehan yang terakhir, kecuali untuk persediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan dan RSUD Cibabat telah disajikan dengan metode FIFO. Saldo persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) yang dilakukan pada setiap akhir Tahun Anggaran. Saldo persediaan sebesar per 31 Desember 2021 sebesar Rp32.019.657.874,93 tersebut berada pada:

No	SOPD	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	187.389.597,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	9.548.695.953,58	9.185.437.470,61

No	SOPD	2021 (Rp)	2020 (Rp)
3	Rsud Cibabat	11.721.606.703,80	15.755.632.819,71
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3.475.067.000,00	7.077.491.000,00
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	236.724.165,00	341.184.384,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.744.260,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	735.731.307,00	630.939.081,00
8	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	271.174.665,56	334.569.731,00
9	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00
10	Dinas Pangan Dan Pertanian	722.590.459,00	591.687.763,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	493.088.160,00	251.562.590,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.261.693.160,89	2.185.554.570,00
13	Dinas Perhubungan	2.687.119.484,10	1.919.657.180,00
14	Dinas Komunikasi. Informatika. Kearsipan Dan Perpustakaan	847.400,00	172.528.850,00
15	Dinas Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian	82.752.900,00	13.782.200,00
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	152.798.890,00	76.965.900,00
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	0,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.759.500,00	0,00
19	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	0,00
20	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	45.023.000,00	0,00
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	44.308.000,00
22	Sekretariat Daerah	331.766.639,00	332.691.800,00
23	Sekretariat DPRD	41.034.950,00	5.495.499,00
24	Inspektorat Kota	4.532.480,00	6.752.500,00
25	Kecamatan Cimahi Utara	0,00	0,00
26	Kecamatan Cimahi Tengah	0,00	0,00
27	Kecamatan Cimahi Selatan	0,00	0,00
28	Kantor Kesatuan Bangsa	517.200,00	1.683.000,00
	JUMLAH	32.019.657.874,93	38.927.924.338,32

Rincian dapat dilihat pada **lampiran 8**.

Rincian Persediaan Pemerintah Kota Cimahi berdasarkan jenis Persediaannya, sebagai berikut:

No	Persediaan	2021	2020
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	971.560.304,89	1.061.439.243,00
2	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.345.204.989,90	1.638.791.048,00
3	Persediaan Perangko, Materai dan Benda pos lainnya	5.850.000,00	1.089.000,00
4	Peralatan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.150.994.322,00	395.095.455,71
5	Peralatan Bahan Kebutuhan Medis	-	13.492.934.332,47

No	Persediaan	2021	2020
6	Persediaan Cinderamata	164.699.200,00	166.927.000,00
7	Persediaan Bahan baku bangunan	184.960.760,00	247.515.438,00
8	Persediaan bahan/bibit tanaman	72.808.794,00	-
9	Persediaan Bibit ternak	96.720.000,00	74.040.000,00
10	Persediaan Bahan obat-obatan	14.370.265.125,60	10.505.345.004,14
11	Persediaan Bahan kimia	5.697.930.807,48	273.505.116,00
12	Persediaan Bahan Makanan Pokok	157.695.444,40	109.966.806,00
13	Persediaan Bahan Pokok	74.545.356,00	76.435.114,50
14	Persediaan Barang Cetak	4.821.711.600,56	2.330.544.804,50
15	Persediaan Barang Yang diserahkan kepada Pihak Ketiga	1.904.711.170,10	8.554.295.976,00
	JUMLAH	32.019.657.874,93	38.927.924.338,32

Dalam persediaan bibit ternak, terdapat benih pemberian yang dibudidayakan. Hasil dari budidaya benih tersebut dicatat terpisah oleh Dinas Pangan dan Pertanian.

Dalam Persediaan Bahan Obat-obatan terdapat Barang Kadaluarsa yang ada pada Dinas kesehatan dan seluruh Puskesmas yang belum dikeluarkan dari Persediaan dikarenakan belum adanya Penghapusan sebesar Rp468.082.789,50.

Dalam Persediaan Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat terdapat Belanja Aset Tetap yang diserahkan dan Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat. Adapun Belanja Aset Tetap yang diserahkan antara lain Bangunan dan Gedung Rehabilitasi Rumah Dinas Kapolres, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kejari, Pembangunan Pujasera Lahan Parkir dan Taman pada Museum TNI, Pembangunan Penataan Interior Instansi Vertikal. Sedangkan Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat antara lain Rehabilitasi Bangunan Kodim, Rehabilitasi Bangunan Pusdikpom dan Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Kejari. Seluruh Persediaan tersebut belum dikeluarkan dari Persediaan karena belum adanya BAST Penyerahan Gedung dan Bangunan tersebut kepada Pihak Ke Tiga dengan Total nilai sebesar Rp3.475.067.000,00.

4.3.20. Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Dana Bergulir adalah dana yang akan disalurkan kepada kelompok pengusaha golongan ekonomi lemah dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat Kota Cimahi melalui penyediaan permodalan yang murah dan mudah. Jumlah bantuan yang diberikan bervariasi mulai Rp2.000.000,00 s.d. Rp20.000.000,00 per kelompok dengan jangka waktu maksimal pinjaman sebesar tiga tahun. Dana bergulir dikelola oleh Bagian Administrasi Perekonomian dengan membentuk sebuah Tim Dana Bergulir. Saldo dana bergulir per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Dana Bergulir	50.591.536,00	48.909.062,00

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2021 sebesar Rp50.591.536,00 merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu jumlah pokok awal dana bergulir ditambah dengan pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir dikurangi dengan dana bergulir di masyarakat yang diragukan akan tertagih. Berdasarkan Laporan Tim Pengelolaan

Pengawasan dan Monitoring Dana Bergulir dan laporan dari Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah. dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- a. Pokok awal dana bergulir seluruhnya adalah sebesar Rp1.125.000.000,00 dan telah disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat sebesar Rp1.087.500.000,00 yang disalurkan berdasarkan dua cara :
 - 1) Penyaluran dengan nilai Rp125.000.000,00 disalurkan kepada kelompok usaha. Pada Tahap I diberikan kepada 9 (sembilan) kelompok usaha dengan dengan nilai penyaluran sebesar Rp100.500.000,00 dengan nilai pengembalian (*revolving*) Tahap I sebesar Rp31.500.000,00. Sisa penyaluran dana Tahap I sebesar Rp24.500.000,00 dan pengembalian dari kelompok usaha sebesar Rp31.500.000,00 disalurkan kembali pada Tahap II kepada 4 (empat) kelompok usaha.
 - 2) Perjanjian Pengelolaan Program Pinjaman Modal Bagi Usaha Mikro antara Pemerintah Kota Cimahi dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Nomor: 180/35.Perj/2009.407/CMI.PERJ/2009 dengan nilai Rp1.000.000.000,00. Dana tersebut disalurkan kepada 13 (tiga belas) koperasi/Baitul Mal Watamwil (BMT) sebesar Rp575.000.000,00 dan usaha mikro sebesar Rp387.500.000,00 yang tersebar di 15 (lima belas) kelurahan di Pemerintah Kota Cimahi.
- b. Perkembangan pengelolaan Dana Bergulir sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Uraian	2021 (Rp)
Pokok dana bergulir	1.125.000.000,00
Penyaluran dana bergulir	(1.087.500.000,00)
Saldo dana bergulir	37.500.000,00
Pengembalian pokok pinjaman	772.544.112,00
Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	(768.908.592,00)
Pokok dana bergulir yang ada dalam Tim Dana Bergulir	41.135.520,00
Pendapatan bunga dan jasa giro	155.219.667,00
Penyetoran pendapatan ke kas daerah	(142.637.019,00)
Biaya administrasi	(3.126.632,00)
Jumlah	50.591.536,00

Terdapat penyetoran pokok sebesar Rp1.566.677,00 yang dicatat sebagai penerimaan kembali investasi yang terdiri dari:

No	Uraian	Tanggal	Nilai
1	Setoran An. Aban Sutisna	4-May-21	400.004,00
2	Setoran An. Eni Rohaeni	4-May-21	300.000,00
3	Setoran An. Sukandar	4-May-21	300.000,00
4	Setoran An. Ate Rahmat	30-Sep-21	200.000,00
5	Setoran An. Widaningsih	7-Oct-21	300.000,00
6	Setoran An. Nanang	7-Oct-21	16.673,00
7	Setoran An. Uwen Suwendi	24-Dec-21	50.000,00

No	Uraian	Tanggal	Nilai
	Jumlah Setoran Pokok Usaha Mikro		1.566.677,00
	Jumlah Setoran Pokok Koperasi		-
	Jumlah Setoran Pokok Usaha Mikro dan Koperasi		1.566.677,00
	Aban Sutisna	4-May-21	199.996,00
	Widaningsih	7-Oct-21	39.996,00
	Nanang	7-Oct-21	66.665,00
	Jumlah Setoran Bunga Pinjaman Usaha Mikro		306.657,00
	Jumlah Setoran Pokok dan Bunga Pinjaman		1.873.334,00

Saldo dana bergulir sebesar Rp50.591.536,00 seluruhnya berada pada rekening BJB nomor 0008291470001 atas nama Tim Pengelola Dana Bergulir.

- c. Sisa dana bergulir yang masih ada di masyarakat adalah sebesar Rp314.955.891,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Dana Bergulir yang disalurkan	1.087.500.000,00
Pengembalian pokok pinjaman s.d 2020	(770.977.433,00)
Sisa Dana bergulir di masyarakat per 31 Desember 2020	316.522.568,00
Pengembalian pokok pinjaman selama tahun 2021	(1.566.677,00)
Sisa dana bergulir di masyarakat per 31 Desember 2021	314.955.891,00

Seluruh sisa dana di masyarakat tersebut termasuk kategori macet sehingga keseluruhan nilai tersebut dilaporkan sebagai dana bergulir yang diragukan tertagih. Kemacetan tersebut dikarenakan:

- 1) Usaha yang dijalankan tidak dapat bersaing, pailit dan usaha tidak dilanjutkan lagi.
- 2) Penerima dana bergulir meninggal dunia atau pindah tempat tinggal dan alamat baru tidak dapat diketahui.

Terhadap dana yang masih berada di masyarakat tersebut, tetap dilakukan upaya penagihan dan sebagian dari penerima manfaat telah menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Pinjaman.

- d. Atas dasar kondisi tersebut, untuk nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah hanya dana yang ada pada rekening Tim Pengelola Dana Bergulir saja yaitu sebesar Rp50.591.536,00.

4.3.21. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan kepemilikan Pemerintah Kota Cimahi terhadap Badan Usaha Milik Pemerintah/Daerah yang merupakan investasi permanen atau investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Saldo penyertaan modal per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	68.493.992.363,50	68.660.344.186,50

Penyertaan modal tersebut terdiri dari:

No.	Uraian	2021(Rp)	2020 (Rp)
1	PT Bank BJB Tbk	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00
2	PD Jati Mandiri	42.493.992.363,50	42.660.344.186,50
Jumlah		68.493.992.363,50	68.660.344.186,50

Dari tabel penyertaan modal diatas dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- a. Pada tanggal 8 Juli 2010 Bank BJB mencatatkan saham perdananya (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan kepemilikan saham Pemerintah Kota Cimahi setelah IPO sebesar 1.07% dengan jumlah lembar saham 104.000.000. Penyertaan modal pada PT Bank BJB Tbk per 31 Desember 2017 sebesar Rp26.000.000.000,00 merupakan nilai berdasarkan metode biaya karena kepemilikan Pemerintah Kota Cimahi kurang dari 20%. Data realisasi penyertaan modal Pemerintah Kota Cimahi ke PT Bank BJB Tbk sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tahun	Nilai Penyertaan (Rp)	Saldo (Rp)
2002	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2003	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00
2004	5.000.000.000,00	11.000.000.000,00
2005	5.000.000.000,00	16.000.000.000,00
2006	2.500.000.000,00	18.500.000.000,00
2007	2.500.000.000,00	21.000.000.000,00
2008	2.500.000.000,00	23.500.000.000,00
2009	2.500.000.000,00	26.000.000.000,00

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank BJB, Pemerintah Kota Cimahi pada tanggal 24 Oktober 2019 menyertakan modal kepada Bank BJB dengan membeli 1.842.105 lembar saham dengan harga perlembar sebesar Rp1.900,00 senilai Rp3.499.999.500,-. Namun harga penutupan harga saham Bank Jabar di Bursa Efek Indonesia sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 tidak pernah mencapai angka minimal Rp1.900,00, maka sesuai legal opini Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dana setoran tersebut tidak akan diefektifkan dan disetorkan kembali ke Kas Daerah Kota Cimahi pada tanggal 27 Desember 2019.

- b. Penyertaan modal pada PD Jati Mandiri per 31 Desember 2020 sebesar Rp42.660.344.186,50 merupakan nilai berdasarkan metode ekuitas karena kepemilikan Pemerintah Kota Cimahi lebih dari 50%.

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cimahi ke PD Jati Mandiri sesuai PERDA No 11 Tahun 2006 Tanggal 9 Oktober 2006 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PD. Jati Mandiri adalah sebesar Rp51.351.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	TAHUN	PENYERTAAN MODAL (Rp)
1	2006	27.000.000.000,00

No	TAHUN	PENYERTAAN MODAL (Rp)
2	2007	15.000.000.000,00
3	2010	2.800.000.000,00
4	2011	4.000.000.000,00
5	2013	1.551.000.000,00
6	2014	1.000.000.000,00
JUMLAH		51.351.000.000,00

Sedangkan saldo rugi sampai dengan 2020 adalah sebesar Rp8.857.007.636,50 dengan rincian per tahunnya sebagai berikut :

No	Tahun	Nama	Jumlah Penyertaan Modal s.d. Tahun Berjalan (Rp)	Saldo Laba (Rugi) s.d. Tahun Berjalan (Rp)	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 4+5
1	2006	PD. Jati Mandiri	27.000.000.000,00	.	27.000.000.000,00
2	2007	PD. Jati Mandiri	42.000.000.000,00	(83.543.057,00)	41.916.456.943,00
3	2008	PD. Jati Mandiri	42.000.000.000,00	(303.940.227,75)	41.696.059.772,25
4	2009	PD. Jati Mandiri	42.000.000.000,00	5.848.661.350,15	47.848.661.350,15
5	2010	PD. Jati Mandiri	44.800.000.000,00	4.198.313.359,98	48.998.313.359,98
6	2011	PD. Jati Mandiri	48.800.000.000,00	1.825.475.045,52	50.625.475.045,52
7	2012	PD. Jati Mandiri	48.800.000.000,00	(741.246.025,00)	48.058.753.975,00
8	2013	PD. Jati Mandiri	50.351.000.000,00	(1.334.312.162,00)	49.016.687.838,00
9	2014	PD. Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(2.675.227.439,00)	48.675.772.561,00
10	2015	PD. Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(5.036.957.720,00)	46.314.042.280,00
11	2016	PD. Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(6.305.696.640,00)	45.045.303.360,00
12	2017	PD. Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(7.894.853.454,00)	43.456.146.546,00
13	2018	PD. Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(8.479.403.846,00)	42.871.596.154,00
14	2019	PD. Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(8.524.303.990,50)	42.826.696.009,50
15	2020	PD. Jati Mandiri	51.351.000.000,00	(8.690.655.813,50)	42.660.344.186,50
16	2021	PD. Jati mandiri	51.351.000.000,00	(8.857.007.636,50)	42.493.992.363,50

Saldo Penyertaan Modal pada PD Jati Mandiri tersebut didasarkan laporan keuangan PD Jati Mandiri *audited* dan *unaudited*.

Perlu disampaikan bahwa kondisi PD. Jati Mandiri Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) PD Jati Mandiri secara operasional telah berhenti disebabkan tidak memiliki modal usaha lagi akibat kerugian terus menerus.
- 2) Sesuai Keputusan Walikota Cimahi Nomor 821/Kep.336.Admrek/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Jati Mandiri Periode 2013-2017 disebutkan bahwa Direksi PD. Jati Mandiri selesai per tanggal 16 Agustus 2017.

- 3) Masa jabatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Jati Mandiri sesuai Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 821.27/Kep.276.Admrek/2013 tentang Pengangkatan Badan Pengawas pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri berakhir pada 22 Juli 2017.

Upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut Pemerintah Kota Cimahi melalui Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah dan Inspektorat telah berupaya :

- 1) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung yang telah berpengalaman untuk menemukan solusi penyelesaian masalah perusahaan daerah.
- 2) Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.
- 3) Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- 4) Melakukan upaya fasilitasi penyusunan kajian mengenai PD. Jati Mandiri ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi.
- 5) Melakukan Upaya penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Penarikan Penyertaan Modal pada PD. Jati Mandiri.
- 6) Mengajukan Permohonan untuk melakukan audit PD. Jati Mandiri ke BPKP Perwakilan Jawa Barat namun ditolak melalui Surat BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor S.4331/PW10/5/2018 tanggal 8 Desember 2017.
- 7) Melakukan permohonan untuk melakukan audit PD. Jati Mandiri ke KAP Koesbandiah. Beddy Samsi dan Setiasih namun ditolak karena sampai dengan Tahun 2017 PD. Jati Mandiri sampai dengan 2016 telah diaudit oleh KAP lain.
- 8) Mengeluarkan Surat Walikota Cimahi Nomor 539/5105/admrek tentang Penghentian Aktivitas dan Permohonan Dokumen Pengelolaan Perusahaan Daerah Jati Mandiri termasuk Laporan Keuangan PD. Jati Mandiri sebagai bahan audit.
- 9) Melakukan koordinasi kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengenai pengembalian aset PD. Jati Mandiri ke Kota Cimahi.
- 10) Melakukan pembahasan permasalahan hukum terkait PD. Jati Mandiri dengan Kejaksaan Negeri Kota Cimahi dan mengajukan permohonan untuk dibuatkan legal opinion dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, sehingga legal opinion tersebut akan dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kota Cimahi dalam menyelesaikan permasalahan PD. Jati Mandiri.
- 11) Melakukan Kajian terhadap Aspek Operasional, Aspek Keuangan dan Aspek Ketaatan terhadap Regulasi PD. Jati Mandiri oleh KAP Jojo Sunarjo dan Rekan.

Ringkasan Laporan Keuangan PD Jati Mandiri Tahun 2021 *unaudited* adalah sebagai berikut: (rincian selengkapnya pada **lampiran 9**)

Laporan Rugi Laba Tahun 2021	
Pendapatan	0,00
Belanja	(166.351.823,00)
Rugi Tahun 2021	(166.351.823,00)
Neraca Tahun 2021	
Aset	47.129.233.676,00
Utang	4.635.241.312,50
Ekuitas	42.493.992.363,50

Dalam Aset senilai Rp47.129.233.676,00 terdapat Tanah senilai Rp38.773.988.854,00 yang masih dalam sengketa perdata, dengan uraian sebagai berikut :

Perkara Tata Usaha Negara Terkait Sertifikat Tanah Cibeureum antara Awong Hidjaja (Direktur Utama PT. Adi Darma Bumi Indonesia) Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi, Perusahaan Daerah Jati Mandiri, Idris Ismail dkk

- 1) Perkara pada Tingkat Pertama No. 93/G/2011/PTUN-BDG, dimenangkan oleh Awong Hidjaja;
- 2) Perkara pada Tingkat Banding No. 134/B/2012/PT.TUN.JKT dimenangkan oleh PD. Jati Mandiri, Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi, Idris Ismail dkk;
- 3) Perkara pada Tingkat Kasasi Nomor 120 K/TUN/2013 dimenangkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi;
- 4) Perkara Pada Peninjauan Kembali Nomor 110 PK/TUN/2014 dimenangkan oleh Awong Hidjaja;
- 5) namun berdasarkan Penetapan Nomor: 05/Pdt.Eks/G/2009/PN.BB Jo. Nomor : 76/Pdt.G/2004 PN.BB Jo. Nomor: 372 /Pdt/2006/Pt.2006/PT.Bdg Jo. Nomor: 1686 K/ Pdt/2007. Tentang “NON EKSEKUTABEL ATAU TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN EKSEKUSI”. Maka Tanah tersebut kembali menjadi milik PD. Jati Mandiri di karenakan Peninjauan Kembali Nomor 110 PK/TUN/2014 yang dimenangkan oleh Awong Hidjaja itu sebatas membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi (sisi administrasi), bukan membatalkan kepemilikan karena hal tersebut bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

4.3.22. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kota Cimahi dan pelayanan masyarakat. Saldo aset Tetap milik Pemerintah Kota Cimahi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Aset Tetap	2021 (Rp.)	2020 (Rp.)
1	Tanah	1.056.705.806.799,00	1.054.785.789.081,00
2	Peralatan dan Mesin	694.191.726.346,98	653.697.490.905,54
3	Gedung dan Bangunan	772.624.864.228,52	745.821.693.568,20

No.	Jenis Aset Tetap	2021 (Rp.)	2020 (Rp.)
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	826.964.855.561,52	788.273.686.779,63
5	Aset Tetap Lainnya	70.405.620.977,47	67.891.291.041,47
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	211.996.377.038,36	51.926.798.918,36
7	Akumulasi Penyusutan	(1.231.876.277.638,95)	(1.119.661.893.807,38)
	Jumlah	2.401.012.973.312,90	2.242.734.856.486,82

Rincian aset tetap dapat dilihat pada **lampiran 10**. Atas posisi aset tetap per 31 Desember 2021 tersebut dapat dijelaskan hal-hal berikut:

a. Mutasi aset tetap pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2020 (Rp.)	Penambahan Tahun 2021 (Rp.)	Pengurangan Tahun 20201 (Rp.)	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp.)
Tanah	1.054.785.789.081,00	3.274.413.918,00	1.354.396.200,00	1.056.705.806.799,00
Peralatan dan Mesin	653.697.490.905,54	47.652.758.676,18	7.158.523.234,74	694.191.726.346,98
Gedung dan Bangunan	745.821.693.568,20	100.302.859.633,10	73.499.688.972,78	772.624.864.228,52
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	788.273.686.779,63	124.229.218.578,89	85.538.049.797,00	826.964.855.561,52
Aset Tetap Lainnya	67.891.291.041,47	2.929.648.936,00	415.319.000,00	70.405.620.977,47
Konstruksi Dalam Pengerjaan	51.926.798.918,36	160.069.578.120,00	-	211.996.377.038,36
JUMLAH	3.362.396.750.294,20	438.458.477.862,17	167.965.977.204,52	3.632.889.250.951,85

Dari tabel mutasi aset tetap di atas dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- 1) Penambahan aset tetap selama tahun 2021 sebesar Rp438.458.477.862,17 dapat diuraikan sebagai berikut;
 - a) Pengadaan yang berasal dari belanja modal sebesar Rp247.060.564.786,00 (termasuk Belanja BOS pada Dinas Pendidikan sebesar Rp8.281.363.087,00 (**Lampiran 11a**))
 - b) Reklas antar KIB sebesar Rp153.863.749.722,53
 - c) Reklas dari belanja Barang dan Jasa sebesar Rp8.003.504.379,00
 - d) Reklas dari belanja pemeliharaan Rp120.000.000,00
 - e) Reklas dari belanja persediaan Rp429.851.187,00
 - f) Mutasi antar SKPD sebesar Rp9.034.372.650,00
 - g) Hibah sebesar Rp14.818.856.612,00

- h) BTT sebesar Rp1.687.223.172,00
- i) Koreksi sebesar Rp3.440.355.353,64

2) Pengurangan aset tetap selama tahun 2021 sebesar Rp167.965.977.204,52 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Aset yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp1.304.306,910,99
- b) Reklas Antar KIB sebesar Rp153.863.749.722,53
- c) Reklas ke Barang dan Jasa sebesar Rp 66.016.000,00
- d) Reklas ke aset lainnya sebesar Rp865.579.350,00
- e) Reklas ke pemeliharaan sebesar Rp476.153.271,00
- f) Reklas ke persediaan sebesar Rp108.410.750,00
- g) Mutasi antar SKPD sebesar Rp9.034.372.650,00
- h) Mutasi ke Aset Lain-lain Rp273.842.350,00
- i) Rusak berat/Penghapusan sebesar Rp1.727.646.000,00
- j) Koreksi sebesar Rp245.900.000,00

Penambahan TA 2021	Belanja Modal + BOS (a)	Reklas Antar KIB (b)	Reklas dari Barang dan Jasa (c)	Reklas dari Belanja Pemeliharaan (d)	Reklas dari Belanja Persediaan (e)
Tanah	1.924.413.918,00	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	40.367.666.054,00	276.762.000,78	54.468.150,00	6.937.964,90	429.851.187,00
Gedung dan Bangunan	92.323.402.639,00	87.550.000,00	2.700.227.559,00	113.062.035,10	-
Jalan, irigasi & Jaringan	109.597.606.795,00	445.958.568,75	1.087.797.750,00	-	-
Aset Tetap Lainnya	2.847.475.380,00	82.173.556,00	-	-	-
KDP	-	152.971.305.597,00	4.161.010.920,00	-	-
Total	247.060.564.786,00	153.863.749.722,53	8.003.504.379,00	120.000.000,00	429.851.187

Mutasi Antar SKPD (f)	Hibah (g)	BTT (h)	Koreksi (i)	Penambahan (10=1+2+3+4+5+6+7+8+9)
1.350.000.000,00	-			3.274.413.918,00
3.490.058.250,00	1.910.854.147,00	613.067.172,00	503.093.750,50	47.652.758.676,18
4.004.461.400,00	-	1.074.156.000,00		100.302.859.633,10
189.853.000,00	12.908.002.465,00		0,14	124.229.218.578,89
-	-			2.929.648.936,00
-	-		2.937.261.603,00	160.069.578.120,00
9.034.372.650,00	14.818.856.612,00	1.687.223.172,00	3.440.355.353,64	438.458.477.862,17

Pengurangan TA 2021	Tidak Dikapitalisasi (a)	Reklas Antar KIB (b)	Reklas ke Barang dan Jasa (c)	Reklas ke Aset Lainnya (d)	Reklas ke Pemeliharaan (e)
Tanah	-	-	896.200,00	-	-
Peralatan dan Mesin	1.304.306.910,99	342.341.473,75	65.120.000,00	865.579.350,00	-
Gedung dan Bangunan	-	67.942.359.451,78	-	-	474.153.271,00
Jalan, irigasi & Jaringan	-	85.348.196.797,00	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	230.852.000,00	-	-	2.000.000,00
KDP	-	-	-	-	-
Total	1.304.306.910,99	153.863.749.722,53	66.016.200,00	865.579.350,00	476.153.271,00

Pengurangan TA 2021	Reklas ke Persediaan (f)	Mutasi Antar SKPD (g)	Mutasi Ke Aset Lain-lain (h)	Rusak Berat / Penghapusan (i)	Koreksi (j)	Pengurangan (11=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)
Tanah	3.500.000,00	1.350.000.000,00		-	-	1.354.396.200,00
Peralatan dan Mesin	66.910.750,00	3.490.058.250,00	137.233.000,00	641.073.500,00	245.900.000,00	7.158.523.234,74
Gedung dan Bangunan	38.000.000,00	4.004.461.400,00	136.609.350,00	904.105.500,00	-	73.499.688.972,78
Jalan, irigasi & Jaringan	-	189.853.000,00		-	-	85.538.049.797,00
Aset Tetap Lainnya	-	-		182.467.000,00	-	415.319.000,00
KDP	-	-		-	-	-
Total	108.410.750,00	9.034.372.650,00	273.842.350,00	1.727.646.000,00	245.900.000,00	167.965.977.204,52

Selain data-data tersebut diatas dalam penyajian aset tetap terdapat beberapa informasi yang perlu disampaikan sebagai berikut:

Dalam Aset Tetap Tanah, terdapat aset jalan yang masih belum jelas kepemilikannya namun masih tercatat di KIB sebesar Rp132.113.225.000,00. Aset Tetap Tanah (Aset jalan) ini sedang dilakukan proses klarifikasi terhadap pihak terkait (TNI, Jasa Marga dan pihak Provinsi Jawa Barat) untuk memperoleh kejelasan status kepemilikan aset tersebut. Adapun rinciannya disajikan pada **Lampiran 11b**. Selain itu dalam Gedung dan Bangunan terdapat koreksi reklas yang berasal dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.157.214.419,00 Adapun rinciannya disajikan pada **Lampiran 11c**.

4.3.23. Akumulasi Penyusutan

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2021 sebesar Rp1.231.876.277.638,95. Rincian akumulasi penyusutan per SOPD disajikan pada **lampiran 12**.

4.3.24. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Lainnya	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.348.345.000,00	3.348.345.000,00
Aset Tidak Berwujud	9.932.562.034,90	8.733.693.634,90
Akumulasi Amortisasi	(8.229.263.872,40)	(6.900.246.239,16)
Aset Tak Berwujud Netto	1.703.298.162,51	1.833.447.395,75
Aset Lain Lain	16.955.466.977,42	19.709.611.280,92
Jumlah	22.007.110.139,93	24.891.403.676,67

Atas posisi aset lainnya per 31 Desember 2021 tersebut dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.348.345.000,00 merupakan nilai estimasi harga perolehan atas tanah seluas +/- 8,575 m² yang diinvestasikan dengan cara kemitraan antara Pemerintah Kota Cimahi dengan PT.Bumi Kencana Indah untuk pembangunan Pusat Perdagangan Pasar Antri di Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah dengan perjanjian Nomor 180/07-Perj/2003 Tanggal 17 Juli 2003.
- Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.932.562.034,90 merupakan *software* yang terdiri dari :

SOPD	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Dinas Pendidikan	521.580.800,00	437.059.000,00
Dinas Kesehatan	172.730.000,00	172.730.000,00
RSUD Cibabat	392.194.000,00	392.194.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.117.395.100,00	931.469.000,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	275.132.000,00	275.132.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	65.000.000,00	65.000.000,00
Dinas sosial. Pengendalian penduduk. Dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	32.640.000,00	32.640.000,00
Dinas Tenaga Kerja	321.387.000,00	231.837.000,00
Dinas Pangan dan Pertanian	51.975.455,00	51.975.455,00
Dinas Lingkungan Hidup	86.680.000,00	86.680.000,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	263.974.250,00	263.974.250,00
Dinas Perhubungan	334.344.050,00	334.344.050,00
Dinas Komunikasi. Informatika. Kearsipan dan Kepustakaan	1.006.929.683,00	1.006.929.683,00
Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	498.426.500,00	354.266.500,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	787.192.900,00	333.224.000,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	34.650.000,00	34.650.000,00
BAPPEDA	204.694.646,90	169.989.646,90
BPKAD	473.787.000,00	473.787.000,00
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.627.768.900,00	1.494.216.800,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	378.260.500,00	378.260.500,00

SOPD	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Manusia Daerah		
Sekretariat Daerah	166.952.500,00	166.952.500,00
Sekretariat DPRD	698.221.000,00	698.221.000,00
Inspektorat	49.700.000,00	49.700.000,00
Kecamatan Cimahi Utara	71.193.750,00	71.193.750,00
Kecamatan Cimahi Tengah	173.664.500,00	148.672.500,00
Kecamatan Cimahi Selatan	78.595.000,00	78.595.000,00
Kantor Kesatuan Bangsa	47.492.500,00	
Jumlah	9.932.562.034,90	8.733.693.634,90

- c. Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.229.263.872,40 merupakan amortisasi aset tetap tak berwujud dari tahun perolehan hingga tahun 2021. Rincian Akumulasi Amortisasi disajikan pada **lampiran 13**.
- d. Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.955.466.977,42 terdiri dari :

SOPD	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Aset Tetap Rusak Berat	5.849.152.318,82	5.849.152.318,82
Piutang Retribusi Kadaluwarsa	212.739.385,00	212.739.385,00
Koreksi Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan	5.422.866.048,00	5.422.866.048,00
Peralatan dan Mesin tidak dalam penguasaan	1.294.404.425,60	4.048.548.729,10
Peralatan dan Mesin Diserahkan Kepada Masyarakat – DLH	4.176.304.800,00	4.176.304.800,00
Jumlah	16.955.466.977,42	19.709.611.280,92

Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.955.466.977,42 terdiri dari aset tetap rusak berat yang sudah tidak dapat digunakan lagi dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Cimahi sebesar Rp5.849.152.318,82 dan piutang retribusi yang telah kadaluwarsa pada tahun 2013 sebesar Rp 212.739.385,00. (rincian pada **lampiran 14**). Selain itu, terdapat koreksi Aset tetap Gedung dan bangunan yang dialihkan ke aset lain-lain dikarenakan terdapat Aset tetap Gedung dan Bangunan yang bukan milik Dinas Pendidikan sebesar Rp 4.984.326.048,00 namun masih tercatat dan terdapat penambahan aset tetap gedung dan Bangunan yang telah dikeluarkan dari KIB namun BAST belum ada sebesar Rp438.540.000,00 milik Dinas Pendidikan untuk SD IT Al Maqam dan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) barang yang diserahkan kepada masyarakat pada Aset Lain-lain sebesar Rp3.475.067.000.

Sampai dengan tahun 2013 izin yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) berjumlah 66 jenis. Berdasarkan UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 141 yang termasuk jenis retribusi perizinan tertentu adalah Izin Mendirikan Bangunan. Retribusi Izin Tempat Minuman Beralkohol. Retribusi Izin Gangguan (HO). Retribusi Izin Trayek. dan Retribusi Izin Usaha Perikanan sehingga KPPT Kota Cimahi hanya memungut tiga jenis retribusi yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Retribusi Izin Gangguan (HO). dan Retribusi Izin Trayek (IT). Pada Tahun 2005 sampai dengan 2009 sudah terbit beberapa izin retribusi namun belum dibayar oleh wajib retribusi, sehingga berdasarkan peraturan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pada Pasal 23, hak untuk melakukan penagihan menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi. Oleh karena itu,

KPPT telah melakukan verifikasi izin-izin retribusi yang masa tagihnya telah kadaluwarsa pada tahun 2013 sebesar Rp212.739.385,00 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis retribusi	2013 (Rp)
IMB	64.461.601,00
HO	30.926.150,00
IT	150.000,00
KP	405.000,00
IPPT	102.215.234,00
SIUP	2.650.000,00
TDP	1.510.000,00
SIUKP	525.000,00
SITU	426.400,00
TDG	120.000,00
SIUJK	100.000,00
IPKTK.SWSATA	300.000,00
SIPA.ANGK	750.000,00
IUA	750.000,00
IP	7.450.000,00
Jumlah	212.739.385,00

4.3.25. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	2020 (Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	2021 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	40.349.191,00	48.276.595,00	40.349.191,00	48.276.595,00
Bagian Lancar Utang Bunga Kepada Pemerintah Pusat	161.298.946,00	129.039.156,47	161.298.946,00	129.039.156,47
Utang Bunga Dana Talangan RSUD Cibabat	-			
Bagian Lancar Utang Kepada Pemerintah Pusat	855.508.220,00	855.508.220,00	855.508.220,00	855.508.220,00
Pendapatan Diterima Dimuka	-			
Utang Belanja	19.004.747.924,00	4.141.620.812,00	19.004.747.924,00	4.141.620.812,00
Utang Lain-lain	25.180.855.366,00	13.622.915.723,00	25.180.855.366,00	13.622.915.723,00
Jumlah	45.242.759.647,00	18.797.360.506,47	45.242.759.647,00	18.797.360.506,47

Atas saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 tersebut dapat dijelaskan hal-hal berikut:

- a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp.48.276.595,00 terdiri dari Utang PFK BOS SD pada Dinas Pendidikan sebesar Rp47.935.751,00 yang disajikan pada Kas Lainnya (setoran PFK Dana BOS) dan Utang PFK yang berasal dari Gaji dan Tunjangan ASN Pemerintah Kota Cimahi sebesar Rp340.844,00 yang telah keluar dari Rekening Kas Daerah namun berada pada rekening penampung pemotongan PFK atas nama bank bjb .
- b. Utang Bunga Kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi No.02/WPB.13/BD.02/2022 Tanggal 11 Januari 2022 sebesar 129.039.156,47 merupakan proporsi bunga berjalan yang akan jatuh tempo pada 20 Maret 2022.
- c. Bagian Lancar Utang kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 sebesar Rp855.508.220,00 merupakan kewajiban utang sesuai dengan naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Cimahi dengan Nomor SLA-1208/DP3/2007 tanggal 18 April 2007. Saldo Utang sebesar Rp855.508.220,00 tersebut merupakan bagian lancar utang kepada pemerintah pusat yang jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2022 sebesar Rp427.754.110,00 dan tanggal 20 September 2022 sebesar Rp 427.754.110,00.
- d. Utang Belanja Pemerintah Kota Cimahi per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.141.620.812,00 merupakan utang belanja pegawai dan barang jasa selama tahun 2021. Rincian utang belanja dapat dilihat pada **lampiran 15**.
- e. Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.622.915.723,00 merupakan saldo utang kepada pihak ketiga, terdiri dari:

Uraian	2020 (Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	2021 (Rp)
Utang atas biaya pemeliharaan dan pembangunan (retensi)	1.319.924.798,00	-	-	1.319.924.798,00
Utang atas pelayanan rujukan di rumah sakit	101.675.224,00	-	101.675.224,00	-
Utang RSUD Cibabat atas pembelian barang	23.028.546.738,00	11.380.509.815,00	23.028.546.738,00	11.380.509.815,00
Utang Dana Talangan RSUD Cibabat ke Bank Mandiri	-	-	-	-
Utang Kompensasi Jasa Pelayanan	189.828.800,00	70.342.150,00	189.828.800,00	70.342.150,00
Utang Kompensasi Dampak Negatif	42.989.320,00	309.281.000,00	42.989.320,00	309.281.000,00
Jaminan pada UPTD Rusunawa	497.890.486,00	213.615.303,00	168.647.829,00	542.857.960,00
Jumlah	25.180.855.366,00	11.973.748.268,00	23.531.687.911,00	13.622.915.723,00

Rincian utang atas biaya pemeliharaan dan pembangunan (retensi), utang RSUD Cibabat atas pembelian barang serta utang Kompensasi Jasa Pelayanan dan Kompensasi Dampak negatif dapat dilihat pada **lampiran 16, 17 dan 18**.

4.3.26. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang Pemerintah Kota Cimahi kepada Pemerintah Pusat untuk pembiayaan pembangunan Pasar Atas Baru Kota Cimahi. Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	2020 (Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	2021 (Rp)
Utang Kepada Pemerintah Pusat	3.422.032.878,70	-	855.508.220,00	2.566.524.658,70

Utang Pemerintah Kota Cimahi kepada Pemerintah Pusat tersebut berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1208/DP3/2007 tanggal 18 April 2007 dengan plafon pinjaman sebesar Rp14.086.072.432,00. Pada tanggal 19 April 2010, plafon pinjaman diubah menjadi Rp12.832.623.298,00 dengan Amandemen Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor AMA-369/SLA-1208/DSMI/2010. Sesuai dengan naskah perjanjian, pembayaran angsuran pertama mulai dibayarkan pada tanggal 20 Maret 2011 dan berakhir tanggal 20 September 2025.

4.3.27. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban, Saldo ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Ekuitas	2.916.024.217.594,05	2.711.528.785.611,89

Ekuitas dijelaskan lebih rinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Cimahi per 31 Desember 2021. (Rincian Dapat Dilihat pada **Lampiran 19**)

4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kota Cimahi yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban-LO dan surplus/defisit operasional yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Semua pendapatan-LO, beban-LO dan surplus/defisit operasional dianggarkan dan dicatat berdasarkan azas bruto.

1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan dicatat berdasarkan penerimaan bruto (azas bruto) sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran dan diakui dalam tahun anggaran berjalan dan pada akhir tahun anggaran.

Pendapatan-LO dalam tahun anggaran berjalan dicatat berdasarkan jumlah kas yang diterima. Pada akhir tahun anggaran, pendapatan yang diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sampai dengan akhir tahun anggaran bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas dicatat di Neraca sebagai penambahan Piutang dan Ekuitas Dana Lancar.

Pendapatan diakui setelah ada bukti setor ke Kas Daerah dan apabila sampai akhir tahun belum direalisasi ke Kas Daerah, maka dicatat di Neraca sebagai penambah Kas dan Ekuitas Dana Lancar. Pendapatan yang telah diterima untuk periode tahun anggaran selanjutnya dicatat di Neraca sebagai Pendapatan diterima dimuka.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya;
- b. Pendapatan Transfer yaitu Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi;
- c. Lain-lain Pendapatanyang Sah terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya.

Jumlah pendapatan-LO Pemerintah Kota Cimahi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.545.373.383.520,29. Jumlah tersebut didapat setelah dilakukan penyesuaian pada beberapa transaksi pendapatan yang berpengaruh terhadap neraca.

2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan semua pengeluaran kas yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Pengeluaran beban daerah terdiri dari:

- a. Beban Pegawai
- b. Beban Barang
- c. Beban Bunga
- d. Beban Subsidi
- e. Beban Hibah
- f. Beban Bantuan Sosial
- g. Beban Penyusutan Aset Tetap
- h. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
- i. Beban Penyisihan Piutang
- j. Beban Penyisihan Dana Bergulir
- k. Beban Lain-lain

Jumlah beban daerah Pemerintah Kota Cimahi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.330.843.106.922,38 jumlah tersebut didapat setelah dilakukan penyesuaian pada beberapa transaksi beban yang berpengaruh terhadap neraca.

Koreksi atas Pengeluaran Beban (penerimaan pengembalian beban) yang terjadi dalam Tahun Anggaran berjalan dicatat sebagai pengurangan beban. Apabila diterima pada Tahun Anggaran berikutnya, koreksi atas pengeluaran beban dicatat dalam lain-lain Pendapatan yang Sah.

4.4.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Cimahi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp433.164.813.348,49.

4.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp203.700.704.578,00 yang terdiri dari:

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
Pajak Hotel	301.848.846,00	423.815.698,00
Pajak Restoran	17.048.477.567,00	13.850.188.968,00
Pajak Hiburan	123.330.330,00	220.137.083,00
Pajak Reklame	2.679.178.300,00	2.813.213.850,00
Pajak Penerangan Jalan Umum	37.701.852.705,00	36.900.353.297,00
Pajak Parkir	937.097.932,00	646.077.204,00
Pajak Air Tanah	8.472.806.671,00	8.813.258.403,00
Pajak Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan	55.960.840.082,00	41.495.177.873,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	80.475.272.145,00	74.163.119.758,00
Jumlah	203.700.704.578,00	179.325.342.134,00

4.4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.171.916.379,00 yang terdiri dari:

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	4.644.854.020,00	5.625.659.206,00
Retribusi Jasa Usaha	5.387.268.125,00	7.935.642.168,00
Retribusi Perijinan Tertentu	2.139.794.234,00	4.277.694.324,00
Jumlah	12.171.916.379,00	17.838.995.698,00

Dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
Hasil Retribusi Daerah	12.171.916.379,00	17.838.995.698,00
Retribusi Jasa Umum	4.644.854.020,00	5.625.659.206,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	1.793.413.500,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.562.133.900,00	1.309.268.700,00
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	181.345.000,00	119.085.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	683.644.000,00	444.189.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	895.585.000,00	879.072.450,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	588.309.040,00	543.932.260,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	104.907.500,00	74.546.000,00
Retribusi Pengendalian Menara	259.404.580,00	200.776.696,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	157.970.000,00	97.035.000,00
Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	38.896.000,00	30.180.000,00
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	172.659.000,00	134.160.600,00
Retribusi Jasa Usaha	5.387.268.125,00	7.935.642.168,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.103.238.125,00	4.291.662.968,00
Retribusi Terminal	253.838.000,00	86.928.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	30.192.000,00	3.557.051.200,00
Retribusi Perizinan Tertentu	2.139.794.234,00	4.277.694.324,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.552.574.234,00	3.241.943.324,00
Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum	3.450.000,00	3.750.000,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	583.770.000,00	1.032.001.000,00

4.4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.956.960.000,00 yaitu:

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Perusahaan Daerah		,
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	9.956.960.000,00	9.778.080.000,00
Jumlah	9.956.960.000,00	9.778.080.000,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp9.956.960.000,00 tersebut merupakan bagian deviden atas laba tahun 2021 Pemerintah Kota Cimahi atas kepemilikan 1.07% saham atau sebanyak 104.000.000 lembar saham pada PT Bank BJB.

4.4.1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Pendapatan Asli Daerah Lainnya periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp207.335.232.391,49 yang terdiri dari:

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	1.052.983.328,00	1.719.377.182,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	337.911.430,00	
Penerimaan Jasa Giro	9.376.700.958,10	6.061.508.451,14
Pendapatan Bunga Lain. Lain	307.719.834,01	287.203.040,32
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.102.432.744,38	12.281.000,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	561.000,00	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	184.126.021,00	144.273.512,00
Pendapatan Denda Pajak	1.426.540.148,00	2.093.540.349,00
Pendapatan Denda Retribusi	23.470.807,00	43.239.321,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	49.593.947,00	
Pendapatan dari Pengembalian	315.613.979,00	678.651.795,00
Pendapatan Dari BLUD	191.128.150.715,00	134.007.063.962,45
Sumbangan Pihak Ketiga	-	344.627.748,00
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	16.041.653.850,00
Pendapatan Denda Lain-lain-LO		37.299.563,00
Dana Non Kapitasi		202.081.135,00
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan-LO	1.177.480,00	
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	28.250.000,00	
Jumlah	207.335.232.391,49	161.672.800.908,91

4.4.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer berupa Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya. dan Transfer dari Pemerintah Provinsi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.028.642.243.991,00.

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	743.905.839.987,00	788.330.045.490,00
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	52.247.274.000,00	97.730.028.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	232.489.130.004,00	119.792.475.687,00
Jumlah	1.028.642.243.991,00	1.005.852.549.177,00

4.4.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp743.905.839.987,00 yang terdiri dari :

4.4.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp51.986.941.479,00 yang terdiri dari :

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.740.049.507,00	4.762.204.516,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	6.039.776.294,00	39.066.170.560,00
DBH PPh Pasal 21	35.315.829.783,00	
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.891.285.895,00	4.743.183.600,00
Jumlah	51.986.941.479,00	48.571.558.676,00

4.4.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp29.733.151.567,00 yang terdiri dari :

Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	3.358.469.000,00	3.728.732.391,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	179.344.000,00	4.613.010.454,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Landrent	769.322.068,00	470.878.981,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	85.402.700,00	120.502.643,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000,00	1.330.780.150,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi	24.212.294.799,00	29.319.524.292,00
Jumlah	29.733.151.567,00	39.583.428.911,00

4.4.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp530.425.978,000,00 yaitu:

	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	530.425.978.000,00	539.717.972.000,00

4.4.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp131.759.768.941,00 yaitu:

	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
Dana Alokasi Khusus Fisik	31.966.257.254,00	45.170.237.820,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	99.793.511.687,00	115.286.848.083,00
Jumlah	131.759.768.941,00	160.457.085.903,00

4.4.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
DID	52.247.274.000,00	97.730.028.000,00

4.4.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

Transfer dari Pemerintah Provinsi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp232.489.130.004,00 yang terdiri dari:

4.4.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Transfer dari Pemerintah Provinsi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp126.781.787.043,00 yang terdiri dari:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	47.893.996.320,00	45.491.082.600,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22.789.873.830,00	18.447.005.220,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	29.736.362.390,00	28.134.133.580,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	178.901.700,00	177.013.500,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	26.182.652.803,00	27.543.240.787,00
Transfer Pemerintah Provinsi	126.781.787.043,00	119.792.475.687,00

4.4.2.3.2. Bantuan Keuangan Provinsi

Bantuan Keuangan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp105.707.342.961,00

	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	9.676.657.020,00	-
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	96.030.685.941,00	-
Jumlah	105.707.342.961,00	-

4.4.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp83.566.326.180,80 terdiri dari:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pendapatan Hibah	83.494.375.949,80	59.439.221.689,98
Pendapatan Dana Darurat	-	-
Pendapatan Lainnya	71.950.231,00	23.922.151.027,00
Jumlah	83.566.326.180,80	83.361.372.716,98

Adapun rincian pendapatan hibah adalah sebagai berikut :

No	SOPD	2021 (Rp)
Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah Pusat-LO		21.632.224.949,80
1	Dinas Kesehatan	6.356.416.321,00
2	RSUD Cibabat	1.913.159.147,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	344.259.500,00
4	Dinas Sosial	110.387.516,80
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	12.908.002.465,00
Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat - Bappenda		6.700.327.000,00
Pendapatan Hibah Dana BOS-LO - BPKAD		55.161.824.000,00
	JUMLAH	83.494.375.949,80

Pendapatan Lainnya sebesar Rp71.950.231,00 merupakan pengembalian atas sekolah dasar swasta yaitu SD Semesta Hati yang sudah tidak beroperasi lagi.

4.4.4 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan pengeluaran untuk membayar gaji, tunjangan dan honorarium pegawai Pemerintah Kota Cimahi selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Beban Pegawai pada APBD dianggarkan dalam klasifikasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Jumlah Beban Pegawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp626.341.641.494,00 yang terdiri dari:

Beban Pegawai	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Gaji Pokok dan Tunjangan	287.338.317.514,00	389.095.253.926,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	157.339.447.208,00	150.457.757.500,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	98.614.718.280,00	8.794.000.000,00
Gaji dan Tunjangan DPRD	33.629.360.044,00	9.812.600.000,00
Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	536.897.640,00	
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	605.520.000,00	
Biaya Insentif Pemungutan Pajak	-	829.207.008,00
Honorarium PNS	-	57.458.000,00
Honorarium Non PNS	-	2.845.950.000,00
Uang lembur	-	2.222.107.700,00
Jasa Medis	-	5.271.554.196,00
Beban Pegawai BLUD	48.277.380.808,00	61.156.411.196,00
Jasa Pelayanan	-	23.414.788.318,00
Beban Pegawai Dana BOS	-	565.665.000,00
Jumlah	626.341.641.494,00	654.522.752.844,00

4.4.5 Beban Barang

Beban Barang merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi untuk membeli barang dan jasa serta untuk membayar biaya perjalanan dinas dan pemeliharaan aset-aset Pemerintah Kota Cimahi selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Beban Barang dikelompokkan ke dalam Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas dimana dalam APBD dianggarkan sebagai Belanja Barang dan Jasa untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Jumlah Beban Barang periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp556.263.620.481,91 terdiri dari :

Beban Barang	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Beban Persediaan	147.997.945.138,29	174.752.300.288,94
Beban Jasa	336.911.501.029,62	263.219.286.073,75
Beban Pemeliharaan	46.128.442.345,00	14.290.438.232,00
Beban Perjalanan Dinas	25.225.731.969,00	36.159.340.024,00
Jumlah	556.263.620.481,91	488.421.364.618,69

4.4.5.1. Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi untuk membiayai persediaan yang telah digunakan selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, beban Persediaan dicatat sesuai dengan pemakaian persediaan yang telah terjadi.

Realisasi Beban Persediaan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp147.997.945.138,29 atau 26,61% dari Beban Barang yang terdiri dari :

Beban Persediaan	2021	2020
ATK	6.228.766.174,11	4.927.377.541,00
Alat Listrik dan elektronik	1.996.871.348,10	1.878.225.116,00
Perangko, materai dan benda pos lainnya	299.654.500,00	228.622.400,00
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.523.712.691,71	2.003.288.316,91
Bahan Kebutuhan Medis	2.011.635,00	15.795.151.044,98
Cindramata	1.206.546.300,00	589.178.500,00
Bahan baku bangunan	4.954.649.798,00	4.076.150.054,00
Bahan/bibit tanaman	629.225.496,00	508.625.200,00
Bibit ternak	27.320.000,00	46.810.000,00
Bahan obat-obatan	50.512.544.131,54	41.546.020.566,57
Bahan kimia	10.574.335.163,99	1.245.146.390,00
Bahan Pokok Natura	4.474.992.915,00	5.195.103.449,00
Bahan Makanan Pokok	2.551.079.893,10	2.538.780.294,48
Barang Cetakan	7.059.813.396,50	5.581.260.726,00
Barang Yang Akan di Berikan Kepada Pihak Ketiga	33.152.210.895,24	77.297.238.787,00
Beban Persediaan BOS	19.804.210.800,00	11.295.321.903,00
Jumlah	147.997.945.138,29	174.752.300.288,94

4.4.5.2. Beban Jasa

Beban Jasa merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi yang digunakan untuk membiayai belanja barang dan jasa habis pakai diluar persediaan. biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Beban Jasa periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp336.911.501.029,62 dengan proporsi terhadap Beban Barang sebesar 60,57% yang terdiri dari :

No	S O P D	Beban Jasa (Rp)
1	Dinas Pendidikan	44.426.279.349,50
2	Dinas Kesehatan	53.627.957.626,83
3	Rsud Cibabat	40.474.807.598,50
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.409.546.161,80
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	22.950.190.236,09
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.684.113.133,08
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.441.890.603,67
8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.941.019.182,00

No	S O P D	Beban Jasa (Rp)
9	Dinas Tenaga Kerja	3.276.278.796,00
10	Dinas Pangan dan Pertanian	2.111.884.027,50
11	Dinas Lingkungan Hidup	24.978.343.254,16
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.758.600.177,17
13	Dinas Perhubungan	14.397.526.453,09
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan	4.434.620.193,91
15	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian	11.159.280.373,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.610.581.375,50
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	3.954.446.945,17
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.130.363.855,00
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.821.427.808,17
20	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.841.500.224,50
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.143.340.510,33
22	Sekretariat Daerah	16.967.077.165,00
23	Sekretariat DPRD	9.977.677.199,16
24	Inspektorat Kota	1.002.165.166,66
25	Kecamatan Cimahi Utara	13.500.224.549,83
26	Kecamatan Cimahi Tengah	17.814.169.290,00
27	Kecamatan Cimahi Selatan	15.555.680.789,33
28	Kantor Kesatuan Bangsa	2.520.508.939,67
	JUMLAH	336.911.501.029,62

Rincian dapat dilihat pada **lampiran 20**

4.4.5.3. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi yang digunakan untuk pemeliharaan terhadap Aset Tetap yang tidak menambah nilai Aset Tetap itu sendiri selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp46.128.442.345,00 dengan proporsi terhadap Beban Barang sebesar 8,29% yang terdiri dari:

Beban Pemeliharaan	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Beban Pemeliharaan Tanah	2.856.000,00	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.021.785.180,00	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.908.951.041,00
Beban Jasa Service		953.048.802,00
Beban Pemeliharaan Alat Kesehatan		62.213.871,00
Beban Pemeliharaan Alat Uji		285.033.700,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.183.308.137,00	3.392.886.331,00
Beban Pemeliharaan Penampung Air/Reservoir		51.903.091,00

Beban Pemeliharaan	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Beban Pemeliharaan Tanah	2.856.000,00	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.021.785.180,00	
Beban Pemeliharaan Rumah Dinas		14.846.100,00
Beban Penggantian Suku Cadang	219.991.000,00	3.389.216.150,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO	23.715.152.275,00	
Beban Pemeliharaan Jalan		2.196.618.100,00
Beban Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		513.042.000,00
Beban Pemeliharaan Jaringan WAN/LAN		623.886.486,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.384.000,00	
Beban Pemeliharaan BOS	1.620.862.544,00	746.967.037,00
Beban Pemeliharaan BLUD	7.354.103.209,00	151.825.523,00
Jumlah	46.128.442.345,00	14.290.438.232,00

4.4.5.4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi yang digunakan untuk membiayai perjalanan dinas, pelatihan dan pendidikan, bimbingan teknis, kursus-kursus, seminar dan sosialisasi selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp25.225.731.969,00 dengan proporsi terhadap Beban Barang sebesar 4,53% yang terdiri dari:

Beban Perjalanan Dinas	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Beban Perjalanan dinas dalam daerah	685.347.000,00	620.295.000,00
Beban Perjalanan dinas luar daerah		32.690.267.846,00
Beban Perjalanan Dinas Tetap	20.854.005.291,00	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	141.585.000,00	
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri		214.128.140,00
Beban Kursus.kursus singkat/ Pelatihan	1.048.353.400,00	173.000.000,00
Beban Sosialisasi	367.464.364,00	
Beban Bimbingan Teknis	168.731.000,00	1.056.000.000,00
Beban Pendidikan dan Pelatihan	270.402.000,00	317.130.000,00
Beban Perjalanan Dinas BOS	1.089.346.150,00	1.061.699.038,00
Beban Perjalanan Dinas BLUD	600.497.764,00	26.820.000,00
Jumlah	25.225.731.969,00	36.159.340.024,00

4.4.6 Beban Bunga

Beban Bunga adalah pembayaran bunga atas kewajiban penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Beban Bunga periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp276.614.324,47 yang terdiri dari :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	276.614.324,47	458.243.473,20
Jumlah	276.614.324,47	458.243.473,20

4.4.7 Beban Subsidi

Beban Subsidi digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada badan/lembaga/organisasi dan kepada kelompok/anggota masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Beban Subsidi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp410.574.000,00 yang terdiri dari:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Beban Subsidi kepada BUMN	410.574.000,00	-
Jumlah	410.574.000,00	-

4.4.8 Beban Hibah

Beban Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada badan/lembaga/organisasi dan kepada kelompok/anggota masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Beban Hibah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.250.155.200,00 yang terdiri dari:

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Beban Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	18.250.155.200,00	13.856.011.450,00
Jumlah	18.250.155.200,00	13.856.011.450,00

4.4.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada organisasi sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.571.530.000,00 yang terdiri dari:

Beban Bantuan Sosial	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Beban Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	2.571.530.000,00	2.864.475.000,00
Jumlah	2.571.530.000,00	2.864.475.000,00

4.4.10 Beban Penyusutan Aset Tetap

Beban penyusutan adalah pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari suatu aset. Beban Penyusutan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap.

Perhitungan nilai beban penyusutan aset tetap Pemerintah Kota Cimahi menggunakan metode garis lurus.

Realisasi Beban Penyusutan Aset Tetap periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp122.398.887.198,70 dengan rincian sebagai berikut:

No	S O P D	Beban Penyusutan Aset Tetap (Rp)
1	Dinas Pendidikan	9.131.625.900,66
2	Dinas Kesehatan	4.902.788.768,71
3	RSUD Cibabat	39.270.687.570,62
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32.961.709.548,05
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.968.727.732,95
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	914.620.188,08
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	189.417.227,57
8	Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	399.290.334,14
9	Dinas Tenaga Kerja	110.175.821,43
10	Dinas Pangan dan Pertanian	670.339.945,73
11	Dinas Lingkungan Hidup	3.340.057.073,91
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	679.843.191,15
13	Dinas Perhubungan	7.569.397.553,51
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan	1.016.248.311,10
15	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian	4.450.033.917,10
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	542.740.641,83
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	231.269.151,83
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	255.122.883,51
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	714.197.787,18
20	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	220.701.419,99
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	208.806.246,43
22	Sekretariat Daerah	3.092.598.099,32
23	Sekretariat DPRD	1.858.081.343,61
24	Inspektorat Kota	290.736.706,16
25	Kecamatan Cimahi Utara	578.049.541,89
26	Kecamatan Cimahi Tengah	934.210.137,31
27	Kecamatan Cimahi Selatan	883.268.853,62
28	Kantor Kesatuan Bangsa	14.141.301,30
	JUMLAH	122.398.887.198,70

4.4.11 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 1.329.017.633,25 yang berasal dari Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud lainnya terdiri dari :

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Dinas Pendidikan	40.297.950,00	53.787.500,00
Dinas Kesehatan	9.492.500,00	34.132.500,00
RSUD Cibabat	33.061.000,00	36.498.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	246.337.775,00	199.856.250,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	43.874.875,00	45.593.625,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	16.250.000,00
BPBD	-	-
Dinas sosial. Pengendalian penduduk. Dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	7.500.000,00
Dinas Tenaga Kerja	80.346.750,00	57.959.250,00
Dinas Pangan dan Pertanian	2.000.000,00	4.668.750,00
Dinas Lingkungan Hidup	21.670.000,00	21.670.000,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	54.166.987,50	58.354.487,50
Dinas Perhubungan	-	12.349.200,00
Dinas Komunikasi. Informatika. Kearsipan dan Kepustakaan	46.622.420,75	203.049.170,75
Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	118.669.125,00	88.566.625,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	187.163.225,00	73.671.000,00
Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga	8.662.500,00	8.662.500,00
BAPPEDA	8.676.250,00	12.271.875,00
BPKAD	56.626.750,00	68.864.250,00
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	235.169.275,00	254.313.125,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	23.941.500,00	48.409.625,00
Sekretariat Daerah	4.496.250,00	28.985.000,00
Sekretariat DPRD	36.708.250,00	82.958.250,00
Inspektorat Kota	12.425.000,00	12.425.000,00
Kecamatan Cimahi Utara	-	12.449.000,00
Kecamatan Cimahi Tengah	31.904.875,00	35.543.125,00
Kecamatan Cimahi Selatan	9.831.250,00	19.648.750,00
Kesbang	11.873.125,00	-
Jumlah	1.329.017.633,25	Rp1.498.437.358,25

4.4.12 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan pengakuan piutang yang diperkirakan tidak dapat tertagih. Nilai beban penyisihan piutang sebesar Rp2.666.559.266,08 ditentukan dengan penggolongan kualitas pajak. Beban Penyisihan Piutang dibagi menjadi Beban Penyisihan Piutang Pajak, Beban Penyisihan Piutang Retribusi dan Beban Penyisihan Piutang lain-lain.

1. Beban Penyisihan Piutang Pajak

Beban Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2021 mengalami penambahan beban sebesar Rp1.304.519.442,83 yang terdiri dari:

Piutang	Penyisihan Piutang Pajak 31 Desember 2021 (Rp)	Penyisihan Piutang Pajak 31 Desember 2020 (Rp)	Koreksi Penyisihan Piutang Yang Dihapuskan	Pengurangan / Penambahan Beban Penyisihan Piutang Pajak 2021 (Rp)
Pajak Hotel	97.904,40	5.750,00		92.154,40
Pajak Restoran	204.649,49	56.301,18		148.348,31
Pajak Reklame	171.629.778,00	155.123.000,00		16.506.778,00
Pajak Parkir	18.866,00	4.281,00		14.585,00
Pajak Air Tanah	206.535.379,83	194.201.253,22		12.334.126,61
PBB	46.380.446.362,47	135.276.330.496,95	(90.171.307.585,01)	1.275.423.450,52
Jumlah	46.758.932.940,19	135.625.721.082,35	(90.171.307.585,01)	1.304.519.442,83

2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Beban Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 mengalami penambahan beban sebesar Rp451.208.828,68 yang terdiri dari :

Piutang	Penyisihan Piutang Retribusi 31 Desember 2021 (Rp)	Penyisihan Piutang Retribusi 31 Desember 2020 (Rp)	Pengurangan / Penambahan Beban Penyisihan Piutang Retribusi 2021 (Rp)
Laboratorium UPTD Dinas Lingkungan Hidup	14.074.815,00	7.043.967,50	7.043.967,50
Retribusi Rusunawa	1.303.245.519,50	889.689.164,20	413.556.355,30
Retribusi BITC	35.289.205,88	4.667.580,00	30.621.625,88
Jumlah	1.352.609.540,38	901.400.711,70	451.208.828,68

3. Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 mengalami penambahan beban sebesar Rp910.830.944,55 dengan rincian sebagai berikut :

Piutang	Penyisihan Piutang Lainnya 31 Desember 2021 (Rp)	Penyisihan Piutang Lainnya 31 Desember 2020 (Rp)	Pengurangan / Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lainnya 2021 (Rp)
Penyisihan Piutang Lainnya Klaim Rumah Sakit – BLUD RSUD	671.030.309,52	131.783.690,00	539.246.619,77
Penyisihan Piutang Lainnya – BLUD Air Minum	901.445.411,00	576.492.254,00	324.953.157,50
Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga - DPUPR	1.982.276,90	-	1.982.276,90
Sumbangan Pihak Ketiga – Cimahi Mall	302.552.832,00	258.470.811,00	44.082.021,00

Piutang	Penyisihan Piutang Lainnya 31 Desember 2021 (Rp)	Penyisihan Piutang Lainnya 31 Desember 2020 (Rp)	Pengurangan / Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lainnya 2021 (Rp)
Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga – Dinas Pendidikan	447.319,38		447.319,38
Penyisihan Piutang BLUD Puskesmas	119.600,00		119.600,00
Jumlah	1.877.577.748,80	966.746.754,25	910.830.944,55

Adapun rincian atas Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat sebesar Rp1.982.276,90 yaitu kelebihan atas pembayaran Paket Pekerjaan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Penataan Ruang MPP Tahap II, Dinas pendidikan sebesar Rp447.319,38 kelebihan atas pembayaran Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri.

4.4.13 Beban Lain-lain

Beban lain-lain merupakan beban operasional Kota Cimahi yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan beban penyisihan.

Beban Lain-lain periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp334.507.323,99 yang terdiri dari :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Beban Bahan Pembelajaran	-	389.459.650,00
Aset Tetap yang Nilainya dibawah Nilai Kapitalisasi	152.325.016,99	163.813.786,50
Reklas Persediaan	870.000,00	
Beban Lain-lain BLUD Puskesmas Dinkes	14.960.484,00	
Beban Penurunan Nilai Investasi	166.351.823,00	166.351.823,00
Jumlah	334.507.323,99	728.625.259,50

4.4.13. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Defisit dari kegiatan non operasional merupakan penghapusan Peralatan dan Mesin Rp5.130.797.753,00 terdiri dari :

No	S O P D	Defisit dari kegiatan non Operasional (Rp)
1	Dinas Pendidikan	276.510.000,00
2	Dinas Kesehatan	926.926.500,00
3	Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat	68.500.000,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	724.246.000,0
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	177.000.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja	459.021.370,00
7	Dinas Ketahanan Pangan	180.900.000,00

No	S O P D	Defisit dari kegiatan non Operasional (Rp)
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	199.063.793,00
9	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian	112.400.000,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	274.500.000,00
11	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	354.660.000,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	256.175.000,00
13	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	224.800.000,00
14	Badan Kepegawian dan Pengembangan SDM Daerah	112.400.000,00
15	Sekretariat Daerah	449.020.090,00
16	Inspektorat Kota	334.675.000,00
	JUMLAH	5.130.797.753,00

4.4.14. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa biasa seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Realisasi Beban Luar Biasa pada tahun 2021 sebesar Rp9.736.649.668,00 yang terdiri dari :

	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Belanja Tidak Terduga	9.736.649.668,00	10.612.007.886,38
Jumlah	9.736.649.668,00	10.612.007.886,38

4.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Arus Kas Pemerintah Kota Cimahi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp37.805.188.562,11. Jumlah tersebut diperoleh dari selisih lebih arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp284.630.437.112,11. Selisih kurang dari aktivitas investasi sebesar Rp246.007.581.458,00. Selisih kurang dari aktivitas pendanaan sebesar Rp855.508.220,00 dan selisih dari aktivitas transitoris sebesar Rp37.841.128,00. Apabila kenaikan arus kas tahun 2021 sebesar Rp37.805.188.562,11 ditambah dengan saldo awal kas 2021 sebesar Rp270.908.452.653,53 maka saldo kas per 31 Desember 2021 berjumlah Rp308.713.641.215,64.

Saldo akhir kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp308.713.641.215,64 terdiri dari saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp261.726.825.185,51, Saldo di kas di Bendahara pengeluaran Rp148.923.030,52, Saldo di Kas di Bendahara Penerimaan Rp659.044,00, Saldo Kas di RSUD sebesar Rp40.989.619.473,61, Kas di BLUD Air Minum Rp 861.472.095,00, Kas di Bendahara BLUD Puskesmas sebesar Rp3.174.447.354,00, Kas Lainnya 48.276.595,00 serta Kas Dana BOS sebesar Rp1.763.418.438,00

4.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp284.630.437.112,11 yang merupakan selisih antara Arus Masuk Kas sebesar Rp1.519.082.577.175,11 dengan Arus Keluar Kas sebesar Rp1.234.452.140.063,00

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi :		
Jumlah Arus Masuk Kas	1.519.082.577.175,11	1.456.277.082.717,91
Jumlah Arus Keluar Kas	1.234.452.140.063,00	1.185.075.221.701,11
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	284.630.437.112,11	271.201.861.016,80

4.5.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.519.082.577.175,11 terdiri dari :

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	179.891.802.692,00	158.937.237.899,00
Penerimaan Retribusi Daerah	11.548.482.640,00	15.243.650.522,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.956.960.000,00	9.778.080.000,00
Penerimaan Lain.lain PAD yang Sah	202.654.762.893,11	190.008.897.075,91
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	61.309.116.578,00	50.460.873.698,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	47.781.705.502,00	38.645.976.130,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	530.425.978.000,00	539.717.972.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	131.759.768.941,00	160.457.085.903,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	52.247.274.000,00	97.730.028.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	123.865.281.737,00	118.963.390.897,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		
Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat	105.707.342.961,00	23.922.151.027,00
Penerimaan Hibah	6.700.327.000,00	140.839.566,00
Dana BOS	55.161.824.000,00	52.270.900.000,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	71.950.231,00	
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.519.082.577.175,11	1.456.277.082.717,91

4.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.234.452.140.063,00 terdiri dari:

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pembayaran Pegawai	643.977.236.028,00	636.883.229.738,00
Pembayaran Barang	555.391.457.278,00	456.337.905.380,02
Pembayaran Bunga	308.874.114,00	781.441.813,09
Pembayaran Subsidi	410.574.000,00	
Pembayaran Hibah	18.999.042.200,00	13.856.011.450,00
Pembayaran Bantuan Sosial	2.571.530.000,00	2.864.475.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		
Pembayaran Tak Terduga	12.793.426.443,00	74.352.158.320,00

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		
Pembayaran Bagi Hasil Restribusi		
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.234.452.140.063,00	1.185.075.221.701,11

4.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar (246.007.581.458,00) yang merupakan selisih antara Arus Masuk Kas sebesar Rp1.052.983.328,00 dengan Arus Keluar Kas sebesar Rp 247.060.564.786,00

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi:		
Jumlah Arus Masuk Kas	1.052.983.328,00	1.719.377.182,00
Jumlah Arus Keluar Kas	247.060.564.786,00	97.244.613.801,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan	(246.007.581.458,00)	(95.525.236.619,00)

4.5.2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.052.983.328,00

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pencairan Dana Cadangan		
Penjualan atas Tanah		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		1.662.403.182,00
Penjualan atas Gedung dan bangunan	10.511.600,00	56.974.000,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	1.042.471.728,00	
Penjualan atas Aset Lainnya		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	1.052.983.328,00	1.719.377.182,00

4.5.2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cimahi untuk belanja modal selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp terdiri dari:

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan		
Perolehan Tanah	1.924.413.918,00	24.237.283.327,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	40.367.666.054,00	36.574.433.534,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	92.323.402.639,00	19.768.621.392,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	109.597.606.795,00	13.598.490.000,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.847.475.380,00	3.065.785.548,00
Perolehan Aset Lainnya		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	247.060.564.786,00	97.244.613.801,00

4.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp (855.508.220,00) yang merupakan selisih antara Arus Masuk Kas sebesar Rp0,00 dengan Arus Keluar Kas sebesar Rp855.508.220,00.

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan :		
Jumlah Arus Masuk Kas	-	8.548.192.400,00
Jumlah Arus Keluar Kas	855.508.220,00	34.746.347.598,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	(855.508.220,00)	26.198.155.198,00

4.5.3.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	-	8.548.192.400,00
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	8.548.192.400,00

4.5.3.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp855.508.220,00 terdiri dari:

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	855.508.220,00	855.508.220,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya		185.648.400,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		33.705.190.978,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	855.508.220,00	34.746.347.598,00

Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp855.508.220,00 terdiri dari pembayaran tagihan pokok atas pinjaman daerah sebesar Rp855.508.220,00.

4.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp37.841.128,00 yang merupakan selisih antara Arus Masuk Kas sebesar Rp94.401.906.222,00 dengan Arus Keluar Kas sebesar Rp94.364.065.094,00.

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris :		
Jumlah Arus Masuk Kas	94.401.906.222,00	85.776.323.087,00
Jumlah Arus Keluar Kas	94.364.065.094,00	86.040.091.111,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	37.841.128,00	(263.768.024,00)

4.5.4.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan perhitungan fihak ketiga (PFK) periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp94.401.906.222,00 terdiri dari :

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Belanja Tidak Langsung		
a. PPh 21	27.273.624.445,00	21.313.374.086,00
b. IWP	19.738.722.168,00	20.202.565.100,00
c. Taperum	-	264.661.000,00
d. Iuran Jaminan Kesehatan		-
e. Koreksi Kelebihan Pembayaran PPh 21		-
Belanja Langsung		
a. PPh 21	3.966.729.488,00	27.190.658.153,00
b. PPh 22	1.316.033.690,00	1.057.612.155,00
c. PPh 23	1.227.729.933,00	852.714.714,00
d. PPh 4	6.471.575.972,00	1.326.914.903,00
e. PPN	34.407.490.526,00	13.567.822.976,00
Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris	94.401.906.222,00	85.776.323.087,00

4.5.4.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran perhitungan fihak ketiga (PFK) periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp94.364.065.094,00 terdiri dari :

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Belanja Tidak Langsung		
a. PPh 21	27.248.119.167,00	21.592.902.566,00
b. IWP	19.733.972.878,00	20.214.272.635,00
c. Taperum	--	264.785.000,00
d. Iuran Jaminan Kesehatan	-	12.757.500,00
Belanja Langsung		
a. PPh 21	3.966.449.388,00	27.190.511.753,00
b. PPh 22	1.316.033.690,00	1.057.612.155,00
c. PPh 23	1.225.492.190,00	847.522.977,00
d. PPh 4	6.471.575.972,00	1.326.914.903,00
e. PPN	34.402.421.809,00	13.532.811.922,00
Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris	94.364.065.094,00	86.040.091.111,00

4.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari:

1. Ekuitas Awal
2. Surplus/Defisit LO
3. RK PPKD
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
5. Lain-lain (Perubahan Basis Akuntansi)
6. Pendapatan Yang Ditangguhkan
7. Ekuitas Akhir

Ekuitas Pemerintah Kota Cimahi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.916.024.217.594,05 atau naik 8% dari Ekuitas tahun sebelumnya, yaitu Rp2.711.528.785.611,89

4.6.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Cimahi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah per 31 Desember 2021. Nilai Ekuitas Awal diperoleh dari Neraca per 31 Desember 2021, yaitu :

	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Ekuitas Awal	2.711.528.785.611,89

4.6.2. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Saldo surplus/defisit LO diperoleh dari Laporan Operasional Pemerintah Kota Cimahi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, yaitu :

	1 Jan 2019 – 31 Des 2021 (Rp)
Surplus/Defisit LO	199.662.829.176,91

4.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koreksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Kesalahan sebesar Rp0,52 merupakan penyesuaian terhadap kelebihan penerimaan karena penutupan rekening Bank Mandiri sebesar Rp0,40 serta koreksi saldo awal Tahun 2021 di rekening kasda BJB sebesar Rp0,12 dikarenakan transaksi di BJB tidak bias mengakomodir nilai desimal.

- b. Koreksi Nilai Piutang

Koreksi Nilai Piutang merupakan penyisihan piutang sampai dengan Tahun 2021 karena perubahan kebijakan akuntansi.

	31 Desember 2021
Koreksi Nilai Piutang	(4.175.918.915,75)

- c. Koreksi Nilai Utang

Koreksi Nilai Utang merupakan koreksi atas nilai utang jangka pendek atas uang jaminan Rusunawa.

	31 Desember 2021
Koreksi Nilai Utang	(21.905.000,00)

- d. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan merupakan penyisihan Persediaan sampai dengan Tahun 2021 karena perubahan kebijakan akuntansi.

	31 Desember 2021
Koreksi Nilai Persediaan	(4.683.461,90)

e. Koreksi Nilai Aset Tetap

Koreksi terhadap Nilai Aset Tetap dilakukan karena adanya perpindahan aset tetap antar SKPD satu dengan SKPD lainnya, aset tetap dibawah nilai kapitalisasi dibawah tahun 2021 dan hibah aset tetap kepada masyarakat.

	31 Desember 2021
Koreksi Nilai Aset Tetap	(1.265.202.393,86)

f. Koreksi Nilai Aset Lainnya

Tidak ada koreksi terhadap Aset tetap lainnya sampai dengan 31 Desember 2021

	31 Desember 2021
Koreksi Nilai Aset Lain.lain	-

4.6.4. Lain-Lain (Perubahan Basis Akuntansi)

Lain-lain (Perubahan Basis Akuntansi) terdiri dari penyisihan piutang sebesar Rp84.553.855,62 yang terdiri dari :

SOPD	Jenis Penyisihan Atas Piutang	Nilai Penyisihan
Dinas Perhubungan	Retribusi Izin Usaha	Rp75.750,00
Diskominfoarpus	Retribusi Menara Telekomunikas	Rp17.220.821,10
DPMPTSP	Izin Mendirikan bangunan	Rp38.276.491,05
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pajak penerangan Jalan PLN	Rp15.332.513,48
	Pajak Hiburan	Rp450,00
	Pajak Reklame	Rp13.647.830,00
Jumlah		Rp84.553.855,62

Selain Penyisihan Piutang, terdapat juga penyesuaian atas Akumulasi Penyusutan sebesar Rp10.184.503.367,13, dan Akumulasi Amortisasi yaitu koreksi pada BAPPEDA sebesar Rp0,01.

4.6.5. Koreksi Utang PFK

Koreksi utang PFK sebesar Rp29.572.880,52 merupakan sisa utang PFK tahun 2021 yang mengoreksi Kas Daerah sebesar Rp3.207.435,00 dan kurang bayar PFK Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan yang dipungut Tahun 2021 sebesar Rp340.844,00. Koreksi utang PFK juga terdiri dari koreksi Lebih bayar atas PFK pada Dinas Pendidikan Rp6.050,00, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp6.812.150,52, Sekretariat Daerah Rp26.204.303,00 dan Kecamatan Cimahi Utara Rp98.606,00.

4.6.6. Keuntungan/Kerugian Investasi Pemerintah Daerah

Keuntungan/kerugian Investasi Pemerintah Daerah berasal dari keniakan investasi Pemerintah Daerah dari dana bergulir Pemerintah Kota Cimahi per 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.682.474,00

4.6.7. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Cimahi yang diperoleh dari Ekuitas Awal ditambah dengan Surplus/Defisit LO dan RK PPKD dikurangi/ditambah dengan koreksi-koreksi yang berasal dari dampak kumulatif, perubahan basis akuntansi dan pendapatan yang ditangguhkan. Nilai Ekuitas Akhir Pemerintah Kota Cimahi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2021
Ekuitas Akhir	2.916.024.217.594,05

Rincian disajikan di **Lampiran 19**.

BAB V

PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Profil Entitas

Dari hasil perjuangan yang cukup panjang, ditetapkanlah Undang-undang Nomor 9 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi. Secara formal Kota Cimahi diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001 oleh Menteri Dalam Negeri. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengandung paradigma baru dalam pemerintahan daerah dimana tujuan pembentukan daerah otonom adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, demokratisasi, pemberdayaan, keadilan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

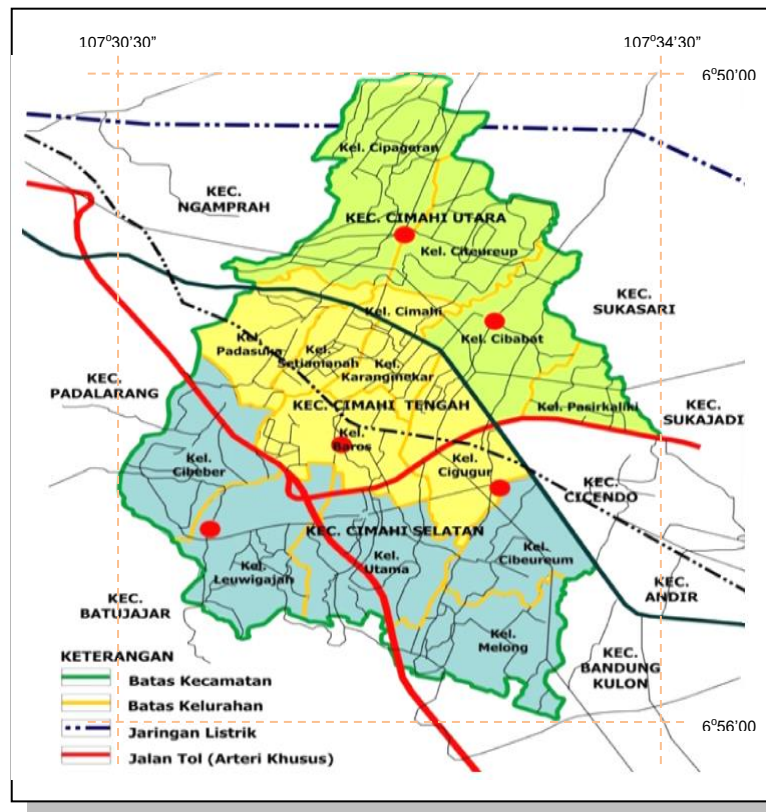
Kondisi geografis suatu wilayah secara langsung akan berpengaruh terhadap pembangunan di wilayah tersebut terutama dalam pengelolaan ruang untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di suatu wilayah. Pengembangan Kota Cimahi pun tidak terlepas dari kondisi geografis yang dimilikinya.

Secara geografis Kota Cimahi terletak pada cekungan Bandung, yang merupakan inti dari wilayah Bandung Raya. Kota Cimahi dilintasi oleh jalan nasional yang menghubungkan Kota Bandung – Kota Jakarta; Jalan Tol Cileunyi–Purwakarta–Padalarang, serta jalur kereta api Bandung – Jakarta. Dengan melihat kedudukan geografis yang sedemikian strategis dan terletak di persimpangan jalur kegiatan ekonomi regional dan sebagai kota inti Bandung Raya yang berdampingan dengan ibu kota Jawa Barat yang sangat dinamis. Kota Cimahi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sentra kegiatan pelayanan jasa yang berbasis pada sumber daya manusia, terutama industri, pendidikan, perdagangan dan pariwisata.

Luas Wilayah Kota Cimahi adalah 40,25 km² (4.025,73 ha) yang dibagi menjadi 3 (tiga) kecamatan dan 15 kelurahan, dengan letak wilayah administrasi berbatasan dengan Kota Bandung pada bagian timur dan selatan. Kabupaten Bandung pada bagian selatan, serta dengan Kabupaten Bandung Barat pada bagian utara, barat dan selatan.

Luas wilayah Kecamatan Cimahi Utara 13,31 km² dibagi menjadi 4 kelurahan yaitu Kelurahan Pasirkaliki 3,23 km², Kelurahan Cibabat 2,87 km², Kelurahan Citeureup 1,27 km², dan Kelurahan Cipageran 5,94 km². Kemudian untuk Kecamatan Cimahi Tengah memiliki luas wilayah 10,11 km² dibagi menjadi 6 Kelurahan yaitu Kelurahan Baros 2,25 km², Kelurahan Cigugur tengah 2,35 km², Kelurahan Karang Mekar 1,31 km², Kelurahan Setiamanah 1,38 km², Kelurahan Padasuka 1,98 km², dan Kelurahan Cimahi 0,84 km². Dan Kecamatan Cimahi Selatan memiliki luas wilayah 16,83 km² dibagi menjadi 5 kelurahan yaitu Kelurahan Utama 3,13 km². Kelurahan Leuwigajah 2,64 km². Kelurahan Cibeber 3,33 km². Kelurahan Cibeureum 3,93 km² dan Kelurahan Melong 3,8 km².

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kota Cimahi



Meskipun secara geografis letak Kota Cimahi menguntungkan. namun terdapat beberapa kendala dalam pengembangan ruang. sebagai berikut :

1. Sebagian wilayah Kota Cimahi ($\pm 20\%$ luas wilayah) menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2000. termasuk ke dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Pelabuhan Udara Husein Sastranegara. Kawasan Kota terkena bahaya kecelakaan dan pada daerah horisontal dalam dikembangkan maksimal ketinggian bangunan yang terbatas.
2. Peruntukan lahan Wilayah Bandung Utara berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa sebagian besar luas Kota Cimahi. yaitu 1.446,59 ha ($\pm 36\%$ dari luas Kota Cimahi) termasuk ke dalam Kawasan Bandung Utara. Pemanfaatan ruang pada daerah yang termasuk dalam KBU ini sangat terbatas dengan tujuan mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang di KBU untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan serta untuk mewujudkan peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora dan fauna.
3. Fungsi lindung. Garis Sempadan Sungai (GSS), jalan tol dan jalur kereta api. Selain menguntungkan Kota Cimahi juga menjadi hambatan dalam pengembangan kota, yang menjadikan Kota Cimahi menjadi tersegmentasi.

Kendala-kendala tersebut tidak menjadikan Kota Cimahi menjadi stagnan namun

kendala tersebut justru menjadi tantangan bagi pemerintah kota dalam pengembangan dan pembangunan kota sehingga pengembangan dan pembangunan Kota Cimahi menjadi sangat dinamis dan selalu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang ada.

5.2 Perangkat Daerah Penyusun Laporan Keuangan 2021

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Cimahi melakukan perubahan satuan kerja perangkat daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi yang dijabarkan melalui :

1. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
2. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cimahi;
3. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Kota Cimahi;
4. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Cimahi;
5. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Cimahi;
6. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kota Cimahi;
7. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Cimahi;

Sehingga berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas Satuan Kerja Perangkat Daerah penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi adalah:

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021
1	DINAS PENDIDIKAN
2	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	DINAS KESEHATAN
4	RSUD CIBABAT
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
8	DINAS PERHUBUNGAN

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
11	DINAS TENAGA KERJA
12	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
13	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16	KANTOR KESATUAN BANGSA
17	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
18	PPKD
19	SEKRETARIAT DAERAH
20	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
21	SEKRETARIAT DPRD
22	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
23	INSPEKTORAT
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
25	KECAMATAN CIMAHI UTARA
26	KECAMATAN CIMAHI TENGAH
27	KECAMATAN CIMAHI SELATAN
28	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
29	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KERASIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Tipologi dan urusan pemerintahan daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah dengan tipe B yang melaksanakan tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRD dengan tipe B yang melaksanakan tugas pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- c. Inspektorat dengan tipe B yang melaksanakan tugas pengawas penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Dinas meliputi :
 - 1) Dinas Pendidikan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
 - 2) Dinas Kesehatan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;

- 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe B yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub kebakaran;
- 6) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 7) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta perindustrian;
- 8) Dinas Perhubungan dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan perhubungan;
- 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 10) Dinas Tenaga Kerja dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan tenaga kerja dan transmigrasi;
- 11) Dinas Pangan dan Pertanian dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pangan, pertanian dan perikanan;
- 12) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumber daya mineral;
- 14) Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan kehutanan;
- 15) Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, persandian, statistik, kearsipan dan perpustakaan;

e. Badan meliputi :

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- 3) Badan Pengelola Pendapatan Daerah dengan tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

f. Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Cimahi Utara dengan tipe A, meliputi :
 - a) Kelurahan Cipageran;
 - b) Kelurahan Citeureup;
 - c) Kelurahan Cibabat;
 - d) Kelurahan Pasirkaliki;
2. Kecamatan Cimahi Tengah dengan tipe A, meliputi:
 - a) Kelurahan Padasuka;
 - b) Kelurahan Setiamanah;
 - c) Kelurahan Karangmekar;
 - d) Kelurahan Baros;
 - e) Kelurahan Cimahi;
 - f) Kelurahan Cigugur Tengah;
3. Kecamatan Cimahi Selatan dengan tipe A, meliputi:
 - a) Kelurahan Cibeureum;
 - b) Kelurahan Cibeber;
 - c) Kelurahan Leuwigajah;
 - d) Kelurahan Utama;
 - e) Kelurahan Melong;

5.3 Hubungan Dengan DPRD dan BPK. serta Forkopimda

5.3.1 Hubungan dengan DPRD

Hubungan dengan DPRD merujuk pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah dan di dalam pelaksanaannya sesuai dengan fungsi Pemerintah serta fungsi DPRD sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hubungan antara Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan DPRD berjalan secara dinamis sesuai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, serta dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengajukan rancangan perda, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, serta tugas dan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Hubungan ini terlihat diantaranya dalam penyusunan rencana anggaran (KUA. PPAS. RAPBD dan APBD) maupun dalam pansus-pansus menghasilkan perda. Selain itu, secara berkala ada forum kebersamaan eksekutif-legislatif mendengarkan pencerahan dari narasumber yang relevan (sosial/politik/ekonomi/hukum).

5.3.2 Hubungan dengan BPK

Hubungan dengan BPK mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. sampai saat ini telah berjalan dengan baik.

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Cimahi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terkait masih adanya catatan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Kota Cimahi dan Pemerintah Daerah Kota Cimahi berkomitmen untuk terus memperbaiki kekurangan yang ada dengan harapan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Cimahi pada tahun mendatang tetap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

5.3.3 Hubungan dengan Forkopimda

Hubungan dengan Forkopimda terjalin sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing seperti dengan Unsur Pimpinan DPRD, unsur Kepolisian, unsur Kejaksaan dan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah. Harmonisasi yang telah terjalin diwujudkan dalam Program Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Pengamanan Daerah serta Koordinasi pada setiap event sosial dan kemasyarakatan.

5.4 Pengaruh Stakeholder (pemegang kepentingan) : DPRD

Pengaruh *stakeholder* DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan cukup kuat. baik dalam proses penganggaran maupun inisiatif penyusunan produk legislatif/perda. Pengaruh DPRD dalam penyelenggaraan program kegiatan Pemerintah Daerah Kota Cimahi diwujudkan melalui tugas dan fungsi yang dimiliki oleh DPRD yaitu fungsi legislasi untuk membuat peraturan daerah, fungsi anggaran untuk menetapkan APBD dan fungsi pengawasan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

5.5 Dampak dari Lingkungan Entitas Terhadap Risiko Bidang Kerja dan Laporan Keuangan

Dampak lingkungan entitas terhadap risiko bidang kerja dan laporan keuangan dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor:

1. Lingkungan internal;

Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi bidang pendidikan ekonomi khususnya akuntansi.

2. Lingkungan eksternal :

- a. Kenyamanan lingkungan kerja yang belum optimal;
- b. Kesempatan memperoleh pendidikan dan latihan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan khususnya akuntansi dan laporan keuangan;

- c. Pendidikan dan latihan yang diberikan terlalu singkat.

5.6 Alamat Kantor

No	Nama	Alamat	Telepon	Faximile	Keterangan
1	Kepala Daerah	Jl.Rd.Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Cimahi 40513	022- 6654016	6654274 Psw 125	MelaluiSanditel
2	SekretariatDewan/DPRD	Jl.Hj.Julaeha Kartasasmita	022- 6633315	6633315	Langsung
3	Inspektorat Kota	Jl. TTUC Jl. Pesantren, Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40513	022- 6630330	6654274 Psw 125	Langsung
4	Sekretariat Daerah	Jl.Rd.Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Cimahi 40513	022- 6654274	5554274	Langsung
5	BPKAD	Jl.Rd.Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Cimahi 40513	022- 6654274 Psw 117/132	6654274 Psw 125	MelaluiSanditel

BAB VI

PENUTUP

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah Daerah Kota Cimahi menyusun laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dapat dipahami dan untuk menghindari kesalahpahaman pengguna dalam membaca laporan keuangan maka diperlukan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisikan informasi, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan tujuan, sasaran dan target sebagaimana yang telah ditetapkan, pada pelaksanaannya ditentukan oleh penerimaan, semangat, komitmen dan dukungan semua pihak baik dari jajaran eksekutif, legislatif serta masyarakat umum.

Keberhasilan pelaksanaan suatu rencana kerja akan sangat bergantung pada beberapa aspek yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal. Demikian pula optimalisasi pelaksanaan program pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi akan lebih optimal apabila sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang menunjang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Upaya untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan keuangan harus dilakukan dalam rangka mempertahankan perolehan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun agar dapat menjelaskan secara lengkap pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BELANJA HIBAH PEMERINTAH KOTA CIMAHY TAHUN 2021

NO.	JENIS	SPP		SPM		SP2D		KEPERLUAN	NILAI
		NO SPP	TGL SPP	NOSPM	TGL SPM	NO SP2D	TGL SP2D		
1	LS	090/SPP.LS.HIBAH/KONI/III/2021	31/03/2021	090/SPM.LS.HIBAH/KONI/III/2021	31/03/2021	0812/SP2D/IV/2021	05/04/2021	Belanja Hibah Uang Kepada KONI Kota Cimahi	3.575.000.000,00
2	LS	091/SPP.LS.HIBAH/KNPI/III/2021	31/03/2021	091/SPM.LS.HIBAH	31/03/2021	0813/SP2D/IV/2021	05/04/2021	Belanja Hibah Uang KNPI Kota Cimahi	175.000.000,00
3	LS	0146/SPP/HIBAH/NPCI I/V/2021	24/05/2021	0146/SPM/HIBAH/NPCI/V/2021	24/05/2021	1218/SP2D/V/2021	25/05/2021	BELANJA HIBAH UANG KEPADA NPCI KOTA CIMAHY TAHUN 2021	100.000.000,00
4	LS	0145/SPP/LS.HIBAH/2.22.02.2.01.02/V/2021	24/05/2021	0145/SPM/LS.HIBAH/2.22.02.2.01.02/V/2021	24/05/2021	1219/SP2D/V/2021	27/05/2021	Berita Acara Penyerahan Dana Hibah Kepada Dewan Kebudayaan Kota Cimahi Tahun 2021	100.000.000,00
5	LS	0214/SPP-HIBAH-PRAMUKA/VII/2021	05/07/2021	0214/SPM-HIBAH-PRAMUKA/VII/2021	05/07/2021	1509/SP2D/VII/2021	06/07/2021	Hibah Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Cimahi Tahun 2021	400.000.000,00
6	LS	00034/SPP-LS/8.01.0.00.0.00.01./B02/2021	09/07/2021	00034/SPM-LS/8.01.0.00.0.00.01./B02/2021	09/07/2021	1545/SP2D/VII/2021	09/07/2021	Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2021 (Partai Gerindra)	216.269.109,00
7	LS	00035/SPP-LS/8.01.0.00.0.00.01./B02/2021	09/07/2021	00035/SPM-LS/8.01.0.00.0.00.01./B02/2021	09/07/2021	1546/SP2D/VII/2021	09/07/2021	Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2021 (Partai Demokrat)	179.984.457,00
8	LS	00036/SPP-LS/8.01.0.00.0.00.01./B02/2021	09/07/2021	00036/SPM-LS/8.01.0.00.0.00.01./B02/2021	09/07/2021	1549/SP2D/VII/2021	09/07/2021	Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2021 (Partai Golkar)	168.535.917,00
9	LS	00037/SPP-LS/8.01.0.00.0.00.01./B02/2021	09/07/2021	00037/SPM-LS/8.01.0.00.0.00.01./B02/2021	09/07/2021	1548/SP2D/VII/2021	09/07/2021	Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2021 (Partai Nasdem)	126.057.708,00
10	LS	00038/SPP-LS/8.01.0.00.0.00.01./B02/2021	09/07/2021	00038/SPM-LS/8.01.0.00.0.00.01./B02/2021	09/07/2021	1544/SP2D/VII/2021	09/07/2021	Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2021 (Partai Keadilan Sejahtera)	278.220.150,00
11	LS	00039/SPP-LS/8.01.0.00.0.00.01./B02/2021	09/07/2021	00039/SPM-LS/8.01.0.00.0.00.01./B02/2021	09/07/2021	1547/SP2D/VII/2021	09/07/2021	Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2021 (Partai Kebangkitan Bangsa)	116.630.712,00
12	LS	00042/SPP-LS/8.01.0.00.0.00.01./B02/2021	03/08/2021	00042/SPM-LS/8.01.0.00.0.00.01./B02/2021	03/08/2021	1716/SP2D/VIII/2021	04/08/2021	Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2021 (Partai Hati Nurani Rakyat)	56.577.447,00
13	LS	00044/SPP-LS/8.01.0.00.0.00.01./B02/2021	10/08/2021	00044/SPM-LS/8.01.0.00.0.00.01./B02/2021	10/08/2021	1771/SP2D/VIII/2021	10/08/2021	Hibah BNN Kota Cimahi TA 2021	250.000.000,00
14	LS	0261/SPP-PO/HIBAHKONI/VIII/2021	09/08/2021	0261/SPM-PO/HIBAHKONI/VIII/2021	09/08/2021	1745/SP2D/VIII/2021	10/08/2021	Belanja Hibah Uang Kepada KONI Kota Cimahi	3.575.000.000,00
15	LS	076/SPP/LS-BOP PAUD/PPD/VIII/2021	06/08/2021	076/SPM/LS-BOP PAUD/PPD/VIII/2021	06/08/2021	1741/SP2D/VIII/2021	10/08/2021	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, Sumber Dana DAK Non Fisik BOP PAUD	2.520.600.000,00
16	LS	077/SPP/LS-BOP KESETARAAN/PPD/VIII/2021	06/08/2021	077/SPM/LS-BOP KESETARAAN/PPD/VIII/2021	06/08/2021	1742/SP2D/VIII/2021	10/08/2021	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Sumber Dana DAK Non Fisik BOP Kesetaraan	1.402.800.000,00
17	LS	0271/SPP-PO/HIBAHNPCI/VIII/2021	18/08/2021	0271/SPP-PO/HIBAHNPCI/VIII/2021	18/08/2021	1852/SP2D/VIII/2021	23/08/2021	BELANJA HIBAH UANG KEPADA NPCI KOTA CIMAHY TAHUN 2021	100.000.000,00
18	LS	0325/SPP.LS.HIBAH/KNPI/IX/2021	20/09/2021	0325/SPM.LS.HIBAH/KNPI/IX/2021	20/09/2021	2106/SP2D/IX/2021	24/09/2021	Belanja Hibah uang DPD KNPI Kota Cimahi Tahun 2021 Tahap II	175.000.000,00
19	LS	00052/SPP-LS/8.01.0.00.0.00.01./B02/2021	27/09/2021	00052/SPM-LS/8.01.0.00.0.00.01./B02/2021	27/09/2021	2134/SP2D/IX/2021	29/09/2021	Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2021 Kepada DPC PPP KOTA CIMAHY	110.401.056,00
20	LS	00055/SPP-LS/1.06.2.14.2.08.06./2021	28/09/2021	00055/SPM-LS/1.06.2.14.2.08.06./2021	28/09/2021	2136/SP2D/IX/2021	29/09/2021	BA Penyerahan Dana Hibah ke DPC PPDI Kota Cimahi Tahun 2021	50.000.000,00
21	LS	00056/SPP-LS/1.06.2.14.2.08.06./2021	28/09/2021	00056/SPM-LS/1.06.2.14.2.08.06./2021	28/09/2021	2135/SP2D/IX/2021	29/09/2021	BA Penyerahan Dana Hibah Ke Karang Taruna Kota Cimahi Tahun 2021	250.000.000,00
22	LS	0103/SPP/LS/02.13/X/2021	04/10/2021	0103/SPM/LS/02.13/X/2021	04/10/2021	2208/SP2D/X/2021	04/10/2021	PEMBAYARAN DANA HIBAH (UANG) KEPADA PMI KOTA CIMAHY	500.000.000,00
23	LS	0339/SPP/HIBAH/DKK C/X/DISBUPARPORA/2021	04/10/2021	0339/SPM/HIBAH/DKK C/X/DISBUPARPORA/2021	04/10/2021	2246/SP2D/X/2021	07/10/2021	Belanja Hibah Uang kepada DKKC Tahap 2	100.000.000,00
24	LS	00061/SPP-LS/8.01.0.00.0.00.01./B02/2021	10/11/2021	00061/SPM-LS/8.01.0.00.0.00.01./B02/2021	10/11/2021	2594/SP2D/XI/2021	10/11/2021	Bantuan Keuangan Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan Kota Cimahi TA 2021	219.450.978,00
25	LS	140/SPP/BOP/PPD/DISDIK/2021	22/11/2021	140/SPM/BOP/PPD/DISDIK/2021	22/11/2021	2834/SP2D/XI/2021	25/11/2021	Pencairan Dana BOP PAUD Tahap 2	2.333.700.000,00
26	LS	141/SPP/BOP Dikmas/PPD/DISDIK/2021	22/11/2021	141/SPM/BOP Dikmas/PPD/DISDIK/2021	22/11/2021	2833/SP2D/XI/2021	25/11/2021	Pencairan Dana BOP Dikmas Tahap 2	1.141.700.000,00
27	LS	00066/SPP-LS/8.01.0.00.0.00.01./B02/2021	01/12/2021	00066/SPM-LS/8.01.0.00.0.00.01./B02/2021	01/12/2021	2971/SP2D/XII/2021	02/12/2021	Bantuan Keuangan Partai Politik (Partai Amanat Nasional) TA 2021	74.198.916,00
28	LS	065/SPP-LS-HIBAH/Satpoldamkar/XI/2021	30/11/2021	065/SPM-LS-HIBAH/Satpoldamkar/XI/2021	30/11/2021	2974/SP2D/XII/2021	02/12/2021	Pembayaran Hibah Ke Polres Cimahi	200.000.000,00

29	LS	167/SPP/LS/PPD/2021	09/12/2021	167/SPM/LS/PPD/2021	09/12/2021	3459/SP2D/XII/2021	14/12/2021	Pembayaran kekurangan BOP Tahap 2 sebanyak 3 lembaga	5.400.000,00
30	LS	00300/SPP-LS-TBJK/1.03.0.00.0.00.01./02/2021	14/12/2021	00304/SPM-LS-TBJK/1.03.0.00.0.00.01./02/2021	14/12/2021	3571/SP2D/XII/2021	15/12/2021	100% Perencanaan Rehabilitasi Bangunan Kodim	34.892.000,00
31	LS	00301/SPP-LS-TBJK/1.03.0.00.0.00.01./02/2021	14/12/2021	00305/SPM-LS-TBJK/1.03.0.00.0.00.01./02/2021	14/12/2021	3569/SP2D/XII/2021	15/12/2021	100% Perencanaan Rehabilitasi Bangunan Pusdikpom	32.474.000,00
32	LS	00315/SPP-LS-TBJK/1.03.0.00.0.00.01./02/2021	15/12/2021	00319/SPM-LS-TBJK/1.03.0.00.0.00.01./02/2021	15/12/2021	3575/SP2D/XII/2021	15/12/2021	100% Perencanaan Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Kejari	34.845.000,00
33	LS	00420/SPP-LS-TBJK/1.03.0.00.0.00.01./02/2021	30/12/2021	00428/SPM-LS-TBJK/1.03.0.00.0.00.01./02/2021	30/12/2021	3938/SP2D/XII/2021	31/12/2021	100% Rehabilitasi Bangunan Kodim	198.059.000,00
34	LS	00426/SPP-LS-TBJK/1.03.0.00.0.00.01./02/2021	30/12/2021	00435/SPM-LS-TBJK/1.03.0.00.0.00.01./02/2021	30/12/2021	3997/SP2D/XII/2021	31/12/2021	100% Pengawasan Rehabilitasi Bangunan Pusdikpom	22.164.000,00
35	LS	00427/SPP-LS-TBJK/1.03.0.00.0.00.01./02/2021	30/12/2021	00438/SPM-LS-TBJK/1.03.0.00.0.00.01./02/2021	30/12/2021	4002/SP2D/XII/2021	31/12/2021	100% Rehabilitasi Bangunan Pusdikpom	183.108.000,00
36	LS	00432/SPP-LS-TBJK/1.03.0.00.0.00.01./02/2021	30/12/2021	00430/SPM-LS-TBJK/1.03.0.00.0.00.01./02/2021	30/12/2021	3927/SP2D/XII/2021	31/12/2021	100% Pengawasan Rehabilitasi Bangunan Kodim	24.398.000,00
37	LS	00444/SPP-LS-TBJK/1.03.0.00.0.00.01./02/2021	30/12/2021	00453/SPM-LS-TBJK/1.03.0.00.0.00.01./02/2021	30/12/2021	3998/SP2D/XII/2021	31/12/2021	100% Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Kejari	199.431.000,00
38	LS	00450/SPP-LS-TBJK/1.03.0.00.0.00.01./02/2021	30/12/2021	00459/SPM-LS-TBJK/1.03.0.00.0.00.01./02/2021	30/12/2021	3926/SP2D/XII/2021	31/12/2021	100% Pengawasan Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Kejari	19.516.000,00
JUMLAH									19.249.413.450,00

NO	PENGEMBALIAN	NOSTS	TGLSTS	URAIAN	NILAI
1	STS Pengembalian	02/STS-BL/LS/BUDPAR/2021	28/12/2021	PENGEMBALIAN LS KE KASDA KEGIATAN PEMBINAAN SDM LEMBAGA DAN PRANATA KEBUDAYAAN	2.021.250,00
2	STS Pengembalian	010/STS-LS/PORA/HIBAHKONI/XII2021	31/12/2021	PENGEMBALIAN KELEBIHAN ANGGARAN KONI KOTA CIMAHI TAHUN 2021	132.688.479,00
3	STS Pengembalian		11/01/2022	PENGEMBALIAN KELEBIHAN ANGGARAN KONI KOTA CIMAHI TAHUN 2021	83.241.521,00
4	STS Pengembalian		17/02/2022	PENGEMBALIAN KELEBIHAN ANGGARAN KONI KOTA CIMAHI TAHUN 2021	32.420.000,00
JUMLAH					250.371.250,00

Lampiran 1

BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021

NO.	JENIS	SPP		SPM		SP2D		KEPERLUAN	NILAI
		NO SPP	TGL SPP	NO SPM	TGL SPM	NO SP2D	TGL SP2D		
1	LS	00050/SPP-GU/1.05.0.00.0.00.04./B02/2021	29/09/2021	00049/SPM-GU/1.05.0.00.0.00.04./2021	29/09/2021	2140/SP2D/IX/2021	30/09/2021	Pengajuan Surat Pertanggung Jawaban Ganti Uang (GU 9) Persediaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi	41.540.000,00
2	LS	00122/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	11/10/2021	00122/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	11/10/2021	2349/SP2D/X/2021	13/10/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Amardani/Emi Sukarmi sesuai dengan SK No 600/kep.1414-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
3	LS	00124/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./2021	11/10/2021	00123/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	11/10/2021	2350/SP2D/X/2021	13/10/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Ipong Yayat. S/Engkay sesuai dengan SK No 600/kep.1414-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
4	LS	00123/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./2021	11/10/2021	00124/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	11/10/2021	2351/SP2D/X/2021	13/10/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Hikmah Ansori/Anisa sesuai dengan SK No 600/kep.1414-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
5	LS	00125/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./2021	11/10/2021	00125/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	11/10/2021	2352/SP2D/X/2021	13/10/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Sapari sesuai dengan SK No 600/kep.1414-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00

6	LS	00126/SPP- LS/1.04.1.03.0.00.01./ /2021	11/10/2021	00126/SPM- LS/1.04.1.03.0.00.01./ /02/2021	11/10/2021	2353/SP2D/X/2021	13/10/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Totong Dadang/Tina Sumartinah sesuai dengan SK No 600/kep.1414-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
7	LS	00127/SPP- LS/1.04.1.03.0.00.01./ /2021	11/10/2021	00127/SPM- LS/1.04.1.03.0.00.01./ /02/2021	11/10/2021	2354/SP2D/X/2021	13/10/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Hasan Basri/Kokom Komariah sesuai dengan SK No 600/kep.1415-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
8	LS	00128/SPP- LS/1.04.1.03.0.00.01./ /2021	11/10/2021	00128/SPM- LS/1.04.1.03.0.00.01./ /02/2021	11/10/2021	2355/SP2D/X/2021	13/10/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Nanang Sopyandi/Idawati sesuai dengan SK No 600/kep.1415-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
9	LS	00129/SPP- LS/1.04.1.03.0.00.01./ /2021	11/10/2021	00129/SPM- LS/1.04.1.03.0.00.01./ /02/2021	11/10/2021	2356/SP2D/X/2021	13/10/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Rokajah sesuai dengan SK No 600/kep.1415-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
10	LS	00130/SPP- LS/1.04.1.03.0.00.01./ /2021	11/10/2021	00130/SPM- LS/1.04.1.03.0.00.01./ /02/2021	11/10/2021	2363/SP2D/X/2021	13/10/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Rujiyono/Wati sesuai dengan SK No 600/kep.1415-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
11	LS	00131/SPP- LS/1.04.1.03.0.00.01./ /2021	11/10/2021	00131/SPM- LS/1.04.1.03.0.00.01./ /02/2021	11/10/2021	2357/SP2D/X/2021	13/10/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Yatiman/Cacih sesuai dengan SK No 600/kep.1415-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
12	LS	00132/SPP- LS/1.04.1.03.0.00.01./ /2021	11/10/2021	00132/SPM- LS/1.04.1.03.0.00.01./ /02/2021	11/10/2021	2358/SP2D/X/2021	13/10/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Aep Rohidin/Popon sesuai dengan SK No 600/kep.1416-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
13	LS	00133/SPP- LS/1.04.1.03.0.00.01./ /2021	11/10/2021	00133/SPM- LS/1.04.1.03.0.00.01./ /02/2021	11/10/2021	2359/SP2D/X/2021	13/10/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Djohari sesuai dengan SK No 600/kep.1416-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
14	LS	00134/SPP- LS/1.04.1.03.0.00.01./ /2021	11/10/2021	00134/SPM- LS/1.04.1.03.0.00.01./ /02/2021	11/10/2021	2360/SP2D/X/2021	13/10/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Mamah sesuai dengan SK No 600/kep.1416-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
15	LS	00135/SPP- LS/1.04.1.03.0.00.01./ /2021	11/10/2021	00135/SPM- LS/1.04.1.03.0.00.01./ /02/2021	11/10/2021	2361/SP2D/X/2021	13/10/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Rustandi/Siti Romlah sesuai dengan SK No 600/kep.1416-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
16	LS	00136/SPP- LS/1.04.1.03.0.00.01./ /2021	11/10/2021	00136/SPM- LS/1.04.1.03.0.00.01./ /02/2021	11/10/2021	2362/SP2D/X/2021	13/10/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Suharni sesuai dengan SK No 600/kep.1416-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
17	LS	00159/SPP- LS/1.04.1.03.0.00.01./ /2021	09/11/2021	00159/SPM- LS/1.04.1.03.0.00.01./ /02/2021	09/11/2021	2633/SP2D/XI/2021	11/11/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Anwar Suryana / Wati Astuti sesuai dengan SK No 600/kep.1414-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00

18	LS	00160/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./2021	09/11/2021	00160/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	09/11/2021	2634/SP2D/XI/2021	11/11/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Dedeh sesuai dengan SK No 600/kep.1414-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
19	LS	00161/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./2021	09/11/2021	00161/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	09/11/2021	2635/SP2D/XI/2021	11/11/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Djamin Samsudin / Ika sesuai dengan SK No 600/kep.1414-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
20	LS	00162/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	09/11/2021	00162/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	09/11/2021	2636/SP2D/XI/2021	11/11/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Jamar sesuai dengan SK No 600/kep.1414-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
21	LS	00163/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	09/11/2021	00163/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	09/11/2021	2637/SP2D/XI/2021	11/11/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Jukasih sesuai dengan SK No 600/kep.1414-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
22	LS	00164/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	09/11/2021	00164/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	09/11/2021	2638/SP2D/XI/2021	11/11/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Junaedi / Tini Rustini sesuai dengan SK No 600/kep.1414-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
23	LS	00165/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	09/11/2021	00165/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	09/11/2021	2639/SP2D/XI/2021	11/11/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Kusmana / Nurul N. S. sesuai dengan SK No 600/kep.1414-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
24	LS	00166/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	09/11/2021	00166/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	09/11/2021	2640/SP2D/XI/2021	11/11/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Teguh Tri Haryanto / Debby Pradanawati sesuai dengan SK No 600/kep.1414-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
25	LS	00167/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	09/11/2021	00167/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	09/11/2021	2641/SP2D/XI/2021	11/11/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Yudi Wahyudin/Nia Kurniasih sesuai dengan SK No 600/kep.1414-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
26	LS	00168/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	09/11/2021	00168/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	09/11/2021	2642/SP2D/XI/2021	11/11/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Acih sesuai dengan SK No 600/kep.1415-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
27	LS	00172/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./2021	09/11/2021	00172/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	09/11/2021	2643/SP2D/XI/2021	11/11/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Ajat Sudrajat / Ratnasari sesuai dengan SK No 600/kep.1415-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
28	LS	00173/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./2021	09/11/2021	00173/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	09/11/2021	2644/SP2D/XI/2021	11/11/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Dodo Rukanda/ Enok Rusmini sesuai dengan SK No 600/kep.1415-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
29	LS	00174/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./2021	09/11/2021	00174/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	09/11/2021	2645/SP2D/XI/2021	11/11/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Juju Suminar sesuai dengan SK No 600/kep.1415-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00

30	LS	00175/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./2021	09/11/2021	00175/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	09/11/2021	2646/SP2D/XI/2021	10/11/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. M.Sahril/Witarsih sesuai dengan SK No 600/kep.1415-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
31	LS	00177/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./2021	09/11/2021	00177/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	09/11/2021	2647/SP2D/XI/2021	11/11/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Rasmita Sudrajat sesuai dengan SK No 600/kep.1415-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
32	LS	00178/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./2021	09/11/2021	00178/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	09/11/2021	2648/SP2D/XI/2021	11/11/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Sobur/Rohmah Sriyanti sesuai dengan SK No 600/kep.1415-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
33	LS	00180/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./2021	09/11/2021	00180/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	09/11/2021	2649/SP2D/XI/2021	11/11/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Sudrajat/Eti Maryati sesuai dengan SK No 600/kep.1415-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
34	LS	00182/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./2021	09/11/2021	00182/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	09/11/2021	2650/SP2D/XI/2021	11/11/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Suryana/Wakinem sesuai dengan SK No 600/kep.1415-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
35	LS	00183/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./2021	09/11/2021	00183/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	09/11/2021	2625/SP2D/XI/2021	11/11/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Diah Herawati/ Komardi sesuai dengan SK No 600/kep.1416-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
36	LS	00186/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./2021	09/11/2021	00186/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	09/11/2021	2626/SP2D/XI/2021	11/11/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Eddy Moch Dimiyati sesuai dengan SK No 600/kep.1416-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
37	LS	00187/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./2021	09/11/2021	00187/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	09/11/2021	2627/SP2D/XI/2021	11/11/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Lia Kurnia/ Tono Hartono sesuai dengan SK No 600/kep.1416-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
38	LS	00188/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./2021	09/11/2021	00188/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	09/11/2021	2628/SP2D/XI/2021	11/11/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Sukaesih sesuai dengan SK No 600/kep.1416-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
39	LS	00189/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./2021	09/11/2021	00189/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	09/11/2021	2629/SP2D/XI/2021	11/11/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Sumartini sesuai dengan SK No 600/kep.1416-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
40	LS	00190/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./2021	09/11/2021	00190/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	09/11/2021	2630/SP2D/XI/2021	11/11/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Tuti Sutijah/ Tata Setia sesuai dengan SK No 600/kep.1416-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
41	LS	00191/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./2021	09/11/2021	00191/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	09/11/2021	2631/SP2D/XI/2021	11/11/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Uce Rohman sesuai dengan SK No 600/kep.1416-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00

42	LS	00192/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./2021	09/11/2021	00192/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	09/11/2021	2632/SP2D/XI/2021	11/11/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Wiwin Winanjar/ Eka Ariyanti sesuai dengan SK No 600/kep.1416-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
43	LS	151/SPP/LS/Bansos-SPP/PSMP/Disdik/2021	30/11/2021	151/SPM-LS/Bansos-SPP/PSMP/Disdik/2021	30/11/2021	2961/SP2D/XII/2021	01/12/2021	Pembayaran Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu (SPP) Jenjang SMP	1.145.150.000,00
44	LS	152/SPP/LS/BANSOS-SPP/PSD/DISDIK/2021	30/11/2021	152/SPM/LS/BANSOS-SPP/PSD/DISDIK/2021	30/11/2021	2960/SP2D/XII/2021	01/12/2021	Belanja Bantuan Sosial Uang yang diserahkan Kepada Individu, Keg Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	227.340.000,00
45	LS	00294/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	00294/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	3723/SP2D/XII/2021	27/12/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Ade Suhendar / Tuti sesuai dengan SK No 600/kep.1414-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
46	LS	00295/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	00295/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	3726/SP2D/XII/2021	27/12/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Achmad Deddy / Mukminah sesuai dengan SK No 600/kep.1414-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
47	LS	00296/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	00296/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	3727/SP2D/XII/2021	27/12/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Yopi Kristiana / Winda Yulia sesuai dengan SK No 600/kep.1414-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
48	LS	00297/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	00297/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	3728/SP2D/XII/2021	27/12/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Rita Mardiana sesuai dengan SK No 600/kep.1414-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
49	LS	00298/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	00298/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	3729/SP2D/XII/2021	27/12/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Samsudi / Sri Rahayu sesuai dengan SK No 600/kep.1414-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
50	LS	00299/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	00299/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	3725/SP2D/XII/2021	27/12/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Ade Syamsudin / Entin Kartini sesuai dengan SK No 600/kep.1414-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
51	LS	00300/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	00300/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	3722/SP2D/XII/2021	27/12/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Komariah sesuai dengan SK No 600/kep.1415-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
52	LS	00301/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	00301/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	3719/SP2D/XII/2021	27/12/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Wahyudin/ Suwarni sesuai dengan SK No 600/kep.1415-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
53	LS	00302/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	00302/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	3724/SP2D/XII/2021	27/12/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Aminah sesuai dengan SK No 600/kep.1415-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
54	LS	00303/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	00303/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	3720/SP2D/XII/2021	27/12/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Supriadi /Imas Susanti sesuai dengan SK No 600/kep.1415-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00

55	LS	00304/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	00304/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	3721/SP2D/XII/2021	27/12/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Sahla/Aam Aminah sesuai dengan SK No 600/kep.1415-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
56	LS	00305/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	00305/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	3714/SP2D/XII/2021	27/12/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Ade Ruswandi/Rusmiati sesuai dengan SK No 600/kep.1415-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
57	LS	00306/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	00306/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	3732/SP2D/XII/2021	27/12/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Ridwan Apandi/ Erni Indriani sesuai dengan SK No 600/kep.1416-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
58	LS	00307/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	00307/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	3733/SP2D/XII/2021	27/12/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Rukanda/Nurheti Rusma sesuai dengan SK No 600/kep.1416-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
59	LS	00308/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	00308/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	3731/SP2D/XII/2021	27/12/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Abdul Rohman/ Mintarsih sesuai dengan SK No 600/kep.1416-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
60	LS	00309/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	00309/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	3734/SP2D/XII/2021	27/12/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Sodik/Enung Siti Aisyah sesuai dengan SK No 600/kep.1416-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
61	LS	00310/SPP-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	00310/SPM-LS/1.04.1.03.0.00.01./02/2021	22/12/2021	3730/SP2D/XII/2021	27/12/2021	Pembayaran Bantuan Stimulan an. Nining Sunarsi/ Saepuloh sesuai dengan SK No 600/kep.1416-DPKP/2021 Tanggal 09 Juli 2021 Sumber Dana DAK Fisik Penugasan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan)	20.000.000,00
JUMLAH									2.574.030.000,00

NO	PENGEMBALIAN	NO STS	TGL STS	URAIAN	NILAI
1	STS Pengembalian	00001/STS-BL/02/PSMP/DISDIK/2021	24/12/2021	PENGEMBALIAN BANTUAN SOSIAL SPP GRATIS DARI SMP TERPADU AL-MASUDIYAH	1.400.000,00
2	STS Pengembalian	00003/STS-BL/02/SPP-SD/2021	31/12/2021	PENGEMBALIAN BANTUAN SOSIAL SPP GRATIS DARI SD PLUS AL-FURQON	600.000,00
3	STS Pengembalian	00004/STS-BL/02/SPP-SD/2021	31/12/2021	PENGEMBALIAN BANTUAN SOSIAL SPP GRATIS DARI SD PLUS DARUSSURUR AL-YAHYA	500.000,00
JUMLAH					2.500.000,00

REKAPITULASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL TAHUN 2021

No	Jenis Belanja	Nilai SP2D	Nilai STS Pengembalian	Nilai Realisasi
1	BELANJA HIBAH	19.249.413.450,00	250.371.250,00	18.999.042.200,00
2	BELANJA BANTUAN SOSIAL	2.574.030.000,00	2.500.000,00	2.571.530.000,00

DINAS PENDAPATAN DAERAH
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Penghapusan Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	Piutang Pajak :						
	Piutang pajak daerah						
	1) Pajak Hotel	2020	1.150.000,00		301.848.846,00	283.417.966,00	19.580.880,00
	2) Pajak Restoran	2020	11.260.236,00		17.048.477.567,00	17.018.807.906,00	40.929.897,00
	3) Pajak Reklame	2020	700.293.335,00		2.542.700.000,00	2.326.007.100,00	916.986.235,00
	4) Pajak Hiburan dan Tontonan	2020	90.000,00		123.240.330,00	123.330.330,00	-
	5) Pajak Penerangan Jalan Umum	2020	3.066.502.695,00		34.621.793.896,00	37.688.296.591,00	-
	6) Pajak Genset Non PLN	2020	-		13.556.114,00	13.556.114,00	-
	7) Pajak Parkir	2020	856.200,00		936.674.732,00	937.097.932,00	433.000,00
	8) Pajak Air Tanah	2020	650.988.401,00		8.472.806.671,00	8.237.134.116,00	886.660.956,00
	9) BPHTB	2020	-		55.960.840.082,00	55.960.840.082,00	-
	10) PBB	2020	194.027.470.020,00	(90.171.307.585,00)	80.475.272.145,00	57.303.314.555,00	127.028.120.025,00
	- Penghapusan Piutang sesuai SK Wali Kota 973/Kep,456-BAPPENDA/2021 tanggal 12 Maret 2021			(91.036.314.611,00)			
	- Penambahan Ketetapan dan Catatan Tunggal atas Pembayaran Piutang yang dihapuskan			865.007.026,00			
Jumlah			198.458.610.887,00	(90.171.307.585,00)	200.497.210.383,00	179.891.802.692,00	128.892.710.993,00

Penyisihan Piutang Pajak Hotel 2021

Piutang Pajak	Pokok	0 s/d < 1 th (Lancar)		1 sd 2 th (Kurang Lancar)		>2 s/d 5 th (Diragukan)		> 5 tahun (Macet)	
		Piutang	0,005	Piutang	0,10	Piutang	0,50	Piutang	1,00
2021	19.580.880,00	19.580.880,00	97.904,40						
Jumlah	19.580.880,00	19.580.880,00	97.904,40	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pokok		19.580.880,00							
Jumlah Penyisihan		97.904,400							
NRV		19.482.975,60							

Penyisihan Piutang Pajak Restoran 2021

Piutang Pajak	Pokok	0 s/d < 1 th (Lancar)		1 sd 2 th (Kurang Lancar)		>2 s/d 5 th (Diragukan)		> 5 tahun (Macet)	
		Piutang	0,005	Piutang	0,10	Piutang	0,50	Piutang	1,00
2021	40.929.897,00	40.929.897,00	204.649,49						
Jumlah	40.929.897,00	40.929.897,00	204.649,49	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pokok		40.929.897,00							
Jumlah Penyisihan		204.649,49							
NRV		40.725.247,52							

Penyisihan Piutang Pajak Reklame 2021

Piutang Pajak	Pokok	0 s/d < 1 th (Lancar)		1 sd 2 th (Kurang Lancar)		>2 s/d 5 th (Diragukan)		> 5 tahun (Macet)	
		Piutang	0,005	Piutang	0,10	Piutang	0,50	Piutang	1,00
2012	118.091.438,00							118.091.438,00	118.091.438,00
2013	2.031.250,00							2.031.250,00	2.031.250,00
2014	7.228.422,00							7.228.422,00	7.228.422,00
2015	3.565.625,00							3.565.625,00	3.565.625,00
2016	-								
2017	-								
2018	-								
2019	31.739.200,00		-	31.739.200,00	3.173.920,00				
2020	211.785.700,00		-	211.785.700,00	21.178.570,00				
2021	542.544.600,00	542.544.600,00	2.712.723,00						
Jumlah	916.986.235,00	542.544.600,00	2.712.723,00	243.524.900,00	24.352.490,00	-	-	130.916.735,00	130.916.735,00
Jumlah Pokok		916.986.235,00							
Jumlah Penyisihan		157.981.948,00							
NRV		759.004.287,00							

Penyisihan Piutang Pajak Parkir 2021

Piutang Pajak	Pokok	0 s/d < 1 th (Lancar)		1 sd 2 th (Kurang Lancar)		>2 s/d 5 th (Diragukan)		> 5 tahun (Macet)	
		Piutang	0,005	Piutang	0,10	Piutang	0,50	Piutang	1,00
2020	175.800,00		-	175.800,00	17.580,00				
2021	257.200,00	257.200,00	1.286,00						
Jumlah	433.000,00	257.200,00	1.286,00	175.800,00	17.580,00	-	-	-	-
Jumlah Pokok		433.000,00							
Jumlah Penyisihan		18.866,000							
NRV		414.134,00							

Penyisihan Piutang Pajak Air 2021

Piutang Pajak	Pokok	0 s/d < 1 th (Lancar)		1 sd 2 th (Kurang Lancar)		>2 s/d 5 th (Diragukan)		> 5 tahun (Macet)	
		Piutang	0,005	Piutang	0,10	Piutang	0,50	Piutang	1,00
2012	63.977.520,00							63.977.520,00	63.977.520,00
2013	45.403.164,00							45.403.164,00	45.403.164,00
2014	2.911.232,00							2.911.232,00	2.911.232,00
2015	-								
2016	-								
2017	-								
2018	134.077.020,00					134.077.020,00	67.038.510,00		
2019	135.239.262,00			135.239.262,00	13.523.926,20				
2020	117.429.093,00			117.429.093,00	11.742.909,30				
2021	387.623.665,00	387.623.665,00	1.938.118,33						
Jumlah	886.660.956,00	387.623.665,00	1.938.118,33	252.668.355,00	25.266.835,50	134.077.020,00	67.038.510,00	112.291.916,00	112.291.916,00
Jumlah Pokok		886.660.956,00							
Jumlah Penyisihan		206.535.379,825							
NRV		680.125.576,18							

Penyisihan Piutang PBB 1994-2020

Piutang Pajak	Pokok	0 s/d < 1 th (Lancar)		1 sd 2 th (Kurang Lancar)		>2 s/d 5 th (Diragukan)		> 5 tahun (Macet)	
		Piutang	0,5%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
2013	8.860.290.864,00							8.860.290.864,00	8.860.290.864,00
2014	8.385.117.149,00							8.385.117.149,00	8.385.117.149,00
2015	9.444.491.323,00							9.444.491.323,00	9.444.491.323,00
2016	9.046.948.228,00					9.046.948.228,00	4.523.474.114,00		
2017	9.926.107.866,00					9.926.107.866,00	4.963.053.933,00		
2018	12.087.484.228,00				-	12.087.484.228,00	6.043.742.114,00		
2019	15.861.877.669,00			15.861.877.669,00	1.586.187.766,90				
2020	24.284.316.685,00			24.284.316.685,00	2.428.431.668,50				
2021	29.131.486.013,00	29.131.486.013,00	145.657.430,07						
Jumlah	127.028.120.025,00	29.131.486.013,00	145.657.430,07	40.146.194.354,00	4.014.619.435,40	31.060.540.322,00	15.530.270.161,00	26.689.899.336,00	26.689.899.336,00
Jumlah Pokok		127.028.120.025,00							
Jumlah Penyisihan		46.380.446.362,47							
TOTAL		80.647.673.662,54							

Penyisihan Piutang Pajak Hotel 2021	97.904,40
Penyisihan Piutang Pajak Restoran 2021	204.649,49
Penyisihan Piutang Pajak Reklame 2021	157.981.948,00
Penyisihan Piutang Pajak Parkir 2021	18.866,00
Penyisihan Piutang Pajak Air 2021	206.535.379,83
Penyisihan Piutang PBB 1994-2020	46.380.446.362,47
Total Penyisihan	46.745.285.110,18

Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2021

A. PIUTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

No	Tanggal SKRD	Nama/Keterangan	0 s/d 1 Bln (Lancar)			> 1 s/d 3 Bln (Kurang Lancar)			>3 s/d 12 Bulan (Diragukan)		>12 Bulan (Macet)	
			Piutang	0,5%		Piutang	10%		Piutang	50%	Piutang	100%
1	31/12/2020	Piutang Retribusi IMB tahun 2020	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 99.807.224,00	Rp 99.807.224,00
1	30/07/2021	ROSE ROSALINA		Rp -		Rp -	Rp -	Rp 1.659.150	Rp 829.575,00		Rp -	
2	30/07/2021	AGUS WANDRI		Rp -		Rp -	Rp -	Rp 3.534.700	Rp 1.767.350,00		Rp -	
JUMLAH			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.193.850,00	Rp 2.596.925,00	Rp 99.807.224,00	Rp 99.807.224,00	
JUMLAH POKOK PIUTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN			Rp 105.001.074,00									
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI IMB TAHUN 2020			Rp 102.404.149,00									

B. PIUTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

No	Tanggal SKRD	Nama/Keterangan	0 s/d 1 Bln (Lancar)			> 1 s/d 3 Bln (Kurang Lancar)			>3 s/d 12 Bulan (Diragukan)		>12 Bulan (Macet)	
			Piutang	0,5%		Piutang	10%		Piutang	50%	Piutang	100%
1	31/12/2020	Piutang Retribusi IG tahun 2020	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 51.898.211,00	Rp 51.898.211,00
			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
JUMLAH			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 51.898.211,00	Rp 51.898.211,00
JUMLAH POKOK PIUTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN			Rp 51.898.211,00									
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI IG TAHUN 2021			Rp 51.898.211,00									

C. PIUTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

No	Tanggal SKRD	Nama/Keterangan	0 s/d 1 Bln (Lancar)			> 1 s/d 3 Bln (Kurang Lancar)			>3 s/d 12 Bulan (Diragukan)		>12 Bulan (Macet)	
			Piutang	0,5%		Piutang	10%		Piutang	50%	Piutang	100%
1	31/12/2020	Piutang Retribusi IT tahun 2020	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.900.000,00	Rp 2.900.000,00
JUMLAH			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.900.000,00	Rp 2.900.000,00
JUMLAH POKOK PIUTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK			Rp 2.900.000,00									
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI IT TAHUN 2020			Rp 2.900.000,00									

D. PIUTANG KARTU PENGAWASAN

No	Tahun	Rincian	0 s/d 1 Tahun (Lancar)			> 1 s/d 2Tahun (Kurang Lancar)			>2 s/d 5 Tahun (Diragukan)		>5 Tahun (Macet)	
			Piutang	0,50%		Piutang	10%		Piutang	50%	Piutang	100%
1	2011	Heru Gunawan	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00	60.000,00
2	2011	Iming Vertical	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
3	2011	Yuliani Herwanti	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00	40.000,00
4	2011	Sansan Saudaratex	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00
5	2011	Sansan Saudaratex	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00
6	2011	PT Sinar Continental	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00
7	2011	PT Sinar Continental	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00
8	2011	PT Sinar Continental	-	-	-	-	-	-	-	-	230.000,00	230.000,00
9	2011	Menna Ria Sitorus	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00
10	2011	Nandang Sumitra	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000,00	120.000,00
JUMLAH			-	-	-	-	-	-	-	-	1.140.000,00	1.140.000,00
JUMLAH POKOK PIUTANG RETRIBUSI KARTU PENGAWASAN			1.140.000,00									
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG KARTU PENGAWASAN 2021			1.140.000,00									

E. PIUTANG RETRIBUSI LABORATORIUM

No	Tanggal SKRD	Nama/Keterangan	0 s/d 1 Bln (Lancar)			> 1 s/d 3 Bln (Kurang Lancar)			>3 s/d 12 Bulan (Diragukan)		>12 Bulan (Macet)	
			Piutang	0,5%		Piutang	10%		Piutang	50%	Piutang	100%
1	2019	Piutang sampai dengan 2019									Rp 5.077.500,00	Rp 5.077.500,00
2	Maret 20	PT. Matahari Sentosa									Rp 532.000,00	Rp 532.000,00
3	Juni 20	Bp Rudi									Rp 457.000,00	Rp 457.000,00
4	Juni 20	Bp Rudi									Rp 609.000,00	Rp 609.000,00
5	Juni 20	POLDA									Rp 444.000,00	Rp 444.000,00
6	Juli 20	Ayulia									Rp 320.000,00	Rp 320.000,00
7	Sep-20	M. Salman									Rp 225.500,00	Rp 225.500,00

8	Nov-20	PT. Harmony Pilar Sentosa							Rp	1.828.000,00	Rp	1.828.000,00						
9	Nov-20	PT. Ayoetex							Rp	170.000,00	Rp	170.000,00						
10	Desember 20	PT. Saptajaya							Rp	532.000,00	Rp	532.000,00						
11	Desember 20	PT. Harmony Pilar Sentosa							Rp	914.000,00	Rp	914.000,00						
12	Desember 20	Adam M							Rp	371.000,00	Rp	371.000,00						
13	Desember 20	M. Salman							Rp	66.000,00	Rp	66.000,00						
14	Desember 20	M. Rizky							Rp	132.000,00	Rp	132.000,00						
15	Januari 21	PT. Saptajaya						Rp	532.000,00	Rp	266.000,00							
16	Januari 21	PT. Trisulatex						Rp	820.500,00	Rp	410.250,00							
17	Juni 21	PT. Bintang Warna Mandiri						Rp	1.064.000,00	Rp	532.000,00							
18	Agustus 21	PT. Saptajaya						Rp	1.495.000,00	Rp	747.500,00							
19	Sep-21	Teguh						Rp	396.000,00	Rp	198.000,00							
20	Nov-21	PT. Trigunawan				Rp	532.000,00	Rp	53.200,00		Rp	-						
21	Nov-21	PT. Logam Bima				Rp	1.207.500,00	Rp	120.750,00		Rp	-						
22	Desember 21	PT. Nickcrome	Rp	737.500,00	Rp	3.687,50		Rp	-									
23	Desember 21	PT. Nickcrome	Rp	376.000,00	Rp	1.880,00		Rp	-									
24	Desember 21	PT. Kencana Fajar	Rp	532.000,00	Rp	2.660,00		Rp	-									
25	Desember 21	PT. Dwimulya	Rp	532.000,00	Rp	2.660,00		Rp	-									
26	Desember 21	PT. Benang Warna Indonusa	Rp	532.000,00	Rp	2.660,00		Rp	-									
27	Desember 21	PT. Mewah Niagajaya	Rp	532.000,00	Rp	2.660,00												
28	Desember 21	PT. SIAP	Rp	532.000,00	Rp	2.660,00												
29	Desember 21	PT. Trigunawan	Rp	532.000,00	Rp	2.660,00												
30	Desember 21	PT. SIAP	Rp	737.500,00	Rp	3.687,50												
31	Desember 21	PT. Kahatex	Rp	1.064.000,00	Rp	5.320,00												
32	Desember 21	Klinik Yudisman	Rp	1.180.000,00	Rp	5.900,00												
33	Desember 21	PT. Sama Indah	Rp	1.207.500,00	Rp	6.037,50												
34	Desember 21	PT. Logam Bima	Rp	1.207.500,00	Rp	6.037,50												
35	Desember 21	PT. Kahatex	Rp	1.958.000,00	Rp	9.790,00												
36	Desember 21	PT. San San Saudaratex 1	Rp	532.000,00	Rp	2.660,00												
37	Desember 21	Wildan	Rp	711.000,00	Rp	3.555,00												
38	Desember 21	RSIA Kartini	Rp	737.500,00	Rp	3.687,50												
39	Desember 21	PT. Perdana Firsta	Rp	182.500,00	Rp	912,50												
	JUMLAH		Rp	13.823.000,00	Rp	69.115,00	Rp	1.739.500,00	Rp	173.950,00	Rp	4.307.500,00	Rp	2.153.750,00	Rp	11.678.000,00	Rp	11.678.000,00
	JUMLAH POKOK PIUTANG RETRIBUSI LABORATORIUM		Rp	31.548.000,00														
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI LAB TAHUN 2021		Rp	14.074.815,00														

F. PIUTANG RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH (BITC)

No	Tanggal SKRD	Nama/Keterangan	0 s/d 1 Bln (Lancar)			> 1 s/d 3 Bln (Kurang Lancar)			>3 s/d 12 Bulan (Diragukan)			>12 Bulan (Macet)			
			Piutang	0,5%		Piutang	10%		Piutang	50%		Piutang	100%		
1	Sep-20	HELPHY		Rp	-		Rp	-		Rp	-	Rp	4.500.000,00	Rp	4.500.000,00
2	OKTOBER 20	HELPHY		Rp	-		Rp	-		Rp	-	Rp	4.500.000,00	Rp	4.500.000,00
3	DESEMBER 20	HELPHY		Rp	-		Rp	-		Rp	-	Rp	4.500.000,00	Rp	4.500.000,00
4	JANUARI 21	HELPHY						Rp	4.500.000,00	Rp	2.250.000,00				
5	FEBRUARI 21	HELPHY						Rp	4.500.000,00	Rp	2.250.000,00				
6	MARET 21	INDOARTHA RUANGAN						Rp	3.146.175,00	Rp	1.573.087,50				
7	Apr-21	INDOARTHA RUANGAN						Rp	3.146.175,00	Rp	1.573.087,50				
8	Mei 21	INDOARTHA RUANGAN						Rp	3.146.175,00	Rp	1.573.087,50				
9	Mei 21	ACDI LT. 1						Rp	6.741.000,00	Rp	3.370.500,00				
10	Mei 21	ACDI LT. 3						Rp	2.205.000,00	Rp	1.102.500,00				
11	JUNI 21	ACDI LT. 1						Rp	6.741.000,00	Rp	3.370.500,00				
12	JUNI 21	ACDI LT. 3						Rp	2.205.000,00	Rp	1.102.500,00				
13	JUNI 21	KREANOVA						Rp	1.312.500,00	Rp	656.250,00				
14	JULI 21	KREANOVA						Rp	1.312.500,00	Rp	656.250,00				
15	Sep-21	KREANOVA						Rp	1.312.500,00	Rp	656.250,00				
16	OKTOBER 21	INDOARTHA MEJA				Rp	600.000,00	Rp	60.000,00						
17	OKTOBER 21	KREANOVA				Rp	1.312.500,00	Rp	131.250,00						
18	Nov-21	INDOARTHA MEJA				Rp	600.000,00	Rp	60.000,00						
19	Nov-21	ACDI LT. 1				Rp	6.741.000,00	Rp	674.100,00						
20	Nov-21	ACDI LT. 3				Rp	2.205.000,00	Rp	220.500,00						
21	Nov-21	KREANOVA				Rp	1.312.500,00	Rp	131.250,00						
22	Nov-21	SMARTEK				Rp	2.934.000,00	Rp	293.400,00						
23	DESEMBER 21	INDOARTHA MEJA	Rp	600.000,00	Rp	3.000,00		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
24	DESEMBER 21	ACDI LT. 1	Rp	6.741.000,00	Rp	33.705,00		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
25	DESEMBER 21	ACDI LT. 3	Rp	2.205.000,00	Rp	11.025,00		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
26	DESEMBER 21	KREANOVA	Rp	1.312.500,00	Rp	6.562,50		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-

27	DESEMBER 21	SMARTEK	Rp 2.934.000,00	Rp 14.670,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
28	DESEMBER 21	EMIFLY	Rp 3.146.175,00	Rp 15.730,88	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
JUMLAH			Rp 16.938.675,00	Rp 84.693,38	Rp 15.705.000,00	Rp 1.570.500,00	Rp 40.268.025,00	Rp 20.134.012,50	Rp 13.500.000,00	Rp 13.500.000,00
JUMLAH POKOK PIUTANG RETRIBUSI (BITC)			Rp 86.411.700,00							
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI BITC TAHUN 2021			Rp 35.289.205,88							

G. PIUTANG RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH (RUSUNAWA)

No	Tanggal SKRD	Nama/Keterangan	0 s/d 1 Bln (Lancar)			> 1 s/d 3 Bln (Kurang Lancar)			>3 s/d 12 Bulan (Diragukan)		>12 Bulan (Macet)	
			Piutang	0,5%		Piutang	10%		Piutang	50%	Piutang	100%
1	Dec-16	Rusunawa Kota Cimahi	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -	Rp 194.565.000,00	Rp 194.565.000,00
2	Dec-17	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-	Rp -	127.525.540,00	Rp 127.525.540,00
3	Dec-18	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-	Rp -	171.050.000,00	Rp 171.050.000,00
4	Dec-19	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-	Rp -	335.472.750,00	Rp 335.472.750,00
	Des-20	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-	Rp -	173.953.142,00	Rp 173.953.142,00
5	Januari 2021	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	-	Rp -	-	42.162.500,00	Rp 21.081.250,00	-	Rp -
6	Februari 2021	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	-	Rp -	-	52.541.700,00	Rp 26.270.850,00	-	Rp -
7	Maret 2021	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	-	Rp -	-	52.350.000,00	Rp 26.175.000,00	-	Rp -
8	Apr-21	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	-	Rp -	-	48.184.550,00	Rp 24.092.275,00	-	Rp -
9	Mei 2021	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	-	Rp -	-	50.065.000,00	Rp 25.032.500,00	-	Rp -
10	Juni 2021	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	-	Rp -	-	57.902.500,00	Rp 28.951.250,00	-	Rp -
11	Juli 2021	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	-	Rp -	-	68.130.000,00	Rp 34.065.000,00	-	Rp -
12	Agustus 2021	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	-	Rp -	-	81.907.500,00	Rp 40.953.750,00	-	Rp -
13	Sep-21	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	-	Rp -	-	95.045.000,00	Rp 47.522.500,00	-	Rp -
14	Oktober 2021	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	114.327.500,00	Rp 11.432.750,00	-	-	Rp -	-	Rp -
15	Nov-21	Rusunawa Kota Cimahi	-	Rp -	-	141.727.500,00	Rp 14.172.750,00	-	-	Rp -	-	Rp -
16	Desember 2021	Rusunawa Kota Cimahi	185.842.500,00	Rp 929.212,50	-	-	Rp -	-	-	Rp -	-	Rp -
Jumlah			Rp 185.842.500,00	Rp 929.212,50	Rp 256.055.000,00	Rp 25.605.500,00	Rp 548.288.750,00	Rp 274.144.375,00	Rp 1.002.566.432,00	Rp 1.002.566.432,00		
Jumlah Piutang Retribusi Rusunawa Tahun 2021			Rp 1.992.752.682,00									
Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi Rusunawa Tahun 2021			Rp 1.303.245.519,50									

No	Jenis Retribusi	Saldo Awal Per 31 Desember 2020	Penambahan Piutang Tahun 2021	Pengurangan Piutang Tahun 2021	Saldo Akhir Per 31 Desember 2021	PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI Per 31 Desember 2021
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Rp 593.626.830,00	Rp 1.063.948.484,00	Rp 1.552.574.240,00	Rp 105.001.074,00	Rp 102.404.149,00
2	Izin Gangguan Keramaian (HO/IG)	Rp 51.898.211,00	Rp -	Rp -	Rp 51.898.211,00	Rp 51.898.211,00
3	Izin Trayek (IT)	Rp 3.200.000,00	Rp 3.300.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 2.900.000,00	Rp 2.900.000,00
4	Izin Kartu Pengawasan	Rp 1.140.000,00	Rp -	Rp -	Rp 1.140.000,00	Rp 1.140.000,00
5	Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (BITC)	Rp 36.199.500,00	Rp 691.814.425,00	Rp 641.602.225,00	Rp 86.411.700,00	Rp 35.289.205,88
6	Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)	Rp 1.247.172.932,00	Rp 3.585.109.700,00	Rp 2.839.529.950,00	Rp 1.992.752.682,00	Rp 1.303.245.519,50
7	Laboratorium Lingkungan	Rp 33.889.500,00	Rp 589.927.500,00	Rp 592.269.000,00	Rp 31.548.000,00	Rp 14.074.815,00
8	Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	Rp 172.208.211,00	Rp -	Rp 172.208.211,00	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp 2.139.335.184,00	Rp 5.934.100.109,00	Rp 5.801.783.626,00	Rp 2.271.651.667,00	Rp 1.510.951.900,38

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
BIAYA DIBAYAR DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2021

No	PERANGKAT DAERAH	NILAI	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN	7.251.000,00	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah
2	DINAS KESEHATAN	82.494.925,00	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah
3	RSU DAERAH CIBABAT	27.940.943,33	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.703.763.588,37	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung; Belanja Sewa Tanah untuk Jalan; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	281.237.210,85	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor; Belanja sewa gedung/kantor/tempat
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	43.030.927,08	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	77.342.108,33	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
8	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	91.822.925,00	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
9	DINAS TENAGA KERJA	148.991.762,50	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gudang; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
10	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	12.566.262,50	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	462.284.162,50	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gudang; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor; Belanja Sewa Mesin Proses Apung
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	87.273.470,83	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gudang
13	DINAS PERHUBUNGAN	120.801.804,58	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Penyimpanan Barang; Belanja Sewa Bangunan Gudang
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	129.801.858,59	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gudang; Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
15	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	21.350.125,00	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	49.199.637,50	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gudang
17	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLARAHAGA	271.364.104,16	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan; Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga; Belanja Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool; Belanja Sewa Bangunan Gudang
18	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	
19	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	261.938.079,17	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gudang; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor; Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan; Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang
20	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	2.226.195,83	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	3.386.725,00	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah
22	SEKRETARIAT DAERAH	571.852.244,33	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gudang; Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor; Belanja Sewa Rumah Negara Golongan III
23	SEKRETARIAT DPRD	39.213.999,17	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah
24	INSPEKTORAT KOTA	15.289.046,67	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah; Belanja Sewa Bangunan Gudang
25	KECAMATAN CIMAHI UTARA	11.834.225,00	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah
26	KECAMATAN CIMAHI TENGAH	13.656.340,00	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah
27	KECAMATAN CIMAHI SELATAN	7.364.334,67	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah
28	KANTOR KESATUAN BANGSA	31.414.583,33	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah
JUMLAH		4.576.692.589,29	

Catatan:

Biaya di bayar dimuka dihitung secara bulanan

Jangka waktu asuransi/sewa: Tanggal 1 s.d 15 dihitung sebagai biaya asuransi /sewa bulan ini

Jangka waktu asuransi/sewa: Tanggal 16 s.d 31 dihitung sebagai biaya asuransi /sewa bulan berikutnya

Pemerintah Kota Cimahi
Kasus Tuntutan Ganti Rugi
Per 31 Desember 2021

No	Penanggung Jawab	Data		Hasil Pemantauan													
		Kasus	Dokumen TP/TGR	SKTJM/SKP	TMT dan JT Terakhir	Jumlah Kasus	Nilai (Rp)	Angsuran		Pelunasan		Penghapusan		Sisa		Bagian Lancar (Rp)	Penyisihan Piutang
1	2	3	4	5	6	7	8	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	17	18
A KERUGIAN KEUANGAN DAERAH																	
1	Dedy Priyatna	Kelalaian Pengelolaan Keuangan (TGR)-2002	Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.157-keu/2004	001/SKTJM/TP-TGR/2011	15-12-2004 dan 15-12-2006	1	15.042.100,00	1	5.900.000,00	0	-	0	-	1	9.142.100,00	9.142.100,00	9.142.100,00
2	Nur Asih Amari	Kelalaian Pengelolaan Keuangan (TGR)-TA 2006-2007	Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.159-keu/2010	SKTJM Th.2010	31-03-2012 dan 31-03-2012	1	248.165.000,00	1	69.320.000,00	0	116.707.500,00	0	-	1	62.137.500,00	62.137.500,00	62.137.500,00
3	Saeffulloh	Kelalaian Pengelolaan Keuangan (TGR)-TA 2006-2007	Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.158-keu/2010	SKTJM Th.2010	31-03-2012 dan 31-03-2012	1	105.732.500,00	1	19.653.500,00	0	22.012.000,00	0	-	1	64.067.000,00	64.067.000,00	64.067.000,00
4	Drs. Kosasih	Kelalaian Pengelolaan Keuangan (TGR)-TA 2006-2007	Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.155-keu/2010	Tanpa SKTJM	31-03-2012 dan 31-03-2012	1	40.537.900,00	1	16.000.000,00	0	-	0	-	1	24.537.900,00	24.537.900,00	24.537.900,00
JUMLAH A						4	409.477.500,00	4	110.873.500,00	0	138.719.500,00	0	-	4	159.884.500,00	159.884.500,00	159.884.500,00
B KERUGIAN KEHILANGAN ASET DAERAH																	
1	Nana Sujana	Kehilangan Kendaraan (TGR)-2005	Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.200-Keu/2005	SKTJM Th.2005	15-07-2005 dan 15-07-2007	1	9.400.000,00	0	-	1	5.236.000,00	1	4.164.000,00	0	-	-	-
2	Setia Kusbaran	Kehilangan Kendaraan (TGR)-2005	Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.201-Keu/2005	SKTJM Th.2005	15-07-2005 dan 15-07-2007	1	49.500.000,00	1	46.133.332,00	0	-	0	-	1	3.366.668,00	3.366.668,00	3.366.668,00
3	Nugraha Gandarmawan	Kehilangan Kendaraan (TGR)-2004	Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.199-keu/2005	SKTJM Th.2005	15-07-2005 dan 15-07-2007	1	49.500.000,00	1	41.000.000,00	0	2.750.000,00	1	6.500.000,00	1	-	-	-
4	Achmad Gunawan	Kehilangan Kendaraan-2005	Keputusan Walikota Cimahi 900/198-keu/2005	SKTJM Th.2005	15-07-2005 dan 15-07-2007	1	84.800.000,00	1	41.000.000,00	0	-	1	12.800.000,00	1	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00
5	Dedi Dasikin	Kehilangan Kendaraan-2007	Keputusan Walikota Cimahi 900/387-keu/2009	001/SKTJM/TP-TGR/2010	09-12-2009 dan 09-12-2011	1	30.000.000,00	1	6.700.000,00	0	-	0	-	1	23.300.000,00	23.300.000,00	23.300.000,00
6	Asep Nasrudin	Kehilangan Kendaraan (TGR)-2009	Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.210-keu/2011	Tanpa SKTJM	09-12-2009 dan 09-12-2011	1	11.000.000,00	1	800.000,00	0	5.200.000,00	1	5.000.000,00	1	-	-	-

No	Penanggung Jawab	Data						Hasil Pemantauan									
	Nama	Kasus	Dokumen TP/TGR	SKTJM/SKP	TMT dan JT Terakhir	Jumlah Kasus	Nilai (Rp)	Angsuran		Pelunasan		Penghapusan		Sisa		Bagian Lancar (Rp)	Penyisihan Piutang
								Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Handiman	Kehilangan Kendaraan (TGR)-2012	Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.585-keu/2012	004/SKTJM/TP-TGR/2013	26-12-2014 dan 26-12-2014	1	15.000.000,00	0	4.100.000,00	0	10.900.000,00	0		- 1		-	-
8	Niagara Raharja	Kehilangan Kendaraan (TGR)-2012	Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.581-keu/2012	005/SKTJM/TP-TGR/2013	26-12-2014 dan 26-12-2014	1	9.000.000,00	1	5.250.000,00	0	3.750.000,00	0		- 1		-	-
9	Mia Nursanti	Kehilangan Kendaraan (TGR)-2012	Keputusan Walikota Nomor 900/Kep.584-keu/2012	006/SKTJM/TP-TGR/2013	26-12-2014 dan 26-12-2014	1	1.761.500,00	0	-	0	1.761.000,00	0		1	500,00	500,00	500,00
10	Suyadi	Kehilangan Kendaraan (TGR)-2019		005/SKTJM/TG R/2019	24/10/2019 dan 24/10/2019	1	9.500.000,00	0	-	1	9.500.000,00			-		-	-
11	Deni Herdiani, ST.	Kehilangan Kendaraan (TGR)-2019		006/SKTJM/TG R/2019	29/10/2019 dan 29/10/2019	1	18.000.000,00	0	-		18.000.000,00			-		-	-
12	Hj. Sri Surya Ekawati,SE.	Kehilangan Kendaraan (TGR)-2019		006/SKTJM/TG R/2019	22/11/2019 dan 22/01/2020	1	24.000.000,00	0	-		24.000.000,00			-		-	-
JUMLAH B						9	311.461.500,00	6	144.983.332,00	1	81.097.000,00	4	28.464.000,00	8	57.667.168,00	57.667.168,00	57.667.168,00
JUMLAH (A+B)						13	720.939.000,00	10	255.856.832,00	1	219.816.500,00	4	28.464.000,00	12	217.551.668,00	217.551.668,00	217.551.668,00

Pemerintah Kota Cimahi
Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat
Per 31 Desember 2021

NO	PERUSAHAAN	SALDO AWAL 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2021	PENYISIHAN PIUTANG	SALDO SETELAH PENYISIHAN
1	BPJS KESEHATAN	2.350.868.500,00	66.176.238.806,00	68.411.365.261,00	115.742.045,00	578.710,23	115.163.334,78
3	PT. JASA RAHARJA	300.626.481,00	999.866.671,00	1.118.083.103,00	182.410.049,00	34.661.276,15	147.748.772,85
4	BPJS KETENAGAKERJAAN	152.301.727,00	517.544.400,00	614.780.130,00	55.065.997,00	17.629.953,50	37.436.043,50
5	GAKINDA KOTA CIMAHI	-	822.456.367,00	822.456.367,00	-		-
6	GAKINDA KBB	-	1.188.064.883,00	1.188.064.883,00	-		-
7	JAMPERSAL KBB	27.660.480,00	489.703.747,00	489.703.747,00	27.660.480,00	2.766.048,00	24.894.432,00
8	JAMPERSAL KOTA CIMAHI	-	238.901.231,00	238.901.231,00	-		-
9	PT TASPEN	1.591.807,00	36.581.896,00	6.660.023,00	31.513.680,00	429.396,65	31.084.283,35
10	KEMENKES	1.278.437.000,00	82.280.440.500,00	77.614.341.500,00	5.944.536.000,00	594.453.600,00	5.350.082.400,00
11	RS MITRA KASIH		302.361.000,00	302.361.000,00	-		-
12	RS DUSTIRA		427.436.800,00	389.916.800,00	37.520.000,00	187.600,00	37.332.400,00
13	RS KASIH BUNDA		56.851.000,00	54.691.000,00	2.160.000,00	10.800,00	2.149.200,00
14	RSUP HASAN SADIKIN		541.060.000,00	431.170.000,00	109.890.000,00	7.009.450,00	102.880.550,00
15	RS IMC PADALARANG		1.080.000,00	1.080.000,00	-		-
16	RSAU dr.M. SALAMUN		54.581.800,00	54.581.800,00	-		-
17	RS AVISENA		13.320.000,00	-	13.320.000,00	1.263.600,00	12.056.400,00
18	RS SILOAM PURWAKARTA		449.676.500,00	306.976.500,00	142.700.000,00	12.039.875,00	130.660.125,00
19	RSUD CILILIN		52.380.000,00	52.380.000,00	-		-
TOTAL		4.111.485.995,00	154.648.545.601,00	152.097.513.345,00	6.662.518.251,00	671.030.309,520	5.991.487.941

Pemerintah Daerah Kota Cimahi
Penyisihan Piutang BLUD Air Minum Tahun 2021

PIUTANG BLUD AIR MINUM

No	Tanggal SKRD	Nama/Keterangan	0 s/d 1 Bln (Lancar)		> 1 s/d 3 Bln (Kurang Lancar)		>3 s/d 12 Bulan (Diragukan)		>12 Bulan (Macet)	
			Piutang	0,5%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%
1	Piutang s/d tahun 2020	711.612.000,00	Rp	-	Rp	-			Rp	711.612.000,00
2	01/01/2021	29.328.600,00	Rp	-	Rp	-	Rp	29.328.600,00	Rp	-
3	01/02/2021	28.913.800,00	Rp	-	Rp	-	Rp	28.913.800,00	Rp	-
4	01/03/2021	31.601.700,00	Rp	-	Rp	-	Rp	31.601.700,00	Rp	-
5	01/04/2021	33.604.500,00	Rp	-	Rp	-	Rp	33.604.500,00	Rp	-
6	01/05/2021	30.986.700,00	Rp	-	Rp	-	Rp	30.986.700,00	Rp	-
7	01/06/2021	33.877.300,00	Rp	-	Rp	-	Rp	33.877.300,00	Rp	-
8	01/07/2021	35.810.400,00	Rp	-	Rp	-	Rp	35.810.400,00	Rp	-
9	01/08/2021	40.931.100,00	Rp	-	Rp	-	Rp	40.931.100,00	Rp	-
10	01/09/2021	40.714.800,00	Rp	-	Rp	-	Rp	40.714.800,00	Rp	-
11	01/10/2021	55.589.900,00	Rp	-	Rp	-	Rp	55.589.900,00	Rp	-
12	01/11/2021	69.540.300,00	Rp	-	Rp	69.540.300,00	Rp	-	Rp	-
13	01/12/2021	439.996.200,00	Rp	439.996.200,00	Rp	2.199.981,00	Rp	-	Rp	-
	JUMLAH		Rp	439.996.200,00	Rp	2.199.981,00	Rp	361.358.800,00	Rp	180.679.400,00
	JUMLAH POKOK PIUTANG RETRIBUSI AIR MINUM		Rp	1.582.507.300,00						
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI AIR MINUM TAHUN 2021		Rp	901.445.411,00						

No	Jenis Retribusi	Saldo Awal Per 31 Desember 2020	Penambahan Piutang Tahun 2021	Pengurangan Piutang Tahun 2021	Saldo Akhir Per 31 Desember 2021	PENYISIHAN PIUTANG BLUD Air Minum Per 31 Desember 2021
7	Piutang Retribusi Air Minum	Rp 1.125.080.600,00	Rp 4.749.434.100,00	Rp 4.292.007.400,00	Rp 1.582.507.300,00	Rp 901.445.411,00
	Jumlah	Rp 1.125.080.600,00	Rp 4.749.434.100,00	Rp 4.292.007.400,00	Rp 1.582.507.300,00	Rp 901.445.411,00

**Saldo Akhir Persediaan
Per 31 Desember 2021**

Lampiran 8

SALDO AKHIR	ATK	Alat Listrik dan elektronik	Perangko, material dan benda pos lainnya	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Bahan Kebutuhan Medis	cindramata	bahan baku bangunan	bahan/bibit tanaman	bibit ternak	Bahan obat-obatan	Bahan kimia	Bahan Pokok Natura	Bahan Makanan Pokok	Barang Cetakan	Barang Yang Akan di Berikan Kepada Pihak Ketiga	Jumlah
1 DINAS PENDIDIKAN	187.389.597,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.389.597,00
2 DINAS KESEHATAN	100.728.219,00	9.215.819,00	3.080.000,00	59.858.809,50	-	2.160.000,00	-	-	-	6.972.900.446,60	2.107.157.432,48	-	-	-	293.595.227,00	9.548.695.953,58
3 RSUD CIBABAT	43.736.591,00	20.898.624,90	-	413.669.072,50	-	-	36.842.370,00	-	-	7.346.107.576,00	3.512.619.000,00	157.695.444,40	-	-	190.038.025,00	11.721.606.703,80
4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.475.067.000,00	-	3.475.067.000,00
5 DPKP	8.317.100,00	-	630.000,00	4.092.300,00	-	-	135.740.390,00	-	-	-	69.666.375,00	-	892.000,00	1.292.500,00	16.093.500,00	236.724.165,00
6 SATPOL PP	1.844.260,00	-	900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.744.260,00
7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	18.555.000,00	-	-	12.378.000,00	-	-	-	-	-	46.227.800,00	658.570.507,00	-	735.731.307,00
8 DINSOS	10.492.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.682.365,56	-	271.174.665,56
9 DINAS TENAGA KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	6.126.197,00	963.100,00	500.000,00	22.340.700,00	-	-	-	39.741.500,00	96.720.000,00	50.065.603,00	1.060.000,00	-	24.855.456,00	426.099.228,00	54.118.675,00	722.590.459,00
11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	439.358.650,00	-	-	-	33.067.294,00	-	954.000,00	7.428.000,00	-	-	-	12.280.216,00	493.088.160,00
12 DISDUK	603.906.760,89	-	-	4.124.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653.661.800,00	1.261.693.160,89
13 DINAS PERHUBUNGAN	495.000,00	2.310.447.546,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376.176.938,10	2.687.119.484,10
14 DISKOMINFOARPUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452.600,00	-	394.800,00	847.400,00
15 DISDAGKOPERIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.752.900,00	82.752.900,00
16 DPMPPTSP	-	-	-	123.627.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.171.150,00	152.798.890,00
17 DISBUDPARPORA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 BAPPEDA	1.660.000,00	-	600.000,00	7.842.000,00	-	4.500.000,00	-	-	-	237.500,00	-	-	-	-	1.920.000,00	16.759.500,00
19 BPKAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	2.633.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.390.000,00	45.023.000,00
21 BKPSDMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 SEKRETARIAT DAERAH	550.000,00	-	-	49.434.500,00	-	142.254.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	139.527.939,00	331.766.639,00
26 SEKRETARIAT DPRD	693.600,00	1.757.900,00	-	8.090.950,00	-	15.785.000,00	-	-	-	-	-	-	2.117.500,00	-	12.590.000,00	41.034.950,00
27 INSPEKTORAT KOTA	2.610.480,00	1.922.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.532.480,00
28 KECAMATAN CIMAHI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 KECAMATAN CIMAHI TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 KECAMATAN CIMAHI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 KANTOR KESATUAN BANGSA	377.200,00	-	140.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517.200,00
JUMLAH	971.560.304,89	2.345.204.989,90	5.850.000,00	1.150.994.322,00	-	164.699.200,00	184.960.760,00	72.808.794,00	96.720.000,00	14.370.265.125,60	5.697.930.807,48	157.695.444,40	74.545.356,00	4.821.711.600,56	1.904.711.170,10	32.019.657.874,93

Pemerintah Kota Cimahi
Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah
Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas
Per 31 Desember 2021

No	Perusahaan Daerah	Sumber	Status	Aset (Rp)					Kewajiban dan Ekuitas (Rp)						
				Lancar	Penyertaan Jk Panjang (KSO)	Tetap	Lainnya	Total	Kewajiban			Ekuitas			
									Jangka Pendek	Jangka Panjang	Total	Penyertaan Modal	Koreksi Nilai Aset Tetap	Laba (Rugi) Kumulatif	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	PD. Jati Mandiri Selisih pengakhiran penyertaan modal pada KSO Lingga Jati Bidang Usaha : Perdagangan, Informatika, Telematika, Air Bersih,	unaudited	-	342.765.000,00	-	40.104.803.431,00	6.681.665.245,00	47.129.233.676,00	4.635.241.312,50	-	4.635.241.312,50	51.351.000.000,00	174.075.107,00	(15.301.706.302,50)	36.223.368.804,50
												6.270.623.559,00			6.270.623.559,00
	Jumlah			342.765.000,00	-	40.104.803.431,00	6.681.665.245,00	47.129.233.676,00	4.635.241.312,50	-	4.635.241.312,50	57.621.623.559,00	174.075.107,00	(15.301.706.302,50)	42.493.992.363,50

Pemerintah Kota Cimahi
Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah
Pendapatan, Beban, dan Laba (Rugi) Bersih
Per 31 Desember 2021

No	Perusahaan Daerah	Sumber	Status	Pendapatan Usaha (Rp)	Beban Usaha (Rp)	Pendapatan Kotor (Rp)	Pendapatan Lain-lain (Rp)	Beban Lain-lain (Rp)	Laba (Rugi) Sebelum PKLB (Rp)	PKLB (Rp)	Laba (Rugi) Sebelum Pajak (Rp)	Pajak Penghasilan (Rp)	Laba (Rugi) Bersih (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8	9	10 = 7+8-9	11	12 = 10 - 11	13	14 = 12 - 13
1	PD. Jati Mandiri Bidang Usaha : Perdagangan, Informatika, Telematika, Air Bersih, Perumahan, dan jenis usaha lainnya	unaudited	-	-	166.351.823,00	(166.351.823,00)	-	-	(166.351.823,00)	-	(166.351.823,00)	-	(166.351.823,00)
	Jumlah			-	166.351.823,00	(166.351.823,00)	-	-	(166.351.823,00)	-	(166.351.823,00)	-	(166.351.823,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
MUTASI ASET TETAP
PER 31 DESEMBER 2021

SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP	Jumlah
DINAS PENDIDIKAN							
Saldo Awal (Audited)	62.055.425.372,00	69.783.163.703,36	190.393.418.050,00	599.205.674,00	45.222.982.551,85	5.802.795.214,31	373.856.990.565,52
Penambahan :	-	5.876.298.982,00	12.601.230.228,00	-	2.600.918.705,00	6.762.417.420,00	27.840.865.335,00
Pengurangan :	-	1.282.111.894,00	6.680.108.950,00	-	52.630.000,00	-	8.014.850.844,00
Saldo Akhir (Reviewed)	62.055.425.372,00	74.377.350.791,36	196.314.539.328,00	599.205.674,00	47.771.271.256,85	12.565.212.634,31	393.683.005.056,52
DINAS KESEHATAN							
Saldo Awal (Audited)	7.870.642.001,00	48.628.545.885,59	34.383.389.521,00	306.819.000,00	61.713.000,00	243.707.750,00	91.494.817.157,59
Penambahan :	-	3.385.138.559,50	13.152.084.596,00	-	-	-	16.537.223.155,50
Pengurangan :	-	99.201.088,99	727.126.500,00	-	-	-	826.327.588,99
Saldo Akhir (Reviewed)	7.870.642.001,00	51.914.483.356,10	46.808.347.617,00	306.819.000,00	61.713.000,00	243.707.750,00	107.205.712.724,10
RSUD CIBABAT							
Saldo Awal (Audited)	28.362.300.000,00	269.648.080.057,32	124.920.593.329,20	1.191.039.000,00	12.025.600,00	-	424.134.037.986,52
Penambahan :	-	12.863.962.662,00	2.582.449.000,00	-	-	-	15.446.411.662,00
Pengurangan :	-	3.940.000,00	-	-	-	-	3.940.000,00
Saldo Akhir (Reviewed)	28.362.300.000,00	282.508.102.719,32	127.503.042.329,20	1.191.039.000,00	12.025.600,00	-	439.576.509.648,52
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
Saldo Awal (Audited)	700.921.601.656,00	11.190.691.055,00	70.399.352.943,00	604.422.966.334,77	534.085.000,00	45.267.117.174,05	1.432.735.814.162,82
Penambahan :	-	481.961.150,00	47.002.416.838,00	99.706.798.956,00	-	134.300.371.475,00	281.491.548.419,00
Pengurangan :	-	46.191.750,00	47.968.093.238,00	85.348.196.797,00	-	-	133.362.481.785,00
Saldo Akhir (Reviewed)	700.921.601.656,00	11.626.460.455,00	69.433.676.543,00	618.781.568.493,77	534.085.000,00	179.567.488.649,05	1.580.864.880.796,82
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
Saldo Awal (Audited)	124.709.863.374,00	12.705.072.439,12	25.613.172.379,00	117.806.347.650,00	16.709.937.259,00	258.145.030,00	297.802.538.131,12
Penambahan :	1.545.337.518,00	561.562.798,00	645.046.098,00	20.398.004.454,00	74.443.556,00	-	23.224.394.424,00
Pengurangan :	-	1.610.768,00	385.840.006,00	-	182.467.000,00	-	569.917.774,00
Saldo Akhir (Reviewed)	126.255.200.892,00	13.265.024.469,12	25.872.378.471,00	138.204.352.104,00	16.601.913.815,00	258.145.030,00	320.457.014.781,12
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							
Saldo Awal (Audited)	-	16.327.978.499,34	1.622.402.950,00	-	97.119.000,00	-	18.047.500.449,34
Penambahan :	-	442.193.000,00	178.457.793,00	-	-	-	620.650.793,00
Pengurangan :	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Akhir (Reviewed)	-	16.770.171.499,34	1.800.860.743,00	-	97.119.000,00	-	18.668.151.242,34
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							
Saldo Awal (Audited)	-	1.563.982.646,00	-	-	9.800.000,00	-	1.573.782.646,00
Penambahan :	-	586.517.450,00	-	-	69.826.000,00	-	656.343.450,00
Pengurangan :	-	1.200.000,00	-	-	69.826.000,00	-	71.026.000,00
Saldo Akhir (Reviewed)	-	2.149.300.096,00	-	-	9.800.000,00	-	2.159.100.096,00

SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP	Jumlah
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
Saldo Awal (Audited)	-	4.837.671.056,48	645.033.000,00	-	3.999.380,62	-	5.486.703.437,10
Penambahan :	-	342.064.150,00	-	-	-	-	342.064.150,00
Pengurangan :	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Akhir (Reviewed)	-	5.179.735.206,48	645.033.000,00	-	3.999.380,62	-	5.828.767.587,10
DINAS TENAGA KERJA							
Saldo Awal (Audited)	1.350.000.000,00	2.493.467.100,00	636.000.000,00	-	5.790.000,00	-	4.485.257.100,00
Penambahan :	-	165.425.000,00	42.001.198,00	-	-	-	207.426.198,00
Pengurangan :	1.350.000.000,00	349.165.000,00	678.001.198,00	-	-	-	2.377.166.198,00
Saldo Akhir (Reviewed)	-	2.309.727.100,00	-	-	5.790.000,00	-	2.315.517.100,00
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN							
Saldo Awal (Audited)	14.252.840.000,00	5.008.598.254,09	12.326.244.221,00	4.149.277.550,00	270.975.000,00	-	36.007.935.025,09
Penambahan :	-	236.190.964,90	290.024.465,10	-	-	-	526.215.430,00
Pengurangan :	-	70.600.000,00	177.770.430,00	-	-	-	248.370.430,00
Saldo Akhir (Reviewed)	14.252.840.000,00	5.174.189.218,99	12.438.498.256,10	4.149.277.550,00	270.975.000,00	-	36.285.780.025,09
DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
Saldo Awal (Audited)	21.755.801.960,00	32.382.616.505,76	11.505.848.320,00	5.113.041.096,00	8.800.000,00	49.225.000,00	70.815.332.881,76
Penambahan :	-	5.055.771.650,00	645.673.138,00	210.897.095,00	-	-	5.912.341.883,00
Pengurangan :	-	933.669.350,00	198.897.095,00	-	-	-	1.132.566.445,00
Saldo Akhir (Reviewed)	21.755.801.960,00	36.504.718.805,76	11.952.624.363,00	5.323.938.191,00	8.800.000,00	49.225.000,00	75.595.108.319,76
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
Saldo Awal (Audited)	-	8.901.156.648,00	41.036.000,00	186.635.000,00	48.674.800,00	-	9.177.502.448,00
Penambahan :	-	524.758.400,00	-	-	30.760.000,00	-	555.518.400,00
Pengurangan :	-	2.600.000,00	-	-	30.760.000,00	-	33.360.000,00
Saldo Akhir (Reviewed)	-	9.423.315.048,00	41.036.000,00	186.635.000,00	48.674.800,00	-	9.699.660.848,00
DINAS PERHUBUNGAN							
Saldo Awal (Audited)	8.319.000.000,00	39.006.446.170,00	14.014.047.100,00	52.325.558.438,00	3.765.000,00	-	113.668.816.708,00
Penambahan :	-	393.968.100,00	167.754.000,00	3.666.456.600,00	-	-	4.228.178.700,00
Pengurangan :	-	-	80.741.000,00	-	-	-	80.741.000,00
Saldo Akhir (Reviewed)	8.319.000.000,00	39.400.414.270,00	14.101.060.100,00	55.992.015.038,00	3.765.000,00	-	117.816.254.408,00
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN							
Saldo Awal (Audited)	98.000.000,00	8.071.339.064,00	1.538.152.000,00	-	1.173.553.756,00	-	10.881.044.820,00
Penambahan :	-	3.618.936.943,00	1.001.658.191,00	220.487.300,00	91.554.675,00	-	4.932.637.109,00
Pengurangan :	-	236.311.300,00	-	-	17.490.000,00	-	253.801.300,00
Saldo Akhir (Reviewed)	98.000.000,00	11.453.964.707,00	2.539.810.191,00	220.487.300,00	1.247.618.431,00	-	15.559.880.629,00
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN							
Saldo Awal (Audited)	9.272.750.000,00	14.354.960.858,98	160.244.288.117,00	1.574.060.725,00	364.050.825,00	-	185.810.110.525,98
Penambahan :	-	985.474.650,00	408.052.239,00	-	-	-	1.393.526.889,00
Pengurangan :	-	5.890.000,00	-	-	-	-	5.890.000,00
Saldo Akhir (Reviewed)	9.272.750.000,00	15.334.545.508,98	160.652.340.356,00	1.574.060.725,00	364.050.825,00	-	187.197.747.414,98

SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP	Jumlah
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							-
Saldo Awal (Audited)	-	4.779.923.094,00	-		4.440.000,00	305.808.750,00	5.090.171.844,00
Penambahan :	-	3.512.834.132,00	13.560.482.737,00	-	60.146.000,00	15.158.224.050,00	32.291.686.919,00
Pengurangan :	-	159.496.160,00	13.560.482.737,00	-	60.146.000,00	-	13.780.124.897,00
Saldo Akhir (Reviewed)	-	8.133.261.066,00	-	-	4.440.000,00	15.464.032.800,00	23.601.733.866,00
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							-
Saldo Awal (Audited)	26.892.778.850,00	1.414.968.996,00	1.516.592.500,00	-	245.025.000,00	-	30.069.365.346,00
Penambahan :	1.729.076.400,00	547.570.000,00	3.555.494.625,00	-	-	3.848.565.175,00	9.680.706.200,00
Pengurangan :	4.396.200,00	-	2.753.655.625,00	-	-	-	2.758.051.825,00
Saldo Akhir (Reviewed)	28.617.459.050,00	1.962.538.996,00	2.318.431.500,00	-	245.025.000,00	3.848.565.175,00	36.992.019.721,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							-
Saldo Awal (Audited)	-	4.384.988.951,26	-	-	9.800.000,00	-	4.394.788.951,26
Penambahan :	-	333.597.240,00	-	-	-	-	333.597.240,00
Pengurangan :	-	117.293.500,00	-	-	-	-	117.293.500,00
Saldo Akhir (Reviewed)	-	4.601.292.691,26	-	-	9.800.000,00	-	4.611.092.691,26
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH							-
Saldo Awal (Audited)	-	9.156.011.540,00			226.000.000,00	-	9.382.011.540,00
Penambahan :	-	2.473.930.000,00	-	-	2.000.000,00	-	2.475.930.000,00
Pengurangan :	-	386.098.000,00	-	-	2.000.000,00	-	388.098.000,00
Saldo Akhir (Reviewed)	-	11.243.843.540,00	-	-	226.000.000,00	-	11.469.843.540,00
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH							-
Saldo Awal (Audited)	-	5.932.472.571,66	167.033.430,00	-	91.863.000,00	-	6.191.369.001,66
Penambahan :	-	95.479.500,00	-	-	-	-	95.479.500,00
Pengurangan :	-	1.892.000,00	-	-	-	-	1.892.000,00
Saldo Akhir (Reviewed)	-	6.026.060.071,66	167.033.430,00	-	91.863.000,00	-	6.284.956.501,66
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH							-
Saldo Awal (Audited)	-	2.797.872.017,00	-	-	-	-	2.797.872.017,00
Penambahan :	-	145.974.000,00	-	-	-	-	145.974.000,00
Pengurangan :	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Akhir (Reviewed)	-	2.943.846.017,00	-	-	-	-	2.943.846.017,00
SEKRETARIAT DAERAH							-
Saldo Awal (Audited)	6.164.015.740,00	35.497.887.279,00	58.029.695.114,00	175.060.800,00	500.749.922,00		100.367.408.855,00
Penambahan :	-	2.898.378.407,78	344.347.075,00	-	-	-	3.242.725.482,78
Pengurangan :	-	1.297.134.000,00	45.910.000,78	-	-	-	1.343.044.000,78
Saldo Akhir (Reviewed)	6.164.015.740,00	37.099.131.686,78	58.328.132.188,22	175.060.800,00	500.749.922,00	-	102.267.090.337,00
SEKRETARIAT DPRD							-
Saldo Awal (Audited)	2.756.775.000,00	18.053.371.481,00	12.270.490.134,00	-	2.261.194.720,00	-	35.341.831.335,00
Penambahan :	-	1.101.947.600,00	140.725.693,00	-	-	-	1.242.673.293,00
Pengurangan :	-	2.101.681.750,00	140.725.693,00	-	-	-	2.242.407.443,00
Saldo Akhir (Reviewed)	2.756.775.000,00	17.053.637.331,00	12.270.490.134,00	-	2.261.194.720,00	-	34.342.097.185,00

SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP	Jumlah
INSPEKTORAT KOTA							-
Saldo Awal (Audited)	-	2.211.537.061,00	4.253.273.060,00	-	-	-	6.464.810.121,00
Penambahan :	-	72.335.000,00	207.890.077,00	-	-	-	280.225.077,00
Pengurangan :	-	7.550.000,00	-	-	-	-	7.550.000,00
Saldo Akhir (Reviewed)	-	2.276.322.061,00	4.461.163.137,00	-	-	-	6.737.485.198,00
KECAMATAN CIMAHI UTARA							-
Saldo Awal (Audited)	12.194.245.000,00	6.189.294.957,55	6.539.117.500,00	239.411.363,86	7.792.489,00	-	25.169.861.310,41
Penambahan :	-	142.762.200,00	-	0,14	-	-	142.762.200,14
Pengurangan :	-	26.730.500,00	-	189.853.000,00	-	-	216.583.500,00
Saldo Akhir (Reviewed)	12.194.245.000,00	6.305.326.657,55	6.539.117.500,00	49.558.364,00	7.792.489,00	-	25.096.040.010,55
KECAMATAN CIMAHI TENGAH							-
Saldo Awal (Audited)	10.506.345.128,00	9.030.058.802,28	8.212.943.300,00	21.263.637,00	3.896.246,00	-	27.774.507.113,28
Penambahan :	-	418.140.700,00	3.576.142.281,00	-	-	-	3.994.282.981,00
Pengurangan :	-	1.582.000,00	-	-	-	-	1.582.000,00
Saldo Akhir (Reviewed)	10.506.345.128,00	9.446.617.502,28	11.789.085.581,00	21.263.637,00	3.896.246,00	-	31.767.208.094,28
KECAMATAN CIMAHI SELATAN							-
Saldo Awal (Audited)	15.227.905.000,00	8.438.613.428,75	6.549.570.600,00	163.000.511,00	9.812.492,00	-	30.388.902.031,75
Penambahan :	-	371.420.174,00	200.929.361,00	26.574.173,75	-	-	598.923.708,75
Pengurangan :	-	26.574.173,75	102.336.500,00	-	-	-	128.910.673,75
Saldo Akhir (Reviewed)	15.227.905.000,00	8.783.459.429,00	6.648.163.461,00	189.574.684,75	9.812.492,00	-	30.858.915.066,75
KANTOR KESATUAN BANGSA							-
Saldo Awal (Audited)	2.075.500.000,00	906.720.783,00	-	-	3.446.000,00	-	2.985.666.783,00
Penambahan :		18.165.263,00	-	-	-	-	18.165.263,00
Pengurangan :	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Akhir (Reviewed)	2.075.500.000,00	924.886.046,00	-	-	3.446.000,00	-	3.003.832.046,00
TOTAL	1.056.705.806.799,00	694.191.726.346,98	772.624.864.228,52	826.964.855.561,52	70.405.620.977,47	211.996.377.038,36	3.632.889.250.951,85

Saldo Awal (Audited)	1.054.785.789.081,00	653.697.490.905,54	745.821.693.568,20	788.273.686.779,63	67.891.291.041,47	51.926.798.918,36	3.362.396.750.294,20
Penambahan :	3.274.413.918,00	47.652.758.676,18	100.302.859.633,10	124.229.218.578,89	2.929.648.936,00	160.069.578.120,00	438.458.477.862,17
Pengurangan :	1.354.396.200,00	7.158.523.234,74	73.499.688.972,78	85.538.049.797,00	415.319.000,00	-	167.965.977.204,52
Saldo Akhir (Reviewed)	1.056.705.806.799,00	694.191.726.346,98	772.624.864.228,52	826.964.855.561,52	70.405.620.977,47	211.996.377.038,36	3.632.889.250.951,85

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
REKAPITULASI LAPORAN ASET TETAP BOS TAHUN 2021

No. Urut	Nama Sekolah	BELANJA MODAL ASET TETAP			Jumlah Belanja Modal Bos
		Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tetap lainnya	
1	SD NEGERI BAROS MANDIRI 1	70.156.000,00		18.997.100,00	89.153.100,00
2	SD NEGERI BAROS MANDIRI 2	43.900.000,00		32.539.000,00	76.439.000,00
3	SD NEGERI BAROS MANDIRI 3	27.255.600,00		18.612.000,00	45.867.600,00
4	SD NEGERI BAROS MANDIRI 4	101.650.000,00		16.211.800,00	117.861.800,00
5	SD NEGERI BAROS MANDIRI 5	15.400.000,00		10.670.000,00	26.070.000,00
6	SD NEGERI BAROS MANDIRI 6	19.800.000,00		27.270.700,00	47.070.700,00
7	SD NEGERI BAROS MANDIRI 7	18.400.000,00		12.114.000,00	30.514.000,00
8	SD NEGERI BINA HARAPAN	62.368.900,00		2.211.700,00	64.580.600,00
9	SD NEGERI CIBABAT 2	25.400.000,00			25.400.000,00
10	SD NEGERI CIBABAT 4	26.150.000,00			26.150.000,00
11	SD NEGERI CIBABAT 5	133.750.000,00			133.750.000,00
12	SD NEGERI CIBABAT MANDIRI 1	105.626.000,00		28.266.900,00	133.892.900,00
13	SD NEGERI CIBABAT MANDIRI 2	167.894.100,00		62.709.700,00	230.603.800,00
14	SD NEGERI CIBABAT MANDIRI 3	67.453.000,00			67.453.000,00
15	SD NEGERI CIBABAT MANDIRI 4	62.270.000,00			62.270.000,00
16	SD NEGERI CIBABAT MANDIRI 5	192.144.818,00		21.485.000,00	213.629.818,00
17	SD NEGERI CIBEGER 1	9.021.000,00			9.021.000,00
18	SD NEGERI CIBEGER 2	10.082.500,00		1.094.600,00	11.177.100,00
19	SD NEGERI CIBEGER 3	76.315.000,00		16.124.000,00	92.439.000,00
20	SD NEGERI CIBEGER 4	19.040.000,00		1.444.700,00	20.484.700,00
21	SD NEGERI CIBEGER MANDIRI 1	45.320.000,00		23.289.200,00	68.609.200,00
22	SD NEGERI CIBEGER MANDIRI 2	68.553.000,00		18.650.200,00	87.203.200,00
23	SD NEGERI CIBEUREUM 5	16.240.000,00		27.183.300,00	43.423.300,00
24	SD NEGERI CIBEUREUM 7	15.000.000,00		15.613.300,00	30.613.300,00
25	SD NEGERI CIBEUREUM MANDIRI 1	37.750.784,00		23.065.100,00	60.815.884,00
26	SD NEGERI CIBEUREUM MANDIRI 2	106.519.800,00		84.523.800,00	191.043.600,00
27	SD NEGERI CIBODAS 1	21.940.000,00		13.468.000,00	35.408.000,00
28	SD NEGERI CIBODAS 2	13.812.500,00		21.853.000,00	35.665.500,00
29	SD NEGERI CIBODAS 3	14.114.200,00		9.298.300,00	23.412.500,00
30	SD NEGERI CIGUGUR TENGAH	3.350.000,00		18.971.100,00	22.321.100,00
31	SD NEGERI CIGUGUR TENGAH MANDIRI 1	65.951.750,00		47.519.900,00	113.471.650,00
32	SD NEGERI CIGUGUR TENGAH MANDIRI 2	76.800.000,00		13.930.700,00	90.730.700,00
33	SD NEGERI CIMAHI MANDIRI 1	147.190.600,00		6.972.800,00	154.163.400,00
34	SD NEGERI CIMAHI MANDIRI 2	93.725.000,00		24.235.000,00	117.960.000,00
35	SD NEGERI CIMAHI MANDIRI 3	19.700.000,00		37.355.500,00	57.055.500,00
36	SD NEGERI CIMAHI MANDIRI 4	24.765.000,00		25.124.000,00	49.889.000,00
37	SD NEGERI CIMAHI MANDIRI 5	13.000.000,00		33.631.000,00	46.631.000,00
38	SD NEGERI CIMINDI 2	3.360.000,00			3.360.000,00
39	SD NEGERI CIMINDI 4	18.580.000,00		939.000,00	19.519.000,00
40	SD NEGERI CIMINDI 5	13.858.800,00			13.858.800,00
41	SD NEGERI CIPAGERAN MANDIRI 1	196.504.500,00		132.610.000,00	329.114.500,00
42	SD NEGERI CIPAGERAN MANDIRI 2	50.680.000,00		32.072.700,00	82.752.700,00
43	SD NEGERI CIPAGERAN MANDIRI 3	30.400.000,00		5.418.000,00	35.818.000,00
44	SD NEGERI CIPAGERAN MANDIRI 4	3.650.000,00		15.470.000,00	19.120.000,00
45	SD NEGERI CIREUNDEU				-
46	SD NEGERI CITEUREUP MANDIRI 1	31.890.000,00		73.917.400,00	105.807.400,00
47	SD NEGERI CITEUREUP MANDIRI 2	54.700.000,00		85.940.200,00	140.640.200,00
48	SD NEGERI CITEUREUP MANDIRI 3	80.180.000,00		31.115.000,00	111.295.000,00
49	SD NEGERI HARAPAN 1	25.997.500,00			25.997.500,00
50	SD NEGERI HARAPAN 2	21.100.000,00		5.433.300,00	26.533.300,00
51	SD NEGERI KARANGMEKAR MANDIRI 1	175.730.000,00		21.313.000,00	197.043.000,00

No. Urut	Nama Sekolah	BELANJA MODAL ASET TETAP			Jumlah Belanja Modal Bos
		Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tetap lainnya	
52	SD NEGERI KARANGMEKAR MANDIRI 2	10.450.000,00		12.838.500,00	23.288.500,00
53	SD NEGERI KARYA BAKTI	22.322.900,00		2.250.000,00	24.572.900,00
54	SD NEGERI KIHAPIT	31.400.000,00		7.203.500,00	38.603.500,00
55	SD NEGERI LEUWIGAJAH 2	20.735.000,00			20.735.000,00
56	SD NEGERI LEUWIGAJAH 3	63.522.200,00		19.537.300,00	83.059.500,00
57	SD NEGERI LEUWIGAJAH 5	49.500.000,00		18.036.200,00	67.536.200,00
58	SD NEGERI LEUWIGAJAH 6	47.715.000,00		25.775.300,00	73.490.300,00
59	SD NEGERI LEUWIGAJAH MANDIRI 1	105.950.000,00		20.417.900,00	126.367.900,00
60	SD NEGERI LINGGABUDI	75.615.400,00		20.009.000,00	95.624.400,00
61	SD NEGERI MELONG ASIH 4	18.692.500,00		7.950.900,00	26.643.400,00
62	SD NEGERI MELONG ASIH 5	21.350.000,00		9.277.900,00	30.627.900,00
63	SD NEGERI MELONG ASIH 7	21.980.500,00		4.870.000,00	26.850.500,00
64	SD NEGERI MELONG ASIH 8	18.400.000,00		9.967.600,00	28.367.600,00
65	SD NEGERI MELONG MANDIRI 1	37.647.040,00		8.779.800,00	46.426.840,00
66	SD NEGERI MELONG MANDIRI 2	261.757.480,00		37.650.000,00	299.407.480,00
67	SD NEGERI MELONG MANDIRI 3	25.142.000,00		18.435.500,00	43.577.500,00
68	SD NEGERI MELONG MANDIRI 4	137.757.665,00		35.939.200,00	173.696.865,00
69	SD NEGERI MELONG MANDIRI 5	48.868.000,00		23.911.400,00	72.779.400,00
70	SD NEGERI MELONG MANDIRI 6	95.503.800,00		39.523.900,00	135.027.700,00
71	SD NEGERI MELONG MANDIRI 7	75.441.400,00		23.019.000,00	98.460.400,00
72	SD NEGERI PADASUKA MANDIRI 1	45.050.000,00		22.676.300,00	67.726.300,00
73	SD NEGERI PADASUKA MANDIRI 2	80.254.545,00		5.791.355,00	86.045.900,00
74	SD NEGERI PADASUKA MANDIRI 3	31.920.000,00		40.962.700,00	72.882.700,00
75	SD NEGERI PADASUKA MANDIRI 4	97.105.000,00		5.044.400,00	102.149.400,00
76	SD NEGERI PAMBUDI DHARMA	23.020.600,00		15.215.600,00	38.236.200,00
77	SD NEGERI PASIRKALIKI MANDIRI 1	20.190.000,00		57.701.000,00	77.891.000,00
78	SD NEGERI PASIRKALIKI MANDIRI 2	26.425.000,00		84.190.200,00	110.615.200,00
79	SD NEGERI RANCABENTANG 3	35.566.900,00		41.092.300,00	76.659.200,00
80	SD NEGERI SETIAMANAH MANDIRI 1	59.059.750,00		34.598.500,00	93.658.250,00
81	SD NEGERI SETIAWARGA	27.246.800,00		20.871.200,00	48.118.000,00
82	SD NEGERI SINDANGSARI	62.220.000,00		11.804.700,00	74.024.700,00
83	SD NEGERI SUKAMAJU 1	9.200.000,00		5.482.400,00	14.682.400,00
84	SD NEGERI SUKAMAJU 2	5.702.500,00		698.700,00	6.401.200,00
85	SD NEGERI SUKANAMPA	74.916.000,00		30.017.000,00	104.933.000,00
86	SD NEGERI TUNAS HARAPAN	24.150.000,00		14.833.000,00	38.983.000,00
87	SD NEGERI TUNAS MEKAR	25.820.000,00		20.803.200,00	46.623.200,00
88	SD NEGERI UTAMA 3			1.304.900,00	1.304.900,00
89	SD NEGERI UTAMA 6	32.550.000,00		15.596.000,00	48.146.000,00
90	SD NEGERI UTAMA 7	6.000.000,00		6.167.000,00	12.167.000,00
91	SD NEGERI UTAMA MANDIRI 1	44.165.000,00		18.704.700,00	62.869.700,00
TOTAL BOS SD		4.664.753.332,00	-	1.917.612.055,00	6.582.365.387,00
1	SMP NEGERI 1	85.185.000,00		45.316.500,00	130.501.500,00
2	SMP NEGERI 2	267.399.000,00			267.399.000,00
3	SMP NEGERI 3	89.706.000,00		29.311.500,00	119.017.500,00
4	SMP NEGERI 4	21.842.000,00		24.011.000,00	45.853.000,00
5	SMP NEGERI 5	38.305.000,00		20.077.500,00	58.382.500,00
6	SMP NEGERI 6	61.672.250,00		58.498.000,00	120.170.250,00
7	SMP NEGERI 7	88.080.000,00		16.450.000,00	104.530.000,00
8	SMP NEGERI 8	63.195.000,00		36.658.250,00	99.853.250,00
9	SMP NEGERI 9	87.149.500,00		-	87.149.500,00
10	SMP NEGERI 10	69.000.000,00		67.283.000,00	136.283.000,00
11	SMP NEGERI 11	27.000.000,00		12.172.100,00	39.172.100,00
12	SMP NEGERI 12	77.875.000,00		85.501.500,00	163.376.500,00
13	SMP NEGERI 13	11.080.000,00		75.931.350,00	87.011.350,00
14	SMP NEGERI 14	6.781.000,00	-	71.665.100,00	78.446.100,00

No. Urut	Nama Sekolah	BELANJA MODAL ASET TETAP			Jumlah Belanja Modal Bos
		Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tetap lainnya	
15	SMP NEGERI 15	28.776.300,00	-	53.310.000,00	82.086.300,00
16	SMP NEGERI 16	375.000,00	-	79.390.850,00	79.765.850,00
TOTAL BOS SMP		1.023.421.050,00	-	675.576.650,00	1.698.997.700,00
TOTAL DANA BOS SD DAN SMP		5.688.174.382,00	-	2.593.188.705,00	8.281.363.087,00

Daftar Aset Tetap Tanah yang Belum Jelas Kepemilikannya

NO	KODE ASET	NOMOR REGISTER	NAMA ASET	ALAMAT	NO SERTIFIKAT	TAHUN PEROLEHAN	NILAI	KETERANGAN	URAIAN	
1	01.11.08.01.	11	Tanah Jalan	JL. SRIWIJAYA / CIMAHI TENGAH		2004	3.192.000.000,00	Proses Klarifikasi dengan TNI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	Proses Klarifikasi dengan TNI
2	01.13.07.03.	5	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	jl. sriwijaya kec.cimahi tengah		2015	8.506.970.000,00	Proses Klarifikasi dengan TNI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	Proses Klarifikasi dengan TNI
3	01.11.08.01.	12	Tanah Jalan	JL. SANGAJARI (ACCESS TOL)		2004	10.718.400.000,00	Proses Klarifikasi dengan Jasamarga	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	Proses Klarifikasi dengan Jasamarga
4	01.13.07.03.	22	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	jl. hms mintaredja, sh (acces Tol)		2015	7.092.000.000,00	Proses Klarifikasi dengan Jasamarga	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	Proses Klarifikasi dengan Jasamarga
5	01.11.08.01.	40	Tanah Jalan	JL. GATOT SUBROTO / CIMAHI TENGAH		2004	14.011.480.000,00	RUAS JALAN PROVINSI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	RUAS JALAN PROVINSI
6	01.11.08.01.	44	Tanah Jalan	LEUWIGAJAH - LAGADAR / CIMAHI SELATAN		2004	9.394.200.000,00	RUAS JALAN PROVINSI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	RUAS JALAN PROVINSI
7	01.11.08.01.	50	Tanah Jalan	CIMAHI - JAMBUDIPA (JL. KOLONEL MASTURI)		2004	15.680.000.000,00	RUAS JALAN PROVINSI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	RUAS JALAN PROVINSI
8	01.11.08.01.	58	Tanah Jalan	CIMAHI - LEUWIGAJAH (JL. BAROS) / CIMAHI SELATAN		2004	12.801.000.000,00	RUAS JALAN PROVINSI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	RUAS JALAN PROVINSI
9	01.11.08.01.	54	Tanah Jalan	JL. GEDUNG EMPAT / CIMAHI TENGAH		2004	2.227.200.000,00	Proses Klarifikasi dengan TNI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	Proses Klarifikasi dengan TNI
10	01.13.07.03.	2	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	jl. gedung empat kec.cimahi tengah		2015	4.872.150.000,00	Proses Klarifikasi dengan TNI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	Proses Klarifikasi dengan TNI
11	01.11.08.01.	55	Tanah Jalan	JL. PONCOL - KALIDAM - GATOT SUBROTO / CIMAHI TENGAH		2004	5.516.000.000,00	Proses Klarifikasi dengan TNI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	Proses Klarifikasi dengan TNI
12	01.13.07.03.	60	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	jl.poncol kec.cimahi tengah		2015	1.740.000.000,00	Proses Klarifikasi dengan TNI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	Proses Klarifikasi dengan TNI
13	01.11.08.01.	61	Tanah Jalan	JL. DUSTIRA / CIMAHI TENGAH		2004	1.645.875.000,00	Proses Klarifikasi dengan TNI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	Proses Klarifikasi dengan TNI
14	01.13.07.03.	4	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	jl. dustira kec.cimahi tengah		2015	2.110.500.000,00	Proses Klarifikasi dengan TNI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	Proses Klarifikasi dengan TNI
15	01.11.08.01.	64	Tanah Jalan	JL. KEWEDANAAN / CIMAHI TENGAH		2004	731.000.000,00	lokasi sebelah DPRD	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	lokasi sebelah DPRD

16	01.11.08.01.	69	Tanah Jalan	JL. PASAR KUMELI / CIMAHI TENGAH		2004	3.078.000.000,00	Proses Klarifikasi dengan TNI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	Proses Klarifikasi dengan TNI
17	01.13.07.03.	42	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	jl. pasir kumeli kec.cimahi tengah		2015	1.800.000.000,00	Proses Klarifikasi dengan TNI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	Proses Klarifikasi dengan TNI
18	01.11.08.01.	72	Tanah Jalan	JL. RATULANGI / CIMAHI TENGAH		2004	2.502.500.000,00	Proses Klarifikasi dengan TNI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	Proses Klarifikasi dengan TNI
19	01.13.07.03.	62	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	jl.jl.sam ratulangi		2015	908.400.000,00	Proses Klarifikasi dengan TNI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	Proses Klarifikasi dengan TNI
20	01.11.08.01.	76	Tanah Jalan	JL. PASOPATI / CIMAHI TENGAH		2004	900.900.000,00	Proses Klarifikasi dengan TNI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	Proses Klarifikasi dengan TNI
21	01.13.07.03.	63	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	jl.pasopati kec.cimahi tengah		2015	874.800.000,00	Proses Klarifikasi dengan TNI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	Proses Klarifikasi dengan TNI
22	01.11.08.01.	77	Tanah Jalan	JL. KARTINI / CIMAHI TENGAH		2004	542.850.000,00	Proses Klarifikasi dengan TNI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	Proses Klarifikasi dengan TNI
23	01.13.07.03.	65	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	jl.taman kartini kec.cimahi tengah		2015	616.400.000,00	Proses Klarifikasi dengan TNI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	Proses Klarifikasi dengan TNI
24	01.11.08.01.	1	Tanah Jalan	Jl. Lapang Tembak		2016	145.780.000,00	Proses Klarifikasi dengan TNI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	Proses Klarifikasi dengan TNI
25	01.11.08.01.	2	Tanah Jalan	Jl. Kebon Sari		2016	209.430.000,00	TANAH MILIK PT KAI BERDASARKAN SERTIFIKAT HAK PAKAI NO.01 TAHUN 1988 BAROS SELUAS 77,200 BERDAASRKAN SURAT PT KAI DAOP 2 BANDUNG NO : KA.204/VIII/DO.2019 TANGGAL 12 AGUSTUS 2019	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	TANAH MILIK PT KAI BERDASARKAN SERTIFIKAT HAK PAKAI NO.01 TAHUN 1988 BAROS SELUAS 77,200 BERDAASRKAN SURAT PT KAI DAOP 2 BANDUNG NO : KA.204/VIII/DO.2019 TANGGAL 12 AGUSTUS 2019
26	01.11.08.01.	3	Tanah Jalan	Jl. Munajan		2016	82.620.000,00	Proses Klarifikasi dengan TNI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	Proses Klarifikasi dengan TNI
27	01.11.08.01.	4	Tanah Jalan	Jl. Unjani		2016	96.900.000,00	Proses Klarifikasi dengan TNI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	Proses Klarifikasi dengan TNI
28	01.11.08.01.	5	Tanah Jalan	Jl. Pojok Selatan		2016	673.260.000,00	Proses Klarifikasi dengan TNI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	Proses Klarifikasi dengan TNI
29	01.11.08.01.	52	Tanah Jalan	JL. SISINGAMANGARAJA / CIMAHI TENGAH		2004	4.695.680.000,00	Proses Klarifikasi dengan TNI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	Proses Klarifikasi dengan TNI
30	01.13.07.03.	41	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	jl.sisingamaraja kec.cimahi tengah		2015	4.510.080.000,00	Proses Klarifikasi dengan TNI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	Proses Klarifikasi dengan TNI
31	01.11.08.01.	22	Tanah Jalan	JL. SIMPANG / CIMAHI TENGAH		2004	923.930.000,00	Proses Klarifikasi dengan TNI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	Proses Klarifikasi dengan TNI

32	01.13.07.03.	37	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	jl.simpang		2015	923.930.000,00	Proses Klarifikasi dengan TNI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	Proses Klarifikasi dengan TNI
33	01.13.07.03.	59	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	jl.kalidam kec.cimahi tengah		2015	4.227.390.000,00	Proses Klarifikasi dengan TNI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	Proses Klarifikasi dengan TNI
34	01.11.08.01.	65	Tanah Jalan	JL. TERUSAN KALIDAM / CIMAHI TENGAH		2004	1.418.400.000,00	Proses Klarifikasi dengan TNI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	Proses Klarifikasi dengan TNI
35	01.13.07.03.	61	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	jl.terusan kalidam kec.cimahi selatan		2015	482.400.000,00	Proses Klarifikasi dengan TNI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	Proses Klarifikasi dengan TNI
36	01.11.08.01.	73	Tanah Jalan	JL. URIP S. / CIMAHI TENGAH		2004	1.386.000.000,00	Proses Klarifikasi dengan TNI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	Proses Klarifikasi dengan TNI
37	01.13.07.03.	38	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	jl.urip sumohardjo kec.cimahi tengah		2015	874.800.000,00	Proses Klarifikasi dengan TNI	Aset Tetap belum jelas kepemilikannya	Proses Klarifikasi dengan TNI
							132.113.225.000,00			

Aset Tetap Lainnya yang seharusnya dicatat pada KIB C

NO	NMUNIT	KDASET	NMASET	TAHUN	NOREG	NILAI	KET
1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.3.5.05.01.01.004.	Tanaman Hortikultura	2013	0024	199.223.000,00	Pagar Taman Kartini Tahap I
2	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.3.5.05.01.01.004.	Tanaman Hortikultura	2017	0024	198.456.000,00	Site Furniture
3	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.3.5.05.01.01.004.	Tanaman Hortikultura	2014	0005	198.181.000,00	Tugu Visi
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.3.5.05.01.01.004.	Tanaman Hortikultura	2013	0022	181.000.000,00	Taman Twister
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.3.5.05.01.01.004.	Tanaman Hortikultura	2015	0021	685.169.383,00	Taman Bawah Flyover Cimindi
6	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.3.5.05.01.01.004.	Tanaman Hortikultura	2015	0020	674.196.300,00	Taman Bawah Flyover Cimindi
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.3.5.05.01.01.004.	Tanaman Hortikultura	2015	0024	627.972.900,00	Taman Sekitar Flyover Cimindi-Koridor Jalan Maharmartanegara
8	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.3.5.05.01.01.004.	Tanaman Hortikultura	2015	0025	510.242.436,00	Taman Sekitar Flyover Cimindi-Koridor Jalan Maharmartanegara
9	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.3.5.05.01.01.004.	Tanaman Hortikultura	2015	0023	461.463.400,00	Taman Jalan Aruman
10	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.3.5.05.01.01.004.	Tanaman Hortikultura	2018	0024	421.310.000,00	Taman Lingkungan di Kelurahan Melong (13 RW)
					Jumlah	4.157.214.419,00	

PENYUSUTAN ASET TETAP TAHUN 2021

NO	SOPD	31 Desember 2020	Beban Penyusutan Tahun 2021	31 Desember 2021
1	Dinas Pendidikan	Rp 109.267.338.764,00	Rp 9.131.625.900,66	Rp 112.077.792.635,63
2	Dinas Kesehatan	Rp 47.562.076.787,50	Rp 4.902.788.768,71	Rp 52.856.560.010,75
3	RSUD Cibabat	Rp 199.251.097.734,00	Rp 39.270.687.570,62	Rp 239.857.371.732,78
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rp 449.166.012.663,48	Rp 32.961.709.548,05	Rp 464.205.096.388,74
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Rp 34.490.690.754,00	Rp 6.968.727.732,95	Rp 43.421.252.164,11
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rp 14.860.124.038,00	Rp 914.620.188,08	Rp 16.037.438.428,42
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 1.337.635.033,00	Rp 189.417.227,57	Rp 1.577.334.291,00
8	Dinas sosial, pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 4.344.503.976,00	Rp 399.290.334,14	Rp 4.759.737.095,15
9	Dinas Tenaga Kerja	Rp 2.182.615.671,00	Rp 110.175.821,43	Rp 2.135.839.100,00
10	Dinas Pangan dan Pertanian	Rp 8.768.014.347,00	Rp 670.339.945,73	Rp 9.466.876.185,38
11	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 29.292.726.911,00	Rp 3.340.057.073,91	Rp 34.307.562.206,06
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 8.110.325.751,00	Rp 679.843.191,15	Rp 8.904.268.942,21
13	Dinas Perhubungan	Rp 47.069.742.803,00	Rp 7.569.397.553,51	Rp 59.722.123.814,49
14	Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan	Rp 7.096.249.478,00	Rp 1.016.248.311,10	Rp 8.151.611.664,72
15	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian	Rp 33.203.232.486,00	Rp 4.450.033.917,10	Rp 38.683.527.826,08
16	Dinas Penanaman Modal PTSP	Rp 4.552.786.746,00	Rp 542.740.641,83	Rp 5.059.150.954,81
17	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	Rp 1.268.760.182,00	Rp 231.269.151,83	Rp 1.791.162.945,14
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 3.999.874.334,00	Rp 255.122.883,51	Rp 4.339.923.582,59
19	BPKAD	Rp 8.443.972.160,00	Rp 714.197.787,18	Rp 10.661.937.968,92
20	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Rp 5.731.557.188,00	Rp 220.701.419,99	Rp 5.953.944.687,16
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Rp 2.551.910.071,00	Rp 208.806.246,43	Rp 2.783.397.192,00
22	Sekretariat Daerah	Rp 49.361.621.197,00	Rp 3.092.598.099,32	Rp 52.166.396.646,74
23	Sekretariat DPRD	Rp 18.862.210.761,00	Rp 1.858.081.343,61	Rp 19.733.322.922,30
24	Inspektorat Kota	Rp 2.226.910.697,00	Rp 290.736.706,16	Rp 2.562.410.721,96
25	Kecamatan Cimahi Utara	Rp 7.228.171.633,51	Rp 578.049.541,89	Rp 7.856.491.122,39
26	Kecamatan Cimahi Tengah	Rp 9.553.915.201,00	Rp 934.210.137,31	Rp 11.580.967.658,48
27	Kecamatan Cimahi Selatan	Rp 8.987.914.656,89	Rp 883.268.853,62	Rp 10.301.462.666,63
28	Kantor Kesatuan Bangsa	Rp 889.901.783,00	Rp 14.141.301,30	Rp 921.316.084,30
JUMLAH		Rp 1.119.661.893.807,38	Rp 122.398.887.198,70	Rp 1.231.876.277.638,95

DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD TAHUN 2021

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah Barang	Harga Perolehan	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akumulasi Amortisasi 2021	Akumulasi Amortisasi 2020	Beban Amortisasi 2021
1	Dinas Pendidikan			521.580.800,00	-	-	-	-	-	-	24.883.750,00	36.577.250,00	71.197.250,00	127.897.250,00	84.381.000,00	53.787.500,00	40.297.950,00	439.021.950,00	398.724.000,00	40.297.950,00
	Aplikasi/Sistem Informasi, Keg. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2021	1	84.521.800,00													21.130.450,00	21.130.450,00	-	21.130.450,00
	Sistem Penilaian Kinerja Guru	2019	1	76.670.000,00											19.167.500,00	19.167.500,00	19.167.500,00	57.502.500,00	38.335.000,00	19.167.500,00
	Aplikasi SIM Pendaftar Pendidikan	2016	1	46.774.000,00								11.693.500,00	11.693.500,00	11.693.500,00	11.693.500,00			46.774.000,00	46.774.000,00	-
	Software Dinas Pendidikan	2015	1	99.535.000,00							24.883.750,00	24.883.750,00	24.883.750,00	24.883.750,00	-			99.535.000,00	99.535.000,00	-
	Belanja Penyedia Jasa Pembangunan Aplikasi Web Dinas Pendidikan	2017	1	39.160.000,00									9.790.000,00	9.790.000,00	9.790.000,00	9.790.000,00		39.160.000,00	39.160.000,00	-
	Belanja Penyedia Jasa Aplikasi SIM Absensi Terintegrasi Bagi Guru	2017	1	49.500.000,00									12.375.000,00	12.375.000,00	12.375.000,00	12.375.000,00		49.500.000,00	49.500.000,00	-
	Belanja Penyedia Jasa Aplikasi BOS	2017	1	49.820.000,00									12.455.000,00	12.455.000,00	12.455.000,00	12.455.000,00		49.820.000,00	49.820.000,00	-
	Software Cost Off-line Computer (temuan BPK 2017) disdik dan sekolah	2016	1	75.600.000,00										56.700.000,00	18.900.000,00			75.600.000,00	75.600.000,00	-
2	Dinas Kesehatan			172.730.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	29.640.000,00	45.840.000,00	35.882.500,00	34.132.500,00	9.492.500,00	159.987.500,00	150.495.000,00	9.492.500,00
	SPTJB JAMPRO	2016	1	20.000.000,00								5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		-	20.000.000,00	20.000.000,00	-
	Sistem Pelayanan Terintegrasi (SIMPATI)	2017	1	79.860.000,00									19.965.000,00	19.965.000,00	19.965.000,00	19.965.000,00		79.860.000,00	79.860.000,00	-
	Software WEB Service Terintegrasi Sijarimas Cimahi	2017	1	18.700.000,00									4.675.000,00	4.675.000,00	4.675.000,00	4.675.000,00		18.700.000,00	18.700.000,00	-
	Pengadaan windows original (temuan BPK 2017)	2013	1	16.200.000,00										16.200.000,00			-	16.200.000,00	16.200.000,00	-
	Sistem Informasi SPM	2019	1	24.970.000,00											6.242.500,00	6.242.500,00	6.242.500,00	18.727.500,00	12.485.000,00	6.242.500,00
	Aplikasi Survei Kepuasan masyarakat	2020	1	8.000.000,00												2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Sistem Antrian paket	2020	1	5.000.000,00												1.250.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
3	RSUD			392.194.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243.587.500,00	45.986.000,00	36.498.500,00	33.061.000,00	359.133.000,00	326.072.000,00	33.061.000,00
	Software Billing (temuan BPK 2017)	2006	1	200.000.000,00										200.000.000,00				200.000.000,00	200.000.000,00	-
	Software Billing (temuan BPK 2017)	2011	1	8.250.000,00										8.250.000,00				8.250.000,00	8.250.000,00	-
	Software - BPJS C1 (temuan BPK 2017)	2016	1	37.950.000,00										28.462.500,00	9.487.500,00			37.950.000,00	37.950.000,00	-
	SIMRS (temuan BPK 2017)	2017	1	13.750.000,00										6.875.000,00	3.437.500,00	3.437.500,00		13.750.000,00	13.750.000,00	-
	License Software Billing	2019	1	6.294.000,00										1.573.500,00	1.573.500,00		1.573.500,00	4.720.500,00	3.147.000,00	1.573.500,00
	Aplikasi SKP	2019	1	57.200.000,00										14.300.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00		42.900.000,00	28.600.000,00	14.300.000,00
	Acronics Server dan Cloud ST	2019	1	44.825.000,00										11.206.250,00	11.206.250,00	11.206.250,00		33.618.750,00	22.412.500,00	11.206.250,00
	Multimedia Informasi	2019	1	23.925.000,00										5.981.250,00	5.981.250,00	5.981.250,00		17.943.750,00	11.962.500,00	5.981.250,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			1.117.395.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274.452.750,00	187.426.250,00	199.856.250,00	246.337.775,00	908.073.025,00	661.735.250,00	246.337.775,00
	Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang	2021	1	97.681.100,00													24.420.275,00	24.420.275,00		24.420.275,00
	Sistem informasi Movev Bangunan Gedung	2021	1	88.245.000,00													22.061.250,00	22.061.250,00		22.061.250,00
	Sistem Informasi Penataan Ruang pada Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	2020	1	49.720.000,00												12.430.000,00	12.430.000,00	24.860.000,00	12.430.000,00	12.430.000,00
	Sistem Informasi Penataan Ruang pada Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	2018	1	188.100.000,00										47.025.000,00	47.025.000,00	47.025.000,00	47.025.000,00	188.100.000,00	141.075.000,00	47.025.000,00
	Penyusunan Database Jaringan Jalan Kota Cimahi Berbasis GIS	2018	1	381.535.000,00										95.383.750,00	95.383.750,00	95.383.750,00	95.383.750,00	381.535.000,00	286.151.250,00	95.383.750,00
	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Penataan Ruang	2019	1	180.070.000,00											45.017.500,00	45.017.500,00	45.017.500,00	135.052.500,00	90.035.000,00	45.017.500,00
	Software Keuangan & Kepegawaian (temuan BPK 2017)	2007	1	49.940.000,00										49.940.000,00				49.940.000,00	49.940.000,00	-
	Software LAN (temuan BPK 2017)	2007	1	82.104.000,00										82.104.000,00				82.104.000,00	82.104.000,00	-
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman			275.132.000,00	-	-	-	-	-	-	-	23.189.375,00	23.189.375,00	38.897.375,00	46.370.500,00	45.593.625,00	43.874.875,00	221.115.125,00	177.240.250,00	43.874.875,00
	SIM UPT Air Minum	2016	1	44.027.500,00								11.006.875,00	11.006.875,00	11.006.875,00	11.006.875,00			44.027.500,00	44.027.500,00	-
	SIM Pelanggan Penyedotan Lumpur Tinja	2016	1	48.730.000,00								12.182.500,00	12.182.500,00	12.182.500,00	12.182.500,00			48.730.000,00	48.730.000,00	-
	Belanja Peningkatan Aplikasi Billing	2020	1	89.650.000,00												22.412.500,00	22.412.500,00	44.825.000,00	22.412.500,00	22.412.500,00
	Belanja Penyedia Jasa Aplikasi Revitalisasi SIM UPT PALD	2019	1	36.767.500,00											9.191.875,00	9.191.875,00	9.191.875,00	27.575.625,00	18.383.750,00	9.191.875,00
	Sistem Pencatatan Meter Air dan Online Billing	2018	1	49.082.000,00										12.270.500,00	12.270.500,00	12.270.500,00	12.270.500,00	49.082.000,00	36.811.500,00	12.270.500,00
	Sistem Operasi Windows Komputer Rusunawa (temuan BPK 2017)	2017	1	6.875.000,00										3.437.500,00	1.718.750,00	1.718.750,00		6.875.000,00	6.875.000,00	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran			65.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	16.250.000,00	5.000.000,00	55.000.000,00	50.000.000,00	5.000.000,00
	Website www.satpolppdamkar.cimahikot.a.go.id	2017	1	45.000.000,00									11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00		45.000.000,00	45.000.000,00	-
	Upgrade Aplikasi Sistem Papan Informasi	2020	1	20.000.000,00												5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah Barang	Harga Perolehan	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akumulasi Amortisasi 2021	Akumulasi Amortisasi 2020	Beban Amortisasi 2021
7	Dinas sosial, pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			32.640.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000,00	10.140.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-	32.640.000,00	32.640.000,00	-
	SIM Database Terpilah Anak	2017	1	30.000.000,00									7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00	-
	software Windows 7 (temuan BPK 2017)	2011	1	2.640.000,00										2.640.000,00	-			2.640.000,00	2.640.000,00	-
8	Dinas Tenaga Kerja			321.387.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.543.750,00	36.821.750,00	57.959.250,00	80.346.750,00	199.671.500,00	119.324.750,00	80.346.750,00
	Belanja Penyedia Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan	2021	1	89.550.000,00													22.387.500,00	22.387.500,00	-	22.387.500,00
	Database Ketenagakerjaan Kegiatan Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	2018	1	98.175.000,00										24.543.750,00	24.543.750,00	24.543.750,00	24.543.750,00	98.175.000,00	73.631.250	24.543.750,00
	Belanja Penyedia Jasa Aplikasi Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Bursa Tenaga Kerja	2019	1	49.112.000,00											12.278.000,00	12.278.000,00	12.278.000,00	36.834.000,00	24.556.000	12.278.000,00
	Belanja Penyedia Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan Kegiatan Pengelolan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan	2020	1	84.550.000,00												21.137.500,00	21.137.500,00	42.275.000,00	21.137.500	21.137.500,00
9	Dinas Pangan dan Pertanian			51.975.455,00	-	-	-	-	-	-	-	8.325.113,75	10.993.863,75	12.993.863,75	12.993.863,75	4.668.750,00	2.000.000,00	51.975.455,00	49.975.455,00	2.000.000,00
	Aplikasi Pemutakhiran Data Pertanian dan Kehatanan Pangan (Diskopindagtan - 2016)	2016	1	33.300.455,00								8.325.113,75	8.325.113,75	8.325.113,75	8.325.113,75			33.300.455,00	33.300.455	-
	Aplikasi SIM Puskesmas	2017	1	10.675.000,00									2.668.750,00	2.668.750,00	2.668.750,00	2.668.750,00		10.675.000,00	10.675.000,00	-
	Aplikasi SIM Puskesmas	2018	1	8.000.000,00										2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000	2.000.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup (Dinas Kebersihan dan Pertamanan)			86.680.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.670.000,00	21.670.000,00	21.670.000,00	21.670.000,00	86.680.000,00	65.010.000,00	21.670.000,00
	SIM Laboratorium	2018	1	38.830.000,00										9.707.500,00	9.707.500,00	9.707.500,00	9.707.500,00	38.830.000,00	29.122.500	9.707.500,00
	SIM Dokumen Lingkungan Online	2018	1	47.850.000,00										11.962.500,00	11.962.500,00	11.962.500,00	11.962.500,00	47.850.000,00	35.887.500	11.962.500,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			263.974.250,00	-	-	-	-	-	-	-	5.582.500,00	9.770.000,00	40.583.800,00	48.523.237,50	58.354.487,50	54.166.987,50	216.981.012,50	162.814.025,00	54.166.987,50
	Belanja Jasa Aplikasi Website	2020		34.705.000,00													8.676.250,00	17.352.500,00	8.676.250	8.676.250,00
	Belanja Jasa License Zoom	2020		26.950.000,00													6.737.500,00	13.475.000,00	6.737.500	6.737.500,00
	Pengembangan Aplikasi Silima	2019	1	35.250.000,00											8.812.500,00	8.812.500,00	8.812.500,00	26.437.500,00	17.625.000	8.812.500,00
	Software	2019	1	29.412.950,00											7.353.237,50	7.353.237,50	7.353.237,50	22.059.712,50	14.706.475	7.353.237,50
	Sistem Koneksi (Intervase tahap awal) NIK Pembuatan Digital Arsip	2018	1	38.600.000,00										9.650.000,00	9.650.000,00	9.650.000,00	9.650.000,00	38.600.000,00	28.950.000	9.650.000,00
	Informasi yang dapat diakses masyarakat melalui web Dinas Kependudukan	2018	1	26.750.000,00										6.687.500,00	6.687.500,00	6.687.500,00	6.687.500,00	26.750.000,00	20.062.500	6.687.500,00
	Pembentukan dan penataan sistem koneksi (Intervase Tahap Awal) NIK	2018	1	25.000.000,00										6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	25.000.000,00	18.750.000	6.250.000,00
	Aplikasi Money Pelayanan Dokumen Kependudukan	2016	1	22.330.000,00								5.582.500,00	5.582.500,00	5.582.500,00	5.582.500,00	-	-	22.330.000,00	22.330.000	-
	Aplikasi CD Interaktif Profil Disadukapil	2017	1	16.750.000,00									4.187.500,00	4.187.500,00	4.187.500,00	4.187.500,00	4.187.500,00	16.750.000,00	16.750.000	-
	ESET NOD32 (temuan BPK 2017)	2015	1	5.000.000,00										5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000	-
	Kapensky (temuan BPK 2017)	2009	1	3.226.300,00										3.226.300,00	-	-	-	3.226.300,00	3.226.300	-
12	Dinas Perhubungan			334.344.050,00	-	-	-	-	-	675.000,00	675.000,00	5.548.437,50	17.897.637,50	279.976.137,50	17.222.637,50	12.349.200,00	-	334.344.050,00	334.344.050,00	-
	Aplikasi Untuk Penyempurnaan Software Website Dinas Perhubungan Tahun 2016	2016	1	19.493.750,00								4.873.437,50	4.873.437,50	4.873.437,50	4.873.437,50			19.493.750,00	19.493.750	-
	OS Windows	2014	1	2.700.000,00						675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	-	-	-	-	2.700.000,00	2.700.000	-
	Sistem Informasi Penerangan Jalan Umum	2017	1	49.396.800,00									12.349.200,00	12.349.200,00	12.349.200,00	12.349.200,00		49.396.800,00	49.396.800	-
	SOFTWARE APLIKASI SISTEM INFORMASI (temuan BPK 2017)	2006	1	22.000.000,00										22.000.000,00	-	-	-	22.000.000,00	22.000.000	-
	WINDOWS XP SOFTWARE (temuan BPK 2017)	2006	1	1.881.000,00										1.881.000,00	-	-	-	1.881.000,00	1.881.000	-
	sim database angkutan umum (temuan BPK 2017)	2015	1	41.345.000,00										41.345.000,00	-	-	-	41.345.000,00	41.345.000	-
	software website dihub (temuan BPK 2017)	2015	1	100.425.000,00										100.425.000,00	-	-	-	100.425.000,00	100.425.000	-
	Sistem Informasi PUJ (temuan BPK 2017)	2015	1	48.702.500,00										48.702.500,00	-	-	-	48.702.500,00	48.702.500	-
	Sistem Reklame (temuan BPK 2017)	2015	1	48.400.000,00										48.400.000,00	-	-	-	48.400.000,00	48.400.000	-

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah Barang	Harga Perolehan	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akumulasi Amortisasi 2021	Akumulasi Amortisasi 2020	Reban Amortisasi 2021
13	Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan			1.006.929.683,00	-	-	-	-	-	-	-	32.480.250,00	188.907.000,00	290.429.045,75	235.529.420,75	203.049.170,75	46.622.420,75	997.017.308,00	950.394.887,25	46.622.420,75
	Sistem Pengelolaan Administrasi Pelayanan Informasi Publik	2017	1	38.940.000,00									9.735.000,00	9.735.000,00	9.735.000,00	9.735.000,00		38.940.000,00	38.940.000	-
	Aplikasi Cimahi Smart City	2017	1	586.767.000,00									146.691.750,00	146.691.750,00	146.691.750,00	146.691.750,00		586.767.000,00	586.767.000	-
	Revitalisasi Aplikasi Pengaduan Terintegrasi (KAPDE-2016)	2016	1	45.795.000,00								11.448.750,00	11.448.750,00	11.448.750,00	11.448.750,00	-		45.795.000,00	45.795.000	-
	Aplikasi Pengaduan Berbasis Android (KAPDE-2016)	2016	1	52.886.000,00								13.221.500,00	13.221.500,00	13.221.500,00	13.221.500,00	-		52.886.000,00	52.886.000	-
	Revitalisasi Aplikasi Intervensi Kemiskinan (KAPDE-2016)	2016	1	31.240.000,00								7.810.000,00	7.810.000,00	7.810.000,00	7.810.000,00	-		31.240.000,00	31.240.000	-
	Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	2019	1	39.649.500,00											9.912.375,00	9.912.375,00	9.912.375,00	29.737.125,00	19.824.750	9.912.375,00
	Piranti Lunak Pengamanan Jaringan Komputer	2018	1	55.000.000,00										13.750.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	55.000.000,00	41.250.000	13.750.000,00
	Computer mainframe	2018	1	91.840.183,00										22.960.045,75	22.960.045,75	22.960.045,75	22.960.045,75	91.840.183,00	68.880.137	22.960.045,75
	Software Operating System Server - (temuan BPK 2017)	2013	1	9.900.000,00										9.900.000,00	-			9.900.000,00	9.900.000	-
	Software Database Management System - (temuan BPK 2017)	2013	1	19.250.000,00										19.250.000,00	-			19.250.000,00	19.250.000	-
	Software Development tools - (temuan BPK 2017)	2013	1	4.950.000,00										4.950.000,00	-			4.950.000,00	4.950.000	-
	perangkat lunak windows Pro SP2 OEM /MS Office 2007 Pro FPP(temuan BPK 2017)	2008	1	30.712.000,00										30.712.000,00	-			30.712.000,00	30.712.000	-
14	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			498.426.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.937.500,00	17.499.875,00	54.296.125,00	88.566.625,00	118.669.125,00	284.969.250,00	166.300.125,00	118.669.125,00
	SIMECI(Aplikasi Metrologi Cimahi)	2021	1	46.500.000,00													11.625.000,00	11.625.000,00	-	11.625.000,00
	Jasa Pembuatan Website Integritas Layanan Teknis (Cerah)	2021	1	47.850.000,00													11.962.500,00	11.962.500,00	-	11.962.500,00
	Aplikasi Pameran Virtual Expo	2021	1	49.810.000,00													12.452.500,00	12.452.500,00	-	12.452.500,00
	Aplikasi Virtual EXPO	2020	1	60.632.000,00												15.158.000,00	15.158.000,00	30.316.000,00	15.158.000	15.158.000,00
	Aplikasi Pelayanan Metrologi	2020	1	26.850.000,00												6.712.500,00	6.712.500,00	13.425.000,00	6.712.500	6.712.500,00
	Aplikasi Lapaku	2020	1	49.600.000,00												12.400.000,00	12.400.000,00	24.800.000,00	12.400.000	12.400.000,00
	Aplikasi Kegiatan Pemetaan dan Pendataan UKM (LAPAKU)	2019	1	49.200.000,00											12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	36.900.000,00	24.600.000	12.300.000,00
	Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	2019	1	48.900.000,00											12.225.000,00	12.225.000,00	12.225.000,00	36.675.000,00	24.450.000	12.225.000,00
	Aplikasi Meteorologi	2019	1	49.085.000,00											12.271.250,00	12.271.250,00	12.271.250,00	36.813.750,00	24.542.500	12.271.250,00
	Aplikasi Meteorologi	2018	1	46.249.500,00										11.562.375,00	11.562.375,00	11.562.375,00	11.562.375,00	46.249.500,00	34.687.125	11.562.375,00
	Aplikasi SIM Laporan Kinerja	2017	1	23.750.000,00									5.937.500,00	5.937.500,00	5.937.500,00	5.937.500,00	5.937.500,00	23.750.000,00	23.750.000	-
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			787.192.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.390.000,00	61.342.750,00	73.671.000,00	187.163.225,00	393.566.975,00	206.403.750,00	187.163.225,00
	Aplikasi Pendukung MPP	2021	1	453.968.900,00													113.492.225,00	113.492.225,00	-	113.492.225,00
	Konsultasi Pengembangan Sijinter DPMPITSP	2020	1	49.313.000,00												12.328.250,00	12.328.250,00	24.656.500,00	12.328.250	12.328.250,00
	Konsultasi Pengembangan Sijinter DPMPITSP	2019	1	48.224.000,00											12.056.000,00	12.056.000,00	12.056.000,00	36.168.000,00	24.112.000	12.056.000,00
	Konsultasi pengembangan integrasi dan migrasi SIM KPPT ke Sijinter DPMPITSP	2019	1	34.177.000,00											8.544.250,00	8.544.250,00	8.544.250,00	25.632.750,00	17.088.500	8.544.250,00
	Aplikasi Migrasi Data	2019	1	31.570.000,00											7.892.500,00	7.892.500,00	7.892.500,00	23.677.500,00	15.785.000	7.892.500,00
	Sistem informasi pelayanan perizinan terpadu	2018	1	47.500.000,00										11.875.000,00	11.875.000,00	11.875.000,00	11.875.000,00	47.500.000,00	35.625.000	11.875.000,00
	pembuatan konten dashboard pada aplikasi multimedia 2018	2018	1	39.900.000,00										9.975.000,00	9.975.000,00	9.975.000,00	9.975.000,00	39.900.000,00	29.925.000	9.975.000,00
	Penyedia jasa penyusunan integrasi dan migrasi SIM KPPT ke sistem pelayanan terpadu tahun 2018	2018	1	44.000.000,00										11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	44.000.000,00	33.000.000	11.000.000,00
	Software Aplikasi Sistem Informasi Arsip - Temuan BPK	2010	1	14.850.000,00										14.850.000,00	-			14.850.000,00	14.850.000	-
	Mainframe (Temuan BPK 2017)	2011	1	6.190.000,00										6.190.000,00	-			6.190.000,00	6.190.000	-
	Software DAAS MOD (Temuan BPK 2017)	2012	1	17.500.000,00										17.500.000,00	-			17.500.000,00	17.500.000	-

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah Barang	Harga Perolehan	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akumulasi Amortisasi 2021	Akumulasi Amortisasi 2020	Beban Amortisasi 2021
16	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga			34.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.662.500,00	8.662.500,00	8.662.500,00	8.662.500,00	34.650.000,00	25.987.500,00	8.662.500,00
	Aplikasi Pembuatan Web Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cimahi	2018	1	34.650.000,00										8.662.500,00	8.662.500,00	8.662.500,00	8.662.500,00	34.650.000,00	25.987.500	8.662.500,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			204.694.646,90	-	-	-	-	-	-	-	-	12.271.875,00	102.948.485,18	42.497.411,73	12.271.874,99	8.676.250,00	178.665.896,90	169.989.646,91	8.676.250,00
	Sistem Pengelolaan Data Infrastruktur Lingkungan	2021	1	34.705.000,00													8.676.250,00	8.676.250,00		8.676.250,00
	Sistem Perencanaan Sektor Cipta Karya dan Lingkungan Hidup	2017	1	49.087.500,00									12.271.875,00	12.271.875,00	12.271.875,00	12.271.875,00		49.087.500,00	49.087.500	-
	microsoft windows server, sqls, ms office (temuan BPK 2017)	2016	1	120.902.146,90										90.676.610,18	30.225.536,73	-	0,01	120.902.146,90	120.902.146,91	
18	BPKAD			473.787.000,00	-	-	-	-	-	-	-	24.640.000,00	36.877.500,00	148.890.500,00	56.504.250,00	68.864.250,00	56.626.750,00	392.403.250,00	335.776.500,00	56.626.750,00
	Aplikasi SIP Persediaan	2020		148.000.000,00												37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00
	Aplikasi RKBMD	2019	1	29.535.000,00											7.383.750,00	7.383.750,00	7.383.750,00	22.151.250,00	14.767.500,00	7.383.750,00
	Aplikasi RKBMD	2018	1	48.972.000,00										12.243.000,00	12.243.000,00	12.243.000,00	12.243.000,00	48.972.000,00	36.729.000,00	12.243.000,00
	Aplikasi Smart Accounting Control	2017	1	48.950.000,00									12.237.500,00	12.237.500,00	12.237.500,00	12.237.500,00		48.950.000,00	48.950.000,00	-
	Aplikasi Integrasi Sistem SIPKD Keuangan dengan SIPKD Persediaan	2016	1	49.500.000,00								12.375.000,00	12.375.000,00	12.375.000,00	12.375.000,00			49.500.000,00	49.500.000,00	-
	Aplikasi QR code	2016	1	49.060.000,00								12.265.000,00	12.265.000,00	12.265.000,00	12.265.000,00			49.060.000,00	49.060.000,00	-
	Perangkat Lunak SIPKD Persediaan - (temuan BPK 2017)	2014	1	99.770.000,00									99.770.000,00		-			99.770.000,00	99.770.000,00	-
19	Badan Pengelolaan Pendapatan			1.627.768.900,00	-	-	-	41.382.325,00	41.382.325,00	41.382.325,00	41.382.325,00	41.273.750,00	93.805.625,00	303.395.625,00	246.086.875,00	254.313.125,00	235.169.275,00	1.339.573.575,00	1.104.404.300,00	235.169.275,00
	Pengembangan Sistem BAPENDA	2021	1	133.552.100,00													33.388.025,00	33.388.025,00		33.388.025,00
	Pengembangan Aplikasi SISMOP	2020	1	96.030.000,00													24.007.500,00	24.007.500,00	24.007.500	24.007.500,00
	Pengembangan dan Custom Aplikasi SISMOP	2020	1	50.160.000,00													12.540.000,00	12.540.000,00	12.540.000	12.540.000,00
	Pengembangan Aplikasi e-PAD	2020	1	51.810.000,00													12.952.500,00	12.952.500,00	12.952.500	12.952.500,00
	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sismiop/Pajak Daerah	2019	1	155.100.000,00											38.775.000,00	38.775.000,00	38.775.000,00	116.325.000,00	77.550.000	38.775.000,00
	Pengembangan Aplikasi E-PAD	2019	1	106.150.000,00											26.537.500,00	26.537.500,00	26.537.500,00	79.612.500,00	53.075.000	26.537.500,00
	Aplikasi Pelayanan/Pemutakhiran Data PBB Berbasis Web	2019	1	94.875.000,00											23.718.750,00	23.718.750,00	23.718.750,00	71.156.250,00	47.437.500	23.718.750,00
	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sismiop/Pajak Daerah	2018	1	156.200.000,00										39.050.000,00	39.050.000,00	39.050.000,00	39.050.000,00	156.200.000,00	117.150.000	39.050.000,00
	Pengembangan Aplikasi E-PAD	2018	1	96.800.000,00										24.200.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00	96.800.000,00	72.600.000	24.200.000,00
	Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sismiop/Pajak Daerah	2017	1	176.137.500,00									44.034.375,00	44.034.375,00	44.034.375,00	44.034.375,00		176.137.500,00	176.137.500	-
	Pengembangan Aplikasi E-PAD	2017	1	33.990.000,00									8.497.500,00	8.497.500,00	8.497.500,00	8.497.500,00		33.990.000,00	33.990.000	-
	BPHTB pada Kegiatan Pendapatan Daerah (Dinas Pendapatan-2016)	2016	1	47.135.000,00								11.783.750,00	11.783.750,00	11.783.750,00	11.783.750,00			47.135.000,00	47.135.000	-
	Sistem Penghapusan Piutang dan NOP Ganda Pajak Bumi dan Bangunan (Dinas Pendapatan-2016)	2016	1	48.907.500,00								12.226.875,00	12.226.875,00	12.226.875,00	12.226.875,00			48.907.500,00	48.907.500	-
	Aplikasi SISMOP/SIM PBB (Dinas Pendapatan-2016)	2016	1	34.457.500,00								8.614.375,00	8.614.375,00	8.614.375,00	8.614.375,00			34.457.500,00	34.457.500	-
	Aplikasi e-PAD (Dinas Pendapatan-2016)	2016	1	34.595.000,00								8.648.750,00	8.648.750,00	8.648.750,00	8.648.750,00			34.595.000,00	34.595.000	-
	Software Pendapatan (Dinas Pendapatan-2016)	2012	1	165.529.300,00				41.382.325,00	41.382.325,00	41.382.325,00	41.382.325,00				-			165.529.300,00	165.529.300	-
	Software Capaian Kinerja Pegawai (Temuan BPK 2017)	2015	1	30.300.000,00										30.300.000,00	-			30.300.000,00	30.300.000	-
	Software Pemeliharaan (Temuan BPK)	2011	1	23.540.000,00										23.540.000,00	-			23.540.000,00	23.540.000	-
	Software Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan jalan, Pajak Parkir, Pajak BPHTB, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Software Administrasi Sistem, Lap Kegiatan (Temuan BPK 2017)	2011	1	92.500.000,00										92.500.000,00	-			92.500.000,00	92.500.000	-

No.	Jenis Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah Barang	Harga Perolehan	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akumulasi Amortisasi 2021	Akumulasi Amortisasi 2020	Beban Amortisasi 2021
20	BKPSDMD			378.260.500,00	9.891.750,00	20.704.250,00	20.704.250,00	20.704.250,00	10.812.500,00	-	-	22.701.250,00	47.169.375,00	82.110.875,00	71.110.875,00	48.409.625,00	23.941.500,00	378.260.500,00	354.319.000,00	23.941.500,00
	Aplikasi Kinerja	2018	1	47.784.000,00										11.946.000,00	11.946.000,00	11.946.000,00	11.946.000,00	47.784.000,00	35.838.000	11.946.000,00
	Restrukturisasi Aplikasi Kepegawaian Terintegrasi	2018	1	47.982.000,00										11.995.500,00	11.995.500,00	11.995.500,00	11.995.500,00	47.982.000,00	35.986.500	11.995.500,00
	Aplikasi SKP Online	2017	1	49.060.000,00									12.265.000,00	12.265.000,00	12.265.000,00	12.265.000,00		49.060.000,00	49.060.000	-
	Aplikasi Pengelolaan TKD	2017	1	48.812.500,00									12.203.125,00	12.203.125,00	12.203.125,00	12.203.125,00		48.812.500,00	48.812.500	-
	Aplikasi Absensi Pegawai Kegiatan Pembangunan (Badan Kepegawaian Daerah - 2016)	2016	1	43.285.000,00								10.821.250,00	10.821.250,00	10.821.250,00	10.821.250,00			43.285.000,00	43.285.000	-
	Aplikasi Human Capital Care (Badan Kepegawaian Daerah - 2016)	2016	1	47.520.000,00								11.880.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00			47.520.000,00	47.520.000	-
	Software aplikasi kenaikan gaji berkala (Badan Kepegawaian Daerah - 2016)	2009	1	39.567.000,00	9.891.750,00	9.891.750,00	9.891.750,00	9.891.750,00								-		39.567.000,00	39.567.000	-
	Software Otomatisasi absensi (Badan Kepegawaian Daerah - 2016)	2010	1	43.250.000,00		10.812.500,00	10.812.500,00	10.812.500,00	10.812.500,00							-		43.250.000,00	43.250.000	-
	MS Office 2007 (teman BPK 2017)	2012	1	6.000.000,00										6.000.000,00		-		6.000.000,00	6.000.000	-
	OS Windows 7 - (teman BPK 2017)	2013	1	5.000.000,00										5.000.000,00		-		5.000.000,00	5.000.000	-
21	Sekretariat Daerah			166.952.500,00	-	-	-	-	-	-	-	9.521.875,00	34.010.625,00	51.431.875,00	38.506.875,00	28.985.000,00	4.496.250,00	166.952.500,00	162.456.250,00	4.496.250,00
	Aplikasi SIM Kelurahan	2017	1	49.060.000,00										12.265.000,00	12.265.000,00	12.265.000,00		49.060.000,00	49.060.000	-
	Sistem Informasi Kinerja Instansi Pemerintah (SIKIP)	2017	1	48.895.000,00									12.223.750,00	12.223.750,00	12.223.750,00	12.223.750,00		48.895.000,00	48.895.000	-
	Sistem Produk Hukum Daerah Berbasis Aplikasi	2016	1	38.087.500,00								9.521.875,00	9.521.875,00	9.521.875,00	9.521.875,00			38.087.500,00	38.087.500	-
	Sistem Produk Hukum Daerah Berbasis Aplikasi (pengembangan)	2018	1	17.985.000,00										4.496.250,00	4.496.250,00	4.496.250,00	4.496.250,00	17.985.000,00	13.488.750	4.496.250,00
	software Windows (teman BPK 2017)	2008	1	12.925.000,00										12.925.000,00		-		12.925.000,00	12.925.000	-
22	Sekretariat DPRD			698.221.000,00	-	-	-	-	-	-	-	88.697.000,00	134.947.000,00	146.547.000,00	152.280.250,00	82.958.250,00	36.708.250,00	642.137.750,00	605.429.500,00	36.708.250,00
	Aplikasi SIKWAN	2020		77.500.000,00												-	19.375.000,00	19.375.000,00	38.750.000,00	19.375.000,00
	Aplikasi (SIWAN)	2019	1	69.333.000,00											17.333.250,00	17.333.250,00	17.333.250,00	51.999.750,00	34.666.500,00	17.333.250,00
	Sistem Pengendalian Anggaran Belanja	2017	1	89.000.000,00									22.250.000,00	22.250.000,00	22.250.000,00	22.250.000,00		89.000.000,00	89.000.000,00	-
	Sistem Informasi Asap Digital	2017	1	96.000.000,00								24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00		96.000.000,00	96.000.000,00	-
	Software Sistem Manajemen Perjalanan Dinas	2016	1	99.500.000,00								24.875.000,00	24.875.000,00	24.875.000,00	24.875.000,00		-	99.500.000,00	99.500.000,00	-
	Software Sistem Manajemen DPRD	2016	1	195.800.000,00								48.950.000,00	48.950.000,00	48.950.000,00	48.950.000,00		-	195.800.000,00	195.800.000,00	-
	SIM Legislatif	2016	1	59.488.000,00								14.872.000,00	14.872.000,00	14.872.000,00	14.872.000,00		-	59.488.000,00	59.488.000,00	-
	Microsoft (teman BPK 2017)	2011	1	11.600.000,00								14.872.000,00	14.872.000,00	14.872.000,00	14.872.000,00		-	11.600.000,00	11.600.000,00	-
23	Inspektorat			49.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.425.000,00	12.425.000,00	12.425.000,00	12.425.000,00	49.700.000,00	37.275.000,00	12.425.000,00
	Aplikasi Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan	2018	1	49.700.000,00										12.425.000,00	12.425.000,00	12.425.000,00	12.425.000,00	49.700.000,00	37.275.000	12.425.000,00
24	Kecamatan Cimahi Utara			71.193.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.449.000,00	33.846.750,00	12.449.000,00	12.449.000,00	-	71.193.750,00	71.193.750,00	-
	Aplikasi Sepakat Online	2017	1	49.796.000,00										12.449.000,00	12.449.000,00	12.449.000,00		49.796.000,00	49.796.000	-
	O/S Window 7, no office (teman BPK 2017) kel. Cibatu	2013	1	15.897.750,00										15.897.750,00		-		15.897.750,00	15.897.750	-
	Software DAAS(teman BPK 2017)kel. Cugenang	2015	1	3.500.000,00										3.500.000,00		-		3.500.000,00	3.500.000	-
	Software Cost Off-line Computer(teman BPK 2017) kel. Cugenang	2015	1	2.000.000,00										2.000.000,00		-		2.000.000,00	2.000.000	-
25	Kecamatan Cimahi Tengah			173.664.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.886.250,00	32.205.000,00	35.543.125,00	35.543.125,00	31.904.875,00	145.082.375,00	113.177.500,00	31.904.875,00
	Website Kelurahan Baros	2021	1	24.992.000,00													6.248.000,00	6.248.000,00		6.248.000,00
	Pengembangan Aplikasi Website Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2019	2019	1	39.352.500,00											9.838.125,00	9.838.125,00		29.514.375,00	19.676.250	9.838.125,00
	SIM Pelayanan	2018	1	53.130.000,00										13.282.500,00	13.282.500,00	13.282.500,00	13.282.500,00	53.130.000,00	39.847.500	13.282.500,00
	Aplikasi Sepakat Online	2017	1	39.545.000,00									9.886.250,00	9.886.250,00	9.886.250,00	9.886.250,00		39.545.000,00	39.545.000	-
	Pengikat Lunak SMS Center(teman BPK 2017) kel. Baros	2015	1	6.500.000,00										6.500.000,00		-		6.500.000,00	6.500.000	-
	Aplikasi Sepakat Online Pemeliharaan	2018	1	10.145.000,00										2.536.250,00	2.536.250,00	2.536.250,00	2.536.250,00	10.145.000,00	7.608.750	2.536.250,00
26	Kecamatan Cimahi Selatan			78.595.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.817.500,00	19.648.750,00	19.648.750,00	19.648.750,00	9.831.250,00	78.595.000,00	68.763.750,00	9.831.250,00
	SIM Pelayanan	2018	1	39.325.000,00										9.831.250,00	9.831.250,00	9.831.250,00	9.831.250,00	39.325.000,00	29.493.750	9.831.250,00
	Aplikasi Sepakat Online	2017	1	39.270.000,00										9.817.500,00	9.817.500,00	9.817.500,00		39.270.000,00	39.270.000	-
27	Kantor Kesatuan Bangsa			47.492.500,00													11.873.125,00	11.873.125,00	-	11.873.125,00
	Sistem Informasi Ormas	2021	1	47.492.500,00													11.873.125,00	11.873.125,00		11.873.125,00
	JUMLAH			9.932.562.034,90	9.891.750,00	20.704.250,00	20.704.250,00	62.086.575,00	52.194.825,00	42.057.325,00	66.941.075,00	303.536.801,25	767.517.376,25	2.453.263.707,18	1.602.910.946,23	1.498.437.358,24	1.329.017.633,25	8.229.263.872,40	6.900.246.239,16	1.329.017.633,25

**PEMERINTAH KOTA CIMAHI
REKAPITULASI ASET LAIN-LAIN**

NO	SKPD	31 Desember 2020	Penambahan (Rusak Berat, mutasi, dll)		Pengurangan (Koreksi, penghapusan, dll)					31 Desember 2021
1	DINAS PENDIDIKAN	8.124.195.867,01	136.609.350,00		112.400.000,00	112.400.000,00				8.036.005.217,01
2	DINAS KESEHATAN	389.917.389,62				199.800.000,00			69.793.750,50	120.323.639,12
3	RSUD CIBABAT	0,00								0,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	561.196.000,10			68.500.000,00					492.696.000,10
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	632.873.000,12			112.400.000,00	112.400.000,00	140.000.000,00			268.073.000,12
6	SATPOL PP DAMKAR	22.400.000,00								22.400.000,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	177.000.000,00			177.000.000,00					0,00
8	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00								0,00
9	DINAS TENAGA KERJA	572.858.370,00	112.400.000,00		150.000.000,00	112.400.000,00	112.400.000,00	84.221.370,00		226.237.000,00
10	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	121.350.000,00	68.500.000,00		68.500.000,00	112.400.000,00				8.950.000,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.453.671.120,28	800.736.000,00	64.843.350,00						5.319.250.470,28
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII	279.063.793,00				112.400.000,00	86.663.793,00		65.000.000,00	15.000.000,00
13	DINAS PERHUBUNGAN	202.020.550,00							75.000.000,00	127.020.550,00
14	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	337.379.000,10								337.379.000,10

15	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	297.598.027,00			112.400.000,00					185.198.027,00
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	489.305.799,86			68.500.000,00	75.000.000,00				345.805.799,86
17	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN	423.160.000,00				150.000.000,00	204.660.000,00		68.500.000,00	0,00
18	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	303.575.000,00	65.000.000,00			65.000.000,00	112.400.000,00	78.775.000,00	112.400.000,00	0,00
19	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00								0,00
20	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	704.169.579,93			112.400.000,00	112.400.000,00				479.369.579,93
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	112.400.000,00			112.400.000,00					0,00
22	DPRD	0,00								0,00
23	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	0,00								0,00
24	SEKRETARIAT DAERAH	893.128.090,00	75.000.000,00	62.233.000,00	112.400.000,00	62.233.000,00	86.644.090,00	75.000.000,00		694.084.000,00
25	SEKRETARIAT DPRD	0,00								0,00
26	INSPEKTORAT KOTA	334.675.000,00			112.400.000,00	68.500.000,00	78.775.000,00	75.000.000,00		0,00
27	KECAMATAN CIMAHI UTARA	89.929.624,49								89.929.624,49
28	KECAMATAN CIMAHI TENGAH	76.339.801,00								76.339.801,00
29	KECAMATAN CIMAHI SELATAN	96.563.268,41								96.563.268,41
30	KANTOR KESATUAN BANGSA	14.842.000,00								14.842.000,00
TOTAL		19.709.611.280,92	1.258.245.350,00	127.076.350,00	1.319.300.000,00	1.294.933.000,00	821.542.883,00	312.996.370,00	390.693.750,50	16.955.466.977,42

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
UTANG BELANJA PER 31 DESEMBER 2021

No	SKPD	Listrik	Air	Telepon	Internet	Utang Belanja Modal	Utang Sewa Mesin Fotocopy	Utang Penerangan Jalan	Insentif Nakes	Total
1	Dinas Pendidikan	1.018.240,00		123.729,00	1.042.000,00					2.183.969,00
2	Dinas Kesehatan	25.067.069,00	722.200,00	6.527.267,00	4.852.800,00				3.928.572,00	41.097.908,00
3	RSUD Cibabat	210.126.598,00	34.000,00	3.351.157,00	17.875.000,00					231.386.755,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	336.726,00		104.693,00		1.493.220.740,00				1.493.662.159,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	57.214.301,00		3.034.482,00						60.248.783,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran		268.000,00	730.117,00						998.117,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	593.826,00		918.294,00	900.000,00					2.412.120,00
8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	146.491,00	133.000,00	185.582,00						465.073,00
9	Dinas Tenaga Kerja			70.977,00						70.977,00
10	Dinas Pangan Dan Pertanian	6.829.021,00		345.118,00						7.174.139,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.842.441,00	526.400,00	2.342.496,00						4.711.337,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-		113.431,00						113.431,00
13	Dinas Perhubungan	11.524.784,00		5.495.960,00	-			632.907.071,00		649.927.815,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan									-
15	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian	51.895.989,00		1.208.379,00						53.104.368,00
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	320.152,00		439.116,00	832.860,00	349.131.313,00				350.723.441,00
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	433.521,00		1.168.498,00		1.094.909.550,00				1.096.511.569,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									-
19	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah			38.360,00						38.360,00
20	BAPENDA			409.234,00			687.500,00			1.096.734,00
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			43.777,00						43.777,00
22	Sekretariat Daerah	85.005.877,00	349.600,00	3.198.901,00	1.571.700,00					90.126.078,00
23	Sekretariat DPRD	18.911.988,00		97.081,00	9.000.000,00					28.009.069,00
24	Inspektorat Kota	2.347.748,00		105.207,00						2.452.955,00
25	Kantor Kesatuan Bangsa			41.509,00						41.509,00
26	Kecamatan Cimahi Utara	4.251.116,00	165.100,00	2.147.979,00						6.564.195,00
27	Kecamatan Cimahi Tengah	7.778.978,00	1.048.000,00	602.337,00	3.708.308,00					13.137.623,00
28	Kecamatan Cimahi Selatan	4.936.049,00	-	382.502,00						5.318.551,00
Jumlah		490.580.915	3.246.300	33.226.183	39.782.668	2.937.261.603	687.500	632.907.071	3.928.572	4.141.620.812,00

Pemerintah Kota Cimahi
Daftar Utang Kepada Pihak Ketiga Atas Biaya Pemeliharaan dan Pembangunan (Retensi)
Per 31 Desember 2021

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
1	2005	Dinas Tata Kota	CV. PARADIGNA TATA CIPTA	04/KKP/PAK-15A/PWS/DISTAKOT/2005	8.400.000,00	7.560.000,00	840.000,00	Pengawasan Peningkatan 2 bh Rumah Dinas Puskesmas Padasuka
2	2005	Dinas Tata Kota	CV. PARADIGNA TATA CIPTA	04/KKP/PAK-13/PWS/DISTAKOT/2005	16.200.000,00	14.580.000,00	1.620.000,00	Pengawasan Peningkatan Puskesmas Cimindi
3	2005	Dinas Tata Kota	CV. PARADIGNA TATA CIPTA	04/KKP/PAK-15/PWS/DISTAKOT/2005	6.700.000,00	6.030.000,00	670.000,00	Pengawasan Peningkatan Rumah Dinas Puskesmas Cimahi Utara
4	2005	Dinas Tata Kota	CV. GRIYA LOKA	601/13.E/SP/PWS.P2RDPMA-PSPK/DISTAKOT/2005	12.150.000,00	10.935.000,00	1.215.000,00	Pengawasan Peningkatan 3 bh Rumah Dinas Puskesmas Cimahi Selatan
5	2005	Dinas Tata Kota	CV. GRIYA LOKA	04/KKP/PAK-15B/PWS/DISTAKOT/2005	6.700.000,00	6.030.000,00	670.000,00	Pengawasan Peningkatan 2 bh Rumah Dinas Puskesmas Cimahi Selatan
6	2005	Dinas Tata Kota	PT. GIRI AWAS	04/KKP/PAK-04/PWS/DISTAKOT/2005	10.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	Pengawasan Peningkatan Mesjid Agung
7	2005	Dinas Tata Kota	PT. GIRI AWAS	01A/SP/PWS 01/ABT/DISTAKOT/2005	17.500.000,00	15.750.000,00	1.750.000,00	Pengawasan Peningkatan Mesjid Agung ABT
8	2005	Dinas Tata Kota	PT. RESTU IBU	621/39/HARLA/BM/DISTAKOT/2005	88.027.000,00	87.486.000,00	541.000,00	Pengadaan Aspal Untuk Pemeliharaan Jalan Berkala
8			Sub Total I		165.677.000,00	157.371.000,00	8.306.000,00	
9	2006	Dinas Tata Kota	CV. DIANA JULI	621/81/PJJ/BM-DISTAKOT/2006	46.346.000,00	44.028.700,00	2.317.300,00	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembuatan Gorong-gorong Crossing Jl. Padasuka
10	2006	Dinas Tata Kota	CV. SANDRILLA PUTRA	621/126/PJJ/BM-DISTAKOT/2006	48.871.000,00	46.427.450,00	2.443.550,00	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembuatan Saluran sampling jalan cipageran
11	2006	Dinas Tata Kota	CV. HANDAYANI PRIMA	621/RPBRJ/BM-DISTAKOT/2006	27.785.000,00	15.885.000,00	11.900.000,00	peningkatan jalan lingkar utara pengadaan alat-alat kantor (laptop)
3			Sub Total II		123.002.000,00	106.341.150,00	16.660.850,00	
12	2007	Dinas Tata Kota	CV. TRI SACITA	621/47/PJJ/BM-DISTAKOT/2007	191.290.000,00	181.725.500,00	9.564.500,00	Pemeliharaan Jalan sindang sari cibaligo
13	2007	Dinas Tata Kota	CV. KUSDINAR	621/51/PJJ/BM-DISTAKOT/2007	192.650.000,00	183.017.500,00	9.632.500,00	pemeliharaan jalan cibogo lamping dan cireundeu
14	2007	Dinas Tata Kota	CV. MITRA UTAMA	621/167/PJJ/BM-DISTAKOT/2007	99.490.000,00	98.992.550,00	497.450,00	pemeliharaan jalan pabrik aci
15	2007	Dinas Tata Kota	CV. TRI MANUNGGAAL KARYA	621/113/JKS-PRASKOT/2007	48.800.000,00	46.360.000,00	2.440.000,00	perbaikan jalan curug cileungsi kel. Leuwigajah
4			Sub Total III		532.230.000,00	510.095.550,00	22.134.450,00	
16	2008	Sekretariat Daerah	CV. DIMAR	04/PPK/SP/R-SETDA/XII/2008	97.181.000,00	92.321.950,00	4.859.050,00	pemeliharaan tailling tangga
17	2008	Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil	CV. ENDORA SAKTI	800/02/Pn.L-SPK/DISNAKER-10/PPBPK/2008	14.568.400,00		14.568.400,00	pengadaan makanan dan minuman kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja dan fasilitasi pemindahan serta penempatan transmigrasi
18	2008	Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil	CV. PRATAMA	800/02/Pn.L-SPK/DISNAKER-11/PPBPK/2008	14.568.400,00		14.568.400,00	pengadaan makanan dan minuman kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja dan fasilitasi pemindahan serta penempatan transmigrasi
19	2008	Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil	CV. KARYA TIGA PUTRA	800/02/Pn.L-SPK/DISNAKER-01/PPBPK/2008	19.213.975,00		19.213.975,00	pengadaan makanan dan minuman kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja dan fasilitasi pemindahan serta penempatan transmigrasi
20	2008	Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil	CV. ROSFER INDAH	027/49/DUK/2008	540.903.000,00	513.857.850,00	27.045.150,00	pengadaan jaringan komputer (tower LAN) kegiatan pembangunan dan pengoperasian SIAK
21	2008	Dinas Lingkungan Hidup	CV. TRI USAHA MANDIRI	510.2/673/DLH/V/2007	49.821.000,00	47.329.950,00	2.491.050,00	keermur/TPT area unloading
22	2008	Dinas Lingkungan Hidup	CV. CIPTA JAYA KENCANA	510.2/908/DLH/VI/2007	49.515.000,00	47.039.250,00	2.475.750,00	pengecoran area unloading TPK
23	2008	Dinas Lingkungan Hidup	CV. A & B TERANG ABADI	510.2/1377/DLH/VIII/2007	34.539.000,00	32.812.050,00	1.726.950,00	pekerjaan konstruksi jaringan air bersih
24	2008	Dinas Lingkungan Hidup	CV. TIGA SAUDARA	510.2/1569/DLH/IX/2007	556.239.000,00	556.238.999,00	1,00	pembangunan tahap II laboratorium seluas 200 m2
25	2008	Dinas Lingkungan Hidup	CV. MEGA	510.2/2228.C/DLH/IX/2008	83.185.000,00	79.025.750,00	4.159.250,00	pengadaan konstruksi sumur resapan kel. Pasirkaliki (luncuran GRLK prov. 2007)
26	2008	Dinas Lingkungan Hidup	CV. PERKASA UTAMA	510.2/2228.A/DLH/XI/2008	86.599.000,00	82.269.050,00	4.329.950,00	pengadaan konstruksi sumur resapan kel. cimahi (luncuran GRLK prov. 2007)
27	2008	Dinas Tata Kota	CV. INTAN	631/36/PU/PRASKOT/2008	99.850.000,00	94.857.500,00	4.992.500,00	pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan orang perbaikan jembatan di RW. 08 Kel. Karang Mekar
28	2008	Dinas Tata Kota	CV. SEPTIANA	621.5/25/Pm.L/PRASKOT/2008	87.391.000,00	83.021.450,00	4.369.550,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi perbaikan lanjutan saluran RW. 21 kel. Melong

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
29	2008	Dinas Tata Kota	CV. KARYA TIGA PUTRA	621.5/04-SP/PL.5-PSDG/PRASKOT-DTK/2008	43.313.000,00	41.147.350,00	2.165.650,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi perbaikan lanjutan saluran RW. 20 Kel. Padasuka
30	2008	Dinas Tata Kota	CV. BRATA JAYA	621.5/46/m.L/PRASKOT/2008	84.310.000,00	80.094.500,00	4.215.500,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi perbaikan saluran di RW 05 kel. Cigugur tengah
31	2008	Dinas Tata Kota	CV. MAHARANI	621.5/04-SP/PL.10-PSDG/PRASKOT-DTK/2008	49.500.000,00	47.025.000,00	2.475.000,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi perbaikan saluran di RW 03 kel. Leuwigajah
32	2008	Dinas Tata Kota	CV. SOFRAN JAYA	621.5/04-SP/PL.14-PSDG/PRASKOT-DTK/2008	42.890.000,00	40.745.500,00	2.144.500,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi perbaikan saluran di RW 03 kel. Padasuka
33	2008	Dinas Tata Kota	CV. SOFRAN JAYA	621.5/04-SP/PL.17-PSDG/PRASKOT-DTK/2008	39.200.000,00	37.240.000,00	1.960.000,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi normalisasi saluran RW. 08 kel. Melong dan RW 10 kel. Cibeureum
34	2008	Dinas Tata Kota	CV. SOFRAN JAYA	621.5/04-SP/PL.18-PSDG/PRASKOT-DTK/2008	33.850.000,00	32.157.500,00	1.692.500,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi perbaikan saluran di RW 30 dan perbatasan RW 05 kel. Melong
35	2008	Dinas Tata Kota	CV. DIMAR	621.5/25/PL/ABT-PRASKOT/2008	49.000.000,00	46.550.000,00	2.450.000,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi perbaikan gorong-gorong di kel. Cigugur tengah
36	2008	Dinas Tata Kota	CV. UTAMA	621.5/04-SP/PL.28-PSDG/PRASKOT-DTK/2008	14.315.000,00	13.599.250,00	715.750,00	pengadaan konstruksi jaringan irigasi pembangunan drainase RW. 17 siliwangi jl. Kebon rumput III RW 17 Kel. Baros
37	2008	Dinas Tata Kota	CV. CIPTA JAYA KENCANA	621.5/27/PL/ABT-PRASKOT/2008	9.625.000,00	9.143.750,00	481.250,00	pengadaan konstruksi pintu air perbaikan pintu air jorolot di kel. Leuwigajah
38	2008	Dinas Tata Kota	CV. CIPTA JAYA KENCANA	621.3/28/PL/ABT-PRASKOT/2008	19.500.000,00	18.525.000,00	975.000,00	pengadaan konstruksi jalan pemasangan paving block di RT 01, 04 RW 03 kel. Padasuka
39	2008	Dinas Tata Kota	CV. MEGA	621.3/04-SP/PL.21-FPPS/PRASKOT-DTK/2008	47.690.000,00	45.305.500,00	2.384.500,00	pengadaan konstruksi jalan pembangunan jalan lingkungan pontren al-mushadah KH encep toha cilember jl. Cilember cimahi
40	2008	Dinas Tata Kota	CV. SURYA SAMUDRA	691/04-SP/PL.11-PSAS/PRASKOT-DTK/2008	44.138.000,00	41.931.100,00	2.206.900,00	pengadaan konstruksi jaringan air bersih/minum instalasi air bersih di kel. Cibeureum, 2 lokasi
41	2008	Dinas Tata Kota	CV. KARYA MANDIRI	691/04-SP/PL.13-PSAS/PRASKOT-DTK/2008	24.640.000,00	23.408.000,00	1.232.000,00	pengadaan konstruksi jaringan air bersih/minumpembangunan sarana air bersih RW 08 kel. Cibeureum
42	2008	Dinas Tata Kota	CV. HARAVAN JAYA	691.27/37/Pm.L/PRASKOT/2008	97.348.000,00	92.480.600,00	4.867.400,00	pengadaan konstruksi jaringan air bersih/minum bantuan untuk sarana air bersih RT 05/07 kel. Cibeureum
43	2008	Dinas Tata Kota	CV. TRIJAYA	691/04-SP/PL.15-PSAS/PRASKOT-DTK/2008	49.491.000,00	47.016.450,00	2.474.550,00	pengadaan konstruksi jaringan air bersih/minum bantuan untuk sarana air bersih RT 05/04 dan RT 04/08 kel. Cigugur tengah
44	2008	Dinas Tata Kota	CV. SASQIA REZHA PRATAMA	621.3/04-SP/PL.17-PSAS/PRASKOT-DTK/2008	24.611.000,00	23.380.450,00	1.230.550,00	pengadaan konstruksi jaringan air bersih/minum pembangunan jalan dan selokan air kotor di wilayah RT 05/07 jl. Pesantren kel. Cibabat
45	2008	Dinas Tata Kota	CV. SINAR SADULUR PUTRA	621/SPKK-22/BM-PRASKOT/2008	146.776.000,00	139.437.200,00	7.338.800,00	rehabilitasi/pemeliharaan jalan jl. Jayadikrama
46	2008	Dinas Tata Kota	CV. REZEKI	621/SPKK-40/BM-PRASKOT/2008	99.355.000,00	94.387.250,00	4.967.750,00	rehabilitasi/pemeliharaan jalan jl. Kalasan
31	Sub Total IV				2.653.125.775,00	2.502.348.199,00	150.777.576,00	
47	2009	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. WIDYA PRATAMA	510.2/3183/DPLK/VII/2009 031/SPP/MS/VII/2009	253.363.000,00	246.514.598,00	6.848.402,00	pembuatan saluran pasangan daerah irigasi leuwiteureup
48	2009	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. PUTRA JAYA	510.2/3137/DPLK/VII/2009 031/SPP/MS/VII/2009	208.467.000,00	205.047.000,00	3.420.000,00	pembuatan saluran pasangan daerah irigasi jorolot
49	2009	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. KENCANA ABADI PERKASA	510.2/4106.B/DPLK/IX/2009	47.658.000,00	45.275.100,00	2.382.900,00	rehabilitasi/pemeliharaan saluran pakuahaji di cijanggal (paket2)

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
50	2009	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. TRIJAYA	04/KPA-DPLK-06-M/SP/XI/2009	92.900.000,00	88.255.000,00	4.645.000,00	rehabilitasi/pemeliharaan saluran irigasi di leuwiliang (paket3)
51	2009	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. REZITAMA	510.2/2346.C/DPLK/VII/2009	264.621.000,00	264.620.950,00	50,00	pengerukan sungai cikendal
52	2009	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. KAHURIPAN	510.2/3850/DPLK/X/2009	258.500.000,00	245.575.000,00	12.925.000,00	penyediaan sarana air bersih (sumur artesis) di kel. Cigugur tengah
53	2009	kantor lingkungan hidup	CV. DOHARDO	03/KPA/KLH-03/SP/IX/2009	119.611.000,00	113.630.450,00	5.980.550,00	Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
54	2009	Dinas Kesehatan	CV. KARYA CIPTA ARTHA	03/KPA-Dinkes.01.M/SP/XI/2009	181.588.000,00	172.508.600,00	9.079.400,00	penataan puskesmas pembantu leuwigajah (lanjutan)
55	2009	Dinas Kesehatan	CV. SENTRAL AGUNG PRAKASA	04/KPA-Dinkes-01.M/SP/XI/2009	88.112.000,00	83.706.400,00	4.405.600,00	penataan puskesmas pembantu leuwigajah (lanjutan2)
56	2009	Dinas Kesehatan	CV. GURAT EMAS	04/KPA-Dinkes-07.M/SP/XI/2009	73.687.000,00	70.002.650,00	3.684.350,00	penataan puskesmas citeureup (lanjutan)
57	2009	Dinas Kesehatan	CV. GURAT EMAS	03/KPA/SPK/Pusk. CTRP.II/XI/2009	37.460.000,00	35.587.000,00	1.873.000,00	penataan puskesmas citeureup (lanjutan2)
58	2009	Dinas Kesehatan	CV. CIPTA PRATAMA	04/KPA/Dinkes.14.L/SP/XI/2009	501.160.000,00	476.102.000,00	25.058.000,00	pembangunan puskesmas pembantu melong
59	2009	Dinas Kesehatan	CV. HENDOKI BHAKTI	04/KPA-Dinkes-05-M/SP/XI/2009	75.248.000,00	71.485.600,00	3.762.400,00	penataan puskesmas dan gudang obat padasuka
60	2009	Dinas Kesehatan	CV. MEGA	04/KPA-Dinkes-02.M/SP/XI/2009	93.425.000,00	88.753.750,00	4.671.250,00	penataan puskesmas cimahi tengah
61	2009	Dinas Kesehatan	CV. PURBA GEBANG	04/KPA-Dinkes-04.M/SP/XI/2009	61.150.000,00	58.092.501,00	3.057.499,00	penataan puskesmas cigugur tengah
62	2009	Dinas Kesehatan	CV. GINANJAR	04/KPA/SPK/PSRKLK/Dinkes/2009	30.520.000,00	28.994.000,00	1.526.000,00	penataan puskesmas pasirkaliki
63	2009	Dinas Kesehatan	CV. PURBA GEBANG	04/KPA.Dinkes-03.M/SP/XI/2009	87.126.000,00	82.769.700,00	4.356.300,00	penataan puskesmas gedung obat ciawitali
64	2009	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TUMARITIS	03/KPA-DPU-45_L/SP/VII/2009	463.694.000,00	440.510.200,00	23.183.800,00	penataan halaman pasar atas baru kota cimahi
65	2009	Dinas Pekerjaan Umum	CV. ABU RIZAL	03/KPA/SPK/Kel.Cigugur/PU/2009	49.984.000,00	47.484.800,00	2.499.200,00	penyempurnaan kantor kelurahan cigugur tengah
66	2009	Dinas Pekerjaan Umum	CV. CIPTA JAYA KENCANA	03/KPA/SPK/UKS/PU/2009	49.989.000,00	47.489.550,00	2.499.450,00	penataan sekolah untuk lomba UKS
67	2009	Dinas Pekerjaan Umum	CV. BAGJA WALUYA	03/KPA/SP/DPU-64-L/IX/2009	129.375.000,00	122.906.250,00	6.468.750,00	pengadaan penerangan jalan umum (PJU) di dalam site sekitar rusun
68	2009	Dinas Pekerjaan Umum	CV. WIGUNA KARYA PERDANA	621/SPKK-24/BM-DPU/2009	192.057.000,00	182.454.150,00	9.602.850,00	pemeliharaan berkala jalan industri II
69	2009	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DILAGGA	621/SPKK-274/RPJ-ABT/BM-DPU/2009	44.936.000,00	42.689.200,00	2.246.800,00	jalan margaluyu
70	2009	Dinas Pekerjaan Umum	CV. RISA	621/SPKK-281/RPJ-ABT/BM-DPU/2009	44.106.000,00	41.900.700,00	2.205.300,00	persimpangan jalan pesantren amir machmud
71	2009	Dinas Pendidikan	CV. JAYA MAKMUR	07/DISDIK-07-M/SPK/XI/2009	58.295.000,00	55.380.250,00	2.914.750,00	rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMKN 1 cimahi
25 Sub Total V					3.507.032.000,00	3.357.735.399,00	149.296.601,00	
72	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. KARYA TRISTA ASRI	510.2/4718/DPLK/XI/2010	446.920.000,00	424.574.000,00	22.346.000,00	pembuatan septic tank komunal/biogas/mck plus 4 di kel. Padasuka
73	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. SANDRILLA PUTRA	510.2/4432/DPLK/XI/2010	49.600.000,00	47.120.000,00	2.480.000,00	pembuatan mck/septic tank/SPAL/IPAL 4 RW 22 kel. Citeureup
74	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. TIGA PUTRI	510.2/4337/DPLK/XI/2010	89.494.000,00	85.019.300,00	4.474.700,00	rehabilitasi/normalisasi/kirmir/DPT kel. Cibabat (RW 17)
75	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. DILAGGA	510.2/5337/DPLK/XI/2010	73.860.000,00	70.167.000,00	3.693.000,00	penataan taman median jl. Mintaredja (tahap I)
76	2010	Dinas Perhubungan	CV. INSUN MEDAL LESTARI	555/SPKK-01/LU/DISHUB/X/2010	196.080.000,00	186.276.000,00	9.804.000,00	pengadaan marka jalan
77	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GELAR SARANA	027/DPU-ABT.03-M/SP/X/2010	98.370.000,00	93.451.500,00	4.918.500,00	penyempurnaan pasar atas baru kota cimahi
78	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. BINTANG AGUNG	027/DPU-ABT.PG.05-PL/SPK/XI/2010	49.730.000,00	47.243.500,00	2.486.500,00	penataan sarana penunjang olah raga di kota cimahi
79	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRI JAYA	027/DPU-ABT.PG.03-PL/SPK/XI/2010	98.450.000,00	93.527.500,00	4.922.500,00	penyekatan gedung C3
80	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	027/DPU-ABT.PG.04-PL/SP/XI/2010	99.050.000,00	94.097.500,00	4.952.500,00	penataan sarana penunjang bandung cimahi junction (BJC)
81	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PERKASA UTAMA	621/SPKK-22/L/BM-DPU/2010	221.010.000,00	209.959.500,00	11.050.500,00	pembuatan saluran dan trotoar jl. HMS mintaredja
82	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. BINTANG AGUNG	621/SPKK-30/pml/BM-DPU/2010	94.254.000,00	89.541.300,00	4.712.700,00	penggantian plat beton jl. Amir machmud
83	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	621/SPKK-01/pml/BM-DPU/2010	98.770.000,00	93.831.500,00	4.938.500,00	overlay jl. Kihapit
84	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. RIFKINDO SAKTI	621/SPKK-05/pml/BM-DPU/2010	97.290.000,00	92.425.500,00	4.864.500,00	pelebaran beton jl. Sekolah, cimahi tengah
85	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PERKASA UTAMA	621/SPKK-11/PML/BM-DPU/2010	96.307.000,00	91.491.650,00	4.815.350,00	overlay jl. Usman dhomiri
86	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SENTRAL AGUNG PERKASA	621/SPKK-19/PML/BM-DPU/2010	93.560.000,00	88.882.000,00	4.678.000,00	overlay jl. Sisingamangaraja, cimahi tengah
87	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PERKASA UTAMA	621/SPKK-24/PML/BM-DPU/2010	91.261.000,00	86.697.950,00	4.563.050,00	overlay jl. Contong
88	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SWASTIKA MEGA UTAMA	621/SPKK-41/PML/BM-DPU/2010	85.380.000,00	81.111.000,00	4.269.000,00	rehabilitasi jalan baros-dustira-sriwijaya-gandawijaya
89	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	621/SPKK-47/PML/BM-DPU/2010	74.295.000,00	70.580.250,00	3.714.750,00	jl. Stadion

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
90	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. UJUNG JAYA	621/SPKK-27/PML/BM-DPU/2010	74.393.000,00	70.673.350,00	3.719.650,00	overlay jl. Kebon rumput
91	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MUTIARA TEKNIK	621/SPKK-203/pml/BM-DPU/2010	49.680.000,00	47.196.000,00	2.484.000,00	kelurahan karang mekar
92	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PERKASA UTAMA	621/SPKK-303/pml/BM-DPU/2010	49.747.000,00	47.259.650,00	2.487.350,00	kelurahan setiamanah
93	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TEKAD MULYA	621/SPKK-197/pml/BM-DPU/2010	49.700.000,00	47.215.000,00	2.485.000,00	kelurahan baros
94	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. KARYA MANDIRI	621/SPKK-159/RPJ/BM-DPU/2010	49.679.000,00	47.195.050,00	2.483.950,00	kelurahan cigugur tengah
95	2010	Dinas Pekerjaan Umum	(prayitno basuki)	621/SPKK-177/RPJ/BM-DPU/2010	49.448.000,00	46.975.600,00	2.472.400,00	kelurahan utama
96	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	621/SPKK-182/RPJ/BM-DPU/2010	49.516.000,00	47.040.200,00	2.475.800,00	kelurahan cibeureum
97	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRI SACITA	621/SPKK-335/RPJ/BM-DPU/2010	49.496.000,00	47.021.200,00	2.474.800,00	pelebaran beton jl. Dustira, cimahi tengah
98	2010	Dinas Pekerjaan Umum	PT. HEMBI GEMILANG	621/SPKK-65/pml/BM-DPU/2010	69.450.000,00	65.977.500,00	3.472.500,00	pemagaran jl. Sriwijaya
99	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MANDIRI JAYA SETIA	621/SPKK-18/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.637.000,00	47.155.150,00	2.481.850,00	jl. Padasuka
100	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	621/SPKK-45/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.596.000,00	47.116.200,00	2.479.800,00	jl. Gatot subroto dalam (TEPBK TNI)
101	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. KARANG NUNGGAL	621/SPKK-57/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.772.000,00	47.283.400,00	2.488.600,00	jl. Baros pasar RW 01 kel. Leuwigajah
102	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PERKASA UTAMA	621/SPKK-03/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	48.799.000,00	46.359.050,00	2.439.950,00	jl. Encep kartawirya
103	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. INTAN	621/SPKK-32/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.643.000,00	47.160.850,00	2.482.150,00	jl. Sriwijaya (lanjutan)
104	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	621/SPKK-111/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.480.000,00	47.006.000,00	2.474.000,00	jl. Mukodar cibeureum
105	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. KARYA MANDIRI	621/SPKK-54/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.814.000,00	47.323.300,00	2.490.700,00	jl. Terusan jenderal sudirman
106	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MUTIARA TEKNIK	621/SPKK-93/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.451.000,00	46.978.450,00	2.472.550,00	jl. Kalasan II
107	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TUMARITIS	621/SPKK-105/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.548.000,00	47.070.600,00	2.477.400,00	jl. Sadarmanah
108	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. ADHITAMA SARANA	621/SPKK-102/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.391.000,00	46.921.450,00	2.469.550,00	jl. Padat karya
109	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRI JAYA	621/SPKK-96/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.542.000,00	47.064.900,00	2.477.100,00	jl. Bakti I cibeureum
110	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. KARYA CITRA UTAMA	621/SPKK-48/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.622.000,00	47.140.900,00	2.481.100,00	jl. Sriwijaya 1
111	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PUNCAK JAYA ABADI	621/SPKK-51/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.640.000,00	47.158.000,00	2.482.000,00	jl. Sriwijaya 3
112	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. AKAR MANDIRI	621/SPKK-21/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.330.000,00	46.863.500,00	2.466.500,00	pengecatan marka jalan gandawijaya
113	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SANDHI BUANA	621/SPKK-144/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	48.147.000,00	45.739.650,00	2.407.350,00	drainase jalan melong
114	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SUKONINDO	621/SPKK-66/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.115.000,00	46.659.250,00	2.455.750,00	drainase bapa ampi
115	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SEJAHTERA	621/SPKK-108/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.700.000,00	47.215.000,00	2.485.000,00	jl. Singosari
116	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. RISA	621/SPKK-72/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	45.883.800,00	43.589.610,00	2.294.190,00	pembuatan dan pengecatan median
117	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PUTRA JAYA	621/SPKK-39/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.654.000,00	47.171.300,00	2.482.700,00	jl. Taman raden saleh kel. Baros
118	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MEGA	621/SPKK-63/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.674.000,00	47.190.300,00	2.483.700,00	jl. Muhammad yamin
119	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. UJUNG JAYA	621/SPKK-30/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	47.063.000,00	44.709.850,00	2.353.150,00	jl. Pemasangan median
120	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. UTAMA	621/SPKK-66/Pml-ABT/BM-DPU/2010	59.150.000,00	56.192.500,00	2.957.500,00	kelurahan citeureup
121	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. CIPTA JAYA KENCANA	621/SPKK-192/RPJ/BM-DPU/2010	48.006.000,00	45.605.700,00	2.400.300,00	ruas jalan puri cipageran
122	2010	Dinas Pekerjaan Umum	CV. BINA RAYA	621/SPKK-60/RPJ-ABT/BM-DPU/2010	49.613.000,00	47.132.350,00	2.480.650,00	Jl. Lingkungan RW 08 Kel. Setiamanah

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
123	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. INTAN	510.2/5653.A/DPLK/XII/2010	29.719.000,00	28.233.050,00	1.485.950,00	kelurahan cigugur tengah
124	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. GURAT EMAS	510.2/5651.A/DPLK/XII/2010	49.465.000,00	46.991.750,00	2.473.250,00	bumi prima RW 22 kel. Cibabat
125	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. SINAR TERANG	510.2/5660.A/DPLK/XII/2010	49.461.000,00	46.987.950,00	2.473.050,00	sungai citaman RW 16 kel. Cibabat
126	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. CIBAJA	510.2/5662.A/DPLK/XII/2010	49.387.000,00	46.917.650,00	2.469.350,00	pemakaman umum RW kel. Cibabat
127	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. SANDHI BUANA	510.2/5652.A/DPLK/XII/2010	49.507.000,00	47.031.650,00	2.475.350,00	kel. Karangmekar RW 08 dan 06
128	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. PERKASA UTAMA	510.2/5656.A/DPLK/XII/2010	49.466.000,00	46.992.700,00	2.473.300,00	sungai citaman RW 08 kel. Cibabat
129	2010	Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan	CV. MEGA	510.2/5654.A/DPLK/XII/2010	49.763.000,00	47.274.850,00	2.488.150,00	kel. Cigugur tengah RW 06
130	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. SANTIKA PUTRA USAHA	027/Disdik-71-PL/SPK/X/2010	89.465.000,00	84.991.750,00	4.473.250,00	pembangunan ruang kelas baru SMPN 8
131	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. TRIJAYA	027/Disdik-74-PL/SPK/X/2010	79.399.000,00	75.429.050,00	3.969.950,00	Rehab sedang SMPN 10
132	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. SUKAHARJA	027/Disdik-76-PL/SPK/X/2010	79.500.000,00	75.525.000,00	3.975.000,00	Rehab sedang SMPN 9
133	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. TEAM BANGUN PERKASA	027/Disdik-77-PL/SPK/X/2010	79.463.000,00	75.489.850,00	3.973.150,00	Rehab Berat SMPN 2
134	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. MEGAH JAYA	027/Disdik-134-PL/SPK/X/2010	39.150.000,00	37.192.500,00	1.957.500,00	Rehab sedang SMPN 3
135	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. GURAT EMAS	027/Disdik-100-PL/SPK/X/2010	79.414.000,00	75.443.300,00	3.970.700,00	Rehab berat 1 unit ruang kelas SMPN 5
136	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. GURAT EMAS	027/Disdik-101-PL/SPK/X/2010	79.562.000,00	75.583.900,00	3.978.100,00	Rehab berat 1 unit ruang kelas SMP Muhammadiyah
137	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. KARANG NUNGGAL	027/Disdik-105-PL/SPK/X/2010	79.631.000,00	75.649.450,00	3.981.550,00	Rehab sedang 2 kelas SMPN 5
138	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. SATRIA KARYA	027/Disdik-89-PL/SPK/X/2010	79.398.000,00	75.428.100,00	3.969.900,00	rehab berat 1 unit SDN utama mandiri 1
139	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. TIGA PUTERI	027/Disdik-123-PL/SPK/X/2010	39.200.000,00	37.240.000,00	1.960.000,00	rehab sedang 1 unit SDN citeureup mandiri 1
140	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. WIGUNA KARYA PERDANA	027/Disdik-128-PL/SPK/X/2010	39.150.000,00	37.192.500,00	1.957.500,00	rehab sedang 1 unit SDN utama mandiri 1
141	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. PERKASA UTAMA	027/Disdik-119-PL/SPK/X/2010	79.320.000,00	75.354.000,00	3.966.000,00	rehab sedang 2 unit SMA Pasundan 2 cimahi
142	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. MEGA	027/Disdik-116-PL/SPK/X/2010	79.406.000,00	75.435.700,00	3.970.300,00	rehab berat 1 unit SMAN 6
143	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. SINAR TERANG	027/Disdik-132-PL/SPK/X/2010	39.100.000,00	37.145.000,00	1.955.000,00	rehab sedang 1 unit SMK Moh Toha
144	2010	Dinas Pendidikan dan Olahraga	CV. CIPTA JAYA KENCANA	027/Disdik-109-PL/SPK/X/2010	89.451.000,00	84.978.450,00	4.472.550,00	ruang kelas baru 1 unit SDN padasuka mandiri 3
73		Sub Total VI			5.211.437.800,00	4.950.865.910,00	260.571.890,00	
145	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DRANARIN ABADI	03/PPK-KIMRUM/SPK/PSR2M/X/2011 03 Oktober 2011	97.960.000,00	93.062.000,00	4.898.000,00	Pembuatan Sumur Resapan Rusunawa Melong
146	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GANIJAN JAYA	KPA/SP/DPU-75-L/X/2011 03 Nopember 2011	147.900.000,00	140.505.000,00	7.395.000,00	Pemeliharaan Jaringan Irigasi RW 13 Kelurahan Utama (DBP)
147	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. RIFKINDO SAKTI	KPA/SP/DPU-04-L/VIII/2011 11 Agustus 2011	166.065.000,00	157.761.750,00	8.303.250,00	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Cipageran RW 10 (DBP)
148	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MELATI	KPA/SP/DPU-05-L/VIII/2011 11 Agustus 2011	167.736.000,00	159.349.200,00	8.386.800,00	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Cipageran RW 16 (DBP)
149	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GANIJAN JAYA	KPA/SP/DPU-54-L/IX/2011 05 September 2011	162.795.000,00	154.655.250,00	8.139.750,00	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Margajaya Kel. Citeureup RW 2 (DBP)
150	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SANDHI BUANA	KPA/SP/DPU-55-L/IX/2011 24 Agustus 2011	163.023.000,00	154.871.850,00	8.151.150,00	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Margaluyu Kel. Cimahi RW 2 (DBP)
151	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV EKA SAPTA	03/PPK-KIMRUM/SPK/NS.CXC/XI/2011 01 Nopember 2011	76.985.000,00	73.135.750,00	3.849.250,00	Rehabilitasi Saluran Cikendal Kel. Cipageran
152	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PERKASA UTAMA	17/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	99.407.000,00	94.436.650,00	4.970.350,00	Jl. CIBOGO LAMPING (APBD KOTA CIMAHI)
153	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	48/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.857.000,00	90.114.150,00	4.742.850,00	Jl. KEBON KOPI (DBP JAWA BARAT)
154	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PERKASA UTAMA	43/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	95.019.000,00	90.268.050,00	4.750.950,00	Jl. GANIRAH (DBP JAWA BARAT)
155	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRIJAYA	KPA/SP/DPU-30-L/VIII/2011 11 Agustus 2011	190.030.000,00	180.528.500,00	9.501.500,00	PEMBANGUNAN SALURAN DI JALAN MELONG KEC. CIMAHI SELATAN (DBP JAWA BARAT)
156	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DIRA SAWARGI	46/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.854.000,00	90.111.300,00	4.742.700,00	PERBAIKAN JALAN KEBON KOPI III KEL. CIBEUREUM KEC. CIMAHI SELATAN (DBP JAWA BARAT)
157	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. WIDYA TEKNIK	53/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	95.039.000,00	90.287.050,00	4.751.950,00	PERBAIKAN JALAN MELONG III KEL. MELONG KEC. CIMAHI SELATAN (DBP JAWA BARAT)

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
158	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MITRA DESA	44/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.788.000,00	90.048.600,00	4.739.400,00	PERBAIKAN JALAN SADARMANAH KEL. CIBEKER KEC. CIMAHI SELATAN (DBP JAWA BARAT)
159	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. NADYA PRATAMA	55/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.657.000,00	89.924.150,00	4.732.850,00	PERBAIKAN JI. HMS MINTAREJIA IV KEL. UTAMA KEC. CIMAHI SELATAN (DBP JAWA BARAT)
160	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PUTRIANA AZZAHRA	47/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.649.000,00	89.916.550,00	4.732.450,00	PERBAIKAN JI. KEBON KOPI IV KEL. CIBEUREUM KEC. CIMAHI SELATAN (DBP JAWA BARAT)
161	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. HERMI	54/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.800.000,00	90.060.000,00	4.740.000,00	PERBAIKAN JI. MELONG IV KEL. MELONG KEC. CIMAHI SELATAN (DBP JAWA BARAT)
162	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GLOBALINDO DWI SAKTI	45/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	95.168.000,00	90.409.600,00	4.758.400,00	PERBAIKAN JI. SADARMANAH I KEL. CIBEKER CIMAHI SELATAN (DBP JAWA BARAT)
163	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. WIGUNA KARYA PERDANA	KPA/SP/DPU-25-L/VIII/2011 04 Agustus 2011	197.903.000,00	188.007.850,00	9.895.150,00	JI. SETASION (APBD KOTA CIMAHI)
164	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	KPA/SP/DPU-23-L/VIII/2011 04 Agustus 2011	278.701.000,00	264.765.950,00	13.935.050,00	JI. URIP SUMOHARDJO (APBD KOTA CIMAHI)
165	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	83/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	93.293.000,00	88.628.350,00	4.664.650,00	JI. DJULAEHA (DBP JAWA BARAT)
166	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. WIGUNA KARYA PERDANA	86/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	93.238.000,00	88.576.100,00	4.661.900,00	JI. SRIWIJAYA (DBP JAWA BARAT)
167	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MADYA KARYA	KPA/SP/DPU-37-L/VIII/2011 05 Agustus 2011	148.124.000,00	140.717.800,00	7.406.200,00	JI. CIAWITALI (APBD KOTA CIMAHI)
168	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GUDITA	69/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.090.000,00	89.385.500,00	4.704.500,00	JI. SANGKURIANG (DBP JAWA BARAT)
169	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SASQIA REZA PRATAMA	56/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	93.952.000,00	89.254.400,00	4.697.600,00	JI. CIHANJUANG (DBP JAWA BARAT)
170	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MEGA	57/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	93.941.000,00	89.243.950,00	4.697.050,00	JI. PESANTREN (DBP JAWA BARAT)
171	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DIMAR	72/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.065.000,00	89.361.750,00	4.703.250,00	JI. CIAWITALI (DBP JAWA BARAT)
172	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PUTRIANA AZZAHRA	74/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.102.000,00	89.396.900,00	4.705.100,00	PERBAIKAN JI. ENCEP KARTAWIRYA III KEL. CITEREP KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
173	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. NADYA PRATAMA	76/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	93.979.000,00	89.280.050,00	4.698.950,00	PERBAIKAN JI. SANGKURIANG III KEL. PADASUKA KEC. CIMAHI TENGAH (DBP JAWA BARAT)
174	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DIRA SAWARGI	60/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.170.000,00	89.461.500,00	4.708.500,00	PERBAIKAN JI. CIHANJUANG III KEL. CIBABAT KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
175	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DEPA PERDANA KONSTRUKSI	61/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.045.000,00	89.342.750,00	4.702.250,00	PERBAIKAN JI. PESANTREN III KEL. CIBABAT KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
176	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. HERMI	62/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.180.000,00	89.471.000,00	4.709.000,00	PERBAIKAN JI. DEMANG III KEL. CIBABAT KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
177	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PUTRI MANDIRI	68/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.010.000,00	89.309.500,00	4.700.500,00	PERBAIKAN JI. MARGALUYU III KEL. CIMAHI KEC. CIMAHI TENGAH (DBP JAWA BARAT)
178	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MITRA DESA	75/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	93.911.000,00	89.215.450,00	4.695.550,00	PERBAIKAN JI. ENCEP KARTAWIRYA IV KEL. CITEREP KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
179	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GLOBALINDO DWI SAKTI	63/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.010.000,00	89.309.500,00	4.700.500,00	PERBAIKAN JI. CIHANJUANG IV KEL. CIBABAT KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
180	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. RINJANI	64/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	93.987.000,00	89.287.650,00	4.699.350,00	PERBAIKAN JI. PESANTREN IV KEL. CIBABAT KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
181	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. WIDYA TEKNIK	65/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	94.084.000,00	89.379.800,00	4.704.200,00	PERBAIKAN JI. DEMANG IV KEL. CIBABAT KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
182	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DEPA PERDANA KONSTRUKSI	78/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	93.981.000,00	89.281.950,00	4.699.050,00	PERBAIKAN JI. RANCABALI KEL. PASIRKALIKI KEC. CIMAHI UTARA (DBP JAWA BARAT)
183	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. BINA KONSTRUKSI	12/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2011 01 Juli 2011	99.829.000,00	94.837.550,00	4.991.450,00	Jalan Lingkungan kebon Jeruk (APBD Kota Cimahi)
184	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DILAGGA	621/16/SPK.D/RPJ/DPU-BM/XI/2011 01 Nopember 2011	49.635.000,00	47.153.250,00	2.481.750,00	JALING PASIRKALIKI
185	2011	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRIJAYA	621/17/SPK.D/RPJ/DPU-BM/XI/2011 01 Nopember 2011	49.853.000,00	47.360.350,00	2.492.650,00	JALING CIPAGERAN RW. 05

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
186	2011	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	CV. MADYA KARYA	510.2/4260/DKP/X/2011	296.698.000,00	281.863.100,00	14.834.900,00	Pembuatan Sumur Artesis Cibeureum
187	2011	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	CV. WIDYA TEKNIK	510.2/4261/DKP/X/2011	292.697.000,00	278.062.150,00	14.634.850,00	Pembuatan Sumur Artesis Leuwigajah
188	2011	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	CV Permata	027/Disdikpora- 25 -L/SPK/X/2011	113.759.000,00	108.071.050,00	5.687.950,00	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan/Pembangunan Perpustakaan SMP PGRI 3
189	2011	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	CV TRIJAYA	027/Disdikpora-27-L/SPK/X/2011	227.335.000,00	215.968.250,00	11.366.750,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Rehab Ruang Kelas SDN Cimahi Mandiri 5
190	2011	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	CV RIFKINDO SAKTI	KPA/SP/Disdikpora-15-/X/2011	106.254.000,00	100.941.300,00	5.312.700,00	Pembangunan ruang kelas lanjutan, rehab, mushola, WC
191	2011	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	CV Mutiara Teknik	027/disdikpora-114-PL/SPK/2011	24.878.000,00	23.634.100,00	1.243.900,00	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan/Pembangunan Perpustakaan SMP Darussurur
47			Sub Total VII		5.608.436.000,00	5.328.014.200,00	280.421.800,00	
192	2012	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	CV. DILAGGA	027/ Disdikpora/112-PL/SPK/X/2012	14.813.000,00	14.072.350,00	740.650,00	Pemagaran SDN Cibeureum Mandiri 1
193	2012	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	CV. LEMBANG ABADI	027/ Disdikpora/115-PL/SPK/X/2012	15.657.000,00	14.874.150,00	782.850,00	Pemagaran SDN Melong Mandiri 2
194	2012	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	CV. Bina Kontruksi	027/ Disdikpora-025 -L/SPK/IX/2012	244.954.000,00	232.706.300,00	12.247.700,00	Pembuatan Ruang Kelas Baru, Penyelesaian Ruang Kelas, Pemasangan Trails dan Pekerjaan MCK Lanjutan
195	2012	Dinas Kesehatan	CV. FIMOS KARYA	36/SPK/PMB.PKM.CIMSEL(LANJUTAN)/KPA/DINKES-PL/VII/2012	49.242.000,00	46.779.900,00	2.462.100,00	Pembangunan Puskesmas Cimahi Selatan (Lanjutan)
196	2012	Dinas Kesehatan	CV. CIPTA JAYA KENCANA	05/PPK/Pojok Laktasi PKM Melong/SPK/Yanmed/Dinkes/VII/2012	49.725.000,00	47.238.750,00	2.486.250,00	Pembangunan Rehab untuk Pojok Laktasi
197	2012	Dinas Kesehatan	CV. NAGA MAS JAYA	02/PPK/Sp.Pem.Pustu Cimenteng_Lanjutan/DINKES/VIII/2012	507.687.000,00	497.467.260,00	10.219.740,00	Pembangunan Puskesmas Pembantu Cimenteng Sehat (Lanjutan)
198	2012	Dinas Kesehatan	CV. INTAN	52/SPK/Rumdin Medis/KPA/DINKES/X/2012	217.652.000,00	201.343.336,00	16.308.664,00	Pembangunan Rumah Dinas Medis
199	2012	Dinas Kesehatan	CV. INTAN	54/SPK/Rumdin Paramedis/KPA/DINKES/X/2012	265.557.000,00	191.216.973,00	74.340.027,00	Pembangunan Rumah Dinas Paramedis
200	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SANDRILA PUTRA	621/23/SP/RPJ-L/DPU-BM/VIII/2012 TANGGAL, 16 AGUSTUS 2012	269.681.000,00	256.196.950,00	13.484.050,00	Jl. PADAT KARYA
201	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. KARYA MANDIRI	621/03/SP/RPJ-L/DPU-BM/VIII/2012 TANGGAL, 15 AGUSTUS 2012	197.202.000,00	187.341.900,00	9.860.100,00	Jl. IBU GANIRAH -WARUNG CONTONG
202	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. KARYA MANDIRI	621/05/SPK/RPJ/DPU-BM/II/2012 TANGGAL, 27 FEBRUARI 2012	99.154.000,00	94.196.300,00	4.957.700,00	SALURAN Jl. IBU GANIRAH
203	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRI JAYA	621/27/SP/RPJ-DBP/DPU-BM/X/2012 TANGGAL, 09 OKTOBER 2012	99.187.000,00	94.227.650,00	4.959.350,00	Jl. CISEUPAN
204	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DIMAR	621/15/SP/RPJ-L/DPU-BM/VIII/2012 TANGGAL, 16 AGUSTUS 2012	570.084.000,00	541.579.800,00	28.504.200,00	Jl. DAENG M. ARDIWINATA
205	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. BINTANG AGUNG	621/01/SP/RPJ-L/DPU-BM/VIII/2012 TANGGAL, 15 AGUSTUS 2012	197.556.000,00	187.678.200,00	9.877.800,00	Jl. MARTASIK
206	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SANDRILA PUTRA	621/26/SPK/RPJ/DPU-BM/V/2012 TANGGAL, 29 MEI 2012	99.208.000,00	94.247.600,00	4.960.400,00	Jl. RANCABALI
207	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. UTAMA	621/29/SPK/RPJ/DPU-BM/V/2012 TANGGAL, 29 MEI 2012	99.341.000,00	94.373.950,00	4.967.050,00	Jl. KAMARUNG PAMOYANAN
208	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRI JAYA	621/02/SP/RPJ-L-DBP/DPU-BM/X/2012 TANGGAL, 05 OKTOBER 2012	542.258.000,00	515.145.100,00	27.112.900,00	PEMBANGUNAN TROTOAR Jl. SANGKURIANG

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
209	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. UTAMA	621/16/SPK/RPJ/DPU-BM/V/2012 TANGGAL, 23 MEI 2012	99.411.000,00	94.440.450,00	4.970.550,00	JALING PADASUKA (RW. 15)
210	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. UTAMA	621/07/SPK/RPJ/DPU-BM/V/2012 TANGGAL, 11 MEI 2012	98.334.000,00	93.417.300,00	4.916.700,00	JALING MELONG (RW. 29)
211	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PERKASA UTAMA	621/28/SPK/RPJ/DPU-BM/V/2012 TANGGAL, 29 MEI 2012	99.540.000,00	94.563.000,00	4.977.000,00	JALING GUNUNG BATU DALAM
212	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	621/69/SPK/RPJ/DPU-BM/VIII/2012 TANGGAL, 24 AGUSTUS 2012	99.379.000,00	94.410.050,00	4.968.950,00	JALING KARANG ANYAR CIGUGUR
213	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRI JAYA	621/72/SPK/RPJ/DPU-BM/X/2012 TANGGAL, 01 OKTOBER 2012	99.213.000,00	94.252.350,00	4.960.650,00	JALAN KEL. CIBEBER
214	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. KARYA MANDIRI	621/34/SPK/RPJ/DPU-BM/VI/2012 TANGGAL, 01 JUNI 2012	98.700.000,00	93.765.000,00	4.935.000,00	JALING UTAMA (RW 16)
215	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV.DIMAR	621/18/SPK/RPJ/DPU-BM/V/2012 TANGGAL, 23 MEI 2012	99.126.000,00	94.169.700,00	4.956.300,00	JALING KARANG MEKAR (PANDAY)
216	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PRIMA JAYA	621/56/SPK/RPJ/DPU-BM/VII/2012 TANGGAL, 10 JULI 2012	99.302.000,00	94.336.900,00	4.965.100,00	JALING RW. 20 CIPAGERAN
217	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. BINTANG AGUNG	621/08/SPK/RPJ/DPU-BM/V/2012 TANGGAL, 11 MEI 2012	98.203.000,00	93.292.850,00	4.910.150,00	JALING KELURAHAN
218	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. ABDI JAYA	621/04/SPK/RPJ-ABT/DPU-BM/XI/2012 TANGGAL, 20 NOVEMBER 2012	49.762.000,00	47.273.900,00	2.488.100,00	JALING NATA ENDAH KEL. CIBABAT
219	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. INDRA NUGRAHA	621/17/SPK/RPJ-ABT/DPU-BM/XI/2012 TANGGAL, 20 NOVEMBER 2012	49.542.000,00	47.064.900,00	2.477.100,00	JALING KEL. CIBEBER
220	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. UTAMA	621/06/SPK/RPJ-ABT/DPU-BM/XI/2012 TANGGAL, 20 NOVEMBER 2012	99.121.000,00	94.164.950,00	4.956.050,00	JALAN GATOT SUBROTO
221	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. ESA KARYA	621/24/SPK/RPJ-ABT/DPU-BM/XI/2012 TANGGAL, 20 NOVEMBER 2012	49.613.000,00	47.132.350,00	2.480.650,00	JALAN DAYANG SUMBI
222	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. NOVETA SAMUEL	02/PPK/SP-PKSPP/DPU/X/21012	294.524.000,00	279.797.800,00	14.726.200,00	Pembangunan Lanjutan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
223	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PURBA GEBANG	03/PPK-KIMRUM/SPK/PMA/IV/2012	99.518.000,00	94.542.100,00	4.975.900,00	Penyempurnaan Mesjid Agung
224	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. WIGUNA KARYA PERDANA	02/PPK/SP-RLKCBT/DPU/X/21012	369.682.000,00	351.197.900,00	18.484.100,00	Rehabilitasi Lanjutan Kantor Kelurahan Cibabat
225	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DIMAR	03/PPK-KIMRUM/SPK/KNP-PDSK/VI/2012	29.581.000,00	28.101.950,00	1.479.050,00	Pemasangan Kanopi Kantor Kelurahan Padasuka
226	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. FAJAR FIRDAUS	02/PPK-KIMRUM/SPK/TPT.MLNG/VI/21012	99.201.000,00	94.240.950,00	4.960.050,00	Perbaikan TPT di RW. 22 Kel. Melong
227	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. MADYA KARYA	03/PPK-KIMRUM/SPK/DRA-LWG/V/2012	87.559.000,00	83.181.050,00	4.377.950,00	Rehabilitasi Drainase di Kelurahan Leuwigajah
228	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. SASQIA REZHA PRATAMA	03/PPK-KIMRUM/SPK/DRA-CBBT/VI/2012	87.477.000,00	83.173.450,00	4.303.550,00	Rehabilitasi Drainase di Kelurahan Cibabat
229	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TRI JAYA	02/PPK/SP-RJILT/DPU/X/21012	140.789.000,00	133.749.550,00	7.039.450,00	Rehabilitasi Jaringan Iriqasi Leuwiteureup
230	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. GURAT EMAS	03/PPK-KIMRUM/SPK/NSC-LWG/XI/2012	99.495.000,00	94.520.250,00	4.974.750,00	Normalisasi Sungai Sungai Cisangkan Kel. Leuwigajah
231	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PURBA GEBANG	02/PPK-KIMRUM/SPK/NS.CBBR/VIII/2012 ADDM.: 076/01/PPK.KIMRUM/ADD/NS.CBBR/VII/2012	98.922.000,00	93.975.900,00	4.946.100,00	Normalisasi Sungai Sungai Cisangkan Cibeber
232	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. PURBA GEBANG	02/PPK-KIMRUM/SPK/NSS.CTMN/VII/2012	99.470.000,00	94.496.500,00	4.973.500,00	Rehabilitasi/Normalisasi Saluran Sungai Citaman
233	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. KHARISMA JAYA MANDIRI	02/PPK/SP-PLKB/DPU/X/21012	482.012.000,00	457.911.400,00	24.100.600,00	Penataan Lapangan Krida Bakti (DBP)
234	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. TIGA SAUDARA	02/PPK/SP/DPU-59-L/XI/2012	397.991.000,00	378.091.450,00	19.899.550,00	Penataan Lingkungan Kawasan Rusun Leuwigajah
235	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. DIMAR	03/PPK-KIMRUM/SPK/ART-LWG/VII/2012	49.413.000,00	46.942.350,00	2.470.650,00	Penyempurnaan Artesis RW. 16 Kelurahan Leuwigajah
236	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. WIGUNA KARYA PERDANA	03/PPK-KIMRUM/SPK/PGR-RL/VI/2012	99.481.000,00	94.506.950,00	4.974.050,00	Pemasangan Pagar Bagian Depan Rusunawa Leuwigajah

No	Tahun	SKPD	Nama Kontraktor	No.Kontrak	Nilai Kontrak	Pembayaran (Realisasi SP2D)	Utang Lain-lain	Keterangan
237	2012	Dinas Pekerjaan Umum	CV. WIJAYA KUSUMAH	03/PPK-KIMRUM/FAN-PIPA/XI/2012	49.492.000,00	47.017.400,00	2.474.600,00	Pemasangan Pipa Distribusi dan Kelengkapannya Rusunawa Leuwigajah
238	2012	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	CV KURNIA PRIMA JAYA	510.2/3965/DKP/IX/2011 tanggal 19 September 2011	198.974.000,00	189.025.300,00	9.948.700,00	Penataan Taman Median Jalan Mintaredja (Tahap II)
239	2012	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	CV INSUN MEDAL LESTARI	510.2/2366.A/DKP/IX/2011 tanggal 19 September 2011	148.261.000,00	140.847.950,00	7.413.050,00	Pembangunan Gerbang Batas Kota (Padasuka)
48			Sub Total VIII		7.610.046.000,00	7.178.290.369,00	431.755.631,00	
			JUMLAH (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)		25.410.986.575,00	24.091.061.777,00	1.319.924.798,00	

Pemerintah Kota Cimahi
Daftar Utang Kepada Pihak Ketiga Atas Biaya Pemeliharaan dan Pembangunan (Retensi)
Per 31 Desember 2021

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2021	PEMBAYARAN UTANG TAHUN 2021	SALDO PER 31 DESEMBER 2021
1	Saldo Utang Retensi	1.319.924.798	-	-	1.319.924.798
	Total	1.319.924.798	-	-	1.319.924.798

Pemerintah Kota Cimahi
Utang RSUD Cibabat Kepada Rekanan
Per 31 Desember 2021

NO	REKANAN	SALDO AWAL 2020	Koreksi	PENAMBAHAN UTANG 2021	PELUNASAN		SALDO UTANG 31 DESEMBER 2021		
					UTANG 2020	UTANG 2021	2020	2021	TOTAL
		A	B	C	D	E	F=A+B-D	G=C-E	H=F+G
1	ALBA UNIVERSAL ABADI	72.454.388	(1.980.000)	-	70.474.388	-	-	-	-
2	ANTAR MITRA SEMBADA			23.698.730		23.698.730	-	-	-
3	ANUGRAH ARGON MEDIKA	3.121.948.064	9	3.362.466.057	3.121.948.073	1.909.482.722	-	1.452.983.335	1.452.983.335
4	AULIA INDOTAMA LESTARI	8.316.550	30.014.600	166.676.950	38.331.150	163.216.350	-	3.460.600	3.460.600
5	ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	3.257.996.290		2.203.161.281	3.257.996.290	1.294.479.577	-	908.681.704	908.681.704
6	ABADI NUSA USAHA SEMESTA	1.447.022.500	377.492.500	2.984.932.500	1.824.515.000	2.287.972.500	-	696.960.000	696.960.000
7	ANUGRAH JAYA FORDIC			-		-	-	-	-
8	ANUGRAH KARYA GEMILANG			-		-	-	-	-
9	AMODIA KARYAGUNA SEJAHTERA			7.056.500		5.274.500	-	1.782.000	1.782.000
10	ANUGRAH CORONA MEDIKA			55.409.300		55.409.300	-	-	-
11	ASIA TRAN SINERGI			14.400.000		14.400.000	-	-	-
12	ALIYPZ INTERNASIONAL			9.504.000		-	-	9.504.000	9.504.000
13	AFINDO BUANA JAYA			73.612.405		17.585.078	-	56.027.327	56.027.327
14	AGUNG WIJAYA EKASENTOSA	48.400.000		48.400.000	48.400.000	48.400.000	-	-	-
15	BINA SAN PRIMA	549.543.880	(1)	1.042.522.313	549.543.879	679.393.414	-	363.128.899	363.128.899
16	BRATACO			-		-	-	-	-
17	BIOTEK INTI KORPORINDO	603.699.982		951.149.966	603.699.982	817.549.971	-	133.599.995	133.599.995
18	BERKEMBANG SELARAS DAYA	44.415.016		6.529.696	44.415.016	6.529.696	-	-	-
19	BUMIASRI ANGSATANA MANDIRI	151.811.000		178.301.255	151.811.000	144.196.250	-	34.105.005	34.105.005
20	BUANA JAYA ALKESINDO			-		-	-	-	-
21	BINA BAKTI NIAGAPERKASA			64.750.000		38.500.000	-	26.250.000	26.250.000
22	BINA ARTHA SEMESTA	11.953.000	16.338.000	261.127.000	28.291.000	206.549.000	-	54.578.000	54.578.000
23	CIMEKAR RAYA PERKASA	222.387.825		259.018.513	222.387.825	181.358.513	-	77.660.000	77.660.000
24	CENTRAL BANDUNG RAYA	288.146.196	(1)	314.220.852	288.146.195	213.612.114	-	100.608.738	100.608.738
25	CIPTA KARUNIA MANDIRI	142.078.681		88.277.954	142.078.681	73.013.474	-	15.264.480	15.264.480
26	CIPTA KARYA MANDIRI			-		-	-	-	-
27	CORONA CAHAYA SEMESTA			93.997.200		48.352.700	-	45.644.500	45.644.500
28	COBRA DENTAL INDONESIA	8.377.000		17.352.600	8.377.000	7.332.200	-	10.020.400	10.020.400
29	DAYA MUDA AGUNG	8.746.100		10.354.999	8.746.100	10.354.999	-	-	-
30	DISTRI VERSA BUANA MAS	24.619.650		26.935.920	24.619.650	16.386.920	-	10.549.000	10.549.000
31	DEMKA SAKTI			-		-	-	-	-
32	DIASTIKA BIOTEKINDO			135.267.000		101.827.000	-	33.440.000	33.440.000
33	DAMAI SEJAHTERA MEDIKA			-		-	-	-	-
34	DIFAS PUTRA GEMILANG	114.373.930		71.551.425	114.373.930	50.377.800	-	21.173.625	21.173.625
35	DUTA BERKAT ABADI	7.199.500		7.689.000	7.199.500	7.689.000	-	-	-
36	DIRA PHARMA ALKES			43.312.500		43.312.500	-	-	-
37	DEXA ARFINDO PRATAMA			100.368.510		100.368.510	-	-	-
38	DOS NI ROHA			63.715.564		63.715.564	-	-	-
39	EZZY GEMILANG JAYA	363.648.384		253.158.400	363.648.384	253.158.400	-	-	-
40	ELO KARSA UTAMA			626.450		626.450	-	-	-
41	ENSEVAL PUTRA MEGATRAIDING	2.208.144.795	13.799.998	1.821.723.613	2.221.944.793	1.262.044.040	-	559.679.573	559.679.573
42	FAJAR ALAM SCIENTIFIC	24.161.133	-	99.827.380	24.161.133	89.953.231	-	9.874.149	9.874.149
43	FRISMED HOSLAB INDONESIA			1.230.705.960		1.230.705.960	-	-	-
44	GEMPA RAMADHAN			31.229.000		31.229.000	-	-	-
45	GRACIA PERSADA ABADI			254.649.998		119.749.999	-	134.899.999	134.899.999

NO	REKANAN	SALDO AWAL 2020	Koreksi	PENAMBAHAN UTANG 2021	PELUNASAN		SALDO UTANG 31 DESEMBER 2021		
					UTANG 2020	UTANG 2021	2020	2021	TOTAL
		A	B	C	D	E	F=A+B-D	G=C-E	H=F+G
46	GRATIA JAYA MULYA			2.799.000		2.799.000	-	-	-
47	HIKMAH GAS			2.794.508.200		2.330.929.700	-	463.578.500	463.578.500
48	HARMONI			1.555.000		1.555.000	-	-	-
49	HOLI PHARMA			-		-	-	-	-
50	INTI MEDIKA SARANA			-		-	-	-	-
51	INDOFARMA GLOBAL MEDIKA	112.907.667		369.421.812	112.907.667	229.826.614	-	139.595.198	139.595.198
52	INDOHADETAMA	264.152.240		1.168.568.555	264.152.240	1.166.060.555	-	2.508.000	2.508.000
53	INDO DENTAL	2.205.000		-	2.205.000	-	-	-	-
54	INTI SUMBER HASIL SEMPURNA	241.529.250		53.712.402	241.529.250	53.712.402	-	-	-
55	INSAN AFIAT MANDIRI	1.135.523.397		1.410.668.802	1.135.523.397	852.423.476	-	558.245.326	558.245.326
56	ITAMAYA RANORAYA			991.600.000		671.600.000	-	320.000.000	320.000.000
57	IDS MEDICAL SYSTEM INDONESIA			-		-	-	-	-
58	KIMIA PHARMA	898.877.728	(436.000)	2.602.626.683	898.441.728	1.564.531.121	-	1.038.095.562	1.038.095.562
59	KOLOSAL PRATAMA			-		-	-	-	-
60	KASHELARA			6.292.000		6.292.000	-	-	-
61	KURNIA ASTASURYA			237.500.000		237.500.000	-	-	-
62	LAKSANA ABADI MANDIRI	135.528.250		1.094.859.700	135.528.250	1.083.419.700	-	11.440.000	11.440.000
63	LITERA MULTI SARANA			-		-	-	-	-
64	MENSA BINA SUKSES	79.558.055		186.480.191	79.558.055	173.939.951	-	12.540.240	12.540.240
65	MERAPI UTAMA PHARMA	1.654.055.517		1.578.784.292	1.654.055.517	1.012.190.348	-	566.593.944	566.593.944
66	MILLENNIUM PHARMACON	250.661.756	(2.094.400)	587.457.109	248.567.356	318.477.299	-	268.979.810	268.979.810
67	MEGAH MEDIKA PHARMA	287.043.211		324.843.707	287.043.211	244.418.582	-	80.425.125	80.425.125
68	MEDIKA CAHAYA MANDIRI	63.030.150		63.794.020	63.030.150	42.695.015	-	21.099.005	21.099.005
69	MESAT INDO GLOBAL			-		-	-	-	-
70	MUARA SAKTI	1.660.947		104.897.795	1.660.947	81.805.726	-	23.092.069	23.092.069
71	MEDITECH INDONESIA			43.989.000		43.989.000	-	-	-
72	MEDQUEST JAYA GLOBAL	13.976.755		226.673.025	13.976.755	226.673.025	-	-	-
73	MEDISON JAYA RAYA			-		-	-	-	-
74	MITRA MAJU SENTOSA			-		-	-	-	-
75	MARIN LIZA FARMASI	36.152.565	7.138	21.416.545	36.159.703	21.416.545	-	-	-
76	MULYA HUSADA JAYA	22.100.000		25.350.000	22.100.000	19.500.000	-	5.850.000	5.850.000
77	MIDIF FARMA			12.372.663		12.372.663	-	-	-
78	MUNGGARAN	102.196.875		187.865.975	102.196.875	67.608.475	-	120.257.500	120.257.500
79	NUSA KARISMA RAYA	167.453.872	(9.898.870)	527.974.765	157.555.002	423.114.741	-	104.860.024	104.860.024
80	NUSA PRATAMA MANDIRI			-		-	-	-	-
81	NASZA BERDIKARI			-		-	-	-	-
82	NAHL MEDICA UTAMA	447.078.720	13.750.000	591.529.620	460.828.720	440.990.770	-	150.538.850	150.538.850
83	NUANSA JAYA GROUP			28.750.000		28.750.000	-	-	-
84	NEYKA SHARY PRATAMA	866.849.500		1.232.401.090	866.849.500	784.156.700	-	448.244.390	448.244.390
85	OSADHA GRAHA SEJAHTERA			-		-	-	-	-
86	ORIZA MEDIKA MANDIRI			3.503.500		-	-	3.503.500	3.503.500
87	PRIMA ANUGRAH MANDIRI	59.541.394		124.213.672	59.541.394	22.586.850	-	101.626.822	101.626.822
88	PMI KOTA BANDUNG			309.470.000		293.910.000	-	15.560.000	15.560.000
89	PRIMA ALKESINDO NUSANTARA			-		-	-	-	-
90	PARIT PADANG	965.480.426	(1.650.000)	1.420.296.262	963.830.426	1.036.175.868	-	384.120.394	384.120.394
91	PRO HEALTH INTERNASIONAL	21.710.266		-	21.710.266	-	-	-	-
92	PERUSAHAAN PERDAGANGAN IND	327.781.168	94	386.728.253	327.781.262	137.165.092	-	249.563.161	249.563.161
93	PRABU MANDIRI JAYA			117.040.000		117.040.000	-	-	-
94	PENTA VALENT	189.512.192		362.674.909	189.512.192	320.542.327	-	42.132.582	42.132.582
95	RAJAWALI MEDIKA MANDIRI			252.225.001		252.225.001	-	-	-

NO	REKANAN	SALDO AWAL 2020	Koreksi	PENAMBAHAN UTANG 2021	PELUNASAN		SALDO UTANG 31 DESEMBER 2021		
					UTANG 2020	UTANG 2021	2020	2021	TOTAL
		A	B	C	D	E	F=A+B-D	G=C-E	H=F+G
96	REVAS UTAMA MEDIKA			-		-	-	-	-
97	RONTHKARD			43.775.424		43.775.424	-	-	-
98	RAJAWALI NUSINDO	354.484.046		372.891.418	354.484.046	306.747.395	-	66.144.023	66.144.023
99	SURYA PRIMA PERKASA			-		-	-	-	-
100	SURGIKA ALKESINDO	62.542.590		167.555.954	62.542.590	42.378.088	-	125.177.866	125.177.866
101	SAPTA SARI TAMA	42.736.035		-	42.736.035	-	-	-	-
102	SENTRA ASIA GEMILANG	245.845.721	20.278.280	886.166.595	266.124.001	183.991.665	-	702.174.930	702.174.930
103	SUMARSANA	18.949.920		75.665.920	18.949.920	75.665.920	-	-	-
104	SEHAT MURNI SEJAHTERA	21.450.000	(1.950.000)	-	19.500.000	-	-	-	-
105	SABA INDOMEDIKA	5.302.000	1.791.900	24.747.360	7.093.900	24.747.360	-	-	-
106	SAN PRIMA SEJATI	14.186.920		-	14.186.920	-	-	-	-
107	SINERGI TRIDAYA MEDICAL	17.779.999		80.190.000	17.779.999	80.190.000	-	-	-
108	SARANA BINA PRATAMA	80.517.937		-	80.517.937	-	-	-	-
109	SAFIRA DWI TAMA	61.958.600		-	61.958.600	-	-	-	-
110	SINAR PANCA MEDIKA			148.370.000		75.300.000	-	73.070.000	73.070.000
111	SAYAP SONDA			16.813.335		-	-	16.813.335	16.813.335
112	SETIA GUNA MEDIKA			-		-	-	-	-
113	TUNAS BANGUN PRAKARSA	321.697.090		309.251.030	321.697.090	227.448.430	-	81.802.600	81.802.600
114	TEMPO	23.104.500		49.187.823	23.104.500	14.827.983	-	34.359.840	34.359.840
115	TRANSMEDIC INDONESIA	340.035.696	(8.891.893)	546.106.450	331.143.803	458.620.162	-	87.486.288	87.486.288
116	TAWADA HEALTHCARE	15.840.000		20.130.000	15.840.000	20.130.000	-	-	-
117	TRIPUTRA TECHNOMEDIKA BAHARI			65.661.750		30.992.500	-	34.669.250	34.669.250
118	TOTAL MEDIKA PERSADA	9.223.500		21.697.500	9.223.500	21.697.500	-	-	-
119	TRIMITRA INTERNUSA MEDIKA			168.000.000		108.000.000	-	60.000.000	60.000.000
120	TANAYA		51.700.000	52.079.500	51.700.000	52.079.500	-	-	-
121	TRI SAPTA JAYA	164.214.225		427.618.944	164.214.225	345.617.027	-	82.001.917	82.001.917
122	TIARA KENCANA			46.115.893		44.549.893	-	1.566.000	1.566.000
123	TIGARAKSA SATRIA			21.637.600		21.637.600	-	-	-
124	UROGEN ADVANCED SOLUTIONS			133.600.000		133.600.000	-	-	-
125	UNITED DICO CITAS	127.206.154		130.843.182	127.206.154	97.924.747	-	32.918.435	32.918.435
126	USAHA SARANA MEDIKA	13.999.040		-	13.999.040	-	-	-	-
127	USAHA MEDIKA MANDIRI			-		-	-	-	-
128	VIOLET INDONESIA PERSADA			266.100.000		176.100.000	-	90.000.000	90.000.000
129	WIKATON MITRA TAMA			-		-	-	-	-
130	WEGO MEDIKA INDONESIA			-		-	-	-	-
132	WORKCKHARDT PHARMA INDO	11.462.000		-	11.462.000	-	-	-	-
TOTAL		23.028.546.738	498.271.354	39.906.730.017	23.526.818.092	28.526.220.202	-	11.380.509.815	11.380.509.815

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
Rincian UTANG KJP dan KDN
Per 31 Desember 2021

URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PEMBAYARAN	SALDO
KDN	42.989.320	869.275.440	841.922.610	70.342.150
KJP	189.828.800	3.836.369.600	3.716.917.400	309.281.000
TOTAL	232.818.120	4.705.645.040	4.558.840.010	379.623.150

UTANG KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF (KDN)

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
31 Desember 2017	Saldo Utang KDN 2015-Kurang Bayar KDN Juni 2015		100.000	(100.000)
31 Desember 2020	KDN 16-31 Desember 2020		28.474.320	(28.574.320)
31 Desember 2020	KDN Arus Balik 16-31 Desember 2020		14.415.000	(42.989.320)
27 Januari 2021	Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Arus Balik dan TPPAS Sarimukti Tanggal 16 s.d 31 Desember 2020-0151/SP2D/I/2021	42.889.320		(100.000)
18 Februari 2021	KDN Januari 2021		53.832.030	(53.932.030)
18 Februari 2021	KDN Arus Balik Januari 2021		27.120.000	(81.052.030)
09 Maret 2021	Kompensasi Dampak Negatif (KDN) TPPAS Sarimukti dan Arusbalik Bulan Januari 2021-0635/SP2D/III/2021	80.952.030		(100.000)
19 Maret 2021	KDN Februari 2021		45.795.960	(45.895.960)
19 Maret 2021	KDN Arus Balik Februari 2021		23.445.000	(69.340.960)
25 Maret 2021	Kompensasi Dampak Negatif (KDN) di TPPAS Sarimukti dan Arus Balik bulan februari 2021-0750/SP2D/III/2021	69.240.960		(100.000)
19 April 2021	KDN Maret 2021		52.661.070	(52.761.070)
19 April 2021	KDN Arus Balik Maret 2021		26.940.000	(79.701.070)
27 April 2021	Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Arus Balik dan TPPAS Sarimukti Bulan Maret 2021-0963/SP2D/IV/2021	79.601.070		(100.000)
20 Mei 2021	KDN April 2021		51.108.120	(51.208.120)
20 Mei 2021	KDN Arus Balik April 2021		25.890.000	(77.098.120)
31 Mei 2021	Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Arus Balik dan TPPAS Sarimukti Bulan April 2021-1227/SP2D/V/2021	76.998.120		(100.000)
16 Juni 2021	KDN Mei 2021		43.693.230	(43.793.230)
16 Juni 2021	KDN Arus Balik Mei 2021		22.125.000	(65.918.230)
29 Juni 2021	Kompensasi Dampak Negatif (KDN) TPPAS Sarimukti dan Arus Balik Bulan Mei 2021-1445/SP2D/VI/2021	65.818.230		(100.000)
23 Juli 2021	KDN Juni 2021		44.296.560	(44.396.560)
23 Juli 2021	KDN Arus Balik Juni 2021		22.335.000	(66.731.560)
28 Juli 2021	Kompensasi Dampak Negatif (KDN) TPPAS dan Arus Balik Bulan Juni 2021-1643/SP2D/VII/2021	66.631.560		(100.000)
18 Agustus 2021	KDN Juli 2021		47.341.770	(47.441.770)
18 Agustus 2021	KDN Arus Balik Juli 2021		23.910.000	(71.351.770)
20 Agustus 2021	Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Arus Balik dan TPPAS Sarimukti Bulan Juli 2021-1846/SP2D/VIII/2021	71.251.770		(100.000)
13 September 2021	KDN Agustus 2021		52.528.980	(52.628.980)
13 September 2021	KDN Arus Balik Agustus 2021		26.595.000	(79.223.980)
21 September 2021	Kompensasi Dampak Negatif (KDN) TPPAS Sarimukti dan Arus Balik Bulan Agustus 2021-1998/SP2D/IX/2021	79.123.980		(100.000)
12 Oktober 2021	KDN September 2021		51.036.720	(51.136.720)
12 Oktober 2021	KDN Arus Balik September 2021		25.830.000	(76.966.720)
21 Oktober 2021	Kompensasi Dampak Negatif (KDN) TPPAS Sarimukti dan Arus Balik Bulan September 2021-2098/SP2D/X/2021	76.866.720		(100.000)
16 November 2021	KDN Oktober 2021		50.854.650	(50.954.650)
16 November 2021	KDN Arus Balik Oktober 2021		26.400.000	(77.354.650)
01 Desember 2021	Kompensasi Dampak Negatif (KDN) TPPAS Sarimukti dan Arus Balik Bulan Oktober 2021-2398/SP2D/XI/2021	77.254.650		(100.000)
09 Desember 2021	KDN November 2021		35.914.200	(36.014.200)
09 Desember 2021	KDN Arus Balik November 2021		19.380.000	(55.394.200)
14 Desember 2021	Kompensasi Dampak Negatif (KDN) TPPAS Sarimukti dan Arus Balik Bulan November 2021-2598/SP2D/XII/2021	55.294.200		(100.000)
31 Desember 2022	KDN Desember 2021		46.392.150	(46.492.150)
31 Desember 2022	KDN Arus Balik Desember 2021		23.850.000	(70.342.150)

UTANG KOMPENSASI JASA PELAYANAN (KJP)

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
31/Dec/20	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) 16-31 Desember 2020		189.828.800	(189.828.800)
27/Jan/21	Kompensasi Jasa Pelayan (KJP) Bulan Desember 2020-0152/SP2D/I/2021	189.828.800		-
18 Februari 2021	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Januari 2021		358.880.200	(358.880.200)
09 Maret 2021	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Januari 2021-0636/SP2D/III/2021	358.880.200		-
19 Maret 2021	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) bulan Februari 2021		305.306.400	(305.306.400)
25 Maret 2021	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) bulan Februari 2021-0749/SP2D/III/2021	305.306.400		-
19 April 2021	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Maret 2021		351.073.800	(351.073.800)
27 April 2021	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Maret 2021-0964/SP2D/IV/2021	351.073.800		-
20 Mei 2021	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan April 2021		340.720.800	(340.720.800)
31 Mei 2021	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan April 2021-1226/SP2D/V/2021	340.720.800		-
16 Juni 2021	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Mei 2021		291.288.200	(291.288.200)
29 Juni 2021	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Mei 2021-1444/SP2D/VI/2021	291.288.200		-
23 Juli 2021	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Juni 2021		295.310.400	(295.310.400)
28 Juli 2021	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Juni 2021-1642/SP2D/VII/2021	295.310.400		-
18 Agustus 2021	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Juli 2021		315.611.800	(315.611.800)
20 Agustus 2021	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Juli 2021-1847/SP2D/VIII/2021	315.611.800		-
13 September 2021	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Agustus 2021		350.193.200	(350.193.200)
21 September 2021	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Agustus 2021-2103/SP2D/IX/2021	350.193.200		-
12 Oktober 2021	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan September 2021		340.244.800	(340.244.800)
21 Oktober 2021	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan September 2021-2423/SP2D/X/2021	340.244.800		-
16 November 2021	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Oktober 2021		339.031.000	(339.031.000)
01 Desember 2021	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan Oktober 2021-2911/SP2D/XII/2021	339.031.000		-
09 Desember 2021	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan November 2021		239.428.000	(239.428.000)
14 Desember 2021	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Bulan November 2021-3490/SP2D/XII/2021	239.428.000		-
31 Desember 2020	Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Desember 2021		309.281.000	(309.281.000)

Saldo Utang KDN 2015-Kurang Bayar KDN Juni 2015		100.000
KDN Desember 2021		46.392.150
KDN Desember 2021		23.850.000
KJP Desember 2021		-
SALDO UTANG		379.623.150

**RINCIAN PERHITUNGAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2021**

URAIAN	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	SURPLUS/DEFISIT LO	RK PPKD/RK SKPD	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN	KOREKSI NILAI PIUTANG	KOREKSI NILAI UTANG	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	KOREKSI NILAI ASET TETAP	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	Penyisihan Piutang	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Amortisasi	PENDAPATAN YANG DITANGGUKAN	KOREKSI UTANG PFK	KEUNTUNGAN/KE Rugian INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	EKUITAS AKHIR
PPKD-PPKD	212.192.170.819,80	(166.351.823,00)	855.508.220,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.682.474,00	212.883.009.690,80
Disdik	124.764.465.157,03	(313.602.536.633,04)	271.442.125.550,00	-	(228.697.100,00)		-	(1.135.121.894,00)	-	-	-	6.321.172.029,03	-	-	6.050,00	-	87.561.413.159,03
Dinkes	57.784.842.424,15	(102.505.001.215,56)	112.264.811.523,00	-	-		107.141.300,00	10.460.000,00	-	-	-	(391.694.454,53)	-	-	-	-	67.270.559.577,05
RSUD	233.218.301.355,92	(58.910.303.855,80)	71.298.490.211,00	-	-		918.832.953,00	1.681.223.172,00	-	-	-	(1.335.586.428,17)	-	-	-	-	246.870.957.407,95
DPUPR	996.073.183.351,36	(76.834.163.587,07)	192.149.670.904,00	-	(1.515.150.488,75)		-	(3.202.622.400,00)	-	-	-	17.922.625.822,79	-	-	-	-	1.124.593.543.602,33
DPKP	265.434.998.713,48	(29.060.136.049,84)	45.656.482.245,00	-		(21.905.000,00)	-	-	-	-	-	(1.961.833.677,16)	-	-	-	-	280.047.606.231,48
SATPOL PP DAMKAR	2.693.734.861,50	(20.634.843.729,16)	20.868.817.504,00	-	-		42.875.450,00	-	-	-	-	(262.694.202,33)	-	-	-	-	2.707.889.884,00
BPBD	988.618.043,00	(6.565.025.702,24)	6.877.016.790,00	-	-		142.100.000,00	-	-	-	-	(50.282.030,43)	-	-	-	-	1.392.427.100,33
OSP2KBP3A	1.266.533.314,10	(15.965.503.716,58)	16.047.969.197,00	-	-		98.507.000,00	-	-	-	-	(15.942.785,01)	-	-	-	-	1.431.563.009,51
DISNAKER	2.952.084.147,50	(8.620.147.608,43)	8.409.662.354,00	-	-		-	(2.222.000.000,00)	-	-	-	156.952.392,43	-	-	-	-	676.551.285,50
PANGAN	27.634.088.968,09	(11.062.779.524,23)	11.045.284.871,00	-	-		-	(32.236.000,00)	-	-	-	(28.521.892,65)	-	-	-	-	27.555.836.422,22
DLH	45.701.706.146,20	(43.183.928.586,57)	46.374.047.726,00	-	(2.341.500,00)		(18.747.960,00)	-	-	-	-	(1.674.778.221,15)	-	-	-	-	47.195.957.604,48
DISDUKASIP	3.462.035.356,00	(11.166.259.890,93)	10.024.562.879,00	-	-		-	-	-	-	-	(114.100.000,06)	-	-	-	-	2.206.238.344,01
DISHUB	67.874.286.365,67	(33.473.246.524,60)	30.825.144.986,00	-	(150.000,00)		46.164.498,10	189.853.000,00	-	-	75.750,00	(5.082.983.457,99)	-	-	-	-	60.379.144.617,19
DISKOMINFO	4.201.620.215,25	(13.104.463.032,76)	16.811.085.870,00	-	-		-	-	-	-	17.220.821,10	(39.113.875,61)	-	-	-	-	7.886.349.997,97
DISDAGKOPERIN	152.755.312.704,98	(25.587.115.814,98)	22.873.696.050,00	-	-		-	3.364.500,00	-	-	-	(1.030.261.422,99)	-	-	-	-	149.014.996.017,02
DPMPPTSP	1.435.153.268,82	(8.607.756.750,33)	26.722.462.961,00	-	(488.625.756,00)		-	-	-	-	38.276.491,05	36.376.433,01	-	-	-	-	19.135.886.647,55
DISBUDPARPORA	29.187.631.917,33	(17.890.373.704,00)	21.137.007.230,00	-	-		-	2.348.239.000,00	-	-	-	(291.133.611,31)	-	-	-	-	34.491.370.832,02
BAPPEDA	272.865.759,25	(12.285.189.124,51)	12.463.500.589,00	-	-		-	(52.293.500,00)	-	-	-	(84.926.365,08)	0,01	-	-	-	313.957.358,67
BPKAD	919.598.213,34	681.191.693.584,18	(623.031.273.877,00)	-	-		(1.369.553.603,00)	138.585.578,00	-	-	-	(1.503.768.021,74)	-	-	6.812.150,52	-	56.352.094.024,30
BAPENDA	96.988.219.346,11	588.482.827.002,99	(590.386.730.856,11)	-	(1.940.954.071,00)		-	4.460.000,00	-	-	28.980.793,48	(1.686.079,17)	-	-	-	-	93.175.116.136,29
BKPSDMD	165.356.374,33	(14.163.750.335,76)	14.184.866.609,00	-	-		-	-	-	-	-	(22.680.874,57)	-	-	-	-	163.791.773,00
DPRD	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KEPDA	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SETDA	51.541.367.080,33	(52.545.681.704,32)	52.250.467.470,00	-	-		-	74.295.000,00	-	-	-	287.822.649,58	-	-	26.204.303,00	-	51.634.474.798,59
SETWAN	16.296.390.674,33	(67.480.564.727,77)	67.015.984.014,00	-	-		-	(2.101.681.750,00)	-	-	-	986.969.182,31	-	-	-	-	14.717.097.392,87

URAIAN	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	SURPLUS/DEFISIT LO	RK PPKD/RK SKPD	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN	KOREKSI NILAI PIUTANG	KOREKSI NILAI UTANG	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	KOREKSI NILAI ASET TETAP	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	Penyisihan Piutang	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Amortisasi	PENDAPATAN YANG DITANGGUKAN	KOREKSI UTANG PFK	KEUNTUNGAN/KE Rugian INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	EKUITAS AKHIR
INSPEKTORAT	4.272.094.539,33	(8.567.910.723,82)	8.507.722.551,00	-	-		-	25.300.000,00	-	-	-	(44.763.318,80)	-	-	-	-	4.192.443.047,71
CIMUT	17.623.768.445,22	(31.223.359.829,72)	31.196.144.974,00	-	-		5.048.400,00	(216.583.499,86)	-	-	-	(50.269.946,99)	-	-	98.606,00	-	17.334.847.148,65
CIMTENG	17.817.970.292,28	(41.785.921.562,31)	42.134.370.069,00	-	-		12.604.200,00	3.205.500.400,00	-	-	-	(1.092.842.320,17)	-	-	-	-	20.291.681.078,80
CIMSEL	21.009.156.659,27	(38.047.547.797,95)	38.098.331.447,00	-	-		10.344.300,00	16.056.000,00	-	-	-	(430.279.156,12)	-	-	-	-	20.656.061.452,20
KESBANG	2.018.176.713,00	(6.971.827.854,97)	7.135.791.753,00	-	-		-	-	-	-	-	(17.273.000,00)	-	-	-	-	2.164.867.611,03
PPKD	252.983.054.384,92	-	8.746.978.186,11	(0,52)	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-3548229	-	261.726.484.341,51
SALDO 2021	2.711.528.785.611,89	199.662.829.176,91	0,00	(0,52)	(4.175.918.915,75)	(21.905.000,00)	(4.683.461,90)	(1.265.202.393,86)	-	-	84.553.855,62	10.184.503.367,13	0,01	-	29.572.880,52	1.682.474,00	2.916.024.217.594,05

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
RINCIAN BEBAN JASA
PER 31 DESEMBER 2021

5.1.02.01.	Beban Jasa-LO	336.911.501.029,62
5.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis-LO	41.342.357.552,00
5.1.02.01.01.0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas-LO	6.610.238.117,00
5.1.02.01.01.0009.	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran-LO	107.561.100,00
5.1.02.01.01.0010.	Beban Bahan-Isi Tabung Gas-LO	51.761.200,00
5.1.02.01.01.0023.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya-LO	14.093.200,00
5.1.02.01.01.0028.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender-LO	3.115.388.037,00
5.1.02.01.01.0052.	Beban Makanan dan Minuman Rapat-LO	23.099.658.258,00
5.1.02.01.01.0053.	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu-LO	5.493.081.850,00
5.1.02.01.01.0059.	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH-LO	78.760.000,00
5.1.02.01.01.0061.	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)-LO	552.850.800,00
5.1.02.01.01.0062.	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)-LO	192.555.000,00
5.1.02.01.01.0064.	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)-LO	435.225.050,00
5.1.02.01.01.0066.	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)-LO	29.132.900,00
5.1.02.01.01.0067.	Beban Pakaian Penyelamatan-LO	215.089.740,00
5.1.02.01.01.0068.	Beban Pakaian Siaga-LO	153.007.400,00
5.1.02.01.01.0073.	Beban Pakaian KORPRI-LO	1.320.000,00
5.1.02.01.01.0074.	Beban Pakaian Adat Daerah-LO	36.500.000,00
5.1.02.01.01.0075.	Beban Pakaian Batik Tradisional-LO	505.413.900,00
5.1.02.01.01.0076.	Beban Pakaian Olahraga-LO	568.406.500,00
5.1.02.01.01.0077.	Beban Pakaian Paskibraka-LO	82.314.500,00
	Beban Barang Pakai Habis -LO	-
5.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor-LO	160.238.685.840,00
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia-LO	7.894.805.120,00
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan-LO	1.064.347.000,00
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan-LO	1.014.781.500,00
5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan-LO	5.200.000,00
5.1.02.02.01.0013.	Beban Jasa Tenaga Pendidikan-LO	10.268.049.000,00
5.1.02.02.01.0014.	Beban Jasa Tenaga Kesehatan-LO	4.394.497.298,00
5.1.02.02.01.0016.	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum-LO	2.500.732.637,00
5.1.02.02.01.0017.	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat-LO	458.300.000,00
5.1.02.02.01.0020.	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial-LO	-
5.1.02.02.01.0023.	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan-LO	183.305.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Beban Jasa Tenaga Administrasi-LO	2.554.559.781,00
5.1.02.02.01.0027.	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer-LO	366.750.000,00
5.1.02.02.01.0028.	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum-LO	44.142.583.590,00
5.1.02.02.01.0029.	Beban Jasa Tenaga Ahli-LO	2.296.475.000,00
5.1.02.02.01.0030.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan-LO	5.793.775.129,00
5.1.02.02.01.0031.	Beban Jasa Tenaga Keamanan-LO	3.649.167.511,00
5.1.02.02.01.0035.	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik-LO	4.950.000,00
5.1.02.02.01.0036.	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO-LO	567.412.240,00
5.1.02.02.01.0039.	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi-LO	773.000.000,00
5.1.02.02.01.0041.	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik-LO	59.116.000,00
5.1.02.02.01.0042.	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan-LO	2.196.500,00
5.1.02.02.01.0043.	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan-LO	304.880.000,00
5.1.02.02.01.0045.	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan-LO	11.692.333,00
5.1.02.02.01.0046.	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi-LO	178.706.485,00
5.1.02.02.01.0047.	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara-LO	40.746.412.222,00
5.1.02.02.01.0048.	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi-LO	6.492.240.835,00
5.1.02.02.01.0049.	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga-LO	75.134.000,00
5.1.02.02.01.0055.	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan-LO	298.340.000,00
5.1.02.02.01.0059.	Beban Tagihan Telepon-LO	309.184.480,00
5.1.02.02.01.0060.	Beban Tagihan Air-LO	23.939.500,00
5.1.02.02.01.0061.	Beban Tagihan Listrik-LO	10.950.387.600,00
5.1.02.02.01.0062.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah-LO	1.918.792.500,00
5.1.02.02.01.0063.	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan-LO	3.932.538.212,00
5.1.02.02.01.0064.	Beban Paket/Pengiriman-LO	299.305.340,00
5.1.02.02.01.0067.	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan-LO	406.337.477,00
5.1.02.02.01.0069.	Beban Pengolahan Air Limbah-LO	44.716.800,00
5.1.02.02.01.0071.	Beban Lembur-LO	6.252.074.750,00
5.1.02.02.02.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi-LO	36.308.989.773,62

5.1.02.02.02.0003.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3-LO	23.311.707.100,00
5.1.02.02.02.0004.	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3-LO	1.917.442.800,00
5.1.02.02.02.0005.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN-LO	2.118.738.873,44
5.1.02.02.02.0006.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN-LO	643.464.814,53
5.1.02.02.02.0007.	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN-LO	1.058.248.244,03
5.1.02.02.02.0008.	Beban Asuransi Barang Milik Daerah-LO	7.259.387.941,62
5.1.02.02.03.	Beban Sewa Tanah-LO	1.289.551.963,00
5.1.02.02.03.0023.	Beban Sewa Tanah untuk Jalan-LO	1.289.551.963,00
5.1.02.02.04.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin-LO	2.209.706.263,00
5.1.02.02.04.0003.	Beban Sewa Excavator-LO	9.744.000,00
5.1.02.02.04.0017.	Beban Sewa Mesin Proses Apung-LO	133.460.000,00
5.1.02.02.04.0022.	Beban Sewa Electric Generating Set-LO	1.041.500,00
5.1.02.02.04.0036.	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang-LO	274.821.000,00
5.1.02.02.04.0037.	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang-LO	43.432.761,00
5.1.02.02.04.0063.	Beban Sewa Perkakas Pengangkat Bermesin-LO	12.500.000,00
5.1.02.02.04.0117.	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya-LO	1.669.575.002,00
5.1.02.02.04.0118.	Beban Sewa Mebel-LO	9.957.000,00
5.1.02.02.04.0132.	Beban Sewa Peralatan Studio Audio-LO	250.000,00
5.1.02.02.04.0133.	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film-LO	4.925.000,00
5.1.02.02.04.0463.	Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan-LO	50.000.000,00
5.1.02.02.05.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan-LO	4.314.242.000,00
5.1.02.02.05.0001.	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor-LO	1.973.417.000,00
5.1.02.02.05.0002.	Beban Sewa Bangunan Gudang-LO	1.168.410.000,00
5.1.02.02.05.0011.	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga-LO	432.800.000,00
5.1.02.02.05.0014.	Beban Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool-LO	40.000.000,00
5.1.02.02.05.0018.	Beban Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara-LO	73.500.000,00
5.1.02.02.05.0040.	Beban Sewa Rumah Negara Golongan III-LO	570.000.000,00
5.1.02.02.05.0043.	Beban Sewa Hotel-LO	56.115.000,00
5.1.02.02.07.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya-LO	33.950.000,00
5.1.02.02.07.0057.	Beban Sewa Tanaman-LO	33.950.000,00
5.1.02.02.08.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi-LO	9.608.504.027,00
5.1.02.02.08.0002.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural-LO	208.389.996,00
5.1.02.02.08.0003.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Banguna	513.214.200,00
5.1.02.02.08.0004.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior-LO	-
5.1.02.02.08.0005.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya-LO	17.765.082,00
5.1.02.02.08.0006.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik-	590.312.750,00
5.1.02.02.08.0007.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondas	477.980.508,00
5.1.02.02.08.0008.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik	475.289.290,00
5.1.02.02.08.0009.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik	98.386.200,00
5.1.02.02.08.0012.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Pengawas dan Konsultansi Jasa Rekayasa Kd	23.324.000,00
5.1.02.02.08.0013.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya-LO	264.534.700,00
5.1.02.02.08.0015.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah-LO	241.859.338,00
5.1.02.02.08.0016.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Linc	134.939.420,00
5.1.02.02.08.0017.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Pengembangan Pemanfaatan Ruang-LO	342.229.800,00
5.1.02.02.08.0018.	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur-LO	452.457.550,00
5.1.02.02.08.0019.	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan	852.441.550,00
5.1.02.02.08.0020.	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sip	1.661.218.870,00
5.1.02.02.08.0021.	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sip	463.521.265,00
5.1.02.02.08.0023.	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang-LO	269.144.010,00
5.1.02.02.08.0028.	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Penquian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	421.247.000,00
5.1.02.02.08.0030.	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Penquian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal-LO	-
5.1.02.02.08.0032.	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan-LO	1.909.862.498,00
5.1.02.02.08.0033.	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan-LO	190.386.000,00
5.1.02.02.09.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi-LO	3.287.709.528,00
5.1.02.02.09.0001.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan-LO	23.375.000,00
5.1.02.02.09.0003.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika-LO	-
5.1.02.02.09.0007.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan-LO	57.486.000,00
5.1.02.02.09.0011.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei-LO	780.223.650,00
5.1.02.02.09.0013.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen-LO	316.369.900,00
5.1.02.02.09.0014.	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus-LO	1.937.334.978,00
5.1.02.02.09.0020.	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataa	74.855.000,00
5.1.02.02.09.0021.	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisata	98.065.000,00
5.1.02.02.11.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS-LO	57.000.000,00
5.1.02.02.11.0001.	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1-LO	9.000.000,00
5.1.02.02.11.0002.	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2-LO	30.000.000,00
5.1.02.02.11.0003.	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3-LO	18.000.000,00
5.1.02.05.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO	8.019.579.973,00
5.1.02.05.01.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO	2.766.626.000,00
5.1.02.05.01.0001.	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan-LO	1.335.626.000,00
5.1.02.05.01.0004.	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan-LO	85.000.000,00
5.1.02.05.01.0005.	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)-LO	1.346.000.000,00

5.1.02.05.02.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO	5.252.953.973,00
5.1.02.05.02.0001.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain-LO	2.158.412.135,00
5.1.02.05.02.0002.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat-LO	3.094.541.838,00
5.1.02.88.	Beban Barang dan Jasa BOS-LO	25.093.518.635,00
5.1.02.88.88.	Beban Barang dan Jasa BOS-LO	25.093.518.635,00
5.1.02.88.88.8888.	Beban Barang dan Jasa BOS-LO	25.093.518.635,00
5.1.02.99.	Beban Barang dan Jasa BLUD-LO	45.107.705.475,00
5.1.02.99.99.	Beban Barang dan Jasa BLUD-LO	45.107.705.475,00
5.1.02.99.99.9999.	Beban Barang dan Jasa BLUD-LO	45.107.705.475,00

LAPORAN KEUANGAN SKPD

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1.01.01. DINAS PENDIDIKAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	268.729.197.976,00	228.552.914.893,00	85,05	232.100.045.988,00
	Belanja Barang	74.003.194.143,00	69.621.159.447,00	94,08	66.661.661.593,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	9.082.400.000,00	7.404.200.000,00	81,52	-
	Belanja Bantuan Sosial	2.378.320.000,00	1.369.990.000,00	57,60	-
	Jumlah Belanja Operasi	354.193.112.119,00	306.948.264.340,00	86,66	298.761.707.581,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	6.551.913.353,00	5.823.668.982,00	88,89	3.554.746.759,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	15.302.589.596,00	11.966.304.739,00	78,20	5.726.593.400,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.588.893.958,00	2.593.188.705,00	100,17	3.065.785.548,00
	Jumlah Belanja Modal	24.443.396.907,00	20.383.162.426,00	83,39	12.347.125.707,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	378.636.509.026,00	327.331.426.766,00	86,45	311.108.833.288,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	378.636.509.026,00	327.331.426.766,00	86,45	311.108.833.288,00
	SURPLUS / DEFISIT	(378.636.509.026,00)	(327.331.426.766,00)	86,45	(311.108.833.288,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(378.636.509.026,00)	(327.331.426.766,00)	86,45	(311.108.833.288,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS PENDIDIKAN
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.050,00	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di Kas BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	(202.640.087.976,00)	(146.750.786.760,00)
	Kas Lainnya	47.935.751,00	40.349.191,00
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	7.251.000,00	4.276.762,50
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	228.697.100,00
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	89.463.875,63	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	(447.319,38)	-
	Persediaan	187.389.597,00	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	(202.308.489.021,75)	(146.477.463.706,50)
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	62.055.425.372,00	62.055.425.372,00
	Peralatan dan Mesin	74.377.350.791,36	69.783.163.703,36
	Gedung dan Bangunan	196.314.539.328,00	190.393.418.050,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	599.205.674,00	599.205.674,00
	Aset Tetap Lainnya	47.771.271.256,85	45.222.982.551,85
	Konstruksi dalam Pengerjaan	12.565.212.634,31	5.802.795.214,31
	Akumulasi Penyusutan	(112.077.792.635,63)	(109.267.338.764,00)
	Jumlah Aset Tetap	281.605.212.420,89	264.589.651.801,52
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	521.580.800,00	437.059.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(439.021.950,00)	(398.724.000,00)
	Aset Lain-Lain	8.036.005.217,01	8.124.195.867,01
	Jumlah Aset Lainnya	8.118.564.067,01	8.162.530.867,01
	JUMLAH ASET	87.415.287.466,15	126.274.718.962,03

No.	Uraian	2021	2020
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	47.935.751,00	40.349.191,00
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	2.183.969,00	1.469.904.614,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	50.119.720,00	1.510.253.805,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	50.119.720,00	1.510.253.805,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	87.365.167.746,15	124.764.465.157,03
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	87.415.287.466,15	126.274.718.962,03

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS PENDIDIKAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 89.463.875,63	Rp -	Rp 89.463.875,63	#DIV/0!
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 89.463.875,63	Rp -	Rp 89.463.875,63	#DIV/0!
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 89.463.875,63	Rp -	Rp 89.463.875,63	#DIV/0!
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 227.084.164.893,00	Rp 233.568.795.988,00	Rp (6.484.631.095,00)	-2,78
	Beban Persediaan	Rp 20.765.675.603,00	Rp 16.533.000.978,00	Rp 4.232.674.625,00	25,60
	Beban Jasa	Rp 44.426.279.349,50	Rp 48.120.852.061,17	Rp (3.694.572.711,67)	-7,68
	Beban Pemeliharaan	Rp 1.806.829.544,00	Rp 798.050.840,00	Rp 1.008.778.704,00	126,41
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 1.582.225.362,00	Rp 1.163.427.038,00	Rp 418.798.324,00	36,00
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp 7.404.200.000,00	Rp -	Rp 7.404.200.000,00	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp 1.369.990.000,00	Rp -	Rp 1.369.990.000,00	-
	Beban Penyusutan	Rp 9.131.625.900,66	Rp 23.141.896.819,43	Rp (14.010.270.918,77)	-60,54
	Beban Amortisasi	Rp 40.297.950,00	Rp 53.787.500,00	Rp (13.489.550,00)	-25,08
	Beban Penyisihan Piutang	Rp 447.319,38	Rp -	Rp 447.319,38	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp 46.591.000,00	Rp (46.591.000,00)	-100,00
	JUMLAH BEBAN	Rp 313.611.735.921,54	Rp 323.426.402.224,60	Rp (9.814.666.303,05)	-3,03
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (313.522.272.045,91)	Rp (323.426.402.224,60)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (276.510.000,00)	Rp (100.950.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (276.510.000,00)	Rp (100.950.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (313.798.782.045,91)	Rp (323.527.352.224,60)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (313.798.782.045,91)	Rp (323.527.352.224,60)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PENDIDIKAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	124.764.465.157,03	188.422.359.273,32
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(313.798.782.045,91)	(323.527.352.224,60)
3	RK PPKD/RK SKPD	271.442.125.550,00	260.087.257.894,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	(228.697.100,00)	(22.869.685,69)
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(1.135.121.894,00)	(419.730.100,00)
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	224.800.000,00
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	6.321.172.029,03	-
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	6.050,00	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	87.365.167.746,15	124.764.465.157,03

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1.02.01. DINAS KESEHATAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah			-	
	Pendapatan Retribusi Daerah			-	1.793.413.500,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			-	
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	17.738.905.080,00	18.034.132.900,00	101,66	16.243.766.894,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	17.738.905.080,00	18.034.132.900,00	101,66	18.037.180.394,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	17.738.905.080,00	18.034.132.900,00	101,66	18.037.180.394,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	64.735.210.890,00	56.650.499.398,00	87,51	58.612.097.423,00
	Belanja Barang	82.591.004.545,00	57.289.527.169,00	69,37	45.159.124.831,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	147.826.215.435,00	114.440.026.567,00	77,42	103.771.222.254,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah				
	Belanja Peralatan dan Mesin	4.230.212.709,00	3.304.884.809,00	78,13	2.988.655.701,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	15.716.100.675,00	11.953.356.846,00	76,06	3.192.776.162,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	260.000.000,00	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	20.206.313.384,00	15.258.241.655,00	75,51	6.181.431.863,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	168.032.528.819,00	129.698.268.222,00	77,19	109.952.654.117,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	168.032.528.819,00	129.698.268.222,00	77,19	109.952.654.117,00
	SURPLUS / DEFISIT	(150.293.623.739,00)	(111.664.135.322,00)	74,30	(91.915.473.723,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(150.293.623.739,00)	(111.664.135.322,00)	74,30	(91.915.473.723,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS KESEHATAN
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di Kas BLUD Puskesmas	3.174.447.354,00	2.573.771.153,00
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	82.494.925,00	8.009.198.185,83
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	23.920.000,00	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	(119.600,00)	-
	Persediaan	9.548.695.953,58	9.185.437.470,61
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	12.829.438.632,58	19.768.406.809,44
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	7.870.642.001,00	7.870.642.001,00
	Peralatan dan Mesin	51.914.483.356,10	48.628.545.885,59
	Gedung dan Bangunan	46.808.347.617,00	34.383.389.521,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	306.819.000,00	306.819.000,00
	Aset Tetap Lainnya	61.713.000,00	61.713.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	243.707.750,00	243.707.750,00
	Akumulasi Penyusutan	(52.856.560.010,75)	(47.562.076.787,50)
	Jumlah Aset Tetap	54.349.152.713,35	43.932.740.370,09
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	172.730.000,00	172.730.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(159.987.500,00)	(150.495.000,00)
	Aset Lain-Lain	120.323.639,12	389.917.389,62
	Jumlah Aset Lainnya	133.066.139,12	412.152.389,62
	JUMLAH ASET	67.311.657.485,05	64.113.299.569,15

No.	Uraian	2021	2020
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	41.097.908,00	6.226.781.921,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	101.675.224,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	41.097.908,00	6.328.457.145,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	41.097.908,00	6.328.457.145,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	67.270.559.577,05	57.784.842.424,15
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	67.311.657.485,05	64.113.299.569,15

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS KESEHATAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp 1.793.413.500,00	Rp (1.793.413.500,00)	-100,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 18.058.052.900,00	Rp 16.243.766.894,00	Rp 1.814.286.006,00	11,17
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 18.058.052.900,00	Rp 18.037.180.394,00	Rp 20.872.506,00	11,17
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumbang Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp 6.356.416.321,00	Rp 5.290.652.184,00	Rp 1.065.764.137,00	20,1443
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 6.356.416.321,00	Rp 5.290.652.184,00	Rp 1.065.764.137,00	20,144
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 24.414.469.221,00	Rp 23.327.832.578,00	Rp 1.086.636.643,00	4,6581
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 50.456.967.864,00	Rp 64.809.557.529,00	Rp (14.352.589.665,00)	-22,15
	Beban Persediaan	Rp 14.351.843.972,03	Rp 14.892.767.174,55	Rp (540.923.202,52)	-3,63
	Beban Jasa	Rp 53.627.957.626,83	Rp 28.880.678.232,17	Rp 24.747.279.394,66	85,69
	Beban Pemeliharaan	Rp 1.245.566.201,00	Rp 1.003.657.626,00	Rp 241.908.575,00	24,10
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 782.775.831,00	Rp 882.293.085,00	Rp (99.517.254,00)	-11,28
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp 500.000.000,00	Rp -	Rp 500.000.000,00	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 4.902.788.768,71	Rp 5.526.935.410,96	Rp (624.146.642,25)	-11,29
	Beban Amortisasi	Rp 9.492.500,00	Rp 34.132.500,00	Rp (24.640.000,00)	-72,19
	Beban Penyisihan Piutang	Rp 119.600,00	Rp -	Rp 119.600,00	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp 115.031.572,99	Rp 114.573.276,50	Rp 458.296,49	0,40
	JUMLAH BEBAN	Rp 125.992.543.936,56	Rp 116.144.594.834,18	Rp 9.847.949.102,38	8,48
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (101.578.074.715,56)	Rp (92.816.762.256,18)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (926.926.500,00)	Rp (795.711.154,35)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (926.926.500,00)	Rp (795.711.154,35)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (102.505.001.215,56)	Rp (93.612.473.410,53)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (102.505.001.215,56)	Rp (93.612.473.410,53)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS KESEHATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

		(Dalam Rupiah)	
NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	57.784.842.424,15	53.941.056.795,18
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(102.505.001.215,56)	(93.612.473.410,53)
3	RK PPKD/RK SKPD	112.264.811.523,00	91.877.603.929,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	107.141.300,00	5.280.461.360,00
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	10.460.000,00	-
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	298.193.750,50
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(391.694.454,53)	-
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	67.270.559.577,05	57.784.842.424,15

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH - CIBABAT UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah			-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah			-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	145.000.000.000,00	165.608.981.259,00	114,21	162.130.839.861,45
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	145.000.000.000,00	165.608.981.259,00	114,21	162.130.839.861,45
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	145.000.000.000,00	165.608.981.259,00	114,21	162.130.839.861,45
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	95.203.830.268,00	88.637.587.609,00	93,10	102.390.332.980,00
	Belanja Barang	126.487.027.071,00	108.266.447.515,00	85,59	95.453.977.096,02
	Belanja Bunga	-	-	-	362.694.303,09
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	221.690.857.339,00	196.904.035.124,00	88,82	198.207.004.379,11
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	13.889.369.888,00	10.346.041.343,00	74,49	26.879.634.937,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	1.396.412.160,00	1.292.167.160,00	92,53	4.090.906.920,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	15.285.782.048,00	11.638.208.503,00	76,14	30.970.541.857,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	236.976.639.387,00	208.542.243.627,00	88,00	229.177.546.236,11

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	236.976.639.387,00	208.542.243.627,00	88,00	229.177.546.236,11
	SURPLUS / DEFISIT	(91.976.639.387,00)	(42.933.262.368,00)	46,68	(67.046.706.374,66)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	8.548.192.400,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	8.548.192.400,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	33.705.190.978,00
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	33.705.190.978,00
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	(25.156.998.578,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(91.976.639.387,00)	(42.933.262.368,00)	46,68	(92.203.704.952,66)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA RSU CIBABAT
Per 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	40.989.619.473,61	12.624.391.630,61
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di Kas BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	27.940.943,33	27.595.537,83
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	6.859.648.248,09	4.437.115.992,09
	Penyisihan Piutang Lainnya	(868.160.306,61)	(457.413.686,84)
	Persediaan	11.721.606.703,80	15.755.632.819,71
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	58.730.655.062,22	32.387.322.293,40
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	28.362.300.000,00	28.362.300.000,00
	Peralatan dan Mesin	282.508.102.719,32	269.648.080.057,32
	Gedung dan Bangunan	127.503.042.329,20	124.920.593.329,20
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.191.039.000,00	1.191.039.000,00
	Aset Tetap Lainnya	12.025.600,00	12.025.600,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(239.857.371.732,79)	(199.251.097.734,00)
	Jumlah Aset Tetap	199.719.137.915,73	224.882.940.252,52
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	392.194.000,00	392.194.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(359.133.000,00)	(326.072.000,00)
	Aset Lain-Lain	-	-
	Jumlah Aset Lainnya	33.061.000,00	66.122.000,00
	JUMLAH ASET	258.482.853.977,95	257.336.384.545,92

No.	Uraian	2021	2020
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	231.386.755,00	1.089.536.452,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	11.380.509.815,00	23.028.546.738,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	11.611.896.570,00	24.118.083.190,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	11.611.896.570,00	24.118.083.190,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	246.870.957.407,95	233.218.301.355,92
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	258.482.853.977,95	257.336.384.545,92

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL RSU CIBABAT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 168.160.013.515,00	Rp 133.014.537.562,45	Rp 35.145.475.952,55	26,42
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 168.160.013.515,00	Rp 133.014.537.562,45	Rp 35.145.475.952,55	26,42
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbang Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp 1.913.159.147,00	Rp 801.646.159,98	Rp 1.111.512.987,02	138,65
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 1.913.159.147,00	Rp 801.646.159,98	Rp 1.111.512.987,02	138,65
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 170.073.172.662,00	Rp 133.816.183.722,43	Rp 36.256.988.939,57	27,09
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 87.769.882.609,00	Rp 103.258.037.980,00	Rp (15.488.155.371,00)	-15,00
	Beban Persediaan	Rp 54.396.848.717,91	Rp 62.750.569.045,39	Rp (8.353.720.327,48)	-13,31
	Beban Jasa	Rp 40.474.807.598,50	Rp 28.587.038.199,37	Rp 11.887.769.399,13	41,58
	Beban Pemeliharaan	Rp 6.328.606.234,00	Rp 518.315.000,00	Rp 5.810.291.234,00	
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 166.396.168,00	Rp -	Rp 166.396.168,00	
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Penyusutan	Rp 39.270.687.570,62	Rp 43.642.016.248,03	Rp (4.371.328.677,41)	-10,02
	Beban Amortisasi	Rp 33.061.000,00	Rp 36.498.500,00	Rp (3.437.500,00)	-9,42
	Beban Penyisihan Piutang	Rp 539.246.619,77	Rp 325.629.997,09	Rp 213.616.622,68	65,60
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Lain-lain	Rp 3.940.000,00	Rp -	Rp 3.940.000,00	#DIV/0!
	JUMLAH BEBAN	Rp 228.983.476.517,80	Rp 239.118.104.969,88	Rp (10.134.628.452,08)	-4,24
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (58.910.303.855,80)	Rp (105.301.921.247,45)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp (11.000.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp (11.000.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (58.910.303.855,80)	Rp (105.312.921.247,45)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (58.910.303.855,80)	Rp (105.312.921.247,45)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS RSU CIBABAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	233.218.301.355,92	240.512.418.688,60
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(58.910.303.855,80)	(105.312.921.247,45)
3	RK PPKD/RK SKPD	71.298.490.211,00	77.136.160.200,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	0,91
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	(32.562.999,71)
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	918.832.953,00	11.890.617.976,62
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	1.681.223.172,00	7.130.102.998,00
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	704.637.777,95
	-Akumulasi Penyusutan	(1.335.586.428,17)	1.189.847.961,00
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	246.870.957.407,95	233.218.301.355,92

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	7.920.044.000,00	7.241.021.693,00	91,43	6.939.150.533,00
	Belanja Barang	41.960.378.626,00	38.483.234.017,00	91,71	20.906.214.921,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	755.000.000,00	748.887.000,00	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	50.635.422.626,00	46.473.142.710,00	91,78	27.845.365.454,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	502.731.680,00	481.961.150,00	95,87	60.841.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	55.627.272.000,00	46.563.565.838,00	83,71	1.514.191.000,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	119.474.605.962,00	98.631.001.206,00	82,55	13.598.490.000,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	175.604.609.642,00	145.676.528.194,00	82,96	15.173.522.000,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	226.240.032.268,00	192.149.670.904,00	84,93	43.018.887.454,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	226.240.032.268,00	192.149.670.904,00	84,93	43.018.887.454,00
	SURPLUS / DEFISIT	(226.240.032.268,00)	(192.149.670.904,00)	84,93	(43.018.887.454,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(226.240.032.268,00)	(192.149.670.904,00)	84,93	(43.018.887.454,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di Kas BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	1.703.763.588,37	50.865.583,17
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	1.033.843.024,00
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	396.455.379,55	483.726.095,23
	Penyisihan Piutang Lainnya	(1.982.276,89)	(2.418.630,48)
	Persediaan	3.475.067.000,00	7.077.491.000,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	5.573.303.691,03	8.643.507.071,92
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	700.921.601.656,00	700.921.601.656,00
	Peralatan dan Mesin	11.626.460.455,00	11.190.691.055,00
	Gedung dan Bangunan	69.433.676.543,00	70.399.352.943,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	618.781.568.493,77	604.422.966.334,77
	Aset Tetap Lainnya	534.085.000,00	534.085.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	179.567.488.649,05	45.267.117.174,05
	Akumulasi Penyusutan	(464.205.096.388,74)	(449.166.012.663,48)
	Jumlah Aset Tetap	1.116.659.784.408,08	983.569.801.499,34
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.348.345.000,00	3.348.345.000,00
	Aset Tak Berwujud	1.117.395.100,00	931.469.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(908.073.025,00)	(661.735.250,00)
	Aset Lain-Lain	492.696.000,10	561.196.000,10
	Jumlah Aset Lainnya	4.050.363.075,10	4.179.274.750,10
	JUMLAH ASET	1.126.283.451.174,21	996.392.583.321,37

No.	Uraian	2021	2020
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	1.493.662.159,00	319.399.970,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.493.662.159,00	319.399.970,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.493.662.159,00	319.399.970,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	1.124.789.789.015,21	996.073.183.351,36
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.126.283.451.174,21	996.392.583.321,36

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 396.455.380	Rp -	Rp 396.455.380	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 396.455.380	Rp -	Rp 396.455.380	
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -	-	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	-	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	-	
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	-	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	-	
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	-	
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	-	
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 396.455.379,55	Rp -	Rp 396.455.379,55	
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 6.922.171.693,00	Rp 7.258.000.533,00	Rp (335.828.840,00)	-4,63
	Beban Persediaan	Rp 6.209.322.612,00	Rp 12.603.758.150,00	Rp (6.394.435.538,00)	-50,73
	Beban Jasa	Rp 6.409.546.161,80	Rp 3.910.367.297,66	Rp 2.499.178.864,14	63,91
	Beban Pemeliharaan	Rp 23.861.018.500,00	Rp 2.782.744.600,00	Rp 21.078.273.900,00	757,46
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 353.784.987,00	Rp 94.545.209,00	Rp 259.239.778,00	274,20
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 32.961.709.548,05	Rp 72.269.405.797,90	Rp (39.307.696.249,85)	-54,39
	Beban Amortisasi	Rp 246.337.775,00	Rp 199.856.250,00	Rp 46.481.525,00	23,26
	Beban Penyisihan Piutang	Rp 1.982.276,90	Rp 2.418.630,48	Rp (436.353,58)	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 76.965.873.553,75	Rp 99.121.096.468,04	Rp (22.155.222.914,29)	-22,35
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (76.569.418.174,20)	Rp (99.121.096.468,04)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (68.500.000,00)	Rp (400.900.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (68.500.000,00)	Rp (400.900.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (76.637.918.174,20)	Rp (99.521.996.468,04)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (76.637.918.174,20)	Rp (99.521.996.468,04)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	996.073.183.351,36	1.054.529.733.626,31
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(76.637.918.174,20)	(99.521.996.468,04)
3	RK PPKD/RK SKPD	192.149.670.904,00	43.018.887.454,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	(1.515.150.488,75)	(103.384.301,95)
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(3.202.622.400,00)	(2.049.441.950,00)
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	83.300.000,00
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	17.922.625.822,79	116.084.991,04
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	1.124.789.789.015,21	996.073.183.351,37

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1.04.01. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah			-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	3.788.880.000,00	3.217.740.950,00	84,93	4.551.311.486,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3.965.191.000,00	4.469.058.130,00	112,71	978.701.160,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	7.754.071.000,00	7.686.799.080,00	99,13	5.530.012.646,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	7.754.071.000,00	7.686.799.080,00	99,13	5.530.012.646,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	10.272.256.850,00	10.018.490.921,00	97,53	8.746.661.747,00
	Belanja Barang	36.688.215.307,00	31.257.360.546,00	85,20	29.117.758.353,00
	Belanja Bunga			-	-
	Belanja Subsidi			-	-
	Belanja Hibah			-	-
	Belanja Bantuan Sosial	1.207.905.538,00	1.160.000.000,00	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	48.168.377.695,00	42.435.851.467,00	88,10	37.864.420.100,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	3.036.504.740,00	1.545.337.518,00	50,89	24.237.283.327,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	603.910.600,00	561.562.798,00	92,99	342.610.197,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	714.456.800,00	645.046.098,00	90,28	3.711.713.000,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.756.131.080,00	7.490.001.989,00	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya			-	-
	Jumlah Belanja Modal	14.111.003.220,00	10.241.948.403,00	72,58	28.291.606.524,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	62.279.380.915,00	52.677.799.870,00	84,58	66.156.026.624,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	62.279.380.915,00	52.677.799.870,00	84,58	66.156.026.624,00
	SURPLUS / DEFISIT	(54.525.309.915,00)	(44.991.000.790,00)	82,51	(60.626.013.978,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(54.525.309.915,00)	(44.991.000.790,00)	82,51	(60.626.013.978,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	861.472.095,00	195.990.640,00
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Kas Lainnya	542.857.960,00	519.795.486,00
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	1.992.752.682,00	2.372.253.532,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.303.245.519,50)	(1.466.181.417,70)
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	281.237.210,85	355.939.395,94
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	1.582.507.300,00	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	(901.445.411,00)	-
	Persediaan	236.724.165,00	341.184.384,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	3.292.860.482,35	2.318.982.020,24
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	126.255.200.892,00	124.709.863.374,00
	Peralatan dan Mesin	13.265.024.469,12	12.705.072.439,12
	Gedung dan Bangunan	25.872.378.471,00	25.613.172.379,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	138.204.352.104,00	117.806.347.650,00
	Aset Tetap Lainnya	16.601.913.815,00	16.709.937.259,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	258.145.030,00	258.145.030,00
	Akumulasi Penyusutan	(43.421.252.164,11)	(34.490.690.754,00)
	Jumlah Aset Tetap	277.035.762.617,01	263.311.847.377,12
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	275.132.000,00	275.132.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(221.115.125,00)	(177.240.250,00)
	Aset Lain-Lain	268.073.000,12	632.873.000,12
	Jumlah Aset Lainnya	322.089.875,12	730.764.750,12
	JUMLAH ASET	280.650.712.974,48	266.361.594.147,48

No.	Uraian	2021	2020
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	60.248.783,00	428.704.948,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	542.857.960,00	497.890.486,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	603.106.743,00	926.595.434,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	603.106.743,00	926.595.434,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	280.047.606.231,48	265.434.998.713,48
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	280.650.712.974,48	266.361.594.147,48

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 3.963.320.700,00	Rp 6.871.316.318,00	Rp (2.907.995.618,00)	-42,32
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 4.926.484.830,00	Rp 1.030.949.860,00	Rp 3.895.534.970,00	377,86
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 8.889.805.530,00	Rp 7.902.266.178,00	Rp 987.539.352,00	12,50
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp 12.908.002.465,00	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 12.908.002.465,00	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 21.797.807.995,00	Rp 7.902.266.178,00	Rp 13.895.541.817,00	175,8
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 9.633.190.921,00	Rp 9.131.961.747,00	Rp 501.229.174,00	5,49
	Beban Persediaan	Rp 6.589.182.104,00	Rp 8.110.260.720,00	Rp (1.521.078.616,00)	-18,75
	Beban Jasa	Rp 22.950.190.236,09	Rp 19.818.117.034,08	Rp 3.132.073.202,01	15,80
	Beban Pemeliharaan	Rp 1.723.131.699,00	Rp 1.349.133.918,00	Rp 373.997.781,00	27,72
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 325.280.196,00	Rp 137.139.952,00	Rp 188.140.244,00	137,19
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp 1.160.000.000,00	Rp -	Rp 1.160.000.000,00	-
	Beban Penyusutan	Rp 6.968.727.732,95	Rp 11.603.168.224,51	Rp (4.634.440.491,56)	-39,94
	Beban Amortisasi	Rp 43.874.875,00	Rp 45.593.625,00	Rp (1.718.750,00)	-3,77
	Beban Penyisihan Piutang	Rp 738.509.512,80	Rp 1.466.181.417,70	Rp (727.671.904,90)	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp 1.610.768,00	Rp 18.055.385,00	Rp (16.444.617,00)	-91,08
	JUMLAH BEBAN	Rp 50.133.698.044,84	Rp 51.679.612.023,29	Rp (1.545.913.978,45)	-2,99
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (28.335.890.049,84)	Rp (43.777.345.845,29)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (724.246.000,00)	Rp (2.859.999.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (724.246.000,00)	Rp (2.859.999.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (29.060.136.049,84)	Rp (46.637.344.845,29)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (29.060.136.049,84)	Rp (46.637.344.845,29)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	265.434.998.713,48	250.667.528.940,77
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(29.060.136.049,84)	(46.637.344.845,29)
3	RK PPKD/RK SKPD	45.656.482.245,00	60.822.004.618,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI UTANG	(21.905.000,00)	-
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	29.528.000,00
8	KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	161.982.000,00
9	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	391.300.000,00
10	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(1.961.833.677,16)	-
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
11	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
12	KOREKSI UTANG PFK	-	-
13	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
14	EKUITAS AKHIR	280.047.606.231,48	265.434.998.713,48

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	64.575.500,00	104.907.500,00	162,46	74.546.000,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	64.575.500,00	104.907.500,00	162,46	74.546.000,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	64.575.500,00	104.907.500,00	162,46	74.546.000,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	15.111.737.845,00	14.486.562.106,00	95,86	13.908.690.812,00
	Belanja Barang	6.383.946.500,00	5.666.512.105,00	88,76	4.904.953.095,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	21.695.684.345,00	20.353.074.211,00	93,81	18.813.643.907,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	460.988.200,00	442.193.000,00	95,92	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	180.000.000,00	178.457.793,00	99,14	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	640.988.200,00	620.650.793,00		-
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	22.336.672.545,00	20.973.725.004,00	93,90	18.813.643.907,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	22.336.672.545,00	20.973.725.004,00	93,90	18.813.643.907,00
	SURPLUS / DEFISIT	(22.272.097.045,00)	(20.868.817.504,00)	93,70	(18.739.097.907,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(22.272.097.045,00)	(20.868.817.504,00)	93,70	(18.739.097.907,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	43.030.927,08	41.327.870,16
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	2.744.260,00	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	45.775.187,08	41.327.870,16
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	16.770.171.499,34	16.327.978.499,34
	Gedung dan Bangunan	1.800.860.743,00	1.622.402.950,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	97.119.000,00	97.119.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(16.037.438.428,42)	(14.860.124.038,00)
	Jumlah Aset Tetap	2.630.712.813,92	3.187.376.411,34
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	65.000.000,00	65.000.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(55.000.000,00)	(50.000.000,00)
	Aset Lain-Lain	22.400.000,00	22.400.000,00
	Jumlah Aset Lainnya	32.400.000,00	37.400.000,00
	JUMLAH ASET	2.708.888.001,00	3.266.104.281,50

No.	Uraian	2021	2020
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	998.117,00	572.369.420,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	998.117,00	572.369.420,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	998.117,00	572.369.420,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	2.707.889.884,00	2.693.734.861,50
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.708.888.001,00	3.266.104.281,50

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

		(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 104.907.500,00	Rp 74.546.000,00	Rp 30.361.500,00	40,73
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 104.907.500,00	Rp 74.546.000,00	Rp 30.361.500,00	40,729
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 104.907.500,00	Rp 74.546.000,00		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 13.915.112.106,00	Rp 14.480.140.812,00	Rp (565.028.706,00)	-3,90
	Beban Persediaan	Rp 245.748.370,00	Rp 748.977.832,00	Rp (503.229.462,00)	-67,19
	Beban Jasa	Rp 4.684.113.133,08	Rp 4.061.537.587,38	Rp 622.575.545,70	15,33
	Beban Pemeliharaan	Rp 711.297.000,00	Rp 311.956.550,00	Rp 399.340.450,00	128,01
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 63.860.432,00	Rp 127.191.059,00	Rp (63.330.627,00)	-49,79
	Beban Bunga	Rp -	Rp -		
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -		
	Beban Hibah	Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp 200.000.000,00	
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -		
	Beban Penyusutan	Rp 914.620.188,08	Rp 356.392.168,85	Rp 558.228.019,23	156,63
	Beban Amortisasi	Rp 5.000.000,00	Rp 16.250.000,00	Rp (11.250.000,00)	
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -		
	Beban Transfer	Rp -	Rp -		
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp 3.600.000,00	Rp (3.600.000,00)	-100,00
	JUMLAH BEBAN	Rp 20.739.751.229,16	Rp 20.106.046.009,23	Rp 633.705.219,93	3,15
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (20.634.843.729,16)	Rp (20.031.500.009,23)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp (555.754.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp (555.754.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (20.634.843.729,16)	Rp (20.587.254.009,23)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (20.634.843.729,16)	Rp (20.587.254.009,23)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAN PEMADAM
KEBAKARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	2.693.734.861,50	2.652.507.713,73
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(20.634.843.729,16)	(20.587.254.009,23)
3	RK PPKD/RK SKPD	20.868.817.504,00	18.739.097.907,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	42.875.450,00	380.216.300,00
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	1.509.166.950
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(262.694.202,33)	-
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	2.707.889.884,00	2.693.734.861,50

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1.05.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Jumlah Pendapatan Transfer LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah JUMLAH PENDAPATAN				
II	BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasi BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Jumlah Belanja Modal BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja Tak Terduga JUMLAH BELANJA	 2.943.542.060,00 3.882.834.300,00 - - - 43.798.800,00 6.870.175.160,00 - 528.382.700,00 - - 70.000.000,00 598.382.700,00 - - - 7.468.557.860,00	 2.573.133.397,00 3.675.825.943,00 - - - 41.540.000,00 6.290.499.340,00 - 516.691.450,00 - - 69.826.000,00 586.517.450,00 - - - 6.877.016.790,00	 87,42 94,67 - - - - 91,56 - 97,79 - - 97,79 - - - 92,08	 2.795.392.224,00 2.141.211.461,00 - - - - 4.936.603.685,00 - 43.520.000,00 - - - 43.520.000,00 - - - 4.980.123.685,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	7.468.557.860,00	6.877.016.790,00	92,08	4.980.123.685,00
	SURPLUS / DEFISIT	(7.468.557.860,00)	(6.877.016.790,00)	92,08	(4.980.123.685,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(7.468.557.860,00)	(6.877.016.790,00)	92,08	(4.980.123.685,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	77.342.108,33	63.306.750,00
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	735.731.307,00	630.939.081,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	813.073.415,33	694.245.831,00
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	2.149.300.096,00	1.563.982.646,00
	Gedung dan Bangunan	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	9.800.000,00	9.800.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(1.577.334.291,00)	(1.337.635.033,00)
	Jumlah Aset Tetap	581.765.805,00	236.147.613,00
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	-	-
	Akumulasi Amortisasi	-	-
	Aset Lain-Lain	-	177.000.000,00
	Jumlah Aset Lainnya	-	177.000.000,00
	JUMLAH ASET	1.394.839.220,33	1.107.393.444,00

No.	Uraian	2021	2020
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	2.412.120,00	118.775.401,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	2.412.120,00	118.775.401,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	2.412.120,00	118.775.401,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	1.392.427.100,33	988.618.043,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.394.839.220,33	1.107.393.444,00

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp 344.259.500,00	Rp 207.680.780,00	Rp 136.578.720,00	65,764
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 344.259.500,00	Rp 207.680.780,00	Rp 136.578.720,00	65,76
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 344.259.500,00	Rp 207.680.780,00	Rp 136.578.720,00	65,76
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 2.456.458.397,00	Rp 2.912.067.224,00	Rp (455.608.827,00)	-15,65
	Beban Persediaan	Rp 1.207.176.374,00	Rp 509.267.944,00	Rp 697.908.430,00	137,04
	Beban Jasa	Rp 2.441.890.603,67	Rp 1.748.321.293,75	Rp 693.569.309,92	39,671
	Beban Pemeliharaan	Rp 232.827.100,00	Rp 32.100.998,00	Rp 200.726.102,00	
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 161.775.500,00	Rp 64.487.807,00	Rp 97.287.693,00	150,86
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Bantuan Sosial	Rp 41.540.000,00	Rp -	Rp 41.540.000,00	
	Beban Penyusutan	Rp 189.417.227,57	Rp 454.884.474,85	Rp (265.467.247,28)	-58,36
	Beban Amortisasi	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Lain-lain	Rp 1.200.000,00	Rp -	Rp 1.200.000,00	#####
	JUMLAH BEBAN	Rp 6.732.285.202,24	Rp 5.721.129.741,60	Rp 1.011.155.460,64	17,67
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (6.388.025.702,24)	Rp (5.513.448.961,60)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (177.000.000,00)			
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (177.000.000,00)	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (6.565.025.702,24)	Rp (5.513.448.961,60)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (6.565.025.702,24)	Rp (5.513.448.961,60)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

		(Dalam Rupiah)	
NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	988.618.043,00	1.180.871.553,60
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(6.565.025.702,24)	(5.513.448.961,60)
3	RK PPKD/RK SKPD	6.877.016.790,00	4.813.620.615,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	142.100.000,00	35.924.836,00
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	294.650.000,00
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	177.000.000,00
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(50.282.030,43)	-
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	1.392.427.100,33	988.618.043,00

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1.06.01. DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	7.207.920.536,00	7.073.918.557,00	98,14	5.796.776.157,00
	Belanja Barang	12.562.330.900,00	8.331.986.490,00	66,33	5.948.065.930,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	20.070.251.436,00	15.705.905.047,00	78,25	11.744.842.087,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	382.679.700,00	342.064.150,00	-	153.248.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	108.794.500,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	382.679.700,00	342.064.150,00	-	262.042.500,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	20.452.931.136,00	16.047.969.197,00	78,46	12.006.884.587,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan	20.452.931.136,00	16.047.969.197,00	78,46	12.006.884.587,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER				
		(20.452.931.136,00)	(16.047.969.197,00)	78,46	(12.006.884.587,00)
	SURPLUS / DEFISIT				
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan				
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO				
		(20.452.931.136,00)	(16.047.969.197,00)	78,46	(12.006.884.587,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	-		-

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	91.822.925,00	70.981.675,00
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	271.174.665,56	334.569.731,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	362.997.590,56	405.551.406,00
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	5.179.735.206,48	4.837.671.056,48
	Gedung dan Bangunan	645.033.000,00	645.033.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	3.999.380,62	3.999.380,62
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(4.759.737.095,15)	(4.344.503.976,00)
	Jumlah Aset Tetap	1.069.030.491,95	1.142.199.461,10
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	32.640.000,00	32.640.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(32.640.000,00)	(32.640.000,00)
	Aset Lain-Lain	-	-
	Jumlah Aset Lainnya	-	-
	JUMLAH ASET	1.432.028.082,51	1.547.750.867,10

No.	Uraian	2021	2020
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	465.073,00	281.217.553,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	465.073,00	281.217.553,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	465.073,00	281.217.553,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	1.431.563.009,51	1.266.533.314,10
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.432.028.082,51	1.547.750.867,10

PEMERINTAH KOTA CIMAHI

**LAPORAN OPERASIONAL DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021**

		(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah				
	Pendapatan Retribusi Daerah				
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak				
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam				
	Dana Alokasi Umum				
	Dana Alokasi Khusus				
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus				
	Dana Penyesuaian				
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp 110.387.516,80	Rp 10.773.000,00	Rp 99.614.516,80	924,67
	Pendapatan Dana Darurat				
	Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 110.387.516,80	Rp 10.773.000,00	Rp 99.614.516,80	924,67
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 110.387.516,80	Rp 10.773.000,00	Rp 99.614.516,80	924,67
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 6.793.068.557,00	Rp 6.077.626.157,00	Rp 715.442.400,00	11,77
	Beban Persediaan	Rp 1.223.337.096,24	Rp 1.129.533.760,00	Rp 93.803.336,24	8,30
	Beban Jasa	Rp 6.941.019.182,00	Rp 4.520.013.505,00	Rp 2.421.005.677,00	53,56
	Beban Pemeliharaan	Rp 81.044.000,00	Rp 61.688.000,00	Rp 19.356.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 338.132.064,00	Rp 174.763.246,00	Rp 163.368.818,00	93,48
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp 300.000.000,00	Rp -	Rp 300.000.000,00	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 399.290.334,14	Rp 12.563.235,00	Rp 386.727.099,14	#####
	Beban Amortisasi	Rp -	Rp 7.500.000,00	Rp (7.500.000,00)	-100,00
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp 179.800.000,00	Rp (179.800.000,00)	-100,00
	JUMLAH BEBAN	Rp 16.075.891.233,38	Rp 12.163.487.903,00	Rp 3.912.403.330,38	32,17
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (15.965.503.716,58)	Rp (12.152.714.903,00)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp (725.019.900,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp (725.019.900,00)		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (15.965.503.716,58)	Rp (12.877.734.803,00)		
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (15.965.503.716,58)	Rp (12.877.734.803,00)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	1.266.533.314,10	1.718.653.891,97
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(15.965.503.716,58)	(12.877.734.803,00)
3	RK PPKD/RK SKPD	16.047.969.197,00	12.006.884.587,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	98.507.000,00	59.127.750,00
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	(379.795.000,00)
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(15.942.785,01)	739.396.888,13
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	1.431.563.009,51	1.266.533.314,10

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

2.01.01. DINAS TENAGA KERJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	750.000.000,00	583.770.000,00	77,84	1.032.001.000,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	750.000.000,00	583.770.000,00	77,84	1.032.001.000,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	750.000.000,00	583.770.000,00	77,84	1.032.001.000,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	4.490.628.753,00	4.462.877.073,00	99,38	3.925.515.631,00
	Belanja Barang	4.736.009.200,00	4.323.129.083,00	91,28	2.436.984.930,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	9.226.637.953,00	8.786.006.156,00	95,22	6.362.500.561,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	169.121.900,00	165.425.000,00	97,81	74.565.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	42.001.198,00	42.001.198,00	100,00	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	211.123.098,00	207.426.198,00	98,25	74.565.000,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	9.437.761.051,00	8.993.432.354,00	95,29	6.437.065.561,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	9.437.761.051,00	8.993.432.354,00	95,29	6.437.065.561,00
	SURPLUS / DEFISIT	(8.687.761.051,00)	(8.409.662.354,00)	96,80	(5.405.064.561,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(8.687.761.051,00)	(8.409.662.354,00)	96,80	(5.405.064.561,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS TENAGA KERJA
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	148.991.762,50	162.570.062,50
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	148.991.762,50	162.570.062,50
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	1.350.000.000,00
	Peralatan dan Mesin	2.309.727.100,00	2.493.467.100,00
	Gedung dan Bangunan	-	636.000.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	5.790.000,00	5.790.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(2.135.839.100,00)	(2.182.615.671,00)
	Jumlah Aset Tetap	179.678.000,00	2.302.641.429,00
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	321.387.000,00	231.837.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(199.671.500,00)	(119.324.750,00)
	Aset Lain-Lain	226.237.000,00	572.858.370,00
	Jumlah Aset Lainnya	347.952.500,00	685.370.620,00
	JUMLAH ASET	676.622.262,50	3.150.582.111,50

No.	Uraian	2021	2020
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	70.977,00	198.497.964,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	70.977,00	198.497.964,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	70.977,00	198.497.964,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	676.551.285,50	2.952.084.147,50
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	676.622.262,50	3.150.582.111,50

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS TENAGA KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 583.770.000,00	Rp 1.032.001.000,00	Rp (448.231.000,00)	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 583.770.000,00	Rp 1.032.001.000,00	Rp (448.231.000,00)	
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp 236.000.000,00	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp 236.000.000,00	Rp -	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 583.770.000,00	Rp 1.268.001.000,00	Rp -	-
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 4.264.577.073,00	Rp 4.123.815.631,00	Rp 140.761.442,00	3,41
	Beban Persediaan	Rp 182.268.100,00	Rp 490.387.300,00	Rp (308.119.200,00)	-62,83
	Beban Jasa	Rp 3.276.278.796,00	Rp 1.683.155.482,83	Rp 1.593.123.313,17	94,65
	Beban Pemeliharaan	Rp 172.200.698,00	Rp 56.202.500,00	Rp 115.998.198,00	206,39
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 658.284.000,00	Rp 125.934.500,00	Rp 532.349.500,00	422,72
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 110.175.821,43	Rp 96.843.276,36	Rp 13.332.545,07	13,77
	Beban Amortisasi	Rp 80.346.750,00	Rp 57.959.250,00	Rp 22.387.500,00	38,63
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp 765.000,00	Rp -	Rp 765.000,00	#DIV/0!
	JUMLAH BEBAN	Rp 8.744.896.238,43	Rp 6.634.297.940,19	Rp 2.110.598.298,24	31,81
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (8.161.126.238,43)	Rp (5.366.296.940,19)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (459.021.370,00)	Rp (26.914.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (459.021.370,00)	Rp (26.914.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (8.620.147.608,43)	Rp (5.393.210.940,19)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -	Rp -		
	Beban Luar Biasa	Rp -	Rp -		
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (8.620.147.608,43)	Rp (5.393.210.940,19)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS TENAGA KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

		(Dalam Rupiah)	
NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	2.952.084.147,50	2.597.509.156,69
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(8.620.147.608,43)	(5.393.210.940,19)
3	RK PPKD/RK SKPD	8.409.662.354,00	5.405.064.561,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(2.222.000.000,00)	(3.900.000,00)
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	346.621.370,00
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	156.952.392,43	-
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	676.551.285,50	2.952.084.147,50

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2.03.01. DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	240.800.000,00	263.827.000,00	109,56	217.047.500,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	240.800.000,00	263.827.000,00	-	217.047.500,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	240.800.000,00	263.827.000,00	-	217.047.500,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	8.464.993.581,00	7.607.760.017,00	89,87	6.714.515.298,00
	Belanja Barang	3.503.407.442,00	3.324.144.424,00	94,88	2.602.127.495,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	11.968.401.023,00	10.931.904.441,00	91,34	9.316.642.793,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	215.955.250,00	215.650.000,00	99,86	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	161.970.000,00	161.557.430,00	99,75	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	377.925.250,00	377.207.430,00	99,81	-
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	12.346.326.273,00	11.309.111.871,00	91,60	9.316.642.793,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER	-	-	-	-
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan				
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	(12.105.526.273,00)	(11.045.284.871,00)	91,24	(9.099.595.293,00)
	SURPLUS / DEFISIT				
IV	PEMBIAYAAN	-	-	-	-
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman				
	Jumlah Penerimaan				
		-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran				
	PEMBIAYAAN NETO	(12.105.526.273,00)	(11.045.284.871,00)	91,24	(9.099.595.293,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(12.105.526.273,00)	(11.045.284.871,00)	91,24	(9.099.595.293,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	12.566.262,50	22.176.400,00
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	722.590.459,00	591.687.763,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	735.156.721,50	613.864.163,00
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	14.252.840.000,00	14.252.840.000,00
	Peralatan dan Mesin	5.174.189.218,99	5.008.598.254,09
	Gedung dan Bangunan	12.438.498.256,10	12.326.244.221,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.149.277.550,00	4.149.277.550,00
	Aset Tetap Lainnya	270.975.000,00	270.975.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(9.466.876.185,37)	(8.768.014.347,00)
	Jumlah Aset Tetap	26.818.903.839,72	27.239.920.678,09
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	51.975.455,00	51.975.455,00
	Akumulasi Amortisasi	(51.975.455,00)	(49.975.455,00)
	Aset Lain-Lain	8.950.000,00	121.350.000,00
	Jumlah Aset Lainnya	8.950.000,00	123.350.000,00
	JUMLAH ASET	27.563.010.561,22	27.977.134.841,09

No.	Uraian	2021	2020
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	7.174.139,00	343.045.873,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	7.174.139,00	343.045.873,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	7.174.139,00	343.045.873,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	27.555.836.422,22	27.634.088.968,09
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	27.563.010.561,22	27.977.134.841,09

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 263.827.000,00	Rp 217.047.500,00	Rp 46.779.500,00	21,553
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 263.827.000,00	Rp 217.047.500,00	Rp 46.779.500,00	21,553
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 263.827.000,00	Rp 217.047.500,00	Rp -	-
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 7.278.160.017,00	Rp 7.044.115.298,00	Rp 234.044.719,00	3,32
	Beban Persediaan	Rp 900.459.104,00	Rp 29.694.029.520,00	Rp (28.793.570.416,00)	-96,97
	Beban Jasa	Rp 2.111.884.027,50	Rp 1.571.504.057,00	Rp 540.379.970,50	34,39
	Beban Pemeliharaan	Rp 106.274.430,00	Rp 33.609.000,00	Rp 72.665.430,00	216,21
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 74.489.000,00	Rp 32.724.196,00	Rp 41.764.804,00	127,63
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 670.339.945,73	Rp 595.969.189,90	Rp 74.370.755,83	12,48
	Beban Amortisasi	Rp 2.000.000,00	Rp 4.668.750,00	Rp (2.668.750,00)	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp 2.100.000,00	Rp 35.000.000,00	Rp (32.900.000,00)	-94,00
	JUMLAH BEBAN	Rp 11.145.706.524,23	Rp 39.011.620.010,90	Rp (27.865.913.486,67)	-71,43
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (10.881.879.524,23)	Rp (38.794.572.510,90)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (180.900.000,00)	Rp (151.001.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (180.900.000,00)	Rp (151.001.000,00)		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (11.062.779.524,23)	Rp (38.945.573.510,90)		
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (11.062.779.524,23)	Rp (38.945.573.510,90)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	27.634.088.968,09	28.445.910.039,99
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(11.062.779.524,23)	(38.945.573.510,90)
3	RK PPKD/RK SKPD	11.045.284.871,00	9.099.595.293,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	28.898.457.146,00
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(32.236.000,00)	14.350.000,00
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	121.350.000,00
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(28.521.892,65)	-
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	27.555.836.422,22	27.634.088.968,09

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	1.900.000.000,00	2.154.402.900,00	-	1.779.724.400,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.900.000.000,00	2.154.402.900,00	-	1.779.724.400,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.900.000.000,00	2.154.402.900,00	-	1.830.518.500,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	11.420.010.370,00	11.208.960.620,00	98,15	10.484.914.182,00
	Belanja Barang	35.654.817.130,00	31.641.395.218,00	88,74	28.335.906.906,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	20.000.000,00	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	47.094.827.500,00	42.850.355.838,00	90,99	38.820.821.088,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	7.929.700.950,00	5.055.771.650,00	63,76	179.394.750,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	625.000.000,00	621.673.138,00	99,47	7.000.000,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	8.554.700.950,00	5.677.444.788,00	66,37	186.394.750,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	55.649.528.450,00	48.527.800.626,00	87,20	39.007.215.838,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	55.649.528.450,00	48.527.800.626,00	87,20	39.007.215.838,00
	SURPLUS / DEFISIT	(53.749.528.450,00)	(46.373.397.726,00)	86,28	(37.176.697.338,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(53.749.528.450,00)	(46.373.397.726,00)	86,28	(37.176.697.338,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	650.000,00	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	31.548.000,00	33.889.500,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(14.074.815,00)	(7.043.967,50)
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	462.284.162,50	266.385.146,66
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	493.088.160,00	251.562.590,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	973.495.507,50	544.793.269,16
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	21.755.801.960,00	21.755.801.960,00
	Peralatan dan Mesin	36.504.718.805,76	32.382.616.505,76
	Gedung dan Bangunan	11.952.624.363,00	11.505.848.320,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.323.938.191,00	5.113.041.096,00
	Aset Tetap Lainnya	8.800.000,00	8.800.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	49.225.000,00	49.225.000,00
	Akumulasi Penyusutan	(34.307.562.206,06)	(29.292.726.911,00)
	Jumlah Aset Tetap	41.287.546.113,70	41.522.605.970,76
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	86.680.000,00	86.680.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(86.680.000,00)	(65.010.000,00)
	Aset Lain-Lain	5.319.250.470,28	4.453.671.120,28
	Jumlah Aset Lainnya	5.319.250.470,28	4.475.341.120,28
	JUMLAH ASET	47.580.292.091,48	46.542.740.360,20

No.	Uraian	2021	2020
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	4.711.337,00	608.216.094,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	379.623.150,00	232.818.120,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	384.334.487,00	841.034.214,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	384.334.487,00	841.034.214,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	47.195.957.604,48	45.701.706.146,20
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	47.580.292.091,48	46.542.740.360,20

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

		(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	-	-	
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 2.154.402.900,00	Rp 1.788.851.400,00	Rp 365.551.500,00	20,435
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 2.154.402.900,00	Rp 1.788.851.400,00	Rp 365.551.500,00	20,435
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 2.154.402.900,00	Rp 1.788.851.400,00	Rp 365.551.500,00	
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 10.791.410.620,00	Rp 10.902.464.182,00	Rp (111.053.562,00)	-1,02
	Beban Persediaan	Rp 2.377.030.483,00	Rp 1.394.306.044,00	Rp 982.724.439,00	70,48
	Beban Jasa	Rp 24.978.343.254,16	Rp 22.890.990.451,34	Rp 2.087.352.802,82	9,12
	Beban Pemeliharaan	Rp 3.563.902.208,00	Rp 3.195.730.380,00	Rp 368.171.828,00	11,52
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 255.917.000,00	Rp 153.756.332,00	Rp 102.160.668,00	66,44
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 3.340.057.073,91	Rp 3.329.774.801,47	Rp 10.282.272,44	0,31
	Beban Amortisasi	Rp 21.670.000,00	Rp 21.670.000,00	Rp -	0,00
	Beban Penyisihan Piutang	Rp 7.030.847,50	Rp 4.927.570,00	Rp 2.103.277,50	42,68
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp 2.970.000,00	Rp -	Rp 2.970.000,00	#DIV/0!
	JUMLAH BEBAN	Rp 45.338.331.486,57	Rp 41.893.619.760,81	Rp 3.444.711.725,76	8,22
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (43.183.928.586,57)	Rp (40.104.768.360,81)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp (327.299.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp (327.299.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (43.183.928.586,57)	Rp (40.432.067.360,81)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (43.183.928.586,57)	Rp (40.432.067.360,81)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	45.701.706.146,20	45.823.241.269,01
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(43.183.928.586,57)	(40.432.067.360,81)
3	RK PPKD/RK SKPD	46.374.047.726,00	37.227.491.438,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	(2.341.500,00)	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	(18.747.960,00)	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	(58.264.000,00)
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	3.141.304.800,00
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(1.674.778.221,15)	-
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	47.195.957.604,48	45.701.706.146,20

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

2.06.01. DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	6.600.134.000,00	6.094.500.138,00	92,34	5.304.650.178,00
	Belanja Barang	3.737.156.800,00	3.470.304.341,00	92,86	4.110.094.931,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	10.337.290.800,00	9.564.804.479,00	92,53	9.414.745.109,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	443.546.000,00	428.998.400,00	96,72	210.918.920,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	33.379.760,00	30.760.000,00	-	-
	Jumlah Belanja Modal	476.925.760,00	459.758.400,00	96,40	210.918.920,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	10.814.216.560,00	10.024.562.879,00	92,70	9.625.664.029,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	10.814.216.560,00	10.024.562.879,00	92,70	9.625.664.029,00
	SURPLUS / DEFISIT	(10.814.216.560,00)	(10.024.562.879,00)	92,70	(9.625.664.029,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(10.814.216.560,00)	(10.024.562.879,00)	92,70	(9.625.664.029,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	87.273.470,83	76.572.000,00
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	1.261.693.160,89	2.185.554.570,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	1.348.966.631,72	2.262.126.570,00
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	9.423.315.048,00	8.901.156.648,00
	Gedung dan Bangunan	41.036.000,00	41.036.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	186.635.000,00	186.635.000,00
	Aset Tetap Lainnya	48.674.800,00	48.674.800,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(8.904.268.942,21)	(8.110.325.751,00)
	Jumlah Aset Tetap	795.391.905,79	1.067.176.697,00
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	263.974.250,00	263.974.250,00
	Akumulasi Amortisasi	(216.981.012,50)	(162.814.025,00)
	Aset Lain-Lain	15.000.000,00	279.063.793,00
	Jumlah Aset Lainnya	61.993.237,50	380.224.018,00
	JUMLAH ASET	2.206.351.775,01	3.709.527.285,00

No.	Uraian	2021	2020
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	113.431,00	247.491.929,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	113.431,00	247.491.929,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	113.431,00	247.491.929,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	2.206.238.344,01	3.462.035.356,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.206.351.775,01	3.709.527.285,00

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -	-	-
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 5.847.200.138,00	Rp 5.551.950.178,00	Rp 295.249.960,00	5,32
	Beban Persediaan	Rp 2.055.657.694,11	Rp 984.269.951,00	Rp 1.071.387.743,11	####
	Beban Jasa	Rp 1.758.600.177,17	Rp 1.432.099.660,00	Rp 326.500.517,17	22,80
	Beban Pemeliharaan	Rp 265.098.860,00	Rp 430.430.984,00	Rp (165.332.124,00)	-38,41
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 304.029.050,00	Rp 135.344.731,00	Rp 168.684.319,00	####
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 679.843.191,15	Rp 465.931.419,06	Rp 213.911.772,09	45,91
	Beban Amortisasi	Rp 54.166.987,50	Rp 58.354.487,50	Rp (4.187.500,00)	-7,18
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp 2.600.000,00	Rp -	Rp 2.600.000,00	####
	JUMLAH BEBAN	Rp 10.967.196.097,93	Rp 9.058.381.410,56	Rp 1.908.814.687,37	21,07
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (10.967.196.097,93)	Rp (9.058.381.410,56)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (199.063.793,00)	Rp (240.502.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (199.063.793,00)	Rp (240.502.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (11.166.259.890,93)	Rp (9.298.883.410,56)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (11.166.259.890,93)	Rp (9.298.883.410,56)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	3.462.035.356,00	2.543.200.944,56
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(11.166.259.890,93)	(9.298.883.410,56)
3	RK PPKD/RK SKPD	10.024.562.879,00	9.625.664.029,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	312.990.000,00
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	279.063.793,00
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(114.100.000,06)	-
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	2.206.238.344,01	3.462.035.356,00

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

2.09.01. DINAS PERHUBUNGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	1.288.475.000,00	1.529.391.040,00	118,70	1.079.249.260,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.288.475.000,00	1.529.391.040,00	118,70	1.079.249.260,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.288.475.000,00	1.529.391.040,00	118,70	1.079.249.260,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	9.430.673.412,00	9.346.093.418,00	99,10	8.820.147.336,00
	Belanja Barang	21.654.060.620,00	19.045.116.908,00	87,95	13.885.568.298,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	31.084.734.032,00	28.391.210.326,00	91,33	22.705.715.634,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	824.535.700,00	318.968.100,00	38,68	416.834.900,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	178.603.800,00	167.754.000,00	93,93	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.508.718.800,00	3.476.603.600,00	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	4.511.858.300,00	3.963.325.700,00	87,84	416.834.900,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	35.596.592.332,00	32.354.536.026,00	90,89	23.122.550.534,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	35.596.592.332,00	32.354.536.026,00	90,89	23.122.550.534,00
	SURPLUS / DEFISIT	(34.308.117.332,00)	(30.825.144.986,00)	89,85	(22.043.301.274,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(34.308.117.332,00)	(30.825.144.986,00)	89,85	(22.043.301.274,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS PERHUBUNGAN
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	2.900.000,00	3.200.000,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(2.900.000,00)	(2.975.750,00)
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	120.801.804,58	183.450.591,67
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	14.148.000,00	14.148.000,00
	Penyisihan Piutang Lainnya	(14.148.000,00)	(14.148.000,00)
	Persediaan	2.687.119.484,10	1.919.657.180,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	2.807.921.288,68	2.103.332.021,67
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	8.319.000.000,00	8.319.000.000,00
	Peralatan dan Mesin	39.400.414.270,00	39.006.446.170,00
	Gedung dan Bangunan	14.101.060.100,00	14.014.047.100,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	55.992.015.038,00	52.325.558.438,00
	Aset Tetap Lainnya	3.765.000,00	3.765.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(59.722.123.814,49)	(47.069.742.803,00)
	Jumlah Aset Tetap	58.094.130.593,51	66.599.073.905,00
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	334.344.050,00	334.344.050,00
	Akumulasi Amortisasi	(334.344.050,00)	(334.344.050,00)
	Aset Lain-Lain	127.020.550,00	202.020.550,00
	Jumlah Aset Lainnya	127.020.550,00	202.020.550,00
	JUMLAH ASET	61.029.072.432,19	68.904.426.476,67

No.	Uraian	2021	2020
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	649.927.815,00	1.030.140.111,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	649.927.815,00	1.030.140.111,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	649.927.815,00	1.030.140.111,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	60.379.144.617,19	67.874.286.365,67
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	61.029.072.432,19	68.904.426.476,67

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS PERHUBUNGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 1.529.241.040	Rp 1.078.799.260	450.441.780,00	41,754
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 1.529.241.040	Rp 1.078.799.260	450.441.780,00	41,75
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.529.241.040	Rp 1.078.799.260	Rp 450.441.780	41,75
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 8.961.343.418,00	Rp 9.204.897.336	Rp (243.553.918)	-2,65
	Beban Persediaan	Rp 2.314.310.444,00	Rp 2.002.425.596	Rp 311.884.848	15,58
	Beban Jasa	Rp 14.397.526.453,09	Rp 11.085.591.871	Rp 3.311.934.582	29,88
	Beban Pemeliharaan	Rp 1.517.135.830,00	Rp 675.607.004	Rp 841.528.826	124,56
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 242.773.866,00	Rp 103.321.242	Rp 139.452.624	134,97
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 7.569.397.554	Rp 9.229.831.592	Rp (1.660.434.039)	-17,99
	Beban Amortisasi	Rp -	Rp 12.349.200	Rp (12.349.200)	-100,00
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp 268.500	Rp (268.500)	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp 35.875.125	Rp (35.875.125)	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 35.002.487.565	Rp 32.350.167.466	Rp 2.652.320.098	8,20
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (33.473.246.525)	Rp (31.271.368.206)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp (398.851.733)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp (398.851.733)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (33.473.246.525)	Rp (31.670.219.940)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (33.473.246.524,60)	Rp (31.670.219.940)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PERHUBUNGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

		(Dalam Rupiah)	
NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	67.874.286.365,67	77.263.584.115,32
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(33.473.246.524,60)	(31.670.219.939,65)
3	RK PPKD/RK SKPD	30.825.144.986,00	22.043.301.274,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	(150.000,00)	3.650.000,00
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	46.164.498,10	1.183.482,00
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	189.853.000,00	160.494.684,00
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	75.000.000,00
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	75.750,00	(2.707.250,00)
	-Akumulasi Penyusutan	(5.082.983.457,99)	-
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	60.379.144.617,19	67.874.286.365,67

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

2.10.01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	400.000.000,00	431.612.791,00	-	28.568.485,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	400.000.000,00	431.612.791,00	-	28.568.485,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	400.000.000,00	431.612.791,00	-	28.568.485,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	7.735.966.617,00	7.590.421.984,00	98,12	6.958.295.662,00
	Belanja Barang	5.954.216.600,00	5.115.652.618,00	85,92	4.980.648.690,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	13.690.183.217,00	12.706.074.602,00	92,81	11.938.944.352,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	3.865.639.820,00	3.601.446.943,00	93,17	124.904.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	1.330.000.000,00	843.482.041,00	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	94.348.600,00	91.554.675,00	97,04	-
	Jumlah Belanja Modal	5.289.988.420,00	4.536.483.659,00	85,76	124.904.000,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	18.980.171.637,00	17.242.558.261,00	90,85	12.063.848.352,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	18.980.171.637,00	17.242.558.261,00	90,85	12.063.848.352,00
	SURPLUS / DEFISIT	(18.580.171.637,00)	(16.810.945.470,00)	90,48	(12.035.279.867,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(18.580.171.637,00)	(16.810.945.470,00)	90,48	(12.035.279.867,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	140.400,00	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	172.208.211,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	(17.220.821,10)
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	129.801.858,59	32.594.837,50
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	847.400,00	172.528.850,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	130.789.658,59	360.111.077,40
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	98.000.000,00	98.000.000,00
	Peralatan dan Mesin	11.453.964.707,00	8.071.339.064,00
	Gedung dan Bangunan	2.539.810.191,00	1.538.152.000,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	220.487.300,00	-
	Aset Tetap Lainnya	1.247.618.431,00	1.173.553.756,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(8.151.611.664,72)	(7.096.249.478,00)
	Jumlah Aset Tetap	7.408.268.964,28	3.784.795.342,00
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	1.006.929.683,00	1.006.929.683,00
	Akumulasi Amortisasi	(997.017.308,00)	(950.394.887,25)
	Aset Lain-Lain	337.379.000,10	337.379.000,10
	Jumlah Aset Lainnya	347.291.375,10	393.913.795,85
	JUMLAH ASET	7.886.349.997,97	4.538.820.215,25

No.	Uraian	2021	2020
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	-	337.200.000,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	337.200.000,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	337.200.000,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	7.886.349.997,97	4.201.620.215,25
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	7.886.349.997,97	4.538.820.215,25

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	<u>PENDAPATAN</u>				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp 259.404.580	Rp 200.776.696		
	Pendapatan Retribusi Daerah				
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang				
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 259.404.580	Rp 200.776.696		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak				
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam				
	Dana Alokasi Umum				
	Dana Alokasi Khusus				
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus				
	Dana Penyesuaian				
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp 480.730.000		
	Pendapatan Dana Darurat				
	Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp 480.730.000		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 259.404.580	Rp 681.506.696		
2	<u>BEBAN</u>				
	Beban Pegawai	Rp 7.253.221.984,00	Rp 7.295.495.662,00	Rp (42.273.678,00)	-0,58
	Beban Persediaan	Rp 304.974.950,00	Rp 335.062.895,00	Rp (30.087.945,00)	-8,98
	Beban Jasa	Rp 4.434.620.193,91	Rp 4.414.115.018,17	Rp 20.505.175,74	0,46
	Beban Pemeliharaan	Rp 102.908.200,00	Rp 86.064.641,00	Rp 16.843.559,00	19,57
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 205.271.553,00	Rp 160.753.510,00	Rp 44.518.043,00	27,69
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 1.016.248.311,10	Rp 568.544.126,64	Rp 447.704.184,46	78,75
	Beban Amortisasi	Rp 46.622.420,75	Rp 203.049.170,75	Rp (156.426.750,00)	-77,04
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp 17.220.821,10	Rp (17.220.821,10)	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 13.363.867.612,76	Rp 13.080.305.844,66	Rp 283.561.768,10	2,17
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (13.104.463.032,76)	Rp (12.398.799.148,66)		
	<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp (85.071.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON	Rp -	Rp (85.071.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS	Rp (13.104.463.032,76)	Rp (12.483.870.148,66)		
	LUAR BIASA				
4	<u>POS LUAR BIASA</u>				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (13.104.463.032,76)	Rp (12.483.870.148,66)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

		(Dalam Rupiah)	
NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	4.201.620.215,25	4.546.398.896,91
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(13.104.463.032,76)	(12.483.870.148,66)
3	RK PPKD/RK SKPD	16.811.085.870,00	12.035.279.867,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	142.991.000,00
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	(39.179.400,00)
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	17.220.821,10	-
	-Akumulasi Penyusutan	(39.113.875,61)	-
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	7.886.349.997,97	4.201.620.215,25

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

2.11.01. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah			-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	1.572.095.500,00	1.710.256.225,00	108,79	1.504.101.200,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	7.070.277,00	-	4.783.952,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.572.095.500,00	1.717.326.502,00	109,24	1.508.885.152,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.572.095.500,00	1.717.326.502,00	109,24	1.508.885.152,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	8.739.783.000,00	8.388.826.728,00	95,98	7.904.201.361,00
	Belanja Barang	16.061.210.777,00	14.438.317.185,00	89,90	16.277.106.695,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	507.144.000,00	410.574.000,00	80,96	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	25.308.137.777,00	23.237.717.913,00	91,82	24.181.308.056,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah				
	Belanja Peralatan dan Mesin	1.119.958.082,00	976.220.150,00	87,17	161.695.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	379.205.805,00	377.084.489,00	99,44	197.436.100,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.687.788,00	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	1.506.851.675,00	1.353.304.639,00	89,81	359.131.100,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	26.814.989.452,00	24.591.022.552,00	91,71	24.540.439.156,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN				
	Bagi Hasil Pajak				
	Bagi Hasil Retribusi				
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	26.814.989.452,00	24.591.022.552,00	91,71	24.540.439.156,00
	SURPLUS / DEFISIT	(25.242.893.952,00)	(22.873.696.050,00)	90,61	(23.031.554.004,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(25.242.893.952,00)	(22.873.696.050,00)	90,61	(23.031.554.004,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN NERACA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECILDAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	86.411.700,00	36.199.500,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(35.289.205,88)	(4.667.580,00)
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	21.350.125,00	21.256.600,00
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	183.509.525,00	183.509.525,00
	Penyisihan Piutang Lainnya	(183.509.525,00)	(183.509.525,00)
	Persediaan	82.752.900,00	13.782.200,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	155.225.519,12	66.570.720,00
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	9.272.750.000,00	9.272.750.000,00
	Peralatan dan Mesin	15.334.545.508,98	14.354.960.858,98
	Gedung dan Bangunan	160.652.340.356,00	160.244.288.117,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.574.060.725,00	1.574.060.725,00
	Aset Tetap Lainnya	364.050.825,00	364.050.825,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(38.683.527.826,09)	(33.203.232.486,00)
	Jumlah Aset Tetap	148.514.219.588,89	152.606.878.039,98
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	498.426.500,00	354.266.500,00
	Akumulasi Amortisasi	(284.969.250,00)	(166.300.125,00)
	Aset Lain-Lain	185.198.027,00	297.598.027,00
	Jumlah Aset Lainnya	398.655.277,00	485.564.402,00
	JUMLAH ASET	149.068.100.385,01	153.159.013.161,98

No.	Uraian	2021	2020
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	53.104.368,00	403.700.457,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	53.104.368,00	403.700.457,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	53.104.368,00	403.700.457,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	149.014.996.017,02	152.755.312.704,98
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	149.068.100.385,02	153.159.013.161,98

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)				
NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL			
1	PENDAPATAN			
	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 1.760.468.425,00	Rp 1.540.300.700,00	Rp 220.167.725,00 14,294
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 7.070.277,00	Rp 4.783.952,00	Rp 2.286.325,00 47,792
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 1.767.538.702,00	Rp 1.545.084.652,00	Rp 222.454.050,00 14,40
	PENDAPATAN TRANSFER			
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN			
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA			
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.767.538.702,00	Rp 1.545.084.652,00	Rp 222.454.050,00 14,40
2	BEBAN			
	Beban Pegawai	Rp 8.031.701.728,00	Rp 8.261.326.361,00	Rp (229.624.633,00) -2,78
	Beban Persediaan	Rp 1.633.912.101,00	Rp 10.551.812.315,00	Rp (8.917.900.214,00) -84,52
	Beban Jasa	Rp 11.159.280.373,00	Rp 14.418.215.981,00	Rp (3.258.935.608,00) -22,60
	Beban Pemeliharaan	Rp 927.414.341,00	Rp 460.768.353,00	Rp 466.645.988,00 101,28
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 480.047.306,00	Rp 47.113.500,00	Rp 432.933.806,00 918,92
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -
	Beban Subsidi	Rp 410.574.000,00	Rp -	Rp 410.574.000,00 -
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -
	Beban Penyusutan	Rp 4.450.033.917,10	Rp 3.768.337.242,77	Rp 681.696.674,33 18,09
	Beban Amortisasi	Rp 118.669.125,00	Rp 88.566.625,00	Rp 30.102.500,00 33,99
	Beban Penyisihan Piutang	Rp 30.621.625,88	Rp 4.667.580,00	Rp 25.954.045,88 -
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp 126.468.650,00	Rp (126.468.650,00) -100,00
	JUMLAH BEBAN	Rp 27.242.254.516,98	Rp 37.727.276.607,77	Rp (10.485.022.090,79) -27,79
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (25.474.715.814,98)	Rp (36.182.191.955,77)	
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -	
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (112.400.000,00)	Rp (238.130.000,00)	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (112.400.000,00)	Rp (238.130.000,00)	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (25.587.115.814,98)	Rp (36.420.321.955,77)	
4	POS LUAR BIASA			
	Pendapatan Luar Biasa			
	Beban Luar Biasa			
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -	
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (25.587.115.814,98)	Rp (36.420.321.955,77)	

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECILDAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	152.755.312.704,98	156.761.122.656,74
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(25.587.115.814,98)	(36.420.321.955,77)
3	RK PPKD/RK SKPD	22.873.696.050,00	23.031.554.004,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	9.463.599.000,00
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	3.364.500,00	(193.040.999,99)
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	112.400.000,00
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(1.030.261.422,99)	-
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	149.014.996.017,02	152.755.312.704,98

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	1.400.000.000,00	1.552.574.234,00	110,90	3.183.687.691,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.400.000.000,00	1.552.574.234,00	110,90	1.636.885.614,00
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.400.000.000,00	1.552.574.234,00	110,90	1.636.885.614,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	6.966.491.000,00	6.076.232.910,00	87,22	5.240.140.298,00
	Belanja Barang	8.212.774.634,00	5.361.563.016,00	65,28	1.539.824.360,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	15.179.265.634,00	11.437.795.926,00	75,35	6.779.964.658,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	4.987.935.000,00	3.216.612.532,00	64,49	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	17.300.000.000,00	13.560.482.737,00	78,38	305.808.750,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	112.064.000,00	60.146.000,00	53,67	-
	Jumlah Belanja Modal	22.399.999.000,00	16.837.241.269,00	75,17	305.808.750,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	37.579.264.634,00	28.275.037.195,00	75,24	9.413.091.782,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	37.579.264.634,00	28.275.037.195,00	75,24	9.413.091.782,00
	SURPLUS / DEFISIT	(36.179.264.634,00)	(26.722.462.961,00)	73,86	(7.776.206.168,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(36.179.264.634,00)	(26.722.462.961,00)	73,86	(7.776.206.168,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	158.039.285,00	646.665.041,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	(155.442.360,00)	(193.718.851,05)
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	49.199.637,50	47.783.575,00
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	152.798.890,00	76.965.900,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	204.595.452,50	577.695.664,96
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	8.133.261.066,00	4.779.923.094,00
	Gedung dan Bangunan	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	4.440.000,00	4.440.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	15.464.032.800,00	305.808.750,00
	Akumulasi Penyusutan	(5.059.150.954,81)	(4.552.786.746,00)
	Jumlah Aset Tetap	18.542.582.911,19	537.385.098,00
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	787.192.900,00	333.224.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(393.566.975,00)	(206.403.750,00)
	Aset Lain-Lain	345.805.799,86	489.305.799,86
	Jumlah Aset Lainnya	739.431.724,86	616.126.049,86
	JUMLAH ASET	19.486.610.088,55	1.731.206.812,82

No.	Uraian	2021	2020
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	350.723.441,00	296.053.544,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	350.723.441,00	296.053.544,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	350.723.441,00	296.053.544,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	19.135.886.647,55	1.435.153.268,82
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	19.486.610.088,55	1.731.206.812,82

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam

NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan
1	KEGIATAN OPERASIONAL			
1	PENDAPATAN			
	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 1.552.574.234,00	Rp 3.241.943.324,00	Rp (1.689.369.090,00)
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 1.552.574.234,00	Rp 3.241.943.324,00	Rp (1.689.369.090,00)
	PENDAPATAN TRANSFER			
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN			
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -	Rp -
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA			
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -	Rp -
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -	Rp -
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.552.574.234,00	Rp 3.241.943.324,00	Rp (1.689.369.090,00)
2	BEBAN			
	Beban Pegawai	Rp 5.804.482.910,00	Rp 5.511.890.298,00	Rp 292.592.612,00
	Beban Persediaan	Rp 459.248.100,00	Rp 214.423.500,00	Rp 244.824.600,00
	Beban Jasa	Rp 2.610.581.375,50	Rp 1.208.366.852,25	Rp 1.402.214.523,25
	Beban Pemeliharaan	Rp 80.177.675,00	Rp 42.704.920,00	Rp 37.472.755,00
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 172.940.897,00	Rp 58.483.500,00	Rp 114.457.397,00
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -
	Beban Penyusutan	Rp 542.740.641,83	Rp 177.658.938,52	Rp 365.081.703,31
	Beban Amortisasi	Rp 187.163.225,00	Rp 73.671.000,00	Rp 113.492.225,00
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -
	Beban Lain-lain	Rp 28.496.160,00	Rp -	Rp 28.496.160,00
	JUMLAH BEBAN	Rp 9.885.830.984,33	Rp 7.287.199.008,77	Rp 2.598.631.975,56
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (8.333.256.750,33)	Rp (4.045.255.684,77)	
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar			
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (274.500.000,00)	Rp (162.483.000,00)	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (274.500.000,00)	Rp (162.483.000,00)	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (8.607.756.750,33)	Rp (4.207.738.684,77)	
4	POS LUAR BIASA			
	Pendapatan Luar Biasa			
	Beban Luar Biasa			
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -	
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (8.607.756.750,33)	Rp (4.207.738.684,77)	

[illegible]

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	1.435.153.268,82	1.656.626.205,27
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(8.607.756.750,33)	(4.207.738.684,77)
3	RK PPKD/RK SKPD	26.722.462.961,00	3.902.085.717,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	(488.625.756,00)	(3.650.000,00)
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	(400,00)
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	(67.948.056,00)
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	143.500.000,00
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	38.276.491,05	12.278.487,32
	-Akumulasi Penyusutan	36.376.433,01	-
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	19.135.886.647,55	1.435.153.268,82

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2.16.01 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	4.404.845.072,00	4.151.918.547,00	94,26	3.867.948.375,00
	Belanja Barang	7.099.595.554,00	5.404.396.387,00	76,12	2.720.768.526,00
	Belanja Bunga	0,00	0,00	-	-
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	-	-
	Belanja Hibah	8.300.000.000,00	8.049.628.750,00	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	19.804.440.626,00	17.605.943.684,00	88,90	6.588.716.901,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	5.688.460.000,00	379.076.400,00	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	298.643.460,00	282.670.000,00	94,65	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	118.536.455.594,00	2.753.655.625,00	-	73.892.500,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	124.523.559.054,00	3.415.402.025,00	2,74	73.892.500,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	144.327.999.680,00	21.021.345.709,00	14,56	6.662.609.401,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	144.327.999.680,00	21.021.345.709,00	14,56	6.662.609.401,00
	SURPLUS / DEFISIT	(144.327.999.680,00)	(21.021.345.709,00)	14,56	(6.662.609.401,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(144.327.999.680,00)	(21.021.345.709,00)	14,56	(6.662.609.401,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	115.661.521,00	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	271.364.104,16	130.759.558,33
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	387.025.625,16	130.759.558,33
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	28.617.459.050,00	26.892.778.850,00
	Peralatan dan Mesin	1.962.538.996,00	1.414.968.996,00
	Gedung dan Bangunan	2.318.431.500,00	1.516.592.500,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	245.025.000,00	245.025.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	3.848.565.175,00	-
	Akumulasi Penyusutan	(1.791.162.945,14)	(1.268.760.182,00)
	Jumlah Aset Tetap	35.200.856.775,86	28.800.605.164,00
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	34.650.000,00	34.650.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(34.650.000,00)	(25.987.500,00)
	Aset Lain-Lain	-	423.160.000,00
	Jumlah Aset Lainnya	-	431.822.500,00
	JUMLAH ASET	35.587.882.401,02	29.363.187.222,33

No.	Uraian	2021	2020
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	1.096.511.569,00	175.555.305,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.096.511.569,00	175.555.305,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.096.511.569,00	175.555.305,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	34.491.370.832,02	29.187.631.917,33
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	35.587.882.401,02	29.363.187.222,33

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah				
	Pendapatan Retribusi Daerah				
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak				
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam				
	Dana Alokasi Umum				
	Dana Alokasi Khusus				
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus				
	Dana Penyesuaian				
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah				
	Pendapatan Dana Darurat				
	Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 3.978.100.547,00	Rp 4.041.766.375,00	Rp (63.665.828,00)	(1,58)
	Beban Persediaan	Rp 448.772.700,00	Rp 514.489.950,00	Rp (65.717.250,00)	(12,77)
	Beban Jasa	Rp 3.954.446.945,17	Rp 2.114.336.397,42	Rp 1.840.110.547,75	87,03
	Beban Pemeliharaan	Rp 155.692.500,00	Rp 27.413.000,00	Rp 128.279.500,00	
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 709.140.610,00	Rp 41.926.000,00	Rp 667.214.610,00	#####
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Hibah	Rp 8.049.628.750,00	Rp -	Rp 8.049.628.750,00	
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Penyusutan	Rp 231.269.151,83	Rp 48.168.179,00	Rp 183.100.972,83	380,13
	Beban Amortisasi	Rp 8.662.500,00	Rp 8.662.500,00	Rp -	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	#DIV/0!
	JUMLAH BEBAN	Rp 17.535.713.704,00	Rp 6.796.762.401,42	Rp 10.738.951.302,58	158,00
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (17.535.713.704,00)	Rp (6.796.762.401,42)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (354.660.000,00)	Rp (175.300.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (354.660.000,00)	Rp (175.300.000,00)		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (17.890.373.704,00)	Rp (6.972.062.401,42)		
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (17.890.373.704,00)	Rp (6.972.062.401,42)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	29.187.631.917,33	27.177.411.178,07
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(17.890.373.704,00)	(6.972.062.401,42)
3	RK PPKD/RK SKPD	21.137.007.230,00	6.662.609.401,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	56.000,00
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	2.348.239.000,00	1.833.628.500,00
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	423.160.000,00
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(291.133.611,31)	62.829.239,68
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	34.491.370.832,02	29.187.631.917,33

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 4.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	10.238.285.733,00	9.444.636.182,00	92,25	8.170.564.689,00
	Belanja Barang	3.171.742.100,00	2.797.667.167,00	88,21	1.975.628.134,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	13.410.027.833,00	12.242.303.349,00	91,29	10.146.192.823,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	225.834.800,00	221.197.240,00	97,95	45.447.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	225.834.800,00	221.197.240,00	97,95	45.447.000,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	13.635.862.633,00	12.463.500.589,00	91,40	10.191.639.823,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	13.635.862.633,00	12.463.500.589,00	91,40	10.191.639.823,00
	SURPLUS / DEFISIT	(13.635.862.633,00)	(12.463.500.589,00)	91,40	(10.191.639.823,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(13.635.862.633,00)	(12.463.500.589,00)	91,40	(10.191.639.823,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	16.759.500,00	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	16.759.500,00	-
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	4.601.292.691,26	4.384.988.951,26
	Gedung dan Bangunan	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	9.800.000,00	9.800.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	- 4.339.923.582,59	(3.999.874.334,00)
	Jumlah Aset Tetap	271.169.108,67	394.914.617,26
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	204.694.646,90	169.989.646,90
	Akumulasi Amortisasi	- 178.665.896,90	(169.989.646,91)
	Aset Lain-Lain	-	303.575.000,00
	Jumlah Aset Lainnya	26.028.750,01	303.575.000,00
	JUMLAH ASET	313.957.358,67	698.489.617,26

No.	Uraian	2021	2020
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	-	425.623.858,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	425.623.858,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	425.623.858,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	313.957.358,67	272.865.759,25
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	313.957.358,67	698.489.617,25

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	DID	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 9.020.336.182,00	Rp 8.594.864.689,00	Rp 425.471.493,00	4,95
	Beban Persediaan	Rp 305.670.850,00	Rp 141.671.800,00	Rp 163.999.050,00	115,76
	Beban Jasa	Rp 2.130.363.855,00	Rp 1.728.096.062,00	Rp 402.267.793,00	23,28
	Beban Pemeliharaan	Rp 103.606.188,00	Rp 17.665.000,00	Rp 85.941.188,00	
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 205.237.916,00	Rp 94.118.130,00	Rp 111.119.786,00	118,06
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 255.122.883,51	Rp 41.688.471,16	Rp 213.434.412,35	511,97
	Beban Amortisasi	Rp 8.676.250,00	Rp 12.271.875,00	Rp (3.595.625,00)	
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 12.029.014.124,51	Rp 10.630.376.027,16	Rp 1.398.638.097,35	13,16
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (12.029.014.124,51)	Rp (10.630.376.027,16)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (256.175.000,00)	Rp (64.990.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (256.175.000,00)	Rp (64.990.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (12.285.189.124,51)	Rp (10.695.366.027,16)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (12.285.189.124,51)	Rp (10.695.366.027,16)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	272.865.759,25	651.316.963,41
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(12.285.189.124,51)	(10.695.366.027,16)
3	RK PPKD/RK SKPD	12.463.500.589,00	10.191.639.823,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(52.293.500,00)	(178.300.000,00)
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	303.575.000,00
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(84.926.365,08)	-
	-Akumulasi Amortisasi	0,01	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	313.957.358,67	272.865.759,25

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 4.02.02. BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	152.786.878.291,00	179.891.802.692,00	117,74	158.937.237.899,00
	Pendapatan Retribusi Daerah				
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.956.960.000,00	9.956.960.000,00	100,00	9.778.080.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.769.382.763,00	15.588.494.611,11	270,19	12.370.182.390,46
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	168.513.221.054,00	205.437.257.303,11	121,91	181.085.500.289,46
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	60.721.010.363,00	61.309.116.578,00	100,97	50.460.873.698,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	31.578.902.903,00	47.781.705.502,00	151,31	38.645.976.130,00
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	92.299.913.266,00	109.090.822.080,00	118,19	89.106.849.828,00
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	52.247.274.000,00	52.247.274.000,00	100,00	97.730.028.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	52.247.274.000,00	52.247.274.000,00	100,00	97.730.028.000,00
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	128.032.319.484,00	123.865.281.737,00	96,75	118.963.390.897,00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
	Bantuan Keuangan Provinsi	236.810.517.464,00	105.707.342.961,00	44,64	23.922.151.027,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	364.842.836.948,00	229.572.624.698,00	62,92	142.885.541.924,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	509.390.024.214,00	390.910.720.778,00	76,74	329.722.419.752,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	6.700.327.000,00		140.839.566,00
	Dana Darurat				
	Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	6.700.327.000,00	-	140.839.566,00
	JUMLAH PENDAPATAN	677.903.245.268,00	603.048.305.081,11	88,96	510.948.759.607,46
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	9.757.606.376,00	8.927.229.801,00	91,49	7.815.133.366,00
	Belanja Barang	3.960.341.300,00	3.715.275.155,00	93,81	2.659.612.037,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	13.717.947.676,00	12.642.504.956,00	92,16	10.474.745.403,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	91.777.600,00	91.019.500,00	-	117.693.250,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	91.777.600,00	91.019.500,00	-	117.693.250,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	13.809.725.276,00	12.733.524.456,00	92,21	10.592.438.653,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	13.809.725.276,00	12.733.524.456,00	92,21	10.592.438.653,00
	SURPLUS / DEFISIT	664.093.519.992,00	590.314.780.625,11	88,89	500.356.320.954,46
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SILPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	664.093.519.992,00	590.314.780.625,11	88,89	500.356.320.954,46

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	128.892.710.993,00	198.458.610.887,00
	Penyisihan Piutang	(46.745.285.110,18)	(135.641.054.045,82)
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	27.370.729.034,00
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	9.794.305.571,00	6.877.800.265,00
	Belanja Dibayar Dimuka	2.226.195,83	7.114.008,33
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	217.551.668,00	(1.044.988.456,00)
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(217.551.668,00)	(217.551.668,00)
	Piutang Lainnya	417.688.333,20	308.500.374,00
	Penyisihan Piutang Lainnya	(329.032.832,00)	(284.950.811,00)
	Persediaan	45.023.000,00	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	92.077.636.150,86	95.834.209.587,52
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	6.026.060.071,66	5.932.472.571,66
	Gedung dan Bangunan	167.033.430,00	167.033.430,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	91.863.000,00	91.863.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(5.953.944.687,16)	(5.731.557.188,00)
	Jumlah Aset Tetap	331.011.814,50	459.811.813,66
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	1.627.768.900,00	1.494.216.800,00
	Akumulasi Amortisasi	(1.339.573.575,00)	(1.104.404.300,00)
	Aset Lain-Lain	479.369.579,93	704.169.579,93
	Jumlah Aset Lainnya	767.564.904,93	1.093.982.079,93
	JUMLAH ASET	93.176.212.870,29	97.388.003.481,11

No.	Uraian	2021	2020
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	1.096.734,00	399.784.135,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.096.734,00	399.784.135,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.096.734,00	399.784.135,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	93.175.116.136,29	96.988.219.346,11
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	93.176.212.870,29	97.388.003.481,11

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp 203.700.704.578,00	Rp 179.325.342.134,00	Rp 24.375.362.444,00	13,59
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 9.956.960.000,00	Rp 9.778.080.000,00	Rp 178.880.000,00	1,83
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 15.697.682.570,31	Rp 11.378.762.640,46	Rp 4.318.919.929,85	37,96
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 229.355.347.148,31	Rp 200.482.184.774,46	Rp 28.873.162.373,85	14,40
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp 51.986.941.479,00	Rp 48.571.558.676,00	Rp 3.415.382.803,00	7,03
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp 29.733.151.567,00	Rp 39.583.428.911,00	Rp (9.850.277.344,00)	-24,88
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp 81.720.093.046,00	Rp 88.154.987.587,00	Rp (6.434.894.541,00)	-7,30
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -	-
	DID	Rp 52.247.274.000,00	Rp 97.730.028.000,00	Rp (45.482.754.000,00)	-46,54
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp 52.247.274.000,00	Rp 97.730.028.000,00	Rp (45.482.754.000,00)	-46,54
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp 126.781.787.043,00	Rp 119.792.475.687,00	Rp 6.989.311.356,00	5,83
	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 105.707.342.961,00	Rp -	Rp 105.707.342.961,00	
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp 232.489.130.004,00	Rp 119.792.475.687,00	Rp 112.696.654.317,00	94,08
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp 366.456.497.050,00	Rp 305.677.491.274,00	Rp 60.779.005.776,00	19,88
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp 6.700.327.000,00	Rp 140.839.566,00	Rp 6.559.487.434,00	#####
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Pendapatan Lainnya	Rp 71.950.231,00	Rp 23.922.151.027,00	Rp (23.850.200.796,00)	-99,70
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 6.772.277.231,00	Rp 24.062.990.593,00	Rp (17.290.713.362,00)	-71,86
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 602.584.121.429,31	Rp 530.222.666.641,46	Rp 72.361.454.787,85	13,65
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 8.529.679.801,00	Rp 8.212.683.366,00	Rp 316.996.435,00	3,86
	Beban Persediaan	Rp 377.405.500,00	Rp 327.197.600,00	Rp 50.207.900,00	15,34
	Beban Jasa	Rp 2.841.500.224,50	Rp 2.010.794.424,57	Rp 830.705.799,93	41,31
	Beban Pemeliharaan	Rp 228.095.000,00	Rp 91.285.100,00	Rp 136.809.900,00	149,87
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 93.449.742,00	Rp 33.344.500,00	Rp 60.105.242,00	180,26
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 220.701.419,99	Rp 5.239.970,00	Rp 215.461.449,99	#####
	Beban Amortisasi	Rp 235.169.275,00	Rp 254.313.125,00	Rp (19.143.850,00)	-7,53
	Beban Penyisihan Piutang	Rp 1.348.601.463,83	Rp 10.583.681.078,03	Rp (9.235.079.614,20)	-87,26
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp 1.892.000,00	Rp -	Rp 1.892.000,00	
	JUMLAH BEBAN	Rp 13.876.494.426,32	Rp 21.518.539.163,60	Rp (7.642.044.737,28)	-35,51
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp 588.707.627.002,99	Rp 508.704.127.477,86		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (224.800.000,00)	Rp (648.743.749,14)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (224.800.000,00)	Rp (648.743.749,14)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp 588.482.827.002,99	Rp 508.055.383.728,72		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp 588.482.827.002,99	Rp 508.055.383.728,72		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	96.988.219.346,11	97.020.193.654,56
2	SURPLUS/DEFISIT LO	588.482.827.002,99	508.055.383.728,72
3	RK PPKD/RK SKPD	(590.386.730.856,11)	(500.356.320.954,46)
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	(1.940.954.071,00)	(8.169.284.124,00)
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	4.460.000,00	150.399.999,36
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	178.163.465,00
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	28.980.793,48	10.900.000,00
	-Akumulasi Penyusutan	(1.686.079,17)	98.783.576,93
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	93.175.116.136,29	96.988.219.346,11

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

4.02.01. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah				
	Pendapatan Retribusi Daerah				
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		9.044,00		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	9.044,00		-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak				
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				
	Dana Alokasi Umum	530.425.978.000,00	530.425.978.000,00	100,00	539.717.972.000,00
	Dana Alokasi Khusus	143.744.872.000,00	131.759.768.941,00	91,66	160.457.085.903,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	674.170.850.000,00	662.185.746.941,00	98,22	700.175.057.903,00
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus				
	Dana Penyesuaian				
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	674.170.850.000,00	662.185.746.941,00	98,22	700.175.057.903,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah				
	Dana Darurat				
	Dana BOS	57.652.719.654,00	55.161.824.000,00	95,68	52.270.900.000,00
	Pendapatan Lainnya		71.950.231,00		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	57.652.719.654,00	55.233.774.231,00	95,80	52.270.900.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	731.823.569.654,00	717.419.530.216,00	98,03	752.445.957.903,00
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	29.232.248.369,00	22.894.407.047,00	78,32	21.534.375.709,00
	Belanja Barang	3.138.427.800,00	2.888.847.210,00	92,05	1.788.247.077,00
	Belanja Bunga	600.000.000,00	308.874.114,00	51,48	418.747.510,00
	Belanja Subsidi				
	Belanja Hibah				13.856.011.450,00
	Belanja Bantuan Sosial				2.864.475.000,00
	Jumlah Belanja Operasi	32.970.676.169,00	26.092.128.371,00	79,14	40.461.856.746,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah				
	Belanja Peralatan dan Mesin	293.064.800,00	266.918.250,00	91,08	74.450.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan				-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan				-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.008.000,00	2.000.000,00	99,60	-
	Jumlah Belanja Modal	295.072.800,00	268.918.250,00	91,14	74.450.000,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	23.880.085.890,00	12.793.426.443,00	53,57	74.352.158.320,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga	23.880.085.890,00	12.793.426.443,00	-	74.352.158.320,00
	JUMLAH BELANJA	57.145.834.859,00	39.154.473.064,00	68,52	114.888.465.066,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	57.145.834.859,00	39.154.473.064,00	68,52	114.888.465.066,00
	SURPLUS / DEFISIT	674.677.734.795,00	678.265.057.152,00	100,53	637.557.492.837,00
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	271.172.220.678,00	270.898.017.186,53	99,90	121.693.751.477,73
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	271.172.220.678,00	270.898.017.186,53	99,90	121.693.751.477,73
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	2.429.808.337,00	855.508.220,00	35,21	1.041.156.620,00
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	2.429.808.337,00	855.508.220,00	35,21	1.041.156.620,00
	PEMBIAYAAN NETO	268.742.412.341,00	270.042.508.966,53	70,42	120.652.594.857,73
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	943.420.147.136,00	948.307.566.118,53	100,52	758.210.087.694,73

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.812.150,52	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	9.044,00	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	55.161.824.000,00	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	261.938.079,17	135.048.333,34
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	55.430.583.273,69	135.048.333,34
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	11.243.843.540,00	9.156.011.540,00
	Gedung dan Bangunan	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	226.000.000,00	226.000.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(10.661.937.968,92)	(8.443.972.160,00)
	Jumlah Aset Tetap	807.905.571,08	938.039.380,00
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	473.787.000,00	473.787.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(392.403.250,00)	(335.776.500,00)
	Aset Lain-Lain	-	-
	Jumlah Aset Lainnya	81.383.750,00	138.010.500,00
	JUMLAH ASET	56.319.872.594,77	1.211.098.213,34

No.	Uraian	2021	2020
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	(32.259.789,53)	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	855.508.220,00	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	38.360,00	291.500.000,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	823.286.790,47	291.500.000,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	(855.508.220,00)	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	(855.508.220,00)	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	(32.221.429,53)	291.500.000,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	56.352.094.024,30	919.598.213,34
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	56.319.872.594,77	1.211.098.213,34

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Date)

NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan
I	KEGIATAN OPERASIONAL			
1	<u>PENDAPATAN</u>			
	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	Rp -
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	Rp -
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp 9.044	Rp -	Rp 9.044
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp 9.044	Rp -	Rp 9.044
	PENDAPATAN TRANSFER			
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN			
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -
	Dana Alokasi Umum	Rp 530.425.978.000	Rp -	Rp 530.425.978.000
	Dana Alokasi Khusus	Rp 131.759.768.941	Rp -	Rp 131.759.768.941
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp 662.185.746.941	Rp -	Rp 662.185.746.941
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA			
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	Rp -
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp 662.185.746.941	Rp -	Rp 662.185.746.941
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
	Pendapatan Hibah	Rp 55.161.824.000	Rp -	Rp 55.161.824.000
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 55.161.824.000	Rp -	Rp 55.161.824.000
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 717.347.579.985	Rp -	Rp 717.347.579.985
2	<u>BEBAN</u>			
	Beban Pegawai	Rp 22.602.907.047,00	Rp 21.825.875.709,00	Rp 777.031.338,00
	Beban Persediaan	Rp 497.781.762,00	Rp 549.358.600,00	Rp (51.576.838,00)
	Beban Jasa	Rp 1.821.427.808,17	Rp 1.088.323.584,16	Rp 733.104.224,01
	Beban Pemeliharaan	Rp 132.640.200,00	Rp 102.874.752,00	Rp 29.765.448,00
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 317.041.054,00	Rp 131.493.320,00	Rp 185.547.734,00
	Beban Bunga	Rp 276.614.324,47	Rp -	Rp 276.614.324,47
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -
	Beban Penyusutan	Rp 714.197.787,18	Rp 671.580.665,46	Rp 42.617.121,72
	Beban Amortisasi	Rp 56.626.750,00	Rp 68.864.250,00	Rp (12.237.500,00)
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -
	JUMLAH BEBAN	Rp 26.419.236.732,82	Rp 24.438.370.880,62	Rp 1.980.865.852,20
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp 690.928.343.252,18	Rp (24.438.370.880,62)	Rp -
3	<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>			
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar			
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp (718.069.000,00)	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp (718.069.000,00)	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp 690.928.343.252,18	Rp (25.156.439.880,62)	
4	<u>POS LUAR BIASA</u>			
	Pendapatan Luar Biasa			
	Beban Luar Biasa	Rp 9.736.649.668,00		
	POS LUAR BIASA	Rp (9.736.649.668,00)	Rp -	
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp 681.191.693.584,18	Rp (25.156.439.880,62)	

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	919.598.213,34	2.406.587.307,96
2	SURPLUS/DEFISIT LO	681.191.693.584,18	(25.156.439.880,62)
3	RK PPKD/RK SKPD	(623.031.273.877,00)	23.397.072.786,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	(1.369.553.603,00)	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	138.585.578,00	272.378.000,00
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(1.503.768.021,74)	-
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	6.812.150,52	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	56.352.094.024,30	919.598.213,34

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA PPKD
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di Kas BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	149.241.682.414,00	149.241.682.414,00
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	149.241.682.414,00	149.241.682.414,00
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	50.591.536,00	48.909.062,00
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	50.591.536,00	48.909.062,00
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	68.493.992.363,50	68.660.344.186,50
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	68.493.992.363,50	68.660.344.186,50
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	68.544.583.899,50	68.709.253.248,50
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	-	-
	Gedung dan Bangunan	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	-	-
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	-	-
	Jumlah Aset Tetap	-	-
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	-	-
	Akumulasi Amortisasi	-	-
	Aset Lain-Lain	-	-
	Jumlah Aset Lainnya	-	-
	JUMLAH ASET	217.786.266.313,50	217.950.935.662,50

No.	Uraian	2021	2020
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	161.298.946,00	161.298.946,00
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	(0,00)	855.508.220,00
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	-	-
	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.319.924.798,00	1.319.924.798,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.481.223.744,00	2.336.731.964,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	3.422.032.878,70	3.422.032.878,70
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	3.422.032.878,70	3.422.032.878,70
	JUMLAH KEWAJIBAN	4.903.256.622,70	5.758.764.842,70
III	EKUITAS		
	EKUITAS	212.883.009.690,80	212.192.170.819,80
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	217.786.266.313,50	217.950.935.662,50

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

		(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah				
	Pendapatan Retribusi Daerah				
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp 539.717.972.000,00	Rp (539.717.972.000,00)	(100,00)
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp 160.457.085.903,00	Rp (160.457.085.903,00)	(100,00)
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp 700.175.057.903,00	Rp (700.175.057.903,00)	#####
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus				
	Dana Penyesuaian				
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp 700.175.057.903,00	Rp (700.175.057.903,00)	#####
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp 52.270.900.000,00	Rp (52.270.900.000,00)	(100,00)
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp 52.270.900.000,00	Rp (52.270.900.000,00)	#####
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp 752.445.957.903,00	Rp (752.445.957.903,00)	#####
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Persediaan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Jasa	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Pemeliharaan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Perjalanan Dinas	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bunga	Rp -	Rp 458.243.473,20	Rp (458.243.473,20)	(100,00)
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp 13.856.011.450,00	Rp (13.856.011.450,00)	(100,00)
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp 2.864.475.000,00	Rp (2.864.475.000,00)	(100,00)
	Beban Penyusutan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Amortisasi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp 166.351.823,00	Rp 166.351.823,00	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 166.351.823,00	Rp 17.345.081.746,20	Rp (17.178.729.923,20)	(99,04)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (166.351.823,00)	Rp 735.100.876.156,81		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON	Rp -	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (166.351.823,00)	Rp 735.100.876.156,81		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -	Rp -		
	Beban Luar Biasa	Rp -	Rp 10.612.007.886,38		
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp (10.612.007.886,38)		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (166.351.823,00)	Rp 724.488.868.270,43		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PPKD
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	212.192.170.819,80	159.084.925.628,58
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(166.351.823,00)	724.488.868.270,43
3	RK PPKD/RK SKPD	855.508.220,00	(607.642.509.003,00)
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	(56.390.582.632,62)
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	(7.349.567.801,00)
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	-	-
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	0,42
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	1.682.474,00	1.036.357,00
13	EKUITAS AKHIR	212.883.009.690,80	212.192.170.819,80

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 4.03.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	13.880.130.118,00	11.039.594.900,00	79,54	5.946.485.510,00
	Belanja Barang	3.549.607.300,00	2.999.297.709,00	84,50	1.573.059.009,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	17.429.737.418,00	14.038.892.609,00	80,55	7.519.544.519,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	171.990.900,00	145.974.000,00	84,87	29.524.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	171.990.900,00	145.974.000,00	84,87	29.524.000,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	17.601.728.318,00	14.184.866.609,00	80,59	7.549.068.519,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	17.601.728.318,00	14.184.866.609,00	80,59	7.549.068.519,00
	SURPLUS / DEFISIT	(17.601.728.318,00)	(14.184.866.609,00)	80,59	(7.549.068.519,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(17.601.728.318,00)	(14.184.866.609,00)	80,59	(7.549.068.519,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	3.386.725,00	3.386.333,33
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	44.308.000,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	3.386.725,00	47.694.333,33
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	2.943.846.017,00	2.797.872.017,00
	Gedung dan Bangunan	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	-	-
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(2.783.397.192,00)	(2.551.910.071,00)
	Jumlah Aset Tetap	160.448.825,00	245.961.946,00
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	378.260.500,00	378.260.500,00
	Akumulasi Amortisasi	(378.260.500,00)	(354.319.000,00)
	Aset Lain-Lain	-	112.400.000,00
	Jumlah Aset Lainnya	-	136.341.500,00
	JUMLAH ASET	163.835.550,00	429.997.779,33

No.	Uraian	2021	2020
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	43.777,00	264.641.405,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	43.777,00	264.641.405,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	43.777,00	264.641.405,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	163.791.773,00	165.356.374,33
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	163.835.550,00	429.997.779,33

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 10.775.044.900,00	Rp 6.211.035.510,00	Rp 4.564.009.390,00	73,48
	Beban Persediaan	Rp 230.756.250,00	Rp 259.880.610,00	Rp (29.124.360,00)	-11,21
	Beban Jasa	Rp 2.143.340.510,33	Rp 1.005.330.687,34	Rp 1.138.009.822,99	113,20
	Beban Pemeliharaan	Rp 88.109.000,00	Rp 26.165.725,00	Rp 61.943.275,00	
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 581.351.929,00	Rp 236.934.622,00	Rp 344.417.307,00	145,36
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 208.806.246,43	Rp -	Rp 208.806.246,43	#DIV/0!
	Beban Amortisasi	Rp 23.941.500,00	Rp 48.409.625,00	Rp (24.468.125,00)	-50,54
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 14.051.350.335,76	Rp 7.787.756.779,34	Rp 6.263.593.556,42	80,43
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (14.051.350.335,76)	Rp (7.787.756.779,34)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (112.400.000,00)	Rp (325.583.981,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (112.400.000,00)	Rp (325.583.981,00)		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (14.163.750.335,76)	Rp (8.113.340.760,34)		
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (14.163.750.335,76)	Rp (8.113.340.760,34)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021**

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	165.356.374,33	524.940.844,03
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(14.163.750.335,76)	(8.113.340.760,34)
3	RK PPKD/RK SKPD	14.184.866.609,00	7.549.068.519,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	112.400.000,00
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(22.680.874,57)	92.287.771,64
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	163.791.773,00	165.356.374,33

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 5.01.02. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	-	-	-	32.389.859.724,00
	Belanja Barang	-	-	-	-
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	-	-	-	32.389.859.724,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	-	-	-	-
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	-	-	-	32.389.859.724,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	-	-	-	32.389.859.724,00
	SURPLUS / DEFISIT	-	-	-	(32.389.859.724,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	-	-	(32.389.859.724,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA DPRD
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	-	-
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	-	-
	Gedung dan Bangunan	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	-	-
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	-	-
	Jumlah Aset Tetap	-	-
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	-	-
	Akumulasi Amortisasi	-	-
	Aset Lain-Lain	-	-
	Jumlah Aset Lainnya	-	-
	JUMLAH ASET	-	-

No.	Uraian	2021	2020
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	-	-
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	-
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	-
III	EKUITAS		
	EKUITAS	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	-	-

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL DPRD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah				
	Pendapatan Retribusi Daerah				
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak				
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam				
	Dana Alokasi Umum				
	Dana Alokasi Khusus				
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus				
	Dana Penyesuaian				
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah				
	Pendapatan Dana Darurat				
	Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp -	Rp 32.389.859.724,00	Rp (32.389.859.724,00)	-100,00
	Beban Persediaan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Jasa	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Pemeliharaan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Perjalanan Dinas	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Amortisasi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp -	Rp 32.389.859.724,00	Rp(32.389.859.724,00)	-100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp -	Rp (32.389.859.724,00)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp -	Rp (32.389.859.724,00)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp -	Rp (32.389.859.724,00)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS DPRD
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	-	-
2	SURPLUS/DEFISIT LO	-	(32.389.859.724,00)
3	RK PPKD/RK SKPD	-	32.389.859.724,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)		
	-Penyisihan Piutang		
	-Akumulasi Penyusutan		
	-Akumulasi Amortisasi		
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN		
11	KOREKSI UTANG PFK		
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH		
13	EKUITAS AKHIR	-	-

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.01.03. KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai			-	704.787.136,00
	Belanja Barang	-	-	-	-
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	-	-	-	704.787.136,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	-	-	-	-
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	-	-	-	704.787.136,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	-	-	-	704.787.136,00
	SURPLUS / DEFISIT	-	-	-	(704.787.136,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	-	-	(704.787.136,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA KEPALA DAERAH DAN WAKIL
PER 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2020	2019
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	-	-
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	-	-
	Gedung dan Bangunan	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	-	-
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	-	-
	Jumlah Aset Tetap	-	-
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	-	-
	Akumulasi Amortisasi	-	-
	Aset Lain-Lain	-	-
	Jumlah Aset Lainnya	-	-
	JUMLAH ASET	-	-

No.	Uraian	2020	2019
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	-	-
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	-
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	-	-
III	EKUITAS		
	EKUITAS	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	-	-

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp -	Rp 704.787.136,00	Rp (704.787.136,00)	-100,00
	Beban Persediaan	Rp -	Rp -		
	Beban Jasa	Rp -	Rp -		
	Beban Pemeliharaan	Rp -	Rp -		
	Beban Perjalanan Dinas	Rp -	Rp -		
	Beban Bunga	Rp -	Rp -		
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -		
	Beban Hibah	Rp -	Rp -		
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -		
	Beban Penyusutan	Rp -	Rp -		
	Beban Amortisasi	Rp -	Rp -		
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -		
	Beban Transfer	Rp -	Rp -		
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -		
	JUMLAH BEBAN	Rp -	Rp 704.787.136,00	Rp(704.787.136,00)	-100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp -	Rp (704.787.136,00)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON	Rp -	Rp -		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp -	Rp (704.787.136,00)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp -	Rp (704.787.136,00)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KEPALA DAERAH DAN WAKIL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

		(Dalam Rupiah)	
NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	-	800,00
2	SURPLUS/DEFISIT LO	-	(704.787.136,00)
3	RK PPKD/RK SKPD	-	704.786.336,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	-	-
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	-	-

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.01.04. SEKRETARIAT DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	29.630.733.300,00	28.013.446.114,00	94,54	21.896.608.023,00
	Belanja Barang	30.185.190.876,00	22.458.667.191,00	74,40	20.046.552.302,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	59.815.924.176,00	50.472.113.305,00	84,38	41.943.160.325,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	1.958.800.700,00	1.489.021.670,00	76,02	672.553.120,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	290.565.000,00	289.332.495,00	99,58	639.809.060,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	2.249.365.700,00	1.778.354.165,00	79,06	1.312.362.180,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	62.065.289.876,00	52.250.467.470,00	84,19	43.255.522.505,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	62.065.289.876,00	52.250.467.470,00	84,19	43.255.522.505,00
	SURPLUS / DEFISIT	(62.065.289.876,00)	(52.250.467.470,00)	84,19	(43.255.522.505,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SILPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(62.065.289.876,00)	(52.250.467.470,00)	84,19	(43.255.522.505,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA SEKRETARIAT DAERAH
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	26.204.303,00	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	571.852.244,33	595.471.308,33
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	331.766.639,00	332.691.800,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	929.823.186,33	928.163.108,33
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	6.164.015.740,00	6.164.015.740,00
	Peralatan dan Mesin	37.099.131.686,78	35.497.887.279,00
	Gedung dan Bangunan	58.328.132.188,22	58.029.695.114,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	175.060.800,00	175.060.800,00
	Aset Tetap Lainnya	500.749.922,00	500.749.922,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(52.166.396.646,74)	(49.361.621.197,00)
	Jumlah Aset Tetap	50.100.693.690,26	51.005.787.658,00
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	166.952.500,00	166.952.500,00
	Akumulasi Amortisasi	(166.952.500,00)	(162.456.250,00)
	Aset Lain-Lain	694.084.000,00	893.128.090,00
	Jumlah Aset Lainnya	694.084.000,00	897.624.340,00
	JUMLAH ASET	51.724.600.876,59	52.831.575.106,33

No.	Uraian	2021	2020
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	90.126.078,00	1.290.208.026,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	90.126.078,00	1.290.208.026,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	90.126.078,00	1.290.208.026,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	51.634.474.798,59	51.541.367.080,33
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	51.724.600.876,59	52.831.575.106,33

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL SEKRETARIAT DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 26.815.346.114,00	Rp 23.094.708.023,00	Rp 3.720.638.091,00	16,11
	Beban Persediaan	Rp 2.957.885.204,00	Rp 1.934.260.885,00	Rp 1.023.624.319,00	52,92
	Beban Jasa	Rp 16.967.077.165,00	Rp 15.679.739.269,34	Rp 1.287.337.895,66	8,21
	Beban Pemeliharaan	Rp 549.253.431,00	Rp 774.180.425,00	Rp (224.926.994,00)	-29,05
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 1.710.005.351,00	Rp 1.636.827.869,00	Rp 73.177.482,00	4,47
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 3.092.598.099,32	Rp 3.335.951.832,19	Rp (243.353.732,87)	-7,29
	Beban Amortisasi	Rp 4.496.250,00	Rp 28.985.000,00	Rp (24.488.750,00)	-
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp 2.310.000,00	Rp (2.310.000,00)	-100,00
	JUMLAH BEBAN	Rp 52.096.661.614,32	Rp 46.486.963.303,53	Rp 5.609.698.310,80	12,07
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (52.096.661.614,32)	Rp (46.486.963.303,53)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (449.020.090,00)	Rp (560.244.100,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (449.020.090,00)	Rp (560.244.100,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (52.545.681.704,32)	Rp (47.047.207.403,53)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (52.545.681.704,32)	Rp (47.047.207.403,53)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS SEKRETARIAT DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	51.541.367.080,33	57.751.973.116,86
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(52.545.681.704,32)	(47.047.207.403,53)
3	RK PPKD/RK SKPD	52.250.467.470,00	43.255.522.505,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	74.295.000,00	(2.749.950.228,00)
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	331.029.090,00
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	287.822.649,58	-
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	26.204.303,00	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	51.634.474.798,59	51.541.367.080,33

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.01.05. SEKRETARIAT DPRD

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	44.473.133.347,00	40.198.975.031,00	90,39	5.959.725.330,00
	Belanja Barang	34.316.740.472,00	25.574.335.690,00	74,52	39.421.509.257,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	78.789.873.819,00	65.773.310.721,00	83,48	45.381.234.587,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	1.496.755.632,00	1.101.947.600,00	73,62	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	285.516.800,00	140.725.693,00	49,29	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	1.782.272.432,00	1.242.673.293,00	69,72	-
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	80.572.146.251,00	67.015.984.014,00	83,18	45.381.234.587,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	80.572.146.251,00	67.015.984.014,00	83,18	45.381.234.587,00
	SURPLUS / DEFISIT	(80.572.146.251,00)	(67.015.984.014,00)	83,18	(45.381.234.587,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(80.572.146.251,00)	(67.015.984.014,00)	83,18	(45.381.234.587,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA SEKRETARIAT DPRD
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	39.213.999,17	14.251.883,33
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	41.034.950,00	5.495.499,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	80.248.949,17	19.747.382,33
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	2.756.775.000,00	2.756.775.000,00
	Peralatan dan Mesin	17.053.637.331,00	18.053.371.481,00
	Gedung dan Bangunan	12.270.490.134,00	12.270.490.134,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	2.261.194.720,00	2.261.194.720,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(19.733.322.922,30)	(18.862.210.761,00)
	Jumlah Aset Tetap	14.608.774.262,70	16.479.620.574,00
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	698.221.000,00	698.221.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(642.137.750,00)	(605.429.500,00)
	Aset Lain-Lain	-	-
	Jumlah Aset Lainnya	56.083.250,00	92.791.500,00
	JUMLAH ASET	14.745.106.461,87	16.592.159.456,33

No.	Uraian	2021	2020
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	28.009.069,00	295.768.782,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	28.009.069,00	295.768.782,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	28.009.069,00	295.768.782,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	14.717.097.392,87	16.296.390.674,33
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	14.745.106.461,87	16.592.159.456,33

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL SEKRETARIAT DPRD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 39.927.875.031,00	Rp 6.230.825.330,00	Rp 33.697.049.701,00	540,81
	Beban Persediaan	Rp 975.548.499,00	Rp 903.129.754,00	Rp 72.418.745,00	8,02
	Beban Jasa	Rp 9.977.677.199,16	Rp 7.347.258.092,34	Rp 2.630.419.106,82	35,80
	Beban Pemeliharaan	Rp 362.956.305,00	Rp 955.577.498,00	Rp (592.621.193,00)	
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 14.341.718.100,00	Rp 30.174.941.591,00	Rp (15.833.223.491,00)	-52,47
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Penyusutan	Rp 1.858.081.343,61	Rp 929.984.152,99	Rp 928.097.190,62	99,80
	Beban Amortisasi	Rp 36.708.250,00	Rp 82.958.250,00	Rp (46.250.000,00)	
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	
	JUMLAH BEBAN	Rp 67.480.564.727,77	Rp 46.624.674.668,33	Rp 20.855.890.059,44	44,73
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (67.480.564.727,77)	Rp (46.624.674.668,33)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp (932.622.650,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp (932.622.650,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (67.480.564.727,77)	Rp (47.557.297.318,33)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (67.480.564.727,77)	Rp (47.557.297.318,33)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS SEKRETARIAT DPRD
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

		(Dalam Rupiah)	
NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	16.296.390.674,33	19.124.053.405,66
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(67.480.564.727,77)	(47.557.297.318,33)
3	RK PPKD/RK SKPD	67.015.984.014,00	45.381.234.587,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(2.101.681.750,00)	(651.600.000,00)
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	986.969.182,31	-
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	14.717.097.392,87	16.296.390.674,33

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.01.06. INSPEKTORAT KOTA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	7.450.001.907,00	6.869.038.159,00	92,20	6.005.476.513,00
	Belanja Barang	1.576.422.200,00	1.405.593.315,00	89,16	1.052.314.893,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	9.026.424.107,00	8.274.631.474,00	91,67	7.057.791.406,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	47.517.800,00	40.785.000,00	85,83	69.645.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	198.075.000,00	192.306.077,00	97,09	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	245.592.800,00	233.091.077,00	94,91	69.645.000,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	9.272.016.907,00	8.507.722.551,00	91,76	7.127.436.406,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	9.272.016.907,00	8.507.722.551,00	91,76	7.127.436.406,00
	SURPLUS / DEFISIT	(9.272.016.907,00)	(8.507.722.551,00)	91,76	(7.127.436.406,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(9.272.016.907,00)	(8.507.722.551,00)	91,76	(7.127.436.406,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA INSPEKTORAT KOTA
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	15.289.046,67	15.111.033,33
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	4.532.480,00	6.752.500,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	19.821.526,67	21.863.533,33
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	-	-
	Peralatan dan Mesin	2.276.322.061,00	2.211.537.061,00
	Gedung dan Bangunan	4.461.163.137,00	4.253.273.060,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	-	-
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(2.562.410.721,96)	(2.226.910.697,00)
	Jumlah Aset Tetap	4.175.074.476,04	4.237.899.424,00
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	49.700.000,00	49.700.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(49.700.000,00)	(37.275.000,00)
	Aset Lain-Lain	-	334.675.000,00
	Jumlah Aset Lainnya	-	347.100.000,00
	JUMLAH ASET	4.194.896.002,71	4.606.862.957,33

No.	Uraian	2021	2020
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	2.452.955,00	334.768.418,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	2.452.955,00	334.768.418,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	2.452.955,00	334.768.418,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	4.192.443.047,71	4.272.094.539,33
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.194.896.002,71	4.606.862.957,33

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL INSPEKTORAT KOTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbar Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 6.536.463.159,00	Rp 6.338.051.513,00	Rp 198.411.646,00	3,13
	Beban Persediaan	Rp 101.817.294,00	Rp 109.100.000,00	Rp (7.282.706,00)	(6,68)
	Beban Jasa	Rp 1.002.165.166,66	Rp 681.222.503,67	Rp 320.942.662,99	47,11
	Beban Pemeliharaan	Rp 81.112.398,00	Rp 30.168.000,00	Rp 50.944.398,00	
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 200.966.000,00	Rp 234.379.045,00	Rp (33.413.045,00)	(14,26)
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Penyusutan	Rp 290.736.706,16	Rp 185.453.156,25	Rp 105.283.549,91	56,77
	Beban Amortisasi	Rp 12.425.000,00	Rp 12.425.000,00	Rp -	
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Lain-lain	Rp 7.550.000,00	Rp -	Rp 7.550.000,00	#DIV/0!
	JUMLAH BEBAN	Rp 8.233.235.723,82	Rp 7.590.799.217,92	Rp 642.436.505,90	8,46
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (8.233.235.723,82)	Rp (7.590.799.217,92)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (334.675.000,00)	Rp (109.380.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp (334.675.000,00)	Rp (109.380.000,00)		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (8.567.910.723,82)	Rp (7.700.179.217,92)		
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (8.567.910.723,82)	Rp (7.700.179.217,92)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INSPEKTORAT KOTA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	4.272.094.539,33	4.509.882.351,25
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(8.567.910.723,82)	(7.700.179.217,92)
3	RK PPKD/RK SKPD	8.507.722.551,00	7.127.436.406,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	280.000,00
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	25.300.000,00	-
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	334.675.000,00
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(44.763.318,80)	-
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	4.192.443.047,71	4.272.094.539,33

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 6.01.01. KECAMATAN CIMAHI UTARA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	10.550.938.000,00	9.781.000.666,00	92,70	9.426.953.583,00
	Belanja Barang	22.987.252.900,00	21.272.382.108,00	92,54	11.192.066.095,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	33.538.190.900,00	31.053.382.774,00	92,59	20.619.019.678,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	147.855.000,00	142.762.200,00	96,56	231.173.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	147.855.000,00	142.762.200,00	96,56	231.173.000,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	33.686.045.900,00	31.196.144.974,00	92,61	20.850.192.678,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	33.686.045.900,00	31.196.144.974,00	92,61	20.850.192.678,00
	SURPLUS / DEFISIT	(33.686.045.900,00)	(31.196.144.974,00)	92,61	(20.850.192.678,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SiLPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SiLPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(33.686.045.900,00)	(31.196.144.974,00)	92,61	(20.850.192.678,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA KECAMATAN CIMAHI UTARA
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	98.606,00	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	11.834.225,00	12.592.945,83
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	11.932.831,00	12.592.945,83
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	12.194.245.000,00	12.194.245.000,00
	Peralatan dan Mesin	6.305.326.657,55	6.189.294.957,55
	Gedung dan Bangunan	6.539.117.500,00	6.539.117.500,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	49.558.364,00	239.411.363,86
	Aset Tetap Lainnya	7.792.489,00	7.792.489,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(7.856.491.122,39)	(7.228.171.633,51)
	Jumlah Aset Tetap	17.239.548.888,16	17.941.689.676,90
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	71.193.750,00	71.193.750,00
	Akumulasi Amortisasi	(71.193.750,00)	(71.193.750,00)
	Aset Lain-Lain	89.929.624,49	89.929.624,49
	Jumlah Aset Lainnya	89.929.624,49	89.929.624,49
	JUMLAH ASET	17.341.411.343,65	18.044.212.247,22

No.	Uraian	2021	2020
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Akumulasi Amortisasi	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	6.564.195,00	420.443.802,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	6.564.195,00	420.443.802,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	6.564.195,00	420.443.802,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	17.334.847.148,65	17.623.768.445,22
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	17.341.411.343,65	18.044.212.247,22

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL KECAMATAN CIMAHI UTARA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

		(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 9.366.150.666,00	Rp 9.841.803.583,00	Rp (475.652.917,00)	-4,83
	Beban Persediaan	Rp 7.282.531.124,00	Rp 1.792.555.975,00	Rp 5.489.975.149,00	306,27
	Beban Jasa	Rp 13.500.224.594,83	Rp 9.356.509.310,17	Rp 4.143.715.284,66	44,29
	Beban Pemeliharaan	Rp 355.796.903,00	Rp 134.389.918,00	Rp 221.406.985,00	164,75
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 140.607.000,00	Rp 5.180.000,00	Rp 135.427.000,00	#####
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 578.049.541,89	Rp 458.324.684,47	Rp 119.724.857,42	26,12
	Beban Amortisasi	Rp -	Rp 12.449.000,00	Rp (12.449.000,00)	-100,00
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 31.223.359.829,72	Rp 21.601.212.470,64	Rp 9.622.147.359,08	44,54
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (31.223.359.829,72)	Rp (21.601.212.470,64)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp (173.902.813,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp (173.902.813,00)		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (31.223.359.829,72)	Rp (21.775.115.283,64)	Rp -	
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (31.223.359.829,72)	Rp (21.775.115.283,64)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KECAMATAN CIMAHI UTARA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	17.623.768.445,22	18.431.399.889,01
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(31.223.359.829,72)	(21.775.115.283,64)
3	RK PPKD/RK SKPD	31.196.144.974,00	20.850.192.678,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	5.048.400,00	98.900.000,00
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	(216.583.499,86)	(0,14)
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	18.391.161,99
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(50.269.946,99)	-
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	98.606,00	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	17.334.847.148,65	17.623.768.445,22

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 6.01.02. KECAMATAN CIMAHI TENGAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	12.816.723.019,00	12.513.798.847,00	97,64	12.100.259.193,00
	Belanja Barang	32.125.724.200,00	28.833.370.641,00	89,75	13.967.861.178,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	44.942.447.219,00	41.347.169.488,00	92,00	26.068.120.371,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	426.659.000,00	413.680.700,00	96,96	98.860.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	380.004.750,00	373.519.881,00	98,29	199.700.000,00
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	806.663.750,00	787.200.581,00	97,59	298.560.000,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	45.749.110.969,00	42.134.370.069,00	92,10	26.366.680.371,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	45.749.110.969,00	42.134.370.069,00	92,10	26.366.680.371,00
	SURPLUS / DEFISIT	(45.749.110.969,00)	(42.134.370.069,00)	92,10	(26.366.680.371,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SILPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(45.749.110.969,00)	(42.134.370.069,00)	92,10	(26.366.680.371,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA KECAMATAN CIMAHI TENGAH
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	13.656.340,00	17.293.600,00
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	13.656.340,00	17.293.600,00
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	10.506.345.128,00	10.506.345.128,00
	Peralatan dan Mesin	9.446.617.502,28	9.030.058.802,28
	Gedung dan Bangunan	11.789.085.581,00	8.212.943.300,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	21.263.637,00	21.263.637,00
	Aset Tetap Lainnya	3.896.246,00	3.896.246,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(11.580.967.658,48)	(9.553.915.201,00)
	Jumlah Aset Tetap	20.186.240.435,80	18.220.591.912,28
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	173.664.500,00	148.672.500,00
	Akumulasi Amortisasi	(145.082.375,00)	(113.177.500,00)
	Aset Lain-Lain	76.339.801,00	76.339.801,00
	Jumlah Aset Lainnya	104.921.926,00	111.834.801,00
	JUMLAH ASET	20.304.818.701,80	18.349.720.313,28

No.	Uraian	2021	2020
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	13.137.623,00	531.750.021,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	13.137.623,00	531.750.021,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	13.137.623,00	531.750.021,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	20.291.681.078,80	17.817.970.292,28
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	20.304.818.701,80	18.349.720.313,28

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL KECAMATAN CIMAHI TENGAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbang Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 11.992.678.847,00	Rp 12.621.379.193,00	Rp (628.700.346,00)	-4,98
	Beban Persediaan	Rp 10.155.622.413,00	Rp 2.476.787.440,00	Rp 7.678.834.973,00	310,03
	Beban Jasa	Rp 17.814.169.290,00	Rp 11.387.848.475,25	Rp 6.426.320.814,75	56,43
	Beban Pemeliharaan	Rp 630.561.000,00	Rp 181.997.500,00	Rp 448.563.500,00	246,47
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 226.775.000,00	Rp 4.490.000,00	Rp 222.285.000,00	4950,67
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 934.210.137,31	Rp 609.925.009,97	Rp 324.285.127,34	53,17
	Beban Amortisasi	Rp 31.904.875,00	Rp 35.543.125,00	Rp (3.638.250,00)	-10,24
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 41.785.921.562,31	Rp 27.317.970.743,22	Rp 14.467.950.819,09	52,96
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (41.785.921.562,31)	Rp (27.317.970.743,22)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp (327.851.813,72)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp (327.851.813,72)		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (41.785.921.562,31)	Rp (27.645.822.556,94)		
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (41.785.921.562,31)	Rp (27.645.822.556,94)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KECAMATAN CIMAHI TENGAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	17.817.970.292,28	18.992.823.377,32
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(41.785.921.562,31)	(27.645.822.556,94)
3	RK PPKD/RK SKPD	42.134.370.069,00	26.366.680.371,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	12.604.200,00	81.328.100,00
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	3.205.500.400,00	(0,10)
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	22.961.001,00
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(1.092.842.320,17)	-
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	20.291.681.078,80	17.817.970.292,28

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 6.01.03. KECAMATAN CIMAHI SELATAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	12.450.933.315,00	11.924.488.688,00	95,77	11.014.022.824,00
	Belanja Barang	27.605.174.200,00	25.617.549.224,00	92,80	14.227.850.955,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	40.056.107.515,00	37.542.037.912,00	93,72	25.241.873.779,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	366.646.400,00	355.364.174,00	96,92	43.519.000,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	202.483.000,00	200.929.361,00	99,23	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	569.129.400,00	556.293.535,00	97,74	43.519.000,00
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	40.625.236.915,00	38.098.331.447,00	93,78	25.285.392.779,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	40.625.236.915,00	38.098.331.447,00	93,78	25.285.392.779,00
	SURPLUS / DEFISIT	(40.625.236.915,00)	(38.098.331.447,00)	93,78	(25.285.392.779,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SILPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(40.625.236.915,00)	(38.098.331.447,00)	93,78	(25.285.392.779,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA KECAMATAN CIMAHI SELATAN
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	7.364.334,67	7.619.675,00
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	-	-
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	7.364.334,67	7.619.675,00
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	15.227.905.000,00	15.227.905.000,00
	Peralatan dan Mesin	8.783.459.429,00	8.438.613.428,75
	Gedung dan Bangunan	6.648.163.461,00	6.549.570.600,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	189.574.684,75	163.000.511,00
	Aset Tetap Lainnya	9.812.492,00	9.812.492,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(10.301.462.666,63)	(8.987.914.656,89)
	Jumlah Aset Tetap	20.557.452.400,12	21.400.987.374,86
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	78.595.000,00	78.595.000,00
	Akumulasi Amortisasi	(78.595.000,00)	(68.763.750,00)
	Aset Lain-Lain	96.563.268,41	96.563.268,41
	Jumlah Aset Lainnya	96.563.268,41	106.394.518,41
	JUMLAH ASET	20.661.380.003,20	21.515.001.568,27

No.	Uraian	2021	2020
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	5.318.551,00	505.844.909,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	5.318.551,00	505.844.909,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	5.318.551,00	505.844.909,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	20.656.061.452,20	21.009.156.659,27
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	20.661.380.003,20	21.515.001.568,27

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL KECAMATAN CIMAHI SELATAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
I	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 11.422.793.688,00	Rp 11.515.717.824,00	Rp (92.924.136,00)	-0,81
	Beban Persediaan	Rp 9.371.347.817,00	Rp 2.298.121.150,00	Rp 7.073.226.667,00	307,78
	Beban Jasa	Rp 15.555.680.789,33	Rp 11.786.400.692,67	Rp 3.769.280.096,66	31,98
	Beban Pemeliharaan	Rp 674.315.400,00	Rp 101.857.000,00	Rp 572.458.400,00	
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 130.310.000,00	Rp 42.360.000,00	Rp 87.950.000,00	207,63
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Penyusutan	Rp 883.268.853,62	Rp 728.271.999,80	Rp 154.996.853,82	21,28
	Beban Amortisasi	Rp 9.831.250,00	Rp 19.648.750,00	Rp (9.817.500,00)	
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	
	JUMLAH BEBAN	Rp 38.047.547.797,95	Rp 26.492.377.416,47	Rp 11.555.170.381,49	43,62
3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (38.047.547.797,95)	Rp (26.492.377.416,47)		
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -		
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp -	Rp -		
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -		
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp (190.855.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON	Rp -	Rp (190.855.000,00)		
4	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (38.047.547.797,95)	Rp (26.683.232.416,47)		
	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa	Rp -	Rp -		
	Beban Luar Biasa	Rp -	Rp -		
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (38.047.547.797,95)	Rp (26.683.232.416,47)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KECAMATAN CIMAHI SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	21.009.156.659,27	22.377.993.296,63
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(38.047.547.797,95)	(26.683.232.416,47)
3	RK PPKD/RK SKPD	38.098.331.447,00	25.285.392.779,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	10.344.300,00	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	16.056.000,00	-
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	29.003.000,11
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(430.279.156,12)	-
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	20.656.061.452,20	21.009.156.659,27

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 7.01.01. KANTOR KESATUAN BANGSA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya	-	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
II	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	2.815.114.744,00	2.208.900.584,00	78,47	3.409.501.953,00
	Belanja Barang	3.792.974.200,00	3.112.399.456,00	82,06	1.251.206.332,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	1.796.326.450,00	1.796.326.450,00	100,00	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	8.404.415.394,00	7.117.626.490,00	84,69	4.660.708.285,00
	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	40.634.020,00	18.165.263,00	44,70	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	40.634.020,00	18.165.263,00		-
	BELANJA TAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	8.445.049.414,00	7.135.791.753,00	84,50	4.660.708.285,00

NO.	U R A I A N	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
III	TRANSFER				
	TRANSFER/ BAGI HASIL KE KELURAHAN				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Kelurahan	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	8.445.049.414,00	7.135.791.753,00	84,50	4.660.708.285,00
	SURPLUS / DEFISIT	(8.445.049.414,00)	(7.135.791.753,00)	84,50	(4.660.708.285,00)
IV	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	-	-	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	SILPA Tahun Berjalan	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
	Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(8.445.049.414,00)	(7.135.791.753,00)	84,50	(4.660.708.285,00)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
NERACA KANTOR KESATUAN BANGSA
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2021	2020
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Kas RSUD	-	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Kas di Kas BLUD Air Minum	-	-
	Kas di Kas BLUD Puskesmas	-	-
	Kas Dana Bos	-	-
	Investasi Jangka Pendek	-	-
	Piutang Pajak	-	-
	Penyisihan Piutang	-	-
	Piutang Retribusi	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
	Belanja Dibayar Dimuka	31.414.583,33	3.709.725,00
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat	-	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Piutang Lainnya	-	-
	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan	517.200,00	1.683.000,00
	RK SKPD	-	-
	Jumlah Aset Lancar	31.931.783,33	5.392.725,00
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Nonpermanen		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
	Investasi Permanen Lainnya	-	-
	Jumlah Investasi Permanen	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
3	ASET TETAP		
	Tanah	2.075.500.000,00	2.075.500.000,00
	Peralatan dan Mesin	924.886.046,00	906.720.783,00
	Gedung dan Bangunan	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	3.446.000,00	3.446.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(921.316.084,30)	(889.901.783,00)
	Jumlah Aset Tetap	2.082.515.961,70	2.095.765.000,00
4	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	-	-
	Jumlah Dana Cadangan	-	-
5	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
	Aset Tak Berwujud	47.492.500,00	-
	Akumulasi Amortisasi	(11.873.125,00)	-
	Aset Lain-Lain	14.842.000,00	14.842.000,00
	Jumlah Aset Lainnya	50.461.375,00	14.842.000,00
	JUMLAH ASET	2.164.909.120,03	2.115.999.725,00

No.	Uraian	2021	2020
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Bunga	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
	Utang Belanja	41.509,00	97.823.012,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	41.509,00	97.823.012,00
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri	-	-
	Utang Luar Negeri	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	41.509,00	97.823.012,00
III	EKUITAS		
	EKUITAS	2.164.867.611,03	2.018.176.713,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.164.909.120,03	2.115.999.725,00

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN OPERASIONAL KANTOR KESATUAN BANGSA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

		(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp -	Rp -		
	PENDAPATAN TRANSFER				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Dana Bagi Hasil Sumbat Daya Alam	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Umum	Rp -	Rp -		
	Dana Alokasi Khusus	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -		
	Dana Penyesuaian	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	Rp -	Rp -		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Rp -	Rp -		
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp -	Rp -		
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Dana Darurat	Rp -	Rp -		
	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp -	Rp -		
2	BEBAN				
	Beban Pegawai	Rp 2.111.150.584,00	Rp 3.507.251.953,00	Rp (1.396.101.369,00)	-39,81
	Beban Persediaan	Rp 75.809.900,00	Rp 500.893.800,00	Rp (425.083.900,00)	-84,87
	Beban Jasa	Rp 2.520.508.939,67	Rp 682.461.990,67	Rp 1.838.046.949,00	269,33
	Beban Pemeliharaan	Rp 40.871.500,00	Rp 8.099.000,00	Rp 32.772.500,00	
	Beban Perjalanan Dinas	Rp 401.146.055,00	Rp 62.066.040,00	Rp 339.080.015,00	546,32
	Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Hibah	Rp 1.796.326.450,00	Rp -	Rp 1.796.326.450,00	
	Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Penyusutan	Rp 14.141.301,30	Rp -	Rp 14.141.301,30	#DIV/0!
	Beban Amortisasi	Rp 11.873.125,00	Rp -	Rp 11.873.125,00	
	Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Transfer	Rp -	Rp -	Rp -	-
	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH BEBAN	Rp 6.971.827.854,97	Rp 4.760.772.783,67	Rp 2.211.055.071,30	46,44
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	Rp (6.971.827.854,97)	Rp (4.760.772.783,67)		
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp -	Rp (34.152.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp -	Rp (34.152.000,00)		
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	Rp (6.971.827.854,97)	Rp (4.794.924.783,67)		
4	POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa				
	Beban Luar Biasa				
	POS LUAR BIASA	Rp -	Rp -		
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp (6.971.827.854,97)	Rp (4.794.924.783,67)		

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KANTOR KESATUAN BANGSA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

		(Dalam Rupiah)	
NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS 31 DESEMBER 2020	2.018.176.713,00	2.135.630.711,67
2	SURPLUS/DEFISIT LO	(6.971.827.854,97)	(4.794.924.783,67)
3	RK PPKD/RK SKPD	7.135.791.753,00	4.660.708.285,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	-	-
5	KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
6	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
7	KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	-
8	KOREKSI NILAI ASET LAINNYA	-	-
9	LAIN-LAIN (Perubahan Basis Akuntansi)	-	-
	-Penyisihan Piutang	-	-
	-Akumulasi Penyusutan	(17.273.000,00)	16.762.500,00
	-Akumulasi Amortisasi	-	-
10	PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN	-	-
11	KOREKSI UTANG PFK	-	-
12	KEUNTUNGAN/KERUGIAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	-	-
13	EKUITAS AKHIR	2.164.867.611,03	2.018.176.713,00

